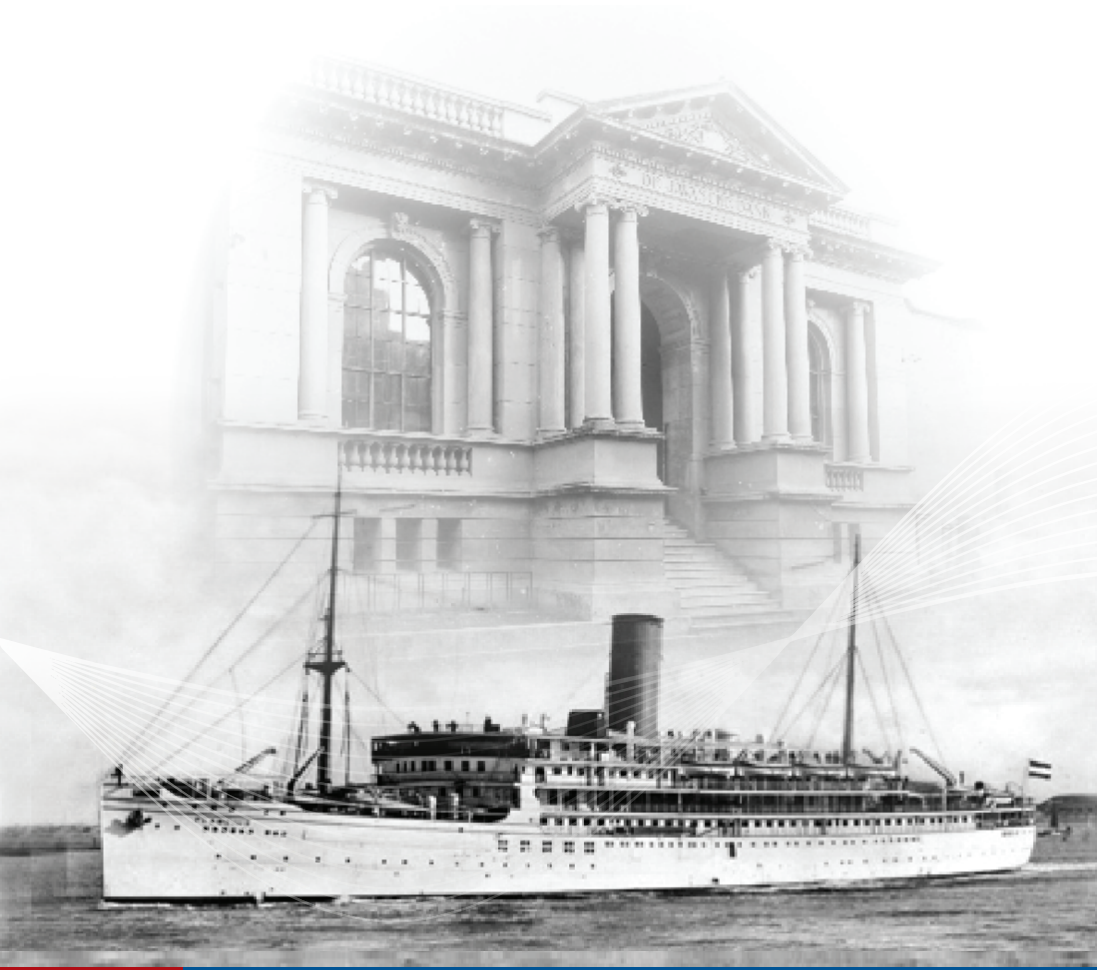
BI INSTITUTE

Seri Buku Sejarah & Heritage

PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN



BI INSTITUTE

PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN



PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR
DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

Penanggung Jawab:
Solikin M. Juhro

Tim Penyusun:
Arlyana Abubakar, Rita Krisdiana, Rasyid Asba, Yulianto Sumalyo,
Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa

Editor: Kasijanto Sastrodinomo

Kontributor:
Usep Sukarya, Rudi Suwarjo, Guruh Suryani Rokhimah, Satyani Oktaviningsih,
Ginisita Dofany, Sintya Aprina

Cetakan Pertama, Maret 2019
xii + 344 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-623-9066-11-6

Bank Indonesia Institute
Jl. Mh. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
http://www.bi.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

TIM PENYUSUN

Arlyana Abubakar | Rita Krisdiana | Rasyid Asba | Yulianto Sumalyo
Allan Akbar| Mirza Ardi Wibawa

EDITOR

Kasijanto Sastrodinomo

SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan menyandang sebutan sebagai Negara Maritim, hal ini karena dua per tiga wilayahnya adalah terdiri dari lautan. Berkat potensi luar biasa tersebut, dahulu Indonesia pernah memiliki sejarah sebagai poros maritim dunia, melalui kejayaannya dalam menguasai jalur perniagaan maritim di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu cerita kejayaan itu adalah adalah Makassar, tentunya kata Makassar disini dalam pengertian cakupan wilayah yang lebih luas dari sekedar nama Kota Makassar pada saat ini.

Makassar lekat dengan identitas sebagai pusat ekonomi maritim sejak berabad lalu, berkat keberadaan bandar niaga yang selalu ramai. Semua ini tidak terlepas pula dari keuntungan luar biasa berkat strategisnya kondisi geografis yang dimilikinya sebagai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Keberadaan bandar niaga telah ada sejak masa Kerajaan Gowa dan Tallo, atau sebelum Makassar berkembang menjadi salah satu simpul penghubung perdagangan maritim Nusantara. Bahkan pada abad ke-15, Makassar termasuk dalam jaringan perdagangan "Jalur Sutra" yang

menghubungkan antara dunia niaga Asia dan Eropa. Makassar menjadi titik temu dunia niaga dari berbagai penjuru mata angin. Antara dunia niaga di belahan "Timur" (Maluku, Irian Jaya), "Barat" (Malaka, Jawa, Kalimantan, Asia Selatan, hingga Eropa), "Utara" (Jepang, Cina, dan Filipina), dan juga "Selatan" (Nusa Tenggara dan Australia).

Selain faktor geografis, perkembangan perdagangan maritim Makassar juga tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi perkapalan dan dunia pelayaran melalui rute lalu-lintas pelayaran yang melalui Laut Tengah, Samudera Hindia, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Pada konteks itulah muncul bandar-bandar niaga yang tersebar di Nusantara yang memainkan peranannya masing-masing sebagai pusat perdagangan, salah satunya adalah Makassar. Makassar berperan sebagai bandar transito pelayaran antara Malaka dan Maluku. Pedagang-pedagang yang ingin menuju ke timur (Maluku), akan singgah di Makassar, begitupun juga sebaliknya. Kedatangan pedagang yang silih berganti, baik dari Cina, India, hingga Eropa, membuat bandar niaga Makassar tidak pernah sepi. Mereka memperdagangkan hasil bumi Makassar untuk dijual ke berbagai wilayah dunia, dan juga membawa barang dagangan dari berbagai belahan dunia untuk dijual di Makassar dan kawasan timur Nusantara.

Ekonomi maritim Makassar telah menjadi magnet bagi kedatangan bangsa barat, tidak hanya untuk berdagang tetapi bahkan ingin berkuasa atas wilayah ini. VOC sebagai kepanjangan tangan Belanda memulai sejarah panjang tersebut, yang dilanjutkan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan pemerintahan Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menjadikan Makassar sebagai salah satu pelabuhan bebas di Hindia Belanda untuk menyaingi pelabuhan Singapura.

Di sisi lain, ekonomi Makassar ternyata juga dibesarkan oleh kesuburan wilayahnya yang kaya akan hasil bumi dengan potensi ekspor luar biasa. Di masa kolonial, sebelum dikenal sebagai penghasil kopra terbesar di Indonesia, Makassar dikenal sebagai produsen beras yang diekspor untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bahkan Makassar juga dikenal sebagai penghasil tenunan, teripang, dan rotan. Pemerintahan Kolonial berhasil menjadikan hasil bumi Makassar tidak hanya diperjualbelikan untuk kebutuhan lokal, namun diperdagangkan pula ke berbagai penjuru dunia. Kopra sebagai

komoditas primadona, tercatat pernah mencapai puncak perdagangan pada tahun 1920, dengan menempatkan Hindia Belanda sebagai pengekspor kopra terbesar di dunia setelah Filipina, British Malaya, dan Ceylon. Kopra Makassar menyumbang 60 persen dari hasil kopra Hindia Belanda tersebut. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kejayaan ekonomi Makassar di masa lalu.

Sejarah mengajarkan kita untuk belajar tentang perjalanan sebuah peradaban dan negara dibangun. Bahkan Confucius, seorang legenda filsuf Tiongkok mengatakan bahwa *"Study the past if you would define the future"*. Kiranya kita bisa belajar dari sejarah ekonomi Makassar yang diwarnai dengan cerita kejayaan ekonomi maritim di masa lalu untuk membangun visi kedepan, sebagaimana keinginan Pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros ekonomi maritim dunia. Sebuah cita-cita untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, dan salah satu pekerjaan besar bersama adalah mengembalikan reputasi Makassar sebagai pusat ekonomi maritim di Indonesia.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, memiliki komitmen kuat untuk bersama-sama pemerintah baik di pusat maupun daerah bersinergi mewujudkan cita-cita tersebut. Khususnya melalui kewenangan di tugas pokok Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melakukan pengawasan dan pengaturan stabilitas sistem keuangan, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bank Indonesia sudah lama memberikan perhatian khusus terhadap keistimewaan Makassar sebagai motor pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Antara lain dengan menjadikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kantor koordinator untuk Kantor-kantor Perwakilan Bank Indonesia lainnya di wilayah Indonesia Timur dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun wilayah koordinasinya meliputi kantor-kantor perwakilan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara.

Kehadiran buku **"Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan"** ditangan pembaca saat ini, selain merupakan memoar akan *institutional memory* organisasi yang telah ada sejak

masa De Javasche Bank *Agentschap* Makassar, juga menjadi memoar akan kejayaan Makassar sebagai pusat ekonomi maritim Indonesia. Pengetahuan sejarah yang ada didalamnya, kiranya dapat memberikan pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kembali hadirnya kejayaan Indonesia sebagai poros ekonomi maritim dunia, tentunya dengan mengoptimalkan kekuatan sumber-sumber ekonomi baru yang dimiliki saat ini. Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan, tidak terbatas pada sektor maritim, namun juga pada sektor strategis lain untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang sejahtera.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2019

Perry Warjiyo

SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR
BANK INDONESIA



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sejarah tentang kejayaan ekonomi maritim Makassar tidak lepas dari keberadaan bandar niaga sejak berabad-abad yang lalu. Aktivitas perdagangan yang ramai mampu menstimulus perekonomian Makassar untuk berkembang menjadi yang paling maju di wilayah timur Nusantara. Terlebih lagi ketika pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menjadikan Makassar sebagai salah satu pelabuhan bebas di Hindia Belanda untuk menyaingi pelabuhan Singapura.

Berkembangnya perekonomian tentunya memunculkan kebutuhan akan hadirnya sebuah lembaga perbankan terutama bank sirkulasi. Ketiadaan bank sirkulasi telah membuat pemerintah kolonial kewalahan dalam menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara bersamaan. Disamping itu muncul pula desakan dari kalangan pengusaha untuk mendirikan lembaga perbankan guna memperlancar kepentingan bisnis mereka. Ketika dibentuk pada 1828, De Javasche Bank (DJB) merupakan bank sirkulasi pertama di Asia dengan kantornya di Batavia. Untuk memperluas jaringan operasinya, DJB melebarkan sayap dengan membuka kantor-kantor cabang di seluruh Hindia

Belanda, salah satunya di Makassar pada tahun 1864. Pertimbangan utama pembukaan De Javasche Bank *Agentschap* Makassar adalah keberadaan pelabuhan yang ramai, yang tentunya terjadi peredaran uang yang besar.

De Javasche Bank merupakan cikal bakal kehadiran bank sentral di Indonesia. Melalui proses nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1953, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia, yang berlanjut dengan perjalanan panjang sebagai proses evolusi hingga mencapai perannya sebagai bank sentral modern saat ini. Demikian pula dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan, yang kehadirannya dimulai dari De Javasche Bank *Agentschap* Makassar tentunya dengan kewenangan yang berbeda. Apabila DJB Agentschap Makassar dahulu berperan sebagai bank komersial yang sekaligus menjalankan peran sebagai bank sirkulasi, maka saat ini KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan hadir sebagai kantor perwakilan bank sentral di daerah yang memiliki tugas pokok yang terkait dengan perannya dalam melaksanakan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran di wilayah kerjanya.

Sejarah mengajarkan bahwa kejayaan ekonomi maritim Makassar sejak dulu sangat dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang sangat strategis. Sebuah keberuntungan yang tetap dimiliki hingga masa kontemporer saat ini. Makassar tetap menjadi kota penting sebagai penghubung antara kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Dengan berperan sebagai pelabuhan transito bagi kegiatan perdagangan dan perhubungan untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Keberadaan pelabuhan utama sebagai pintu gerbang perhubungan laut dalam kegiatan ekspor maupun impor untuk wilayah KTI, semakin diperkuat dengan kehadiran Bandar Udara Hasanuddin untuk memperlancar lalu lintas distribusi barang dan orang. Bahkan kebijakan pembangunan sejak masa Orde Baru, telah menjadikan Kota Makassar sebagai pusat perekonomian KTI. Kekayaan alam, kedinamisan masyarakatnya, serta letaknya yang strategis memungkinkan daerah ini membangun basis ekonomi yang kuat. Selain itu, Sulawesi Selatan juga memiliki areal pertanian yang cukup luas dan subur sebagai lumbung pangan KTI, yang dibuktikan dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan sejak Pelita I.

Buku **"Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan"** ini memberikan gambaran komprehensif

tentang sejarah ekonomi Makassar, sekaligus perjalanan sejarah dan evolusi sebuah bank sentral di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam memahami sejarah, diharapkan kita tidak hanya mengagumi kehebatan atau menyesali kegelapan masa lalu, namun adalah untuk lebih berani dan bijak menghadapi masa kini dan masa depan. Sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti seorang ekonom Indonesia dalam pengantar buku "Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru" bahwa sikap yang benar dari sebuah kajian sejarah adalah berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat harus selalu siap menghadapi masa depan dengan jalan meningkatkan kemampuan mengantisipasi perkembangan mendatang.

Oleh karena itu, kami berharap semoga kehadiran buku ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tetapi juga membuat kita semakin bijak dan berani dalam menjawab tantangan kedepan, terutama bagi pembuat kebijakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya bagi kebijakan Bank Indonesia dalam mengawal perkembangan ekonomi regional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Provinsi Sulawesi Selatan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2019

Dody Budi Waluyo

PENGANTAR
KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kehadiran buku berjudul **"Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan"** ke tangan pembaca merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk terus hadir di tengah masyarakat lewat kajian akademik khususnya kajian sejarah. Ide awal dari pembuatan buku ini adalah adanya upaya Bank Indonesia untuk melakukan perekaman memori institusi (*institutional memory*) dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui tentang kiprah dan kontribusi Bank Indonesia dari masa ke masa. Perekaman memori ini juga merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk membangkitkan rasa kepemilikan bersama bagi rakyat Indonesia terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral kebanggaan bangsa. Buku ini juga merupakan bagian dari Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Buku ini juga merupakan kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan kajian mengenai ekonomi Sulawesi Selatan dalam perspektif sejarah yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dewasa ini. Diharapkan kehadirannya bukan hanya menjadi acuan akademis bagi para mahasiswa, sejarawan, dan penikmat sejarah, namun juga dapat

digunakan bagi para pembuat kebijakan baik dalam tingkat lokal, maupun nasional. Kehadiran buku ini dapat menjadi pintu gerbang bagi kajian sejenis mengenai sejarah ekonomi dan perbankan di wilayah Sulawesi Selatan. Mengingat bahwa kajian sejarah ekonomi perbankan khususnya yang bersifat regional seperti ini masih belum mendapatkan porsi yang memadai dalam dunia akademik.

Buku ini mengupas tuntas tentang kiprah dan peranan Bank Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya peranan Bank Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Secara komprehensif buku ini menjawab bahwa sudah sejak awal pendiriannya, Bank Indonesia atau yang sebelumnya bernama De Javasche Bank telah memiliki peran besar dalam memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi daerah. Sejak masa kolonial, De Javasche Bank *Agentschap* Makassar telah aktif sebagai bank komersial dalam memberikan kredit modal perdagangan yang sekaligus berperan menjadi bank sirkulasi. Sementara itu, di masa kontemporer saat ini Bank Indonesia berkontribusi mengawal stabilitas ekonomi wilayah Sulawesi Selatan lewat perannya sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan sebuah buku, idealnya dapat memenuhi 4 (empat) unsur yaitu *uniqueness* (keunikan), *novelty* (kebaruan), *attractiveness* (menarik), dan *accessibility* (aksesabilitas). Maka dalam penulisan buku **"Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan"** ini, Tim Penulis berusaha mengisi ruang-ruang kosong yang belum di tuliskan oleh buku-buku lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan sumber referensi primer yang berasal dari arsip masa De Jacvasche Bank yang belum banyak dituliskan. Adapun untuk memperluas jangkauan pembaca, penulisan buku ini sengaja menggunakan gaya penulisan semi popular agar menarik dibaca. Diharapkan buku ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas terutama generasi muda yang tertarik dengan sejarah ekonomi kota Makassar disamping tentunya menjadi referensi bagi kalangan akademisi.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan. Kami berharap informasi yang terkandung di dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai peranan Bank Indonesia dan lembaga ini dapat melanjutkan peranannya dalam mendukung pengembangan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2019

Solikin M. Juhro

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Pulau Sulawesi **3**
Gambar 1.2. Peta Wilayah Sulawesi Selatan **4**
Gambar 1.3. Pergerakan Angin Muson Basah dan Kering **5**
Gambar 1.4. Peta Kerajaan Makassar pada Abad ke-17 **9**
Gambar 1.5. Uang Jinggara yang beredar di Kesultanan Gowa-Tallo **29**
Gambar 1.6. Koin *duit* VOC yang beredar di Nusantara **33**
Gambar 2.1. Daging Kelapa yang telah dikeringkan atau Dikenal Sebagai Kopra **42**
Gambar 2.2. Penimbunan Buah Kelapa Untuk Dikeringkan Menjadi Kopra **43**
Gambar 2.3. Kapal Plancius dari Koninklijk Paketvaart Maatschappaij (KPM). KPM Mulai beroperasi pada 1891 sebagai Tulang Punggung Transportasi Laut Pemerintah Kolonial **47**
Gambar 2.4. Iklan Perusahaan Pelayaran Rotterdamsche Lloyd Rute Rotterdam-Jawa **52**
Gambar 2.5. Contoh Uang Kertas Gulden Terbitan De Javasche Bank **60**
Gambar 2.6. Foto Pegawai Kantor DJB Agentschap Makassar tahun 1925 **65**
Gambar 2.7. Gedung Kantor Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij (Bank Escompto) di Batavia yang Dibentuk Tahun 1857 **67**
Gambar 2.8. Logo Perusahaan Dagang Belanda Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang Berdiri Tahun 1824. Pada Awal Abad Ke-20 NHM Mulai Masuk ke Bidang Perbankan **69**
Gambar 2.9. Gedung Kantor Standard Chartered Bank of India, Australia, and China atau lebih dikenal dengan Standard Chartered Bank di Batavia **70**
Gambar 2.10. Logo Algemeene Volkscredit Bank (AVB) Sebagai Lembaga Resmi yang Dibentuk Pemerintah Kolonial Untuk Memberikan Kredit Perdesaan. Lembaga ini merupakan Cikal Bakal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) **76**
Gambar 3.1. Presiden DJB G. G. van Buttingha Wichers pada periode menjelang kedatangan Tentara Pendudukan Jepang **116**
Gambar 3.2. Uang Invasi (Invation Money) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang dengan pecahan 10 gulden **131**
Gambar 3.3. Uang seri Nanpatsu yang dikeluarkan oleh NKG dengan mata uang rupiah pecahan 10 Rupiah **132**
Gambar 4.1. Pelabuhan Makassar sebagai Pusat Transito dan Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia **148**
Gambar 4.2. Presiden Negara Indonesia Timur, Tjokorda Gde Raka Soekawati (tengah) bersama Istrinya yang Berkebangsaan Prancis, ketika Mengunjungi Makassar pada Tahun 1947 **150**
Gambar 4.3. Mr. M. Hamelink, Kepala Cabang De Javasche Bank Agentschap Makassar yang diangkat menjadi Menteri Keuangan Negara Indonesia Timur **151**
Gambar 4.4. Istana atau Kediaman Resmi Presiden Negara Indonesia Timur, Tjokorda Gde Raka Soekawati pada Tahun 1947 **157**
Gambar 4.5. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur Nadjamoeddin Daeng Malewa **161**
Gambar 4.6. Kapal-kapal di Pelabuhan Makassar, 1947 **163**

Gambar 4.7. "Uang Merah" yang diterbitkan oleh NICA **173**
Gambar 4.8. Uang De Javasche Bank Emisi 1948 Federal Seri I **175**
Gambar 4.9. Oeang Republik Indonesia (ORI) Seri I **177**
Gambar 6.1. UMKM Peserta Smart Anging Mammiri 2015 **257**
Gambar 6.2. Kepulauan Selayar **261**
Gambar 6.3. Evolusi Sistem Pembayaran **270**
Gambar 6.4. Makassar Smart Card **271**
Gambar 6.5. Gerakan Peduli Koin Nasional **273**
Gambar 6.6. Peresmian Kas Titipan di bulukumba **275**
Gambar 7.1. Sebaran kerajaan di wilayah Asia Tenggara **278**
Gambar 7.2. Lokasi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum Kedatangan Belanda **279**
Gambar 7.3. Peta rangkaian benteng Makassar 1667-1668 di pesisir pantai Selat Makassar, 3 di antaranya tidak terletak di pantai, yaitu Bonto Ala', Kale Gowa dan Anak Gowa **280**
Gambar 7.4. Peta Pantai Makassar bagian selatan, pada tahun 1650 **281**
Gambar 7.5. Fort Rotterdam abad ke-17 (kiri) dan wilayah sekitar Fort Rotterdam (kanan) **287**
Gambar 7.6. Peta Makassar pada tahun 1922 **289**
Gambar 7.7. Peta Makassar pada tahun 1916 **290**
Gambar 7.8. Fort Rotterdam (c. 1920) dipandang timur-utara; memperlihatkan suasana dan lingkungan benteng yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai elemen pertahanan **291**
Gambar 7.9. Monumen J. A. Bakkers, salah seorang gubernur Sulawesi di taman lebih kecil di sebelah timur Juliana Park **292**
Gambar 7.10. *Muziekkoepel*, gardu musik **292**
Gambar 7.11. Societeit de Harmoni sebelum dirombak pada 1890-an **293**
Gambar 7.12. Denah dan bentuk Societeit de Harmonie setelah direnovasi **294**
Gambar 7.13. Gedung Societeit de Harmonie setelah dirombak dengan dekorasi Art-Deco. Pandangan dari arah selatan (arah Fort Rotterdam), pada 1920-an dengan latar depan Juliana Park **295**
Gambar 7.14. Gedung Societeit de Harmonie (1990) setelah tidak digunakan sebagai tempat hiburan orang-orang Belanda **296**
Gambar 7.15. Societeit de Harmonie Makassar, pandangan depan (selatan) dan detail hiasan Art-Deco (1999) ketika digunakan sebagai Gedung DPRD. Gang di depan yang berfungsi sebagai isolasi panas matahari dan air hujan ditutup dengan jendela **297**
Gambar 7.16. Gedung Balai Kota Makassar dengan arsitektur bergaya Neoklasik campuran Renaisans dan Gotik **298**
Gambar 7.17. Denah Gedung Balai Kota Makassar **299**
Gambar 7.18. Interior Gedung Balai Kota Makassar. Pandangan dari depan (barat) Balai Kota Makassar pada 1930-an dan tangga menuju ruang rapat di lantai dua

(atas). Ruang rapat di lantai dua dengan lampu gantung antik sama dengan yang di *hall* (bawah) **300**
Gambar 7.19. Foto udara Fort Rotterdam dan kawasannya. Memperlihatkan bangunan-bangunan penting di sekitarnya setelah kehidupan di luar benteng pada 1930-an **301**
Gambar 7.20. Denah Gedung Raad van Justitie/Landraad **303**
Gambar 7.21. Foto-foto Gedung Pengadilan (Raad van Justitie/Landraad) **304**
Gambar 7.22. Gambar dan denah Gedung KPM **307**
Gambar 7.23. Pandangan Gedung KPM dari arah barat-selatan dan ruang dalam bagian di atas *hall,* di bawah kubah gedung **308**
Gambar 7.24. Gedung KPM dan pandangan kubahnya dari arah laut sangat jelas menjadi *landmark*, terutama bagi kapal-kapal yang akan mendarat di Wilhelminakade yang menjadi latar depannya **310**
Gambar 7.25. Pandangan depan gedung dan denah Gedung NHM Makassar **312**
Gambar 7.26. Kantor NHM Makassar (1930-an). Pandangan dari arah barat **312**
Gambar 7.27. Gambar prarencana Gedung De Javasche Bank Makassar beserta denah gedung. Pandangan depan (atas-kiri), pandangan samping (atas-kanan) denah lantai utama (bawah-kiri) dan denah lantai bawah (setengah di bawah tanah/*semi-basement*) Kantor De Javasche Bank **314**
Gambar 7.27. Gambar prarencana Gedung De Javasche Bank Makassar beserta denah gedung. Pandangan depan (atas-kiri), pandangan samping (atas-kanan) denah lantai utama (bawah-kiri) dan denah lantai bawah (setengah di bawah tanah/*semi-basement*) Kantor De Javasche Bank (Lanjutan) **315**
Gambar 7.28. Gedung DJB yang berdampingan dengan Kantor NHM Makassar **316**
Gambar 7.29. Gedung DJB Makassar sekitar 1920-an yang berlokasi di Passerstraat atau Jalan Nusantara sekarang **317**
Gambar 7.30. Interior Gedung DJB Makassar **318**
Gambar 7.31. Pembangunan De Javasche Bank Makassar di Passarstraat (1910-an) dan foto setelah selesai **318**
Gambar 7.32. Gedung De Javasche Bank Makassar tampak depan setelah selesai pembangunan. Bergaya Neo-Renaissans; hiasan pada *thympanum* (bidang segi tiga di atas) bercorak *floral* model Jawa. Foto diambil sekitar 1920-an **319**
Gambar 7.33. Pegawai De Javasche Bank Makassar berfoto di depan kantornya tahun 1928 **320**
Gambar 7.34. Foto udara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; pembangunan sepanjang pantai di bagian utara Kota Makassar hingga Pelabuhan Paotere untuk pelabuhan kapal Pinisi **322**
Gambar 7.35. Gedung Bank Indonesia Ujung Pandang di Jalan Sudirman, menggantikan gedung BI lama di Jalan Nusantara. Gedung ini diresmikan oleh Gubernur BI Rahmat Saleh pada 1978 **323**

Gambar 7.36. Gedung eks-DJB ketika dipinjam dan digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (1990-an), dipandang dari arah barat-selatan **324**
Gambar 7.37. Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang masih digunakan sampai saat ini **327**

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1. Perkembangan Armada Kapal Internasional yang Masuk di Pelabuhan Makassar 1905-1939 **53**
Tabel 2.2. Data Ekspor Beras Makassar Menurut Negara Tujuan Tahun 1910-1913 (dalam kg) **54**
Tabel 2.3. Ekspor Beras Makassar ke Berbagai Wilayah di Hindia Belanda 1934-1935 (dalam ton) **55**
Tabel 2.4. Jumlah Ekspor Kopi Makassar 1903-1913 (dalam pikul) **57**
Tabel 2.5. Daftar Nama Pedagang Kopra yang Menerima Bantuan Kredit dari De Javasche Bank, 1918 **73**
Tabel 3.1. Nilai Perdagangan Hindia Belanda 1928–36 **99**
Tabel 3.2. Harga Kopra Jenis Matahari di Makassar 1931–40 **104**
Tabel 3.3. Daftar Perusahaan yang Tergabung dalam Excelco **112**
Tabel 4.1. Daerah Tujuan Ekspor Kopra Makassar 1949 **169**
Tabel 6.1. Status, Landasan Hukum dan Peran Bank Indonesia **230**
Tabel 6.2. Perkembangan PDRB Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku 1983–89 **238**
Tabel 6.3. Perkembangan Distribusi Sektor Pertanian Sulawesi Selatan dalam Pembentukan PDRB 1971, 1976 dan 1983–89 **239**
Tabel 6.4. Inflasi Tingkat Provinsi dan Kota di Sulawesi Selatan 2011–16 **252**
Tabel 6.5. Tingkat Kemiskinan Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2008-14 **253**
Tabel 6.6. Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Daerah Tingkat II pada Wilayah Kerja Bank Indonesia Sulawesi Selatan 1986–89 **265**
Tabel 6.7. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 2013-16 **267**
Grafik 1.1. Sirkulasi distribusi *duit* VOC di Nusantara 1770–80 **34**
Grafik 2.1. Ekspor Kopra di Beberapa Wilayah Hindia Belanda pada Tahun 1891 **48**
Grafik 2.2. Ekspor Kopra dari Jawa, Makassar, dan Hindia Belanda Tahun 1905-1938 **49**
Grafik 2.3. Ekspor Kopra di Beberapa Wilayah Hindia Belanda pada Tahun 1891-1938 **50**
Grafik 2.4. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Periode Tahun 1924 -1930 **90**
Grafik 2.5. Ekspor Minyak Kelapa Makassar ke Amerika Serikat (1915-1924) **94**
Grafik 3.1. Perkembangan Kepemilikan Modal Usaha di Makassar 1817–1948 **103**
Grafik 4.1. Ekspor Kopra di Indonesia Timur 1946–49 **168**
Grafik 6.1. Perkembangan Intermediasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2011-2016 **260**

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia... iv
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... viii
Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... xi
Daftar Gambar... xiv
Daftar Grafik dan Tabel... xvii
Daftar Isi... xviii
Glosarium... xx

01 **BAB I Politik-Ekonomi Makassar dan Sekitarnya (1528-1864)**

- Geografi yang Strategis... **2**
- Makassar sebagai Bandar Niaga dan Maritim... **13**
- Uang, Komoditas, dan Jaringan Perdagangan Maritim Makassar... **22**
- Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Internasional Makassar Abad ke-19... **35**

41 **Bab II De Javasche Bank, Integrasi, dan Ekspansi (1864-1930)**

- Kebangkitan Perdagangan di Makassar Hingga Awal Abad ke-20... **42**
- De Javasche Bank *Agentschap* Makassar... **57**
- Perbankan di Makassar... **66**
- De Javasche Bank dan Ekonomi Makassar Awal Abad ke-20... **79**

97 **Bab III Depresi dan Krisis (1930 – 1945)**

- De Javasche Bank dan Krisis Ekonomi Dunia... **98**
- Menjelang Kedatangan Jepang... **108**
- Kebijakan Politik dan Ekonomi Pendudukan Jepang... **121**
- Nanpo Kaihatsu Ginko Menggantikan De Javasche Bank... **125**

139 **Bab IV De Javasche Bank Kekuatan Ekonomi Federal? (1945-1950)**

- Kemerdekaan Indonesia dan Kembalinya De Javasche Bank di Makassar... **140**
- Peran De Javasche Bank dalam Ekonomi Negara Indonesia Timur... **154**
- Moneter dan Perbankan Masa Revolusi... **170**

181 **Bab V Pembentukan Bank Indonesia (1950-1968)**

- Situasi Politik-Ekonomi dan Upaya Nasionalisasi Perusahaan Belanda... **182**
- Nasionalisasi De Javasche Bank... **200**
- Bank Indonesia di Makassar Pada Periode Awal Pembentukan... **210**
- Kelembagaan Bank Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin... **213**

229 **Bab VI Mengawal Ekonomi Sulawesi Selatan (1968 – 2016)**

- Evolusi Kelembagaan... **230**
- Bank Indonesia dan Pembangunan Sulawesi Selatan... **234**
- Koordinasi dalam Mengawal Inflasi... **243**
- Keberpihakan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah... **254**
- Mengawal Stabilitas Keuangan dan Sistem Pembayaran... **263**

277 **Bab VII 'Heritage' Kantor Eks-De Javasche Bank Makassar**

- Sebelum Kedatangan Belanda... **278**
- Zaman 'Intra-Muros'... **284**
- Periode Kehidupan 'Extra-Muros'... **287**
- Bangunan Bergaya Arsitektur Kolonial di Kota Makassar... **293**
- Gedung eks-De Javasche Bank Makassar... **313**
- Perluasan Pelabuhan dan Penghancuran Gedung DJB Makassar... **320**

327 **Bab VIII Epilog**

Daftar Acuan... 333

GLOSARIUM

Afdeeling	:	Divisi/bagian. Tingkatan administrasi daerah di bawah keresidenan (Hindia Belanda)
Agent	:	Kepala Kantor Cabang
Agentschap	:	Kantor Cabang
Agrarische Wet	:	Undang-undang Agraria
Besluit	:	Keputusan pemerintah
Borneo Barat	:	Sebutan lain untuk Kalimantan Barat (masa Hindia Belanda)
China/Tiongkok/Tionghoa	:	China atau Tiongkok merujuk nama daerah atau negara. Tionghoa merujuk nama etnis.
CONICA	:	Commandant Officer-NICA
Dai Nippon	:	Balatentara Jepang
DJB	:	De Javasche Bank. Bank sirkulasi di Hindia Belanda (1828 - 1952)
f (florin)	:	Simbol mata uang gulden (Belanda). Diambil dari kata Florence, nama kota di Italia tempat peleburan uang koin selama abad pertengahan di Eropa.
Interegnum	:	Masa peralihan pemerintahan
Jung	:	Kapal layar dari Negeri Cina yang digunakan untuk mengangkut muatan orang dan barang.
Kati	:	Satuan berat tradisional menggunakan timbangan kati. sepadan dengan beban 6,25 ons.
Keresidenan	:	Tingkatan daerah yang dipimpin oleh seorang residen (Hindia Belanda)
KNIL	:	Koninklijke Nederlansch-Indische Leger (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)
KPM	:	Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Perusahaan Perkapalan Kerajaan yang beroperasi di Hindia Belanda
Kopra	:	Daging buah kelapa yang telah dikeringkan. Kopra merupakan komoditas penting untuk bahan baku minyak kelapa dan turunannya.
Kongsi	:	Istilah persekutuan dagang bagi orang-orang Tionghoa
Kumiai	:	Koperasi yang berdiri pada masa pendudukan Jepang
Last	:	Satuan berat untuk mengukur muatan kapal pada abad pelayaran. Satu last (Belanda) sepadan dengan 20 pikul atau sekitar 1.200 kilogram.
Malaise	:	Keadaan lesu dan serba sulit dalam bidang perekonomian. Umumnya digunakan untuk menyebut nama lain dari krisis ekonomi tahun 1930 (zaman malaise). Salah satu dampaknya adalah komoditas ekspor Hindia Belanda merosot tajam dan menyebabkan lesunya perekonomian pada waktu itu.

Mij. (Maatschappij)	:	Bahasa Belanda maskapai. Nama lain dari perseroan atau perusahaan.
N.V.	:	*Naamlose Vennootschap*. Bahasa Belanda untuk perseroan (Perusahaan Terbatas atau P.T.)
NHM	:	Nederlandsche Handel Maatschappij
NICA	:	Nederlands Indies Civil Administration (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Pemerintahan pendudukan Belanda setelah Indonesia merdeka.
NIHB	:	Nederlands-Indische Handelsbank
NKG	:	Nanpo Kaihatsu Ginko atau Bank Pembangunan Daerah Selatan. Lembaga perbankan Jepang selama Perang Dunia II untuk mengatur sirkulasi uang di Daerah Selatan (Asia Tenggara) yang telah dikuasai,
ORI	:	Oeang Republik Indonesia
Pikul	:	Satuan berat tradisional berdasarkan beban terberat yang bisa dibawa oleh manusia dengan cara dipikul. Rata-rata dalam ukuran modern 1 pikul adalah 62 kilogram
Regeering	:	Pemerintah daerah
Residen	:	Kepala daerah setingkat Keresidenan (Hindia Belanda)
Staatsblad	:	Lembar Negara
Tail	:	Bentuk tidak baku dari 'tahil'. Satuan berat untuk mata uang perak dan emas, sepadan dengan 36 - 38 gram
Vertrouwelijke *Brieven*	:	Surat-surat Terpercaya
VOC	:	*Verenigde Oostindische Compagnie*. Perusahaan Dagang Hindia Timur.

BAB I
POLITIK-EKONOMI MAKASSAR DAN SEKITARNYA (1528-1864)

Pada terbitan Mingguan *Indie* tanggal 13 Maret 1918, A.W Nieuwenhuis melaporkan bahwa kemunculan Makassar sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur tidak dapat dipisahkan dari letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan.[1] Selain itu wilayah ini juga memiliki tradisi pelayaran yang membuatnya dikenal sebagai suku bahari Nusantara. Hal itulah yang mendorong Makassar dikenal sebagai pintu depan perdagangan di Asia Pasifik.[2]

Makassar sebagai bandar maritim sejak awal pertumbuhannya menunjukkan sebagai kota pelabuhan yang terpenting dalam jaringan perdagangan dunia sejak abad ke-15. Sejak itu Makassar telah masuk dalam jaringan perdagangan Jalur Sutra yang menghubungkan antara dunia niaga Asia dan Eropa. Ia muncul sebagai titik temu antara dunia niaga di belahan Timur (Maluku) dan Barat (Kalimantan, Malaka, Jawa, Asia Selatan dan juga Eropa), dan antara dunia niaga di belahan utara (Filipina, Jepang dan Cina) dan selatan (Nusa Tenggara dan Australia).

Bab pertama ini akan membicarakan kemunculan Makassar sebagai bandar niaga penting di kawasan timur Nusantara, hingga aspek-aspek

1 Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw, 1911 jilid LXXXII, hal. 311.

2 Koloniaal Tijdscrift, 1918, hal 86

apa saja yang mengantarkan Makassar menjadi bandar niaga utama pada kawasan ini. Namun sebelumnya, untuk mengantarkan pada pemahaman tentang ruang dan kewilayahan Makassar, akan diungkapkan terlebih dahulu aspek spasial Makassar terutama dalam konteks pra-kolonial hingga kolonial. Uraian mengenai aspek geografis dan geopolitik akan menjadi penekanan pada isi dalam bab ini.

Geografi yang Strategis

Kehadiran Makassar sebagai bandar niaga tidak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur pada umumnya.[3] Hal itu didasarkan atas kenyataan bahwa kegiatan perdagangan berkaitan erat dengan interaksi antarmanusia ataupun kelompok dalam kegiatan tukar-menukar barang dan jasa, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi interaksi sosial, budaya dan ekonomi yang kuat antara berbagai unsur tempatan dengan motif untuk menguasai perekonomian.

Secara geografis, Pulau Sulawesi terletak di antara Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur, serta Kepulauan Sulu yang merupakan wilayah Filipina di bagian utara dan Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Wilayah Makassar terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi.[4] Pulau Sulawesi memiliki empat jazirah dan tiga teluk. Antara jazirah selatan dan tenggara terdapat Teluk Bone; antara jazirah tenggara dan barat laut terdapat Teluk Tomini; dan antara jazirah barat laut dan jazirah utara terdapat Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo.[5]

3 Poelinggomang (2016: 11).

4 Kini, wilayah Makassar meliputi Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Maros, Kota Makassar, Gowa, Bantaeng, dan Bulukumba.

5 Poelinggomang (2016: 12–3).

Gambar 1.1. Peta Pulau Sulawesi



Sumber: Badan Informasi Geospasial (www.big.go.id)

Bagaimanakah wajah lanskap Makassar? Seorang Belanda yang berkunjung ke ujung pandang selatan Sulawesi itu pada abad ke-17 melukiskannya secara singkat sebagai berikut.

> *Wilayah Makassar dari laut terlihat sebagai daerah yang paling subur dan paling menyenangkan. Wilayah ini berupa daratan indah, hijau, dan tidak begitu tertutup hutan seperti daerah-daerah lain di Hindia; penduduknya sangat padat. Makassar adalah daerah persawahan yang indah, di mana-mana padi tumbuh; hal ini dapat dilihat jika berlayar menyusuri pantai, terutama pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Pada bulan-bulan ini padi belum dituai. Lebih ke dalam lagi terdapat kebun kelapa yang indah. Pohon ditanami berjejer-jejer teratur dan daunnya yang rindang melindungi orang dari terik matahari . . .*[6]

6 Poelinggomang (2016: 13), mengutip Ch. Pelras, "Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing," dalam Gilbert Harmonic (ed.), *Citra Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),

Ditambahkan, wilayah Makassar tidak hanya memiliki pantai yang bagus, yang mendorong penduduknya turun ke laut, tetapi juga daratan yang memungkinkan penduduknya bertani. Kegiatan pertanian sawah berkembang berkat sungai-sungai yang menjadi sarana irigasi, seperti Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara Kota Makassar, dan Sungai Jenebereng yang bermuara di bagian selatan, serta aliran sungai yang lain seperti Sungai Sanrabone dan Sungai Kacia.[7]

Gambar 1.2. Peta Wilayah Sulawesi Selatan



Sumber: Badan Informasi Geospasial (www.big.go.id)

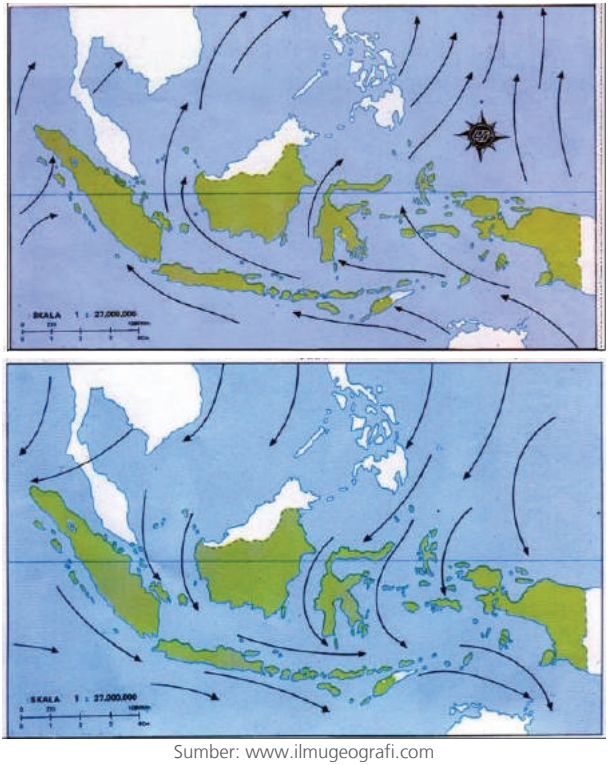
Terletak pada hamparan laut di titik persimpangan pulau-pulau di Nusantara, membuat posisi Makassar sangat strategis sehingga ramai dikunjungi orang. Nelayan dan pedagang yang berlayar di perairan sekitarnya ataupun hendak menuju kawasan Asia Pasifik dan Eropa pastilah menyinggahi pelabuhan kota itu. Faktor lain yang mendukung

7 Poelinggomang (2016: 13).

pertumbuhan Makassar sebagai kota pantai adalah topografinya dengan bentuk tanah dan pantainya. Bukit-bukit pantai di kawasan Makassar yang secara geologis baru saja terjadi sekitar 5000 tahun yang lalu membuat pantai Makassar seperti yang ada sekarang.

Dari segi iklim dan cuaca, sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, terdapat dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Perubahan musim ini bergantung pada keadaan muson. Musim hujan berlangsung antara Oktober hingga April berkat angin muson barat laut (muson basah), yang bertiup mulai September dan memasuki wilayah Sulawesi pada Oktober. Musim penghujan berakhir ketika angin muson basah berhenti dan selanjutnya diganti dengan angin muson tenggara yang kering pada Juni.

Gambar 1.3. Pergerakan Angin Muson Basah dan Kering



Sumber: www.ilmugeografi.com

Angin muson itu tidak hanya memengaruhi perubahan musim tetapi juga pelayaran dan perdagangan. Angin muson barat laut dimanfaatkan oleh pedagang yang berada di bagian barat, seperti Malaka, Riau, Johor, dan Batavia untuk berlayar ke arah timur, ke Kota Makassar dan terus ke Kepulauan Maluku. Pelayaran balik dari Maluku dan Papua ke arah barat umumnya menggunakan angin muson timur laut yang bertiup dari Mei hingga September. Pelayaran ke arah barat dilakukan dari Maluku, singgah di Makassar, lalu melanjutkan pelayaran ke wilayah barat hingga ke Pulau Sumatera dan Selat Malaka.[8] Siklus muson di wilayah Sulawesi menjadikan Makassar sebagai pusat jalur perdagangan, baik jalur perdagangan barat (Eropa, Gujarat, India Selatan, Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan-Makassar-Maluku serta Papua), maupun jalur pelayaran utara (Cina, Filipina, dan Jepang–Makassar–Nusa Tenggara–Australia).

Keadaan geografis dan iklim di Sulawesi Selatan memberikan warna kehidupan orang setempat yang memiliki keragaman tradisi masing-masing di wilayah tersebut. Terlihat dalam ungkapan berikut,

Ia-pakarajai wanu-e;	adapun yang membuat negeri besar
Rekkua engka tasi' akkajang	karena ada laut tempat berkehidupan
Padang maloang alloang-rumang,	lahan luas untuk pertanian dan
Pasa'marowa'abbaureng	pasar yang ramai perniagaan

Ungkapan tersebut menunjukkan ciri-ciri utama negeri-negeri di Sulawesi Selatan sebagai yaitu *palloang-ruma* (petani), *pakkaja* (pelaut atau nelayan), dan *pabbalu'* atau *padangkang* (pedagang). Ciri-ciri utama memberi petunjuk tentang aksentuasi umum yang dimiliki setiap negeri.[9]

Dalam jaringan perdagangan domestik antarpulau di Nusantara terlihat bahwa jauh sejak sebelum kedatangan bangsa Barat ke Makassar, wilayah itu telah memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perniagaan di Nusantara. Posisi geografis yang strategis, berada di jalur perdagangan antara wilayah timur Nusantara (Maluku) dengan wilayah barat Nusantara (meliputi Pulau Jawa dan Sumatera), menjadikan Makassar memiliki

8 Poelingggomang (2016: 14–5).

9 Mattulada (1998: 90–1).

kemampuan untuk menjadi bandar niaga besar dan menjadi semakin kuat setelah kedatangan bangsa Barat.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, orang Bugis Makassar telah berperan besar dalam lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara dan menegakkan hegemoninya di perairan Selat Malaka. Para pedagang Bugis bertindak sebagai pedagang perantara, yang berlayar dari pulau ke pulau hingga ke Selat Malaka.[10] Dalam *Dagregister* (1625) disebutkan bahwa orang Bugis-Makassar mengarungi samudera berlayar ke tempat jauh, mereka sangat cekatan di laut dengan membawa berbagai hasil rempah.

Munculnya kelompok pedagang Bugis-Makassar awalnya banyak dimotori oleh orang Bugis yang berasal dari Wajo dan Bone.[11] Tome Pires, seorang penjelajah asal Portugis, menyebutkan bahwa orang-orang Bugis berdagang hingga Malaka, Jawa, Kalimantan, di berbagai tempat seperti Pahang dan Siam sejak masa Sriwijaya.[12] Pendapat Pires juga dapat ditemukan di dalam hukum pelayaran Amanna Gappa yang menerangkan bahwa orang Bugis secara teratur mengunjungi bandar-bandar di Pulau Jawa, Palembang, Banjarmasin, Sulu, Bima, Timor, Bengkulu, Johor, Aceh, Perak, dan Malaka.[13]

Tidak diragukan lagi, keandalan orang Bugis Makassar dalam mengarungi dan menaklukkan lautan, baik untuk pelayaran maupun perdagangan. Tome Pires menulis mengenai orang Bugis yang ditemuinya di Malaka pada 1511 yang digambarkannya sebagai pelaut-pelaut ulung yang sangat kuat dan memiliki banyak kapal. Mereka berlayar ke seluruh pulau sekitar Jawa, sering kali membawa wanita. Banyak dari para pelaut Bugis itu yang berlayar untuk menjarah, merampas, dan menjual budak-budak yang mereka tangkap.[14] Luasnya jangkauan pelayaran orang Bugis-

10 Meilink-Roelofsz (1962: 172); lihat juga Wolters 1970: 12); Gibson-Hill (1952: 161–2).

11 Schricke (1955: 66)

12 Meilink-Roelofsz (1962: 102). Menurut Tome Pieres, jumlah pelaut Bugis yang pindah dari Palembang sebagai tempat asal Parameswara sekitar 30 orang. Mereka mengikuti Parameswara tinggal di Singapura dan Muar sebelum pindah ke Malaka. Dengan demikian kedatangan pertama para pelaut Bugis di Malaka diduga bersamaan dengan pembangunan kota Malaka yaitu akhir abad ke-13; lihat selanjutnya Cortesao (1944: 233–4).

13 P. A. Leupe, 1849, *deel* I, hlm. 305. Selain hubungan niaga, Malaka juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut; lihat Abdul Wahid dalam Kernial Singh Sandhu dan Paul Wheatly (eds.), (1983:10).

14 Cortesao (1944: 227).

Makassar di Asia Tenggara menandakan bahwa sejak permulaan abad ke-16 armada laut Indonesia sangat substansial, dan orang Bugis Makassar memegang peranan penting. Begitu pula andilnya dalam dunia niaga, pelaut dan pedagang Bugis-Makassar menjadi bagian dari mata rantai dagang pada abad-abad niaga dan hubungan kemaritiman di wilayah Asia Tenggara.[15]

Bandar Makassar termasuk salah satu yang tertua dan terus berkembang hingga saat ini. Kapan bandar Makassar mulai dibangun belum dapat dipastikan penanggalannya. Namun, bandar itu telah berkembang pada abad ke-16 dan mencapai kejayaannya pada abad berikutnya. Dalam perkembangan Makassar, kemajuan perdagangan jelas merupakan kisah keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia.[16]

Keterangan terperinci mengenai luas wilayah Makassar pada masa-masa sebelum kedatangan bangsa Barat sangat sukar diperoleh. Pada waktu itu Makassar terdiri dari sejumlah perkampungan yang terpencar-pencar di sepanjang pantai yang kira-kira terletak pada lokasinya sekarang, dengan beberapa penambahan ke daerah pedalaman. Di sepanjang pantai, perkampungan itu meluas dari Tallo di sebelah utara sampai ke Sungai Jeneberang di sebelah selatan. Daerah perkotaan tidak terdiri dari sekelompok pusat perkampungan, kelompok perumahan yang didirikan terbuat dari bahan yang tidak permanen dan menunjukkan suatu perencanaan jalan yang tidak konsisten. Di seluruh daerah tersebar serangkaian benteng yang merupakan tempat tinggal bangsawan yang dibangun dengan gaya arsitektur yang lebih kokoh dan permanen, kecuali di sepanjang pantai itu sendiri, terdapat pula wilayah pertanian.

15 Tentang abad niaga dan dunia maritim di Asia Tengara, lihat Reid (1992) dan (1999). Andil dan jaringan pedagang Bugis dan Makassar dapat dilihat dalam Poelinggomang (2016).

16 Reid (1983).

Gambar 1.4. Peta Kerajaan Makassar pada Abad ke-17



Sumber: Nationaal Archief (www.gahetna.nl)

Keterangan lain mengenai Makassar didapatkan dari Tome Pires yang pernah mengunjungi Makassar. Dalam kesaksiannya, ia melihat bahwa telah terjalin kontak perdagangan antara Makassar dengan daerah-daerah lain seperti Jawa, Malaka, Kalimantan, hingga Siam. Pires mencatat,

> *Kepulauan Makassar berada di jalur menuju Maluku, yang dicapai lewat pelayaran dari Tanjungpura selama empat atau lima hari. Kepulauan ini terdiri dari banyak pulau dan merupakan negeri besar. Dari sini kita dapat bertolak ke Buton dan Madura dan juga ke utara. Penduduknya masih infidel.*[17] *Penduduk kepulauan ini melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Kalimantan, Siam, dan semua tempat antara Pahang dan Siam. Mereka lebih mirip orang Siam daripada ras lainnya.*[18]

17 Masih belum memeluk agama Katolik sebagaimana dianut oleh Pires.

18 Cortesao (1944: 226).

Secara geopolitik, Makassar merupakan nama tempat yang dikenal lebih dahulu dari penyebutan untuk bandar niaga kerajaan kembar Gowa dan Tallo, yang dalam perkembangannya menyandang nama Kerajaan Makassar. Walaupun demikian, dalam tradisi pelaut dan pedagang yang berniaga ke Maluku juga menyebut kawasan pulau-pulau yang berada di utara Pulau Sumbawa dengan nama Makassar.

Tradisi penyebutan pulau-pulau itu kemudian diserap oleh pelaut dan pedagang Portugis setelah merebut dan menduduki Malaka. Tome Pires mencatat bahwa pedagang-pedagang Melayu menginformasikan terdapat jalur paling singkat dalam pelayaran ke Maluku yaitu melalui Makassar. Tampaknya informasi itu mendorong pelaut dan pedagang Portugis menelusuri jalur pelayaran itu sehingga dalam peta pelayaran pengembara Portugis, Pulau Kalimantan diberi nama "Pulau Makassar yang Besar" atau *Grandos ilha de Macazar*, dan Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya dengan sebutan "Pulau-pulau Makassar" atau *Ilhas dos Macazar*. Selain penyebutan nama Makassar untuk pulau-pulau itu, kota-kota pelabuhan yang berada di pesisir barat Sulawesi yang menjadi tempat singgah pelayaran ke Maluku juga diberikan predikat Makassar, antara lain Siang Makassar, Bacokiki Makassar, Suppa Makassar, Sidenreng Makassar, Napo Makassar dan Tallo Makassar.[19]

Informasi menyangkut penyebutan Makassar yang meliputi wilayah yang luas itu, dalam perkembangan kemudian dipaterikan menjadi nama bandar niaga kerajaan Gowa dan Tallo (Sombaopu dan Tallo). Makassar terbentuk dari dua bandar niaga dari kerajaan kembar Gowa-Tallo, yaitu bandar Tallo dari Kerajaan Tallo yang terletak di pesisir selatan muara Sungai Bira, dan bandar Sombaopu dari Kerajaan Gowa yang terletak di pesisir utara muara Sungai Jeneberang. Dua kerajaan tetangga itu berhasil membentuk persekutuan pada 1528, setelah melalui permufakatan penyelesaian konflik.

Pemufakatan mereka dikenal dalam bentuk pernyataan bahwa "barang siapa yang mengadu-dombakan Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Tallo akan dikutuk oleh Dewata" atau *ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo iamo nacalla Dewata* dalam ungkapan setempat. Kesepakatan itu

19 Cortesao (1944: 239).

berpengaruh bagi rakyatnya dan semua yang mengenal dua kerajaan kembar itu sehingga muncul ungkapan "satu rakyat, dua raja" atau *sereji ata narua karaeng*. Persekutuan yang dibangun itu bersifat menyatukan dua kerajaan dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap mengakui kedudukan kekuasaan masing-masing sebagai raja kerajaan, di samping membentuk satu kesatuan dengan menempatkan Raja Gowa sebagai pemegang kendali kekuasaan kerajaan (*Sombaya*) dan Raja Tallo sebagai pejabat mangkubumi (*Tumabicara Buta*).

Perang yang berakhir dengan pembentukan persekutuan dua kerajaan itu berbasis pada keinginan Kerajaan Gowa untuk mengubah orientasi kehidupan kerajaannya dari agraris ke maritim pada periode pemerintahan Raja Gowa IX, Tumaparissi Kalonna Daeng Matanre Karaeng Manguntungi (1510–46). Kebijakan itu dilaksanakan mengingat semakin banyak arus migran pedagang Melayu ke kawasan ini setelah Malaka diduduki oleh Portugis pada 1511. Sehubungan dengan itu, setelah melakukan persekutuan dua kerajaan, yang secara kesejarahan diperintah oleh raja dari keturunan yang sama,[20] melaksanakan perluasan kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan pesisir dan memaksa mereka melakukan perdagangan dengan bandar niaga Tallo dan Sombaopu.

Hingga akhir abad ke-15 Makassar belum merupakan pusat perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara bagian timur.[21] Pelabuhan

20 Raja Kerajaan Tallo yang pertama, Kareng Lowe ri Sero, adalah saudara kandung raja Gowa VII, Batara Gowa, putra raja Gowa VI, Tunatangkalopi (1445–60). Ada dua versi kisah tentang dua kerajaan tetangga itu. Versi pertama mengisahkan bahwa kedua putra raja itu selalu berselisih. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia membagi wilayah kerajaannya kepada dua putranya. Batara Gowa menjadi raja di wilayah yang dikenal dengan Kerajaan Gowa, sementara adiknya menjadi raja atas wilayah yang kemudian disebut Kerajaan Tallo. Versi lain mengisahkan bahwa sebelum raja mangkat ia berpesan agar Karaeng lowe ri Sero yang kelak menggantikannya. Ketika raja meninggal, putra tertuanya, Batara Gowa, merebut ornamen kerajaan (*Sudanga*) sehingga dewan kerajaan mengakuinya sebagai raja. Akibatnya, adiknya meninggalkan kerajaan itu dan pergi menetap di Pacinnang. Ketika kehadirannya itu diketahui oleh para gelang di wilayah Bira, empat galarang bersepakat menobatkannya menjadi raja. Tawaran itu diterima sehingga mereka bergiat membangun istana kerajaan di wilayah pesisir pada muara Sungai Bira yang dikenal dengan nama hutan Tolloang. Dari nama hutan itulah kemudian kerajaan yang didirikan itu dinamai Kerajaan Tallo.

21 Hall (1985: 24) mencatat bahwa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Makassar belum merupakan pusat jaringan perdagangan. Pada waktu itu ada beberapa jaringan dagang atau zona perdagangan di Asia Tenggara dan sekitarnya yaitu jaringan Selat Malaka, Jaringan Teluk Tonkin (mencakup pantai timur Semenanjung Malaya, Thailand, dan Vietnam Selatan), jaringan Laut Sulu (meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao dan sekitarnya) dan jaringan Laut Jawa yang mencakup Jawa, Kalimantan, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan, bahkan hingga Maluku.

itu hanya merupakan tempat pertemuan atau singgah bagi pedagang Jawa yang sedang dalam perjalanan lalu-lalang ke Kepulauan Maluku dan sekitarnya untuk mencari rempah-rempah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16 ketika pedagang muslim dari Malaka yang direbut oleh Portugis pada 1511 eksodus menuju ke Makassar. Penyebabnya adalah telah terjadi perseteruan yang sengit antara Portugis dan pedagang muslim di Asia ketika Portugis mengibarkan Perang Salib di lautan sejak penjelajahan mereka ke dunia Timur.[22] Menetapnya para pedagang muslim di Makassar merupakan fondasi bagi terbentuknya sebuah pelabuhan *entrepôt* baru di Nusantara bagian timur.

Rupa-rupanya kerajaan lokal Gowa dan Tallo dapat menangkap kesempatan itu dengan mengorganisasikan mereka dalam rangka menjadikan Makassar sebagai pusat pengumpulan dan distribusi rempah-rempah.[23] Untuk membuat para pendatang betah tinggal di Makassar, mereka mendapatkan jaminan tertulis atas keselamatan dan keamanan dari penguasa. Tidak seperti sebelumnya yang hanya berpangku tangan menunggu pedagang yang datang, Kerajaan Gowa-Tallo juga mengirimkan orang-orangnya ke Maluku untuk melakukan perdagangan dan barter dengan produsen rempah-rempah secara langsung.[24]

Jaringan perdagangan yang demikian itu jelas merupakan ancaman bagi Portugis yang berambisi menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, pada abad ke-16 Portugis kurang memiliki kekuatan untuk memaksakan monopoli karena mereka kekurangan kapal dan angkatan laut untuk melakukan patroli di perairan yang luas di kawasan Nusantara khususnya di perairan sekitar Maluku. Bahkan pada 1641 Malaka yang dikuasai Portugis berhasil direbut oleh kompeni dagang Belanda VOC.

Hal menarik ialah ketika Makassar bertindak sebagai tempat penampungan para pedagang pengungsi sebagaimana terjadi ketika Malaka direbut oleh Portugis pada 1511. Makassar menampung eksodus pedagang muslim sebagai akibat kekalahan Portugis, namun pada saat

22 Chauduri (1989: 15).

23 Sutherland dalam Broeze (ed.) (1989: 100).

24 Curtin (1988: 160).

itu pedagang Portugislah yang mengungsi ke Makassar sebagai akibat kekalahan dari Belanda. Tidak kurang dari 3.000 pengungsi Portugis bertempat tinggal di pelabuhan Makassar, demikian juga dengan orang-orang India banyak yang bermukim di sana dan menjadi salah satu kelompok rentenir dan pedagang utama di kota tersebut. Beberapa kerajaan yang berdaulat di Asia juga mengirimkan perwakilan mereka ke Makassar seperti dari Aceh dan Golconda (India) untuk membantu warga mereka yang berdagang di kota itu.

Dengan cepat Makassar tumbuh sebagai kota dagang yang kaya karena memiliki kebijakan terbuka untuk pedagang asing sebagaimana kerajaan Malaka pada dua abad sebelumnya.[25] Berbagai pedagang beraktivitas di sana seperti para pedagang Melayu yang keluar dari Malaka setelah direbut Portugis (1511), pedagang Portugis sendiri yang diusir oleh Belanda dari Malaka (1641), para pedagang lokal, pedagang Denmark dan Inggris, semuanya terlibat aktif dalam perdagangan tekstil India dengan rempah-rempah Maluku yang harus berhadapan dengan sistem monopoli VOC.

Makassar sebagai Bandar Niaga dan Maritim

Penyatuan dua kerajaan kembar Gowa-Tallo merupakan langkah pemufakatan penyelesaian konflik atau perang. Sejak penyatuan dua kerajaan itu, sebuah bandar baru dibangun yang dikenal dengan nama Makassar. Hal itu berakibat Bandar Tallo dan Bandar Sombaopu hanya dipandang sebagai bagian dari bandar baru tersebut. Penyebutan nama Makassar dapat dipandang mewakili eksistensi Gowa-Tallo. Siapa yang memberikan nama itu dan kapan diberikan serta diterima oleh pemilik bandar dan kerajaan itu sulit diketahui.

Kemajuan perkembangan Makassar sebagai bandar niaga berawal ketika pemerintahan Raja Gowa Tomaparissi Kallonna (1510–46) memindahkan ibu kota Kerajaan Gowa dari Tamalate ke Sombaopu.

25 Curtin (1988).

Pemindahan ibu kota itu diikuti dengan penataan birokrasi kerajaan dari bentuk agraris ke maritim yang ditandai dengan pengangkatan kepala Syahbandar di pelabuhan Makassar. Kepala Syahbandar bertugas khusus mengatur lalu lintas perdagangan dan pelayaran di pelabuhan. Selain itu, Syahbandar juga mengatur segala kebijakan di kawasan pelabuhan antara lain pembentukan galangan pembuatan perahu di Tallo guna memperkuat armada maritim kerajaan, termasuk mendesain kapal perang Galei yang mampu mengimbangi kapal-kapal asing yang mengancam teritorial kerajaan.

Kemajuan Makassar ditandai pula dengan semakin terbukanya Makassar terhadap unsur-unsur kebaruan. Sebagai masyarakat yang bersifat pluralistik (karena terdiri dari banyak kelompok suku bangsa, ras dan agama), sistem politik di Makassar cukup terbuka dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan untuk kemajuan perdagangan.[26] Keterbukaan itu juga bisa dilihat dari kesediaan penguasa setempat menerima apa yang dalam masyarakat saat ini disebut sebagai 'modernisasi'. Mereka berusaha mendapatkan kemajuan dari teknologi dan hal-hal baru yang dipandang bermanfaat dari orang-orang asing yang datang di Makassar. Dua tokoh terkenal yang memiliki sikap progresif seperti ini adalah Karaeng Matoaya dan Pattingaioang. Mereka tidak malu-malu mengambil apa saja yang dipandang berguna untuk kemajuan mereka dari pengetahuan para pengunjung Makassar termasuk teknik pembuatan kapal Eropa dan Cina, dan penggunaan pola navigasi laut yang waktu itu sudah lazim digunakan pelaut Eropa, mencetak uang logam, dan sebagainya.

Masa pemerintahan Matoaya (1593–1610) juga merupakan periode ketika Makassar mengadopsi Islam. Dari satu sisi, Islamisasi di Makassar merupakan bagian dari politik pembangunan perdagangan yang sangat jenius sebab sebagian besar perdagangan di Nusantara waktu itu berada di tangan orang-orang Islam. Sudah barang tentu pengadopsian unsur budaya asing bukan hanya untuk kepentingan mode dan imitasi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan lokal. Bugis dan Makassar menciptakan

26 Tentang pluralisme masyarakat Makassar masa tersebut, lihat Reid (2000: 433–49); juga Sutherland dalam Nas (ed.) (1986: 37–55).

sendiri alfabet untuk membuat bahasa mereka sebagai simbol yang mudah dipahami oleh semua kelompok pedagang baik untuk kepentingan hukum maupun bisnis. Mereka memiliki alfabet yang relatif sama meskipun bahasanya sangat berbeda.[27]

Seiring dengan keinginan Kerajaan Makassar mengembangkan pelabuhan, maka segala kegiatan pelayaran dan perdagangan maritim ditempatkan dan dipusatkan dari pelabuhan milik kerajaan-kerajaan taklukan ke bandar Makassar sebagai satu-satunya pusat niaga. Selain itu, kerajaan Makassar juga melaksanakan "kebijakan pintu terbuka" dengan menganut prinsip "laut bebas" (*mare liberium*). Kebijakan itu memperbolehkan para pelaut dan pedagang dalam dunia perdagangan maritim di kawasan kepulauan itu berdatangan dan meminta izin menetap dan berniaga. Pedagang yang jauh sebelumnya telah menetap dan berniaga di sekitar Sombaopu adalah pedagang Portugis pada 1532.[28] Kebijakan penaklukan dan pemusatan kegiatan di bandar Gowa-Tallo itu berdampak terhadap pedagang Melayu yang sebelumnya bermukim di Bandar Siang (Pangkajene-Bungoro) yang juga memohon izin menetap dan berniaga di Makassar yang kemudian diterima dengan tangan terbuka. Kemudahan yang disediakan oleh penguasa membuat pedagang-pedagang lain, seperti Belanda (VOC) pada 1603, Inggris (1613), Spanyol (1615), Denmark (1618), dan Cina (1618) memohon izin menetap di Makassar. Kumpulan pedagang asing itu berhasil meningkatkan status Makassar menjadi bandar transito internasional utama dan terpenting ketika itu.[29]

Bandar Makassar tumbuh dan maju pesat dalam dunia perdagangan, menjadi pusat tujuan niaga bagi semua pedagang yang bergiat dalam dunia perdagangan maritim di kawasan kepulauan Indonesia. Pedagang Eropa dan Timur Asing lainnya yang datang berniaga dan menetap di bandar itu merasakan keamanan mereka terlindung dan penuh kedamaian. Politik pintu terbuka yang dijalankan oleh Kerajaan Makassar bukan hanya diarahkan untuk memikat pedagang dan pelaut di daerah

27 Curtin (1988: 162); lihat juga Reid (1981: 12–23).

28 Erkelens (1897: 82).

29 Sulistiyono (2008).

sekitar (Bugis, Makassar, Mandar, Selayar, dan Bajo) atau Portugis di Malaka dan Melayu, tetapi juga bagi para pedagang dari Asia Timur dan Asia Tenggara.

Kebijakan politik pintu terbuka telah berhasil menempatkan Makassar sebagai satu-satunya pusat perdagangan di Sulawesi Selatan. Pedagang dan pelaut Bugis, Makassar, Selayar, Melayu, dan Portugis menjadikan Makassar sebagai pelabuhan singgah dan tempat pemasaran barang-barang mereka. Makassar tampil sebagai bandar utama dalam perdagangan dengan daerah penghasil dan bandar niaga lain di kawasan timur, selatan, barat, dan utara Nusantara.[30]

Hal tersebut dirasa merupakan faktor utama akselerasi kemajuan bandar Makassar yang masif. Sebabnya, sebagai bandar maritim sejak awal pertumbuhannya menunjukkan sebagai kota pelabuhan yang terpenting dalam jaringan perdagangan dunia sejak abad ke-15. Sejak itu, Makassar telah masuk dalam jaringan perdagangan Jalur Sutra yang menghubungkan antara dunia niaga Asia dan Eropa. Ia muncul sebagai titik temu antara dunia niaga di belahan timur (Maluku, Papua) dan barat (Kalimantan, Malaka, Jawa, Asia Selatan dan juga Eropa), dan antara dunia niaga di belahan utara (Filipina, Jepang dan Cina) dan selatan (Nusa Tenggara dan Australia).

Dasar-dasar kemajuan ekonomi Makassar pada waktu itu tidak hanya terletak pada posisinya yang strategis sebagai *entrepôt* perdagangan yang menghubungkan kawasan dagang Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan jaringan perdagangan lokal lainnya serta berhubungan erat dengan perdagangan jarak jauh dengan Cina dan India, bahkan Eropa, dan juga sebagai produsen komoditas penting seperti beras.[31] Jangkauan jaringan perdagangan telah mencapai hampir seluruh kawasan Nusantara, Australia Utara, kepulauan Filipina, Makao, Cina, dan beberapa kota pelabuhan di Semenanjung Malaya.[32]

Letak Makassar telah memberikan kedudukan sangat penting dalam percaturan ekonomi politik dan sosial, dalam kaitannya dengan kontak

30 Poelinggomang (2016: 23).

31 Sutherland (1986: 37–55).

32 Poelinggomang (1991: 37–8).

dan jalinan hubungan antara pemerintahan lokal dan penetrasi Barat. Hal itu menempatkan perdagangan sebagai kebutuhan dasar dalam membangun perekonomiannya. Kenyataan itu mendorong Kerajaan Makassar sebagai suatu kerajaan maritim untuk tampil dan berhasil membentuk satu zona perdagangan pada abad ke-16 yang oleh Kenneth Hall disebut sebagai 'jaringan Laut Jawa' yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Pesisir Barat Kalimantan, Jawa dan Sumatera Selatan.[33]

Sistem perdagangan Makassar tidak lepas dari rute lalu lintas yang melalui Laut Tengah, Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan meramaikan jalur pelayaran Selat Malaka. Pada konteks itulah muncul kota Pasai yang terletak di ujung Sumatera yang berperan sebagai bandar niaga dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara. Pasai sebagai kerajaan Islam mulai memainkan peranan penting yang menghubungkan Malaka, Jawa, Makassar, Kalimantan dan Ternate. Para pedagang dari Pasai membuka perkampungan sambil membentuk kontak dagang antara bandar yang satu dengan bandar lainnya. Di Makassar ketika itu telah terbentuk permukiman pedagang dari berbagai suku di sepanjang pantai Sombaopu.

Kemajuan Makassar menjadi bandar perdagangan penting di Nusantara terjadi akibat beberapa faktor pendukung. *Pertama*, letak Makassar di pusat perdagangan di kepulauan ini; *kedua*, posisinya pada jalur jaringan perdagangan negara-negara di bagian utara benua Asia dengan Australia yang berada di selatan, juga pada jalur pelayaran dari Samudra Atlantik menuju Samudra Hindia. *Ketiga*, pelabuhannya termasuk pelabuhan alam yang nyaman karena terlindung oleh pulau-pulau kecil yang bertebaran di depannya sehingga gelombang laut pada muson barat laut tidak mengancam kapal dan perahu dagang yang berlabuh. *Keempat*, sebagian penduduk Sulawesi Selatan bergiat dalam perdagangan maritim dan dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung dan cekatan.

Sebagaimana disebutkan, nama 'Makassar' telah dikenal jauh sebelum bandar Makassar baru muncul. Jika informasi tersebut dihubungkan

33 Hall (1985: 224–5).

dengan kedudukan Bandar Makassar dan Kerajaan Makassar yang dalam perkembangannya ditempatkan sebagai satu-satunya bandar terpenting dalam pelayaran ke Maluku, maka dapat dikatakan bahwa penamaan itu berkaitan dengan kedudukan bandar dan kerajaan itu di kawasan jalur utara pelayaran Malaka–Maluku.

Posisi itu menempatkan Makassar menjadi bandar terpenting dan pusat perdagangan transito internasional dalam dunia perdagangan maritim pada akhir abad ke-16 hingga paruh pertama abad ke-17. Makassar menjadi pusat niaga untuk pelaut dan pedagang di Asia dan Eropa dalam komoditas rempah-rempah. Dalam salah satu catatan harian pegawai VOC pada 1624 disebutkan,

> *Semua pedagang Melayu dan asing lainnya, lebih dari 600 pedagang, mempersiapkan diri untuk berlayar lagi, mengikuti datangnya muson barat. Kebanyakan dengan perahu kecil (biasa untuk perdagangan rempah-rempah) menuju Amboina dan daerah sekitarnya dengan modal yang besar yang dapat mereka bawa, sebagian berupa beras, tetapi kebanyakan berupa alat tukar. Keuntungan tahun lalu mendorong mereka untuk tekun dan bersemangat dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih dari tahun sebelumnya; dikatakan bahwa raja (Makassar) mengirim dua orang pemimpin di antara mereka dengan tanggungjawab utama bila penduduk Amboina dan sekitarnya membutuhkan bantuan, mereka akan menolong sepenuhnya seperti dahulu, sesuai dengan kemampuan mereka.*[34]

Makassar juga dikenal sebagai bandar transito internasional dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana.[35] Semua pedagang Asia dan Eropa datang dan memiliki kantor perwakilan dagang—populer disebut loji—di bandar ini. Dalam hal ini peran pelaut dan pedagang Makassar juga tidak dapat diabaikan. Mereka melakukan pelayaran niaga antara Makassar dan daerah penghasil komoditas terpenting ketika itu yakni Maluku, pusat rempah-rempah, dan Timor serta Sumba, penghasil

34 Dikutip dari van Leur (1983: 195–6).

35 Stapel (1922).

kayu cendana. Kedua komoditas itu telah memikat pedagang lain datang ke Makassar.

Setelah Malaka dikuasai VOC, banyak pedagang Melayu mengalihkan perhatiannya ke Makassar sehingga Makassar semakin ramai karena menjadi tempat persinggahan dan penimbunan rempah-rempah dari Maluku.[36] Pedagang Makassar membawa beras ke Maluku dan sekembalinya mereka membawa rempah-rempah, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang Portugis, Inggris, Cina, dan Arab. Untuk memenuhi permintaan beras dari Maluku, Makassar (kerajaan kembar Gowa-Tallo) memperluas pengaruhnya ke Bima dan berbagai kerajaan di pedalaman Bugis seperti Sidenreng, Wajo dan Bone.[37]

Pada periode sebelumnya, yakni pada permulaan abad ke-16, Makassar belum terlalu berarti dalam lalu-lintas perdagangan Nusantara. Perdagangan masih banyak didominasi oleh orang-orang Melayu, Aceh dan Jawa. Para pedagang itu bertindak sebagai pedagang perantara yang berlayar dari pulau ke pulau di Indonesia Timur[38] sehingga pedagang Melayu atau Jawa itu terlibat sebagai pedagang rempah-rempah. Dalam *Dagregiste*r (1625) disebutkan bahwa orang-orang Makassar mengarungi samudra ke tempat jauh, tetapi mereka berlayar dengan perahu berukuran kecil di sekitar Pulau Sulawesi.[39] Jadi orang-orang Makassar sudah belajar dan berdagang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Makassar ketika itu belumlah turut aktif ambil bagian dalam perdagangan internasional dan menempuh jarak jauh seperti yang dilakukan orang-orang Melayu dan Jawa. Sebagian besar orang Makassar masih berkonsentrasi dalam kehidupan agraris[40] sedangkan yang aktif dalam pelayaran dan perdagangan adalah orang-orang Bugis yang berasal dari Wajo dan Bone. Seperti dikatakan Pires, orang-orang Bugis berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Kalimantan, dan berbagai tempat seperti Pahang dan Siam.[41]

---

36 Valentijn, (1724-26: 135)

37 Schricke (1955: 185)

38 Meilink-Roelofsz (1962: 172).

39 Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 muncul beberapa kerajaan, seperti Gowa, Bone, Luwu, Tallo, Sopeng, Wajo, Tanete, Bulo-Bulo, Tondong, Bangkala, Badjing, Mandar, Balannipa, Cenrana, Binoang, Majene. Lihat *Dagregister 1625* ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1896), hlm. 125.

40 Schricke (1955: 66)

41 Meilink-Roelofsz (1962: 102).

Kepindahan pedagang Melayu dan pedagang yang lain dari Malaka ke Makassar memiliki arti penting pada permulaan abad ke-17 setelah jatuhnya kota-kota dagang pantai utara Jawa Timur dan datangnya kaum pedagang yang dahulu singgah di berbagai kota dagang. Makassar menjadi lebih ramai karena menjadi tempat persinggahan dan tempat penimbunan terbesar perdagangan rempah-rempah dari Maluku.[42]

Kedatangan orang Belanda dengan bendera VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) pada abad ke-17 awalnya hanya berdagang. Dalam upaya menjalin kontak dagang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, VOC membentuk kantor perwakilan dagang dan mendirikan loji (kantor perwakilan sekaligus tempat penyimpanan) di beberapa wilayah di Nusantara, termasuk Makassar. Upaya-upaya tersebut dilakukan VOC dengan tujuan memperkuat pengaruhnya di Nusantara. Pada awal kedatangannya, VOC merasa terancam oleh unsur kekuatan lokal, karena itu mereka berusaha menemukan lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan benteng pertahanan dan pemusatan kekuatan perang serta niaga.[43]

Kedudukan politik dan ekonomi Kerajaan Makassar yang kuat menjadi ancaman besar bagi VOC yang mempraktikkan politik monopoli. Konflik antara Kerajaan Makassar versus VOC yang berlangsung sejak 1615 mencapai puncaknya dalam Perang Makassar pada Desember 1666 hingga 18 November 1667. VOC berhasil mengalahkan Kerajaan Makassar dan memaksa menandatangani Perjanjian Bongaya (*Het Bongaais Verdrag*) yang isinya sangat menguntungkan VOC.[44] Sebaliknya, perjanjian itu amat merugikan Kerajaan Makassar sehingga menimbulkan gejolak perlawanan kembali pada 1668. Namun, kekuatan VOC mampu menekan semua perlawanan sehingga perjanjian disahkan kembali pada 1669.

42 Valentijn, (1724-26: 135)

43 Mattulada (1998: 141).

44 Poelinggomang (2016: 30); Andaya (2006: 100-101).

Akibat praktik monopoli VOC, perdagangan Makassar lesu dan memudar.[45] Bahkan dalam kurun waktu itu, perdagangan dan perniagaan Makassar bisa dikatakan mengalami kemerosotan yang hampir mencapai titik "kesunyian."[46] Hal itu berarti jaringan perdagangan Makassar yang telah berkembang lebih dari satu abad sebelumnya menghadapi tantangan berat.[47]

Kemerosotan itu berpangkal pada kebijakan ekonomi VOC yang melakukan monopoli dan penetapan Batavia sebagai satu-satunya pusat kegiatan ekonomi. Di samping itu dilakukan pembatasan penduduk suku Bugis-Makassar yang bergiat dalam pelayaran niaga di daerah produksi komoditas rempah-rempah di bagian timur. Makassar hanya dijadikan pos pengamanan terdepan untuk melindungi monopoli perdagangan VOC. Kebijakan itu membuat Makassar hanya berperan sebagai bandar kecil bagi pelayaran niaga pesisir. Lingkup kegiatan niaga rempah-rempah hanya berpusat di bandar niaga Maluku yang dikuasai VOC. Akibatnya Pelabuhan Makassar hanya berperan sebagai pelabuhan singgah gerak rempah-rempah dan komoditas permintaan antara Maluku dengan Batavia.

Di balik cengkeraman VOC di Makassar, terjadi pula guncangan yang memengaruhi posisi kompeni di kota tersebut. Pada 1776, meletus perlawanan Batara Gowa yang dipimpin oleh Raja Gowa yang meninggalkan tahta dan mengembara ke tempat lain. Pemimpin gerakan yang disebut Batara Gowa I Sangkilang itu berhasil merebut pos VOC di Maros pada 1777.[48] Wilayah Maros dan sekitarnya merupakan daerah

45 Beberapa poin penting dalam Perjanjian Bongaya adalah Kerajaan Makassar diwajibkan membayar kerugian perang (Pasal 13), melepaskan seluruh tawanan pegawai VOC (Pasal 2), menyerahkan barang VOC yang disita (Pasal 3), melepaskan koloni-koloninya (Pasal 14 dan 16–21), membongkar benteng-benteng pertahanannya (Pasal 10), mengusir semua orang Eropa yang berdagang di Makassar (Pasal 6), melarang orang Makassar berlayar ke Maluku (Pasal 9), hanya membolehkan VOC yang berdagang di Makassar tanpa macam-macam kewajiban (Pasal 8), dan menyerahkan Benteng Ujung Pandang berikut perkampungan dan lingkungannya kepada VOC (Pasal 11). Lihat Poelinggomang (1991: 38).

46 Arsip Financien No. 738: Missive van Kamer van Koophandel en Nijverheid in Surabaya den Directeur van Financien, 1 Februari 1898; Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia; "Makassar als vrijhaven," *Indische Gids*, Vol. 1, 1879: 649.

47 Jaringan perdagangan Makassar sebelum jatuh ke tangan VOC digambarkan dengan baik oleh Cornelis Speelman; lihat Noorduyn (1981: 99–124); juga Sulistiyono (2008).

48 Poelinggomang (2016: 37).

yang sangat potensial bagi VOC karena sebagian besar produk beras yang diekspor VOC ke Maluku berasal dari daerah itu. Demikian pula asal budak yang didatangkan dari daerah Maros dan sekitarnya.

Kendati berhasil memadamkan gerakan Batara Gowa pada Juli 1778, VOC tidak dapat segera merebut kembali wilayah yang diduduki Bone. Hal itu berkaitan dengan pecahnya Perang Inggris–Belanda IV (1780–84), yang memengaruhi posisi VOC. Baru setelah perang usai, VOC giat kembali memperluas kekuasaannya di Semenanjung Malaka untuk membendung Inggris agar tidak memasuki dunia perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Usaha itu tidak berhasil memperbaiki kekuasaan dan ekonomi VOC yang memang telah merosot akibat dari permasalahan internal badan dagang itu seperti korupsi.[49]

Kondisi keuangan VOC dinyatakan berada dalam keadaan yang menyedihkan pada 1787. Ketika pecah pergolakan politik di Eropa akibat Revolusi Perancis (1789), posisinya kembali terancam oleh Inggris yang kemudian berhasil merebut Malaka dan Maluku pada 1795. Goyahnya kedudukan politik dan ekonomi VOC di wilayah koloni membuat kompeni secara resmi menyerahkan koloninya kepada Pemerintah Kerajaan Belanda pada 1799. VOC kemudian dinyatakan bubar sejak Januari 1800.

Uang, Komoditas, dan Jaringan Perdagangan Maritim Makassar

Perdagangan adalah hubungan ekonomi antarbangsa yang paling tua dan sangat penting, meskipun dalam sejarah perkembangan hubungan internasional kegiatan itu diikuti dengan perang, seperti tampak dalam sejarah perdagangan di Nusantara, baik pada periode sebelum kedatangan pedagang Eropa maupun sesudahnya. Perang menyertai perdagangan itu ditempatkan dalam kaitannya dengan pajak perdagangan karena merupakan salah satu sumber kesejahteraan terpenting bagi elite politik dan kekuasaan imperial. Itulah sebabnya sejumlah kerajaan yang berada pada persimpangan niaga berkembang dan berusaha mengawasi

49 Poelinggomang (2016: 38).

jalur perdagangan seperti di Afrika, Mediterania, India, Cina, dan Asia Tenggara. Kenyataan itu mendasari sejarawan Brooks Adams menyatakan bahwa "pergeseran dalam jalur perdagangan dan pengawasan jalur-jalur itu menjadi kunci bagi sejarah kemanusiaan."[50]

Posisi geografi Makassar yang strategis menjadikan kedudukannya sangat penting dalam percaturan ekonomi, politik dan sosial dalam kaitannya dengan kontak dan jalinan hubungan antara pemerintahan lokal dan penetrasi Barat. Perdagangan berperan sebagai kebutuhan dasar dalam membangun perekonomian Makassar. Dalam konteks penguasaan hegemoni perdagangan tersebut akan selalu terkait dengan tiga aspek penguasaan yaitu jalur perdagangan, komoditas perdagangan, dan penggunaan uang sebagai simbol hegemoni kekuasaan.

Jalur pelayaran dan perniagaan Jawa–Makassar–Maluku merupakan jalur perdagangan rempah-rempah. Makassar menjadi pelabuhan singgah bagi kapal dagang Belanda yang berlayar dari Batavia ke Maluku. Makassar juga menjadi salah satu bandar perdagangan tekstil, budak, dan beras. Kapal-kapal Belanda datang membawa komoditas dari Eropa berupa kain lena, candu, dan sebagainya. Sementara itu yang dibawa dari dunia Timur berupa aneka jenis minuman keras, mata uang, beragam porselin Cina dan tembikar, dan sebagainya. Selain ke Makassar, berbagai komoditas itu dipasarkan ke berbagai wilayah lain di Sulawesi bagian selatan seperti Maros, Talakar, Bantaeng, dan Bulukumba. Dari berbagai wilayah itu, mereka membawa komoditas berupa beras, budak, teripang, tenunan lokal, gula aren, dan lain-lain untuk memenuhi permintaan di Maluku dan Batavia.[51]

Telah disebutkan bahwa perkembangan niaga kota Makassar memberikan gambaran timbulnya persaingan yang sengit antara Kerajaan Makassar dan VOC yang semakin memperkuat kedudukannya dalam memonopoli perdagangan. Walau hanya menguasai produksi beras, rotan dan teripang, Makassar dipandang sebagai pusat terpenting bagi pedagang yang membutuhkan rempah-rempah dan kayu cendana baik mereka yang berdagang di jaringan perdagangan Asia Selatan, Asia

50 Giplin (1987: 171).

51 Poelinggomang (2016: 112).

Timur, Asia Tenggara maupun dari Eropa. Untuk itu dukungan penduduk menjadi faktor terpenting untuk melakukan pelayaran niaga ke berbagai penjuru daerah produksi komoditas. Kegemilangan yang dicapai itu mengalami kesuraman dan kemunduran sejak kedatangan VOC dan kekalahan Makassar menghadapi kompeni dagang itu.

Walaupun berhasil menaklukkan Makassar, tidak mudah bagi VOC untuk menguasai jaringan perdagangan. Dengan kekuatan di laut yang besar dan jaringan perdagangan internasional yang luas, VOC belum mampu mematahkan jaringan perdagangan Asia yang telah berkembang sebelumnya. Menghancurkan satu pusat perdagangan ternyata tidak secara otomatis menguasai seluruh jaringannya. Dalam hal ini hancurnya satu pusat jaringan perdagangan selalu disusul oleh munculnya pusat-pusat perdagangan yang lain selama jaringan perdagangan itu masih ada. Penguasaan Belanda atas Makassar memprekondisikan muncul dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan baru, baik di Jawa (Banten), kawasan Sulu, Kutai, Banjarmasin, Riau, dan beberapa kota pelabuhan di Semenanjung Malaya.[52] Di pusat-pusat perdagangan yang baru itu, VOC belum memiliki kekuasaan untuk memaksakan monopolinya. Itu sebabnya VOC selalu memandang curiga terhadap pusat-pusat perdagangan itu yang dibayangkannya sebagai sarang penyelundupan dengan wilayah monopolinya di Maluku.[53]

Pada 1767, misalnya, Gubernur Makassar memerintahkan kepala pelabuhan Makassar untuk melakukan penyelidikan mengenai '*the collapse of our sales, and why it is that the native can obtain English goods in better quality and for a lower price than the Company is able to deliver*' (runtuhnya penjualan kami, dan mengapa orang pribumi mampu memperoleh barang-barang Inggris dengan kualitas yang lebih baik dan dengan harga lebih murah daripada yang perusahaan—dalam hal ini VOC— berikan).[54] Setelah melakukan penelitian, kepala pelabuhan Makassar melaporkan bahwa menurunnya perdagangan Makassar disebabkan oleh masuknya "barang-barang Inggris" (berupa tekstil India, opium, dan persenjataan yang dibawa oleh pedagang Inggris ke

52 Poelinggomang (1991: 40–3).

53 Sulistiyono (2008).

54 Heather Sutherland & D.S. Bree dalam T. Ibrahim Alfian dkk, (1987: 339)

Selat Malaka) yang "diselundupkan" ke berbagai daerah dalam jumlah besar. Sementara itu, para pedagang dari Sulawesi Selatan—terutama orang Wajo dan Mandar—membawa kain lokal untuk dijual di Riau guna mendapatkan dolar Spanyol. Selanjutnya dolar Spanyol digunakan membeli barang-barang Inggris di Kedah dan Selangor.

Kelebihan orang-orang Bugis adalah bahwa mereka mengetahui selera pasar tekstil pada masyarakat Indonesia bagian timur, sedangkan Belanda selalu membawa tekstil dengan ukuran dan warna yang tidak laku di pasaran masyarakat pribumi. Juga dilaporkan bahwa para pedagang pribumi selalu menghindari pajak Belanda. Mereka lebih suka melakukan transaksi di pelabuhan-pelabuhan di luar kontrol Belanda. Hasilnya adalah bahwa mereka bisa menjual barang-barang impor tersebut lebih murah daripada yang dijual oleh VOC.[55] Dengan cara begitu perahu dagang Bugis selalu bisa memuat rempah-rempah dari Maluku untuk dijual di luar Makassar. Dengan demikian ternyata penaklukan Makassar tidak memudahkan VOC untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah Maluku. Bahkan VOC harus menghadapi lebih banyak pusat perdagangan yang setiap saat siap melakukan penyelundupan ke Maluku.[56]

Kegagalan VOC tersebut dikondisikan oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya ketidakmungkinan untuk melakukan pembatasan perdagangan ketika kombinasi motif mencari keuntungan dan faktor geografi menciptakan suatu dorongan untuk melakukan "penyelundupan" yang begitu kuat. *Kedua*, VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran. Hal itu bersumber dari sikapnya yang selalu berorientasi pada pencarian keuntungan yang tinggi, ketidakmampuannya dalam membangun jaringan pasar tingkat lokal, serta pengabaiannya atas selera pasar di tingkat lokal. *Ketiga*, keterlibatan VOC dalam pembelian produk lokal (seperti kain tradisional) sangat kecil. Demikian juga produk-produk laut juga diabaikan oleh VOC sehingga ketika produk ini mendapatkan pasaran yang hebat di Cina sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Eropa, VOC tak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi.[57]

---

55 Sutherland dan Bree dalam Alfian dkk. (ed.) (1987: 339).

56 Sulistiyono (2008).

57 Sutherland (1995: 138–9).

Dari perspektif tersebut tampaknya Belanda sedang "berenang melawan arus." Meskipun telah menegakkan politik monopolinya di Makassar, masih sedikit keuntungan ekonomi yang bisa diraih VOC. Sesungguhnya posisi komersial mereka di Makassar cukup marginal. Dalam hal ini sesungguhnya orang-orang Tionghoa yang banyak mengambil keuntungan dari penaklukan Makassar dan perginya orang-orang Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan.[58] Sejak perempat pertama abad ke-17 perdagangan dengan Cina (Amoy) meningkat tajam. Mereka mengimpor produk laut dan hutan seperti teripang, rotan, agar-agar, lilin dan mengekspor porselin, tembikar, barang-barang logam, dan sutra.[59]

Keadaan dunia niaga di Makassar mengalami kebangkitan kembali ketika teh produksi dari Cina mendapat perhatian yang layak di pasaran Eropa. Perniagaan teh mendorong VOC bergiat mempererat hubungannya dengan Cina sehingga pada abad ke-18 Makassar dibuka bagi kapal dagang Cina.[60] Kontak dagang di kawasan itu dengan Cina juga terjalin kuat akibat permintaan komoditas teh Cina yang terus meningkat dari Eropa ikut mendorong terjadinya dinamika perdagangan lokal. Berkembangnya pengiriman teh antara Inggris dan Cina menyebabkan permintaan produk laut meningkat—sebagai barter dengan teh.[61] Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya untuk melakukan perburuan terhadap kelompok sosial lain guna dijual sebagai budak, Mereka dijadikan budak untuk menangkap hewan-hewan laut untuk diekspor ke Cina.[62]

Tidak diragukan lagi orang-orang Bugis-Makassar ikut ambil bagian dalam dinamika itu.[63] Situasi tersebut memunculkan dua pusat niaga di kawasan bagian timur yaitu Ambon dan Banda untuk perniagaan rempah-rempah dan perniagaan produksi laut keramik Cina yang dipusatkan di Makassar.[64]

---

58 Tentang Perdagangan Cina di Makassar pada abad ke-17 hingga pertengahan pertama abad ke-19, lihat Sutherland (2000: 451–72).

59 Reid (1993: 13–32); lihat juga Sutherland (1995: 139).

60 Poelinggomang (1991: 142–3).

61 Warren (1998).

62 Warren (1998: 39–40); lihat juga Warren (1996: 21–3).

63 Anderson dalam Starkey, van Heslinga, de Moor (ed.) (1997: 87–9); lihat juga Sulistiyono (2003).

64 Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Poelinggomang (1991: 142–3).

Perkembangan aktivitas ekonomi Makassar mulai berubah ketika VOC mulai membuka hubungan niaga dengan Cina. Pada 1731, VOC mengizinkan jung (kapal) Cina berniaga ke Makassar untuk bisnis produksi laut dengan batasan hanya dua jung setiap tahun. Izin itu berakibat Makassar mulai dikunjungi jung Cina pada 1736. Setelah terbuka bagi jung Cina, Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan produk Cina dan produk laut. Produk laut berupa teripang, sisik penyu, agar-agar, dan kerang. Selain itu diperdagangkan komoditas lain yang dibawa oleh pelaut dan pedagang bumiputra seperti kayu cendana, lilin, dan sarang burung.

Bagaimana suasana kegiatan jual-beli antara pedagang Cina dan bumiputra di Kota Makassar masa lalu tergambar sebagai berikut.

> *Kota Makassar menjadi hidup ketika jung-jung berlabuh, dan kembali sunyi ketika orang Cina bertolak ke pelabuhan-pelabuhan lain, sehingga para pedagang melakukan pelayaran untuk menukarkan teripang dan sisik penyu dengan produk Cina di beberapa pelabuhan yang lebih menguntungkan.*[65]

Bergairahnya perdagangan antara Makassar dan Cina memunculkan istilah "pasar utama" atau *mata pasarra*. Kehadiran pedagang Cina berhasil mengubah suasana perdagangan karena *Negory Vlaardingen*[66] telah menjadi daerah permukiman pedagang Cina, dan menggeser kedudukan para pedagang Belanda dan Indo. Hal itu berdampak pula bagi hubungan dagang. Para pedagang Cina berhasil menjalin hubungan dagang yang baik dengan pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan di Makassar. Kelompok pedagang yang disebutkan terakhir itu dinyatakan selalu menepati janji dan cekatan dalam kegiatan perdagangan. Kedudukan VOC dalam monopoli rempah-rempah dan teh mulai mengalami ancaman ketika pedagang Inggris menaruh perhatian dalam perdagangan teh pada akhir abad ke-18. Perniagaan teh menuntut usaha memenuhi permintaan pedagang Cina.[67] Selain itu, akibat pembatasan jumlah jung, sehingga

65 Sutherland (1989: 106).

66 Pengertian istilah *Negory Vlaardingen* akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 7.

67 Christiaan G. Heering (1995: 125).

aktivitas pedagang dari daerah ini berpindah ke pusat perdagangan asing lainnya, terutama Singapura, setelah dibangun oleh Raffles pada 1819.

Selain komoditas perdagangan, dinamika ekonomi di Makassar juga diwarnai oleh peredaran berbagai mata uang sebagai alat tukar perdagangan pada masa itu. Kemunculan uang menggantikan sistem barter juga dapat dilihat sebagai suatu upaya penegakan kekuasaan melalui simbol hegemoni penggunaan mata uang secara luas di suatu wilayah. Di Makassar dapat dipastikan beredar berbagai macam mata uang yang digunakan oleh para pedagang, mulai dari uang koin kerajaan, uang Cina, hingga uang yang berasal dari orang Barat—*real* Spanyol, *duit* VOC, dolar Meksiko, dan sebagainya.

Asal-usul uang di Nusantara bermula dari perkembangan masif perdagangan di berbagai wilayah di Nusantara, khususnya Sulawesi, yang mengakibatkan permintaan akan sebuah medium tukar menukar secara berkelanjutan. Sebelum mengenal uang, perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar-menukar barang yang nilainya telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Akan tetapi sistem tersebut memunculkan beberapa kendala seperti ketidakpraktisan, terbatasnya barang yang dapat dibarter, dan membutuhkan ruang pengangkutan yang lebih besar. Untuk itu, ketika muncul sistem uang, dengan cepat uang menggantikan sistem barter yang dirasa tidak praktis.

Pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai mata uang dalam bentuk perak, tembaga dan timah yang merupakan barang dagangan paling penting yang mengalir ke wilayah Asia, termasuk Nusantara. Jika ditilik ke periode kerajaan, pada rentang abad ke-9 hingga abad ke-13, setiap kerajaan tradisional telah melakukan transaksi dagang dengan menggunakan uang. Setiap wilayah kerajaan tradisional memiliki mata uang sendiri.[68] Beberapa kerajaan seperti Kerajaan Kediri, Aceh dan Sulawesi memiliki uang logam dari emas; kerajaan di Bangka, Cirebon, Pontianak, Maluku dan Banten memiliki uang logam dari timah, perak dan tembaga.[69] Pada awal abad ke-14 kerajaan-kerajaan di Nusantara

68 Reid (1993: 96).

69 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Nusantara s.d. Abad Ke-20," https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_2.aspx (diunduh 13 September 2018; 10.00 WIB).

sudah menggunakan uang dalam sistem perdagangannya. Perdagangan di Nusantara menggunakan berbagai mata uang lokal. Di Jawa dikenal mata uang lokal *picis*, *kepeng*, *tail*, di Aceh beredar dirham, di Malaka digunakan *calais*.[70]

Di wilayah Sulawesi bagian selatan, terutama di Kesultanan Gowa-Tallo, beredar mata uang Kesultanan Gowa-Tallo yang disebut *jinggara*. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai uang ini. Uang itu dibuat dari bahan emas berbentuk bulat dengan diameter 15 milimeter, tebal satu milimeter, dan berat 0,6 gram. Pada bagian permukaan depan dan belakang uang itu bertuliskan huruf Arab. Tidak diketahui kapan uang itu beredar dan digunakan oleh masyarakat Makassar.

Gambar 1.5. Uang Jinggara yang beredar di Kesultanan Gowa-Tallo



Ket.Gambar: pecahan: dinara, bahan/bentuk: emas/bulat, berat: 0,6 gr, tebal: 1 mm, diameter: 15 mm, desain utama depan: huruf arab, belakang: huruf arab.

Sumber: Bank Indonesia (2015: 27)

Selain mata uang lokal, mata rantai perdagangan di Nusantara diramaikan oleh peredaran mata uang asing yang masuk dan digunakan sebagai alat pembayaran. Kedua jenis mata uang ini, baik lokal maupun mata uang asing, merupakan peletak dasar komersialisasi yang makin meningkat di kawasan Nusantara setelah tahun 1400. Salah satu mata uang asing yang sangat populer dalam mata rantai perdagangan Nusantara adalah mata uang Cina. Mata uang ini disebut uang *cash* tetapi orang Portugis menyebutnya *caixa* khususnya untuk mata uang tembaga

70 Reid (1993: 96).

Cina yang diekspor dan istilah tersebut juga digunakan oleh bangsa Eropa yang lain.[71] Sedangkan masyarakat Jawa menyebutnya dengan *picis.* Mata uang itu berbentuk bulat kecil mempunyai lubang persegi di tengahnya agar dapat diikat menjadi satu bundel senilai seribu *puon*, enam ratus atau jumlah lainnya yang lazim dilakukan pada waktu itu.[72]

Memasuki permulaan abad ke-16, hampir semua transaksi perdagangan di Jawa menggunakan mata uang *cash* milik Cina. Ketersediaannya yang banyak dan mudah ditemui serta diterima oleh banyak bandar perdagangan membuat mata uang Cina terkenal di bandar-bandar kepulauan yang lain seperti Malaka dan Pasai pada awal abad ke-16. Kepopuleran mata uang *picis* milik Cina semakin besar ketika larangan kaisar atas perdagangan Cina ke Selatan dihapus pada 1567 sehingga mengakibatkan arus masuk secara besar-besaran mata uang tembaga Cina. Akibatnya, banyaknya uang yang beredar membuat khawatir pejabat Cina sehingga pada 1590 di Guangdong dan Fujian dibuat mata uang tembaga baru campuran dengan timah yang murah untuk selanjutnya diedarkan. Pada 1596, melalui armada pertama Belanda, *picis* bermutu rendah ini beredar jauh ke pedalaman Jawa. Bermutu rendah, mata uang *picis* dari timah campuran itu mudah dipalsukan.

Kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16 turut memperbanyak jenis mata uang yang beredar di wilayah kepulauan Nusantara. Hal tersebut menyebabkan peranan mata uang lokal semakin terdesak karena beredar tanpa tatanan dan kontrol yang jelas dan teratur. Salah satu mata uang Bangsa Barat yang paling digemari secara luas adalah *Spaanse matten* atau *real* Spanyol. Pada abad ke-17 tidak ada mata uang lokal yang dapat bersaing dengan real Spanyol sebagai uang internasional. Uang itu segera menjadi satuan hitungan untuk transaksi internasional. Pada 12 Februari 1685, Gubernur Jenderal dan Dewan VOC di Batavia meminta kiriman uang kepada negeri induknya senilai 350.000 sampai 400.000 gulden; lebih disukai dalam bentuk *real* Spanyol, karena orang-orang Jawa, Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya lebih menyukai dan terbiasa menggunakan mata uang tersebut selama bertahun-tahun.

71 Feenstra (t.t.: 171).

72 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Nusantara s.d. Abad ke-20."

VOC yang berupaya memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara, kemudian meminta izin Raja Belanda untuk mencetak mata uang *real* baru dengan ukuran, berat dan kadar yang sama untuk menandingi popularitas *real* Spanyol. Sekitar awal abad ke-18, kedudukan *real* Spanyol tergeser dan mulai langka. Sesungguhnya VOC di Batavia tidak memiliki mata uang sendiri, dan membuat uang merupakan hak kedaulatan VOC yang pelaksanaannya secara ketat berada dalam pengawasan *Staten Generaal*. Tidak mudah untuk mencetak uang VOC sendiri karena penuh dengan regulasi dan persetujuan dari Heeren XVII.

Walaupun *real* Spanyol lebih populer sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, namun dalam penggunaan sehari-hari, uang *picis* Cina lebih digemari. Ketika menancapkan pengaruhnya di Jawa pada 1633, VOC melihat bahwa uang *picis* mudah ditemukan dan diperoleh dari pedagang Cina di Batavia. Mereka mengetahui uang *picis* bukan hanya diperoleh dari negeri Cina langsung melainkan bisa dibuat di Jawa, khususnya di Banten, Cirebon dan Jepara. VOC mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut dengan memberikan timah kepada orang Tionghoa untuk dibuat *picis* sehingga VOC bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Usaha ambil untung VOC tersebut terhenti ketika Inggris menyediakan timah dengan harga yang lebih murah. Setelah itu VOC beralih ke mata uang tembaga sebagai sarana dasarnya untuk memasuki perekonomian di Asia.[73]

Peredaran mata uang yang beragam juga memengaruhi nilai mata uang setiap wilayah sehingga ketika bangsa Eropa melakukan perdagangan di Nusantara mereka mengalami kesulitan bertransaksi menentukan harga. Hal itu terjadi karena dualisme penggunaan mata uang. Para pedagang Eropa, termasuk VOC, melakukan transaksi perdagangan menggunakan uang *real* Spanyol atau mata uang Eropa lainnya, sementara masyarakat pribumi menggunakan uang lokal sesuai dengan daerah masing-masing. Orang-orang Eropa menggunakan mata uang *real* Spanyol untuk transaksi yang berkaitan dengan barang-barang ekspor, sementara masyarakat biasa menggunakan uang lokal dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan transaksi perniagaan sehari-hari sehingga masyarakat pribumi tidak

73 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Nusantara s.d. Abad Ke-20."

pernah ikut terlibat dalam perdagangan yang bersifat internasional atau modern. Standar uang dalam perniagaan menjadi tidak baku antara pemerintah dengan masyarakat.

Pada umumnya, dalam bertransaksi sehari-hari, masyarakat perdesaan masih menggunakan uang *kepeng* atau *picis*, kekayaan orang desa lebih banyak disimpan dalam bentuk barang (emas) atau tanah. Investasi yang besar terhadap barang atau tanah mengakibatkan orang desa jarang memegang uang secara kontan.[74] Perbedaan dalam memandang uang membuat bumiputra terkalahkan oleh orang Eropa dalam persaingan perniagaan yang bersifat nasional apalagi internasional. Hal itulah yang menjadikan sebagian besar masyarakat bumiputra pada waktu itu hidup dalam dualisme ekonomi yaitu barter dan pasar.[75]

Kerumitan mata uang dalam bertransaksi dagang yang dirasakan VOC di wilayah Nusantara melahirkan ide untuk menggunakan mata uang tunggal.[76] Merasa bahwa mereka membutuhkan mata uang sendiri, serta untuk menandingi *picis* Cina pada awal abad ke-18, VOC mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan *duit* sebagai alat pembayaran sah menggantikan *picis* atau *cash*.[77]

Dalam kurun waktu 1724 hingga 1795, VOC mengirimkan lebih dari 1,1 miliar koin tembaga pecahan kecil *duit* (Bahasa Belanda: *doit*) ke Jawa, dikapalkan langsung dari Negeri Belanda. Impor uang pecahan kecil dalam skala besar itu terlihat ganjil karena koin-koin itu terlalu kecil sebagai alat pembayaran perdagangan kompeni yang amat besar, yang biasanya dibayarkan dengan *real* Spanyol. Strategi VOC mencetak dan mengirimkan uang dalam pecahan kecil tampaknya sebagai kebijakan penetrasi moneter untuk memperluas penggunaan koin VOC dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti berdagang di pasar, untuk menyaingi kepopuleran *picis* Cina.[78]

---

74 Creutzberg dan van Laanen (1987).

75 Creutzberg dan van Laanen (1987).

76 Lombard (2005: 149).

77 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Nusantara s.d. Abad Ke-20."

78 Feenstra (t.t.: 153–4).

Gambar 1.6. Koin *duit* VOC yang beredar di Nusantara



Ket. Gambar: pecahan: 1 duit, tahun: 1745, bahan: tembaga, bentuk: bulat, berat: 1,7 gr, tebal: 1 mm, diameter: 20 mm, desain utama depan: lambang provinsi Holland, belakang: bunga & monogram VOC.

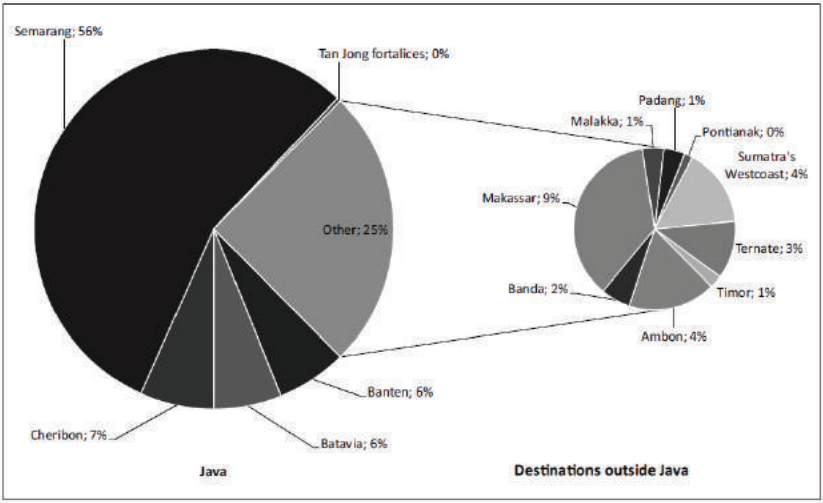
Sumber: Bank Indonesia (2015: 38)

Pengiriman pertama koin *duit* pada 1720 bertujuan mempermudah sistem pembayaran di wilayah kekuasaan VOC. Wilayah edar pertama koin VOC adalah Batavia pada 1724. Setelah mendapatkan respon positif dari masyarakat Batavia, VOC berupaya memperluas distribusi koinnya ke beberapa tempat lain di Jawa sejalan dengan ekspansi teritorial kompeni. Pada 1733, VOC memperkenalkan *duit* di Keresidenan Priangan. Kemudian, pada pertengahan abad ke-18, mayoritas *duit* serupa dikirim ke kantor VOC di Semarang yang juga bertindak sebagai pintu gerbang pengiriman ke pedalaman Jawa, seperti wilayah Kerajaan Mataram.[79]

Tidak seluruh *duit* milik VOC diedarkan di Pulau Jawa, sekitar 25% dikirim ke luar Jawa. Pada 1770, misalnya, sekitar 9% koin VOC itu dikirimkan ke Makassar dari Jawa. Perbandingan sirkulasi *duit* VOC antara Jawa dan luar Jawa (1770–80) terlihat pada grafik 1.1.

79 Feenstra (t.t.: 157).

Grafik 1.1. Sirkulasi distribusi *duit* VOC di Nusantara 1770–80



Sumber: Feenstra (t.t.: 159).

Selain mengimpor dari Negeri Belanda, VOC pernah mencetak mata uangnya di Jawa karena pengiriman koin dari Negeri Belanda tersendat akibat perang di Eropa. Selain itu, pertimbangan VOC berdasar faktor keamanan berhubung banyak ditemukan kasus penyelundupan koin ke Jawa untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang amat merugikan VOC.[80]

Pada 1743, VOC memperoleh hak mencetak uang dari Susuhunan Mataram untuk selanjutnya mengedarkannya ke wilayah VOC lainnya. Pada praktiknya, VOC hanya dua kali mencetak koin di Jawa yakni pada 1764 dan 1783. Selebihnya, koin VOC didatangkan dari Negeri Belanda.[81] Sumber lain mengatakan bahwa pada 1744 VOC telah mencetak *duit* di Jawa dengan berdirinya pabrik uang VOC di Batavia. Pembangunan pabrik uang itu diprakarsai oleh Gubernur VOC Baron van Imhoff yang

80 Feenstra (t.t.: 155).

81 Feenstra (t.t.: 160).

mengadakan kesepakatan dengan Sunan Mataram Pakubuwana I. Akan tetapi, percetakan itu tidak dapat berjalan dengan baik sehingga ditutup.[82]

Produksi uang dan pengiriman ke Jawa secara masif dilakukan oleh VOC dengan tujuan memopulerkan penggunaan *duit* di kalangan masyarakat Nusantara. Hal itu mendatangkan hasil positif bagi VOC karena secara perlahan-lahan mampu mengalahkan *picis* Cina pada 1763. Sementara itu, keberadaan mata uang lokal juga semakin terpinggirkan karena kepopuleran *duit* VOC. Perlahan-lahan mata uang lokal di berbagai wilayah di Nusantara digantikan oleh *duit* yang diproduksi oleh VOC.[83] Tidak diketahui apakah kepopuleran *duit* VOC dan meredupnya *picis* Cina serta mata uang lokal akibat pemaksaan ataukah terjadi secara alamiah sehingga masyarakat meninggalkan mata uang lainnya.

Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Internasional Makassar Abad ke-19

Setelah kekuasaan VOC runtuh pada 1799, wilayah Hindia Belanda diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan perekonomian demi mendapatkan keuntungan yang besar atas tanah jajahan. Kebijakan yang paling masif dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Kebijakan Tanam Paksa di Jawa pada 1830 hingga 1870. Dari kebijakan tersebut, pemerintah kolonial memperoleh keuntungan luar biasa dari Tanah Jawa.

Ketika di Jawa pemerintah memberlakukan kebijakan yang mengikat dan mengekang melalui Tanam Paksa, cara yang ditempuh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Makassar justru sebaliknya. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang membuka kesempatan dan peluang sebesar-besarnya bagi dinamika perdagangan maritim di wilayah

82 Lombard (2005: 149).

83 Feenstra (t.t.: 172).

ini. Pemerintah menerapkan kebijakan "pelabuhan bebas" pada 1847.[84] Sejak itu, politik ekonomi yang monopolistik dihentikan dan diganti dengan kebijakan ekonomi liberal.

Status "bebas" pada pelabuhan Makassar dimaksudkan untuk menghidupkan kembali perdagangan Kota Makassar sehingga menjadi rangsangan penting bagi perdagangan Sulawesi Selatan. Tujuan utama kebijakan itu untuk menyaingi kemajuan Pelabuhan Singapura milik Inggris yang lebih banyak didatangi dan disenangi pedagang asing daripada pelabuhan milik Belanda.

Dalam kebijakan pelabuhan bebas tersebut sistem cukai impor dan ekspor termasuk cukai lain dihapuskan. Kapal jung Cina dan berbagai kapal asing lainnya secara bebas diterima di Pelabuhan Makassar. Lalu lintas Makassar dengan daerah pinggirannya dibebaskan dari pajak atas komoditas, meskipun kapal-kapal asing hanya diizinkan membeli produk pedalaman di ibu kota wilayah, seperti Manado, Kema, Kaili, Ternate, Ambon dan Banda. Setahun sebelum pelaksanaan perdagangan bebas para pegawai pelabuhan dan pedagang tampak ceria memandang ke Selat Makassar melihat kapal-kapal Inggris dan perahu bumiputra berbendera Belanda yang sedang berlabuh. Kapal-kapal itu besar kemungkinan berasal dari Jawa dan Singapura.[85]

Dampak positif dari kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas segera terasa. Setelah 1847, bermunculan beberapa perusahaan dagang Eropa yang membuka usahanya di Kota Makassar. Perusahaan-perusahan itu mulai membeli produk seperti kopi, teripang, dan komoditas lainnya untuk diekspor ke Eropa. Dalam kurun 1847-1873 volume perdagangan Makassar naik lebih cepat daripada Singapura.

---

84 Pelabuhan bebas, seperti yang dilaksanakan Inggris di Singapura, adalah pelabuhan yang bebas dari semua beban pajak perdagangan, tidak dibenarkan adanya pemberian hak-hak istimewa kepada pedagang dan pengusaha tertentu, larangan berniaga komoditas tertentu, formalitas yang menghambat dan menghidupkan keadaan persaingan bebas. Sementara "pelabuhan bebas" di Makassar merupakan pelabuhan bebas yang bersyarat. Meski demikian, Makassar tetap mengalami kemajuan yang pesat akibat penerapan kebijakan tersebut.

85 *Javasche Courant*, 22 Mei 1847; lihat juga Poelinggomang (2016: 93–9); Christiaan G. Heersink, (1995: 98).

Dominasi Singapura dalam perdagangan di Timur Besar (*Groote Oost*) boleh dikatakan telah dipatahkan ketika pusat perdagangan mulai bergeser ke Makassar. Dapat dilihat bahwa terdapat dua faktor penting mengapa ekonomi Makassar kembali mampu menyaingi Singapura. Pertama, faktor politik berupa keberhasilan ekspansi kekuasaan Belanda ke berbagai wilayah di Indonesia Timur yang ditandai dengan penaklukan semua pulau—termasuk Papua Nugini—dan seluruh Sulawesi, dan kepulauan Sunda Kecil pada dekade pertama abad ke-20. Untuk jangka pendek jumlah perahu yang singgah di Pelabuhan Makassar juga bertambah. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut tidak berlangsung lama akibat kemajuan Singapura yang semakin masif. Hal itu menyebabkan Makassar tidak mampu lolos dari hegemoni perdagangan Singapura dan tidak pernah mencapai kedudukan yang lebih penting sebagai pelabuhan transito.

Faktor kedua, keberhasilan Pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan pelayaran (barang dan orang) ke berbagai wilayah di Hindia Belanda. Munculnya teknologi uap yang mengubah wajah perdagangan maritim dengan kapal-kapal uap menunjukkan dimensi baru bagi perdagangan Hindia Belanda yang memungkinkan pengangkutan terjadwal tanpa hambatan menurut irama musim. Pada 1842, Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij (NISM) memulai kerjanya dengan dua kapal baru. Pada mulanya hanya melayari dua jalur utama yaitu Batavia–Padang dan Batavia, Surabaya–Makassar. Kemudian pada 1852 ditambah satu jalur, yaitu jalur Makassar, Ambon, Ternate, Manado. Jalur-jalur tersebut dilayari satu hingga dua kali sebulan.

Pada 1869, perdagangan semakin meningkat dampak pembukaan Terusan Suez. Itulah sebabnya pada 1875 jalur NISM diperluas di sepanjang pantai Kalimantan Timur, Sulawesi bagian barat, Maluku, Nusa Tenggara. Perluasan jalur pada 1880 menambahkan jumlah pelabuhan yang dikunjungi yaitu jalur yang menghubungkan Surabaya dan Makassar, pantai utara dan barat Sulawesi. Selain itu terdapat jalur yang menghubungkan Makassar dan Kepulauaan Sunda kecil dan berbagai jalur kecil di Sulawesi Selatan serta terdapat jalur yang menyinggahi Sinjai, Palopo, Kendari, Selayar dan Makassar.

Pada pertengahan abad ke-19, ketika perkebunan di Jawa mengalami perkembangan pesat di bawah Sistem Tanam Paksa, di wilayah lain justru terjadi sebaliknya. Di Maluku, yang pada periode sebelumnya merupakan daerah primadona bagi Belanda, mulai terasakan terjadi penurunan ekonomi yang signifikan. Untuk menggairahkan ekonomi di kawasan Timur Besar pada pertengahan kedua abad itu, pemerintah membentuk pelabuhan bebas di Makassar pada 1847 dan melepaskan monopoli atas rempah-rempah pada 1864.

Kebijakan Pemerintah Belanda terkait pembukaan pelabuhan bebas di Makassar (1847) adalah sebagai berikut.

1. Perahu besar yang tiba di Makassar dari pantai-pantai, bebas dari semua cukai impor barang kerajinan penduduk.
2. Perahu besar yang meninggalkan ibu kota Makassar sepenuhnya dibebaskan cukai ekspor bagi barang-barang yang dibeli di Makassar asalkan ada penyampaian bahwa muatan barang itu akan dibawa ke pelabuhan pantai di sekitar Makassar.
3. Perahu yang berangkat ke pulau-pulau di bawah wewenang pemerintah.
4. Teripang dan agar-agar akan dibebaskan dari cukai impor. Semua perahu pantai akan dilengkapi dengan surat izin tahunan yang mereka bawa sesuai dengan aturan perdagangan di Makassar apakah untuk perdagangan atau menangkap ikan. Perahu yang berbobot setengah koyang atau kurang harus membayar 1 gulden dan perahu yang berbobot dua koyang sebesar 2 gulden. Perahu yang berbobot lebih dua koyang tidak digunakan bagi pelayaran pantai.
5. Semua perahu yang ditemukan tanpa surat izin akan disita.
6. Mereka harus memenuhi semua persyaratan, tetapi di tempat penyitaan tidak bisa membawa barang dari atau ke kapal perahu besar menuju pelabuhan dan tujuan bendahara penerima cukai impor dan ekspor.

7. Perahu yang tiba di Makassar dari pulau-pulau dibebaskan pembayaran cukai asalkan dilengkapi dengan surat izin bahwa cukai keluar telah dibayar.[86]

Kebijakan pelabuhan bebas Makassar ternyata tidak serta merta berjalan mulus. Kebijakan tersebut masih berlaku terbatas terutama bagi pedagang Eropa. Hal itu memunculkan berbagai tuntutan pedagang lain non-Eropa terutama pedagang Cina. Para pedagang Cina meminta kepada Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya (*Celebes Onderhoorigheiden*) untuk menurunkan pajak pelabuhan bagi kapal-kapal pantai (bukan kapal besar perairan samudra) agar perdagangan barang-barang yang didapat dari daerah-daerah pedalaman menjadi lebih bergairah. Pertama, pedalaman Bugis Makassar seharusnya dibebaskan dari semua pembayaran cukai ekspor dan impor, kecuali cukai impor akan dipungut dari tempat-tempat lain di luar Jawa. Kedua, tidak akan dipungut bayaran atas tempat-tempat barang itu diimpor dari ibu kota Makassar.

Untuk persaingan dengan pihak asing, terutama terkait pelayaran dan perdagangan internasional, pengangkutan barang di Sulawesi dengan kapal-kapal asing sangat penting sejauh kapal-kapal itu diberikan izin dan diatur dengan ketat cara pelaksanaan perdagangannya agar tidak merugikan kapal-kapal pantai. Sejak dahulu pelayaran pantai di bawah bendera asing sering mengalami hambatan atau pembatasan. Undang-undang perkapalan 1850 dengan tegas mempertahankan pelayaran pantai menurut bendera nasional dan khusus bagi perahu pribumi, dan situasi merkantilisme lama tetap dipertahankan, yang pada 1818 kembali diterapkan untuk Jawa dan Madura, dan pada 1825 untuk wilayah lain (pelayaran pantai di Hindia Belanda dimuat dalam Traktat London, 17 Maret 1824). Namun penutupan terhadap kapal asing dalam pelayaran pantai mengalami penurunan tajam pada 1858 dengan suatu ketentuan yang dikeluarkan pada tahun itu, yang hanya mencakup pelabuhan-pelabuhan di daerah yang diletakkan di bawah pemerintahan Belanda. Pelabuhan-pelabuhan tradisional di wilayah swatantra (seluruhnya jauh lebih luas daripada daerah yang diperintah secara langsung) sejak itu tidak lagi berada di bawah larangan pelayaran pantai asing. Ketentuan

86 ANRI, Laporan tentang Perdagangan Makassar, Besluit No. 10, 17 Juli 1824.

itu perlahan-lahan meluas pada pertengahan kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika pemerintah Hindia Belanda memperluas kekuasaannya dan menempatkan lebih banyak daerah di bawah pemerintahan langsung dengan dampak sebagian bisa diatasi karena lebih banyak pelabuhan bagi perdagangan umum dan juga bagi kapal-kapal milik negara-negara sahabat dan sejumlah besar dari pelabuhan itu dibuka untuk pelayaran pantai asing.

Dalam panji-panji liberalisme yang berkembang di Negeri Belanda, dan sejalan dengan semangat Etis yang melanda Hindia Belanda, maka pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial memperluas pembukaan pelabuhan bebas di berbagai wilayah lain di Hindia Belanda. Sekitar 1910, pelabuhan yang dibuka bagi perdagangan bebas mencakup 17 pelabuhan di Jawa, 20 di Sumatera, 10 di Borneo. Sementara di wilayah Timur Besar, selain Makassar pelabuhan bebas lain yang dibuka hingga 1906 adalah Manado, Kema, Amurang, Kwandang, Ternate, Ambon, Banda, Merauke, Dobo, dan Tual, Kupang, Ampenan serta Labuhan Haji di Lombok, Buleleng dan Benoa di Bali.

Kapal-kapal asing bisa datang ke Hindia Belanda dan membongkar serta memuat barang, namun hanya berhubungan dengan lalu lintas internasional. Sementara yang termasuk pelabuhan "pribumi" yakni di daerah yang tidak diperintah langsung selain berbagai pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatera dan Borneo, termasuk Taruna dan Siau di Kepulauan Sangir, kota-kota pantai penting di Teluk Tomini (Gorontalo) dan Sulawesi Timur serta Selatan dan Kepulauan Banggai, Fakfak dan Manokwari di Papua Nugini, dan sebagian besar pelabuhan di kepulauan Sunda Kecil. Kapal-kapal asing di sini juga menangani pelayaran pantai. Mereka bisa dengan jadwal khusus melayani pelayaran menuju Makassar, Ambon, Banda, Ternate, Manado, Kema, Riau, Sabang, Stagen, Pontianak, Sambas, Bali dan Lombok yang kebanyakan sebelumnya merupakan pelabuhan bebas. Pelabuhan lain dan daerah pantainya termasuk sejumlah besar kota kecil tetap tertutup untuk kapal asing. Hanya kapal di bawah bendera nasional dan perahu pribumi yang bisa datang Hindia Belanda untuk mengangkut produk dan menyebarkan barang-barang impor.

BAB II
DE JAVASCHE BANK, INTEGRASI, DAN EKSPANSI (1864 – 1930)

Masa pergantian abad dari abad ke-19 ke abad ke-20 merupakan sebuah masa titik tolak penting dalam perjalanan sejarah Makassar. Periode ini merupakan masa transformasi ekonomi hingga membawa Makassar menjadi salah satu wilayah perdagangan terpenting di Hindia Belanda. Pada saat itu Makassar menjelma menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di kawasan Timur Besar (*Groote Oost*) akibat dari perdagangan berbagai komoditas hasil bumi Makassar. Komoditas penting yang berhasil mengubah perekonomian Makassar dan sekitarnya adalah kopra.

Kopra menjadi komoditas andalan yang dipasarkan ke berbagai wilayah di dunia. Permintaan yang tinggi akan kopra membuat harga komoditas ini melambung dan mendatangkan keuntungan luar biasa bagi Makassar. Perkembangan ekonomi yang sangat masif ini membuat kebutuhan akan kehadiran lembaga perbankan pada wilayah Makassar terutama untuk kebutuhan akan uang dan pembiayaan kredit modal. De Javasche Bank (DJB) *Agentschap* Makassar sebagai salah satu kantor cabang DJB di luar Jawa kemudian hadir untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kehadiran De Javasche Bank berhasil menstimulus perekonomian yang kemudian mengantarkan Makassar pada masa puncak kegemilangan ekonomi pada dekade kedua abad ke-20. Apa saja peranan yang diberikan

DJB *Agentchap* Makassar dalam mengembangkan perekonomian akan dibahas secara komprehensif pada bab ini.

Kebangkitan Perdagangan di Makassar Hingga Awal Abad ke-20

Perdagangan yang semakin masif di wilayah Makassar mengantarkan bandar tersebut menjadi bandar niaga terbesar dan tersibuk di wilayah Timur Besar. Berbagai komoditas dagang hilir mudik masuk dan keluar dari Makassar. Salah satu komoditas yang pada perkembangannya mengantarkan Makassar menjadi bandar utama perdagangan wilayah Timur Besar adalah kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan untuk dimanfaatkan menjadi beberapa produk kebutuhan sehari-hari.

Gambar 2.1. Daging Kelapa yang telah dikeringkan atau Dikenal Sebagai Kopra



Sumber: www.indotrading.com

Cara pembuatan kopra biasanya dilakukan dengan bantuan sinar matahari sebagai prioritas utama. Hal itu bertujuan untuk mengurangi munculnya jamur pada daging kelapa. Dalam pengeringan daging kelapa yang diutamakan adalah lapisan bawah atau atas harus benar-benar kering. Daging kelapa yang dikeringkan melalui pengasapan sebaiknya tidak tersentuh api guna menghindari noda-noda hitam. Api harus selalu dijaga untuk mencegah terlalu banyak asap, apalagi sampai terbakar. Kopra harus benar-benar kering sebelum meninggalkan tempat pengeringan, sebab jika kopra masih lembab maka ia segera berjamur. Kopra harus ditimbun di tempat-tempat yang terkena cukup udara dan cahaya.

Gambar 2.2. Penimbunan Buah Kelapa Untuk Dikeringkan Menjadi Kopra



Sumber: KITLV

Sesungguhnya perdagangan kelapa sebagai komoditas telah lama terjadi, meskipun pemanfaatannya terbatas pada minyak goreng, bahan

alat masak, dan bahkan sebagai pelengkap emas kawin. Tanaman kelapa baru mendapat perhatian serius sebagai komoditas dagang setelah minyak nabati amat dibutuhkan dalam pembuatan sabun dan mentega pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1873, Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) di Amsterdam mulai menerima kopra.[87] Namun ketika itu pasar merespon tidak terlalu baik karena pemakaiannya yang masih terbatas sebagai minyak goreng dan minyak pelumas saja. Ketika pemakaian kopra semakin meningkat, koloni-koloni lain mulai tertarik dan menjajaki kemungkinan untuk mengembangkan tanaman kelapa, di antaranya adalah Inggris yang mengembangkan tanaman kelapa di Ceylon dan Semenanjung Malaya. Begitupun Spanyol yang menjadikan Filipina sebagai pusat penanaman pohon kelapa.

Di wilayah Sulawesi Selatan, pohon kelapa tumbuh hampir di semua wilayah seperti Selayar, Sinjai, Bonthain Bulukumba, Luwu, dan Mandar. Dalam tahun 1875 jumlah tanaman di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 755.500 pohon. Di tahun yang sama jumlah pohon kelapa di Manado sebanyak 605.400 pohon, di Ambon sebanyak 507.349 pohon, dan Gorontalo sebanyak 261.950 pohon.[88]

Bagi penduduk Sulawesi Selatan, kopra telah menjadi tanaman penting khususnya pada tahun 1880an ketika pedagang-pedagang Cina menjadikannya sebagai komoditas perdagangan ke Singapura. Sekitar 60% nilai ekspor Makassar berasal dari kopra. Dari jumlah total ekspor kopra di kawasan Timur Besar (*Groote Oost,* Kawasan Indonesia Timur saat ini) 80% diekspor dari Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika J.C. Westermann dan W.C. Houek mengatakan bahwa pada fase kedua abad ke-20 Makassar muncul sebagai kekuatan perdagangan Asia Pasifik berkat perdagangan kopra.[89]

Perkembangan perdagangan kopra semakin maju terutama ketika pada tahun 1906, Residen Belanda di Makassar memerintahkan agar penanaman pohon kelapa terus dikembangkan di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah yang belum tergarap diharapkan agar ditanami tanaman

87 Reyne dalam Hall dan Van de Koppel (ed.) (1948: 429).

88 *Kolonial Verslag* (1875); Van der Stok (1866).

89 Lihat pernyataan Westermann (1941: 316); dan Houck (1917/18: 125–34).

kelapa. Pemerintah mendatangkan bibit kelapa dari Pulau Selayar atau daerah-daerah yang telah lama menanam kelapa seperti daerah Mandar, Palopo, dan wilayah-wilayah di pesisir timur Teluk Bone. Perluasan tanaman kelapa itu juga mendapat dukungan dari raja-raja setempat, bahkan dituangkan dalam Keputusan Residen (*Gouvernements besluit*) Residen Celebes dan Daerah Taklukannya tertanggal 8 Maret 1906.[90]

Peningkatan perdagangan kopra tidak akan lepas dari kemapanan jaringan perdagangan internasional yang membuat masyarakat Eropa mampu mendapatkan kopra asal Hindia Belanda, terutama Makassar. Fernand Braudel (1966) dan K.N. Chauduri (1989) menekankan bahwa jaringan geografis sangat memengaruhi terbentuknya perdagangan. Perdagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah perdagangan antar pelabuhan, pulau, dan lintas benua. Model-model perdagangan tersebut membentuk sebuah ikatan sinergis antara peningkatan ekonomi suatu tempat dengan tempat lainnya akibat dari perdagangan yang terjadi. Untuk itu, jalur-jalur perdagangan amat berpengaruh pada peningkatan ekonomi suatu wilayah.[91]

Di Makassar, peningkatan ekonomi yang masif akibat perdagangan kopra turut membuat banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuka jalur perdagangan dan pelayaran ke kota tersebut. Untuk mendukung perdagangan antar pulau, sejumlah pelabuhan di luar Makassar menampung komoditas ekspor yang kemudian sewaktu-waktu dikapalkan untuk diekspor melalui pelabuhan Makassar. Pelabuhan-pelabuhan itu merupakan pelabuhan penyangga seperti Manado, Donggala, Selayar, Ternate, Ambon, Majene, Timor, Bali, Balikpapan, Pare-pare dan Palime. Tujuannya adalah untuk menampung komoditas-komoditas hasil ekspor seperti kopra, rotan, dan kopi. Dalam tahun 1883 untuk pertama kalinya kopra diumumkan dalam statistik kolonial sebagai produk ekspor. Menurut laporan kolonial 1883, sejak tahun 1880 di Minahasa, Gorontalo, Pantai Barat Sulawesi, Pesisir Teluk Bone, Selayar, Kalimantan Barat, Sumatera

90 Lihat Gouvernements Besluit Resident Celebes dan Daerah Taklukannya, 8 Maret 1906, No. 166. Dalam salah satu isi keputusan tersebut menjelaskan bahwa penduduk pribumi diberi kebebasan untuk melakukan penanaman kelapa dengan kontrak politik serta hasilnya dibagi dua, setengah masuk ke Pemerintah Belanda dan setengahnya masuk ke kas daerah.

91 Lihat Braudel (1966); Chauduri (1989).

Barat, dan Maluku penduduknya telah membuat kopra untuk tujuan ekspor.[92]

Jumlah kopra yang dikirim pertama ke Eropa adalah pada tahun 1873, dan hasilnya belum cukup berarti bagi Makassar karena kapal-kapal tidak menjangkau daerah pedalaman sehingga muatan yang berhasil dikirimkan ke Eropa menjadi tidak banyak. Selain karena terbatasnya pengangkutan kopra baik yang terjalin antar pulau, maupun pengangkutan internasional, juga karena pedagang-pedagang Cina dan perahu pribumi tidak bisa memiliki modal yang besar untuk melakukan ekspor ke Eropa, terlebih lagi mereka tidak mampu memutuskan hubungannya dengan Singapura yang selama ini telah terjalin.

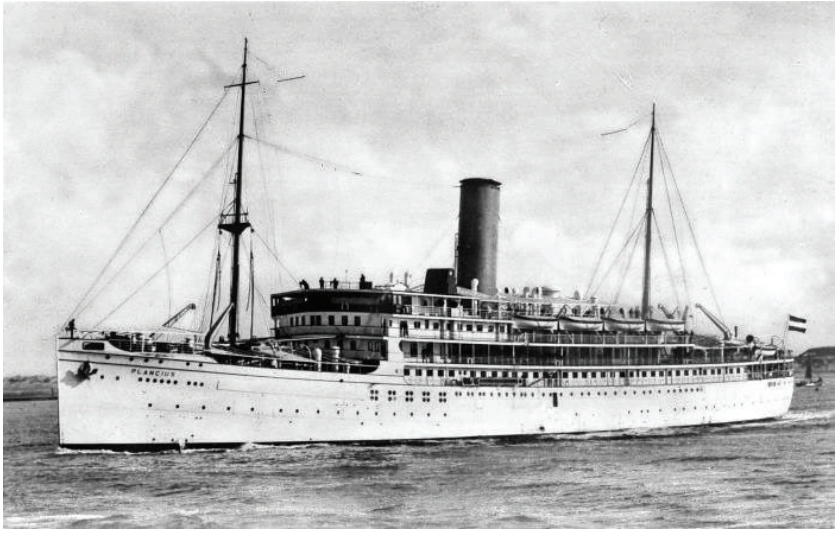
Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan kebijakan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan pengangkutan swasta seperti Perusahaan Cores de Vries. Namun perusahaan yang diharapkan mampu mengatasi pengangkutan, tidak berjalan dengan baik di bawah pengaruh arus perkapalan Makassar-Singapura yang sebelumnya telah mapan. Ekspor kopra ke Eropa baru mulai berarti ketika pemerintah kolonial mendirikan Koninklijk Paketvaart Maatschappaij (KPM) yang mulai beroperasi tahun 1891. Pengangkutan kopra dari berbagai wilayah di Indonesia Timur ditata kembali. Jangkauan sarana pengangkutan KPM membuat Makassar makin penting dalam niaga-antar pulau. Hal itu mendorong ekspor kopra dari Maluku dan Sulawesi Utara terus meningkat melalui Pelabuhan Makassar.

Sejak tahun 1880an permintaan minyak masak di Eropa meningkat tajam. Banyak perusahaan minyak mencari komoditas baru seperti minyak kopra yang mengandung lemak tinggi.[93] Mentega yang semula banyak memakai lemak dari hewani direproduksi kembali agar lebih banyak memakai lemak nabati. Itulah sebabnya dalam dekade awal abad ke-20 para negara imperialis menekankan pada pentingnya kopra dalam

92 *Kolonial Verslag,* (1883).

93 Persentese berbagai sumber jenis tumbuhan yang mengandung lemak tinggi adalah sebagai berikut: kopra 63%, minyak kapas 18%, kedelai 15%, kacang 36%, wijen 35%, benih biji-bijian 45%, butiran minyak kelapa 45%, benih rami 30%, kacang 46%, zaitun 20%. Untuk lebih jelasnya lihat Reyne dalam Hall dan Van de Koppel (ed.) (1948: 516). Lihat pula Lindblad dalam A.H.P. Clemens & J. Th Lindblad (eds). (1989: 7&14).

Gambar 2.3. Kapal Plancius dari Koninklijk Paketvaart Maatschappaij (KPM). KPM Mulai beroperasi pada 1891 sebagai Tulang Punggung Transportasi Laut Pemerintah Kolonial.



Sumber: Koleksi Tropenmuseum

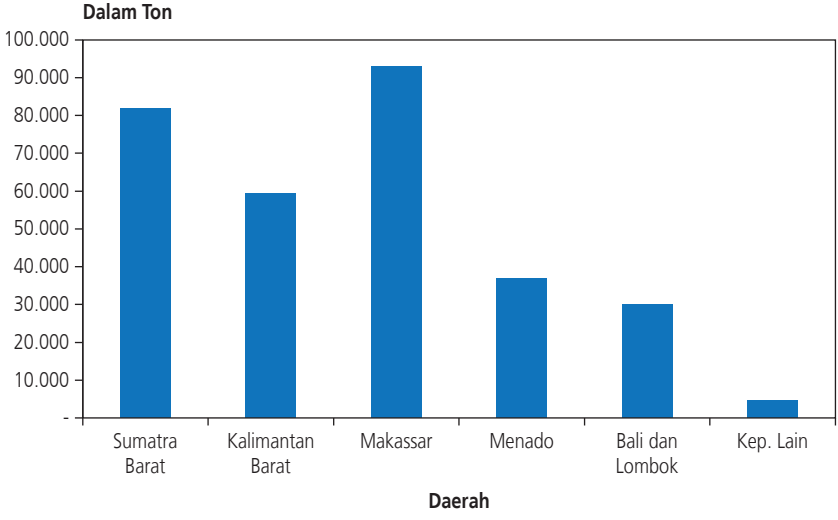
mengatasi kekurangan bahan-bahan dasar munculnya pabrik industri mentega dan sabun di negara-negara Eropa dan Amerika. Pemakaian mentega semakin meningkat dan telah menjadi makanan eksklusif bagi negara-negara industri. Selain itu, kopra juga digunakan dalam pembuatan sabun. Sabun pemakaiannya meningkat karena sebagai bahan dasar dalam pembuatan bom dalam menghadapi Perang Dunia I.[94] Sejak itulah kopra terus meningkat di wilayah-wilayah jajahan negara tropis, termasuk Hindia Belanda.[95]

94 Sabun bukan saja digunakan sebagai alat pencuci atau pembersih pada toilet-toilet tetapi juga sebagai bahan alat pembuatan bom, di mana pemakaian senjata semakin meningkat pada perang Dunia I. Untuk lebih jelasnya lihat laporan Arsip NHM Makassar, No. inv. 5112

95 AND, NHM Makassar No. INV 5112. Lihat pula J.H.R. Brouder, "Overzicht van de Handelsbewging van Manado over het 2 de kwartaal 1933. *Economisch Weekblaad*, 15 September 1933, hal, 446, Lihat pula *Departement van Economische Zaken* "Copra en Palmolie", tidak dipublikasikan, Desember 1937, hlm. 35-36.

Pada data tahun 1891, akibat dari derasnya permintaan kopra dari Eropa, terjadi peningkatan ekspor kopra ke Eropa secara signifikan. Pada tahun tersebut, Makassar menjadi daerah pengekspor kopra tertinggi yakni sebesar lebih dari 90.000 ton dibandingkan dengan daerah lain seperti Sumatera Barat (80.000 ton), Kalimantan Barat (60.000 ton), Manado (38.000), Bali dan Lombok (30.000 ton), serta kepulauan lain di Hindia Belanda (5.000 ton). Perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 2.1. Ekspor Kopra di Beberapa Wilayah Hindia Belanda pada Tahun 1891

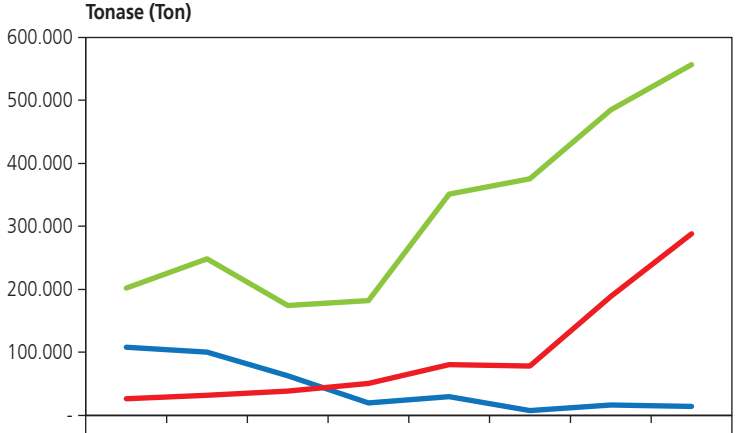


Sumber: Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar over het Jaar 1891-1905.

Pada permulaan abad ke-20, komoditas primadona utama dalam perdagangan adalah kopra. Dalam data berikut, terlihat perbandingan antara ekspor kopra Makassar dengan Jawa dan ekspor Hindia Belanda secara keseluruhan. Terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah ekspor Makassar secara signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dari grafik berikut terlihat ekspor kopra Makassar berhasil mengalahkan ekspor kopra dari

Jawa pada tahun 1920 yang secara signifikan mengalami penurunan jumlah ekspor dari 63.100 ton pada 1917 menjadi 19.600 ton pada tahun 1920. Sementara ekspor kopra Hindia Belanda secara keseluruhan mengalami kenaikan yang luar biasa terutama akibat kontribusi besar ekspor kopra dari Makassar. Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2. Ekspor Kopra dari Jawa, Makassar, dan Hindia Belanda Tahun 1905-1938



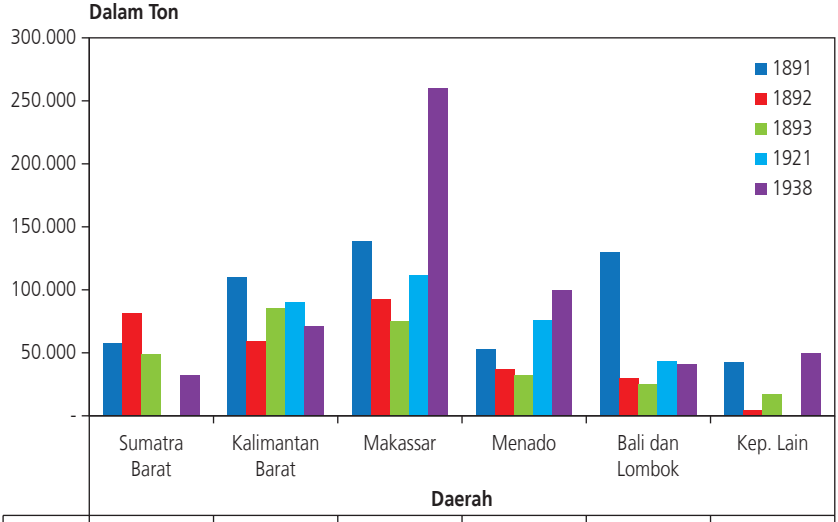
	1905	1910	1917	1920	1925	1930	1935	1938
Jawa & Madura	107,70	100,50	63,100	19,600	29,900	7,400	16,600	14,300
Makassar	26,200	31,300	37,900	50,700	80,500	78,400	188,40	288,10
Hindia Belanda	202,00	248,10	174,80	182,10	351,30	375,70	485,50	556,50

Sumber: NHM Makassar (1905-1938) No. Inv. 5112-5113; F.W.T. Hunger. *Cocos Nucifera: Handbook voor De Kennis van den Cocos-Palm in Nederlandsche Indie, Zijn Eeschiedenis, Beschrijving, Cultuur, and Production*. Amsterdam: Scheltema & Holkema's Bookhandel, 1916, hlm. 124; *Jaarverslag van de Handelsvereniging* Makassar, 1905-1940; J.H. R. Broeder "Kwaliteits verbetering van Copra" dalam *Economisch Weekblad* 11 November 1932, hlm. 712.

Sementara itu, data lainnya memperlihatkan ekspor kopra pada tahun 1891-1938 yang terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Manado, Bali dan Lombok, serta Kepulauan lain. Terlihat dari grafik ini bahwa ekspor kopra dari wilayah-wilayah tersebut

didominasi oleh kopra asal Makassar. Terlihat bahwa sejak tahun 1891 Makassar menjadi wilayah terbesar pengekspor kopra dibandingkan dengan wilayah lain. Puncak dari ekspor Makassar adalah tahun 1938 pasca krisis ekonomi *Malaise* yakni mencapai lebih dari 250.000 ton, atau lebih dua kali lipat hasil ekspor Manado yang menjadi peringkat kedua yakni sebesar 100.122 ton di grafik tersebut. Data lengkap dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.3. Ekspor Kopra di Beberapa Wilayah Hindia Belanda pada Tahun 1891-1938



	Sumatra Barat	Kalimantan Barat	Makassar	Menado	Bali dan Lombok	Kep. Lain
	Daerah					
1891	57,600	109,600	138,400	53,000	130,250	42,850
1892	81,800	59,500	93,000	37,000	30,000	4,700
1893	49,200	85,300	75,200	32,100	25,200	17,000
1921	-	90,213	111,792	76,257	43,231	-
1938	32,000	71,000	260,000	100,122	41,241	50,118

Sumber: Jaarverslag Handelsvereeniging Makassar (1905-1948); Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar over (1891-1905).

Puncak dari harga kopra di pasaran dunia terjadi pada tahun 1920. Jumlah ekspor kopra dari Makassar mencapai 50.792 ton dengan nilai 13.713.840 gulden. Manado berada pada posisi kedua, yaitu 46.250 ton dengan nilai 12.487.500 gulden. Kalimantan Barat 39.722 ton dengan nilai 10.724.940 gulden dan Sumatera Barat 19.234 ton dengan nilai 5.192.910 gulden.[96] Secara keseluruhan nilai ekspor kopra dari empat wilayah tersebut mencapai 42.119.190 gulden di luar Jawa dan Madura. Walaupun secara kuantitas ekspor masih kalah dengan periode sebelumnya, namun secara harga karena permintaan yang tinggi menyebabkan harga kopra naik, sehingga pendapatan ekspor yang dihasilkan menjadi lebih besar.

Dalam pengangkutan kopra untuk diperdagangkan, komoditas itu banyak dibawa ke Makassar dari wilayah pedalaman yang selanjutnya di ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat melalui jalur pelayaran internasional. Untuk jalur Eropa, perkapalan itu banyak dilayani oleh perusahaan Nederlandsche Lloyd, Rotterdamsche Lloyd, Deutsch Australische Dampfschiff Gesellschaft (DADG), dan Ocean Steamship Company. Ketiga perusahaan tersebut melayani jalur rutin Makassar-Eropa dengan membawa kopra. Selain itu, untuk jalur Makassar-Singapura dilayani oleh KPM, Nord Deutsche Lloyd, Wilhelm, Ban Poh Guan, dan Nam Yong yang secara rutin mengunjungi pelabuhan Makassar.

Semakin maju dan berkembangnya teknologi pelayaran membuat pelabuhan Makassar semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang terutama kapal dagang asing. Pada tahun 1915, sebuah pelayaran baru dibuka untuk jalur Jawa-Cina-Jepang dan Jawa-Pasifik. Tujuannya adalah untuk membuka hubungan dagang antara Hindia Belanda, Filipina, Hongkong, Jepang, dan San Francisco. Dalam pelayaran tersebut, Pelabuhan Makassar disinggahi sebulan, seperti halnya Manila dan pantai barat Amerika Utara. Kapal-kapal yang melayani jalur itu adalah SS Tjikembang, Nederlandsche Lloyd, dan Rotterdamsche Lloyd.[97]

---

96 *Verslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar* (1897); *Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar Exporteurs Vereeniging Makassar* (1905-1938); *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar Jaarverslag* (1905-1915).

97 *Jaarverslag van de Kamer Koophandel en Nijverheid te Makassar over het jaar 1915*, hlm. 26-27.

Gambar 2.4. Iklan Perusahaan Pelayaran Rotterdamsche Lloyd Rute Rotterdam-Jawa



Sumber: www.dbnl.org

Pengembangan pelabuhan Makassar berdampak pada semakin ramainya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan Makassar. Kapal dan perahu setiap tahunnya bertambah, baik kapal Eropa maupun kapal-kapal pribumi. Perkembangan kedatangan kapal-kapal ke Pelabuhan Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perkembangan Armada Kapal Internasional yang Masuk di Pelabuhan Makassar 1905-1939

Asal Kapal	Jumlah Kapal (kiri) dan Total Muatan (dalam ton) (kanan)									
	1905		1913		1920		1930		1939	
Belanda	412	1.205.381	398	1621.564	413	2.371.032	735	5.783.335	820	1.366.309
Inggris	27	199.611	43	294.122	54	324.407	54	614.408	50	422.488
Jerman	20	75.990	27	78.934	29	140.665	30	425.007	24	223.333
Jepang	12	257.450	46	358.149	72	523.498	91	713.488	76	1.554.231
Norwegia	7	21.761	8	24.846	10	65.169	11	215.179	23	357.043
Total Kapal	478	1.760.193	522	2.377.615	578	3.424.771	921	7.751.417	993	3.923.404

Sumber: Jaarverslag (1905–1940a); Jaarverslag (1905–1940b); Jaarverslag (1921–1936); ANRI, Memorie van Overgave, No 22.

Meningkatnya dinamika perdagangan di Makassar secara langsung turut memengaruhi Makassar sebagai pusat perdagangan. Pola niaga yang pada umumnya dikuasai oleh orang Tionghoa memberikan wajah baru dalam struktur ekonomi, yang sebelumnya banyak dikuasai oleh pedagang lokal. Para pedagang Cina semakin memiliki peranan dalam pola niaga ini. Salah satunya adalah peranan mereka dalam menjadi perantara antara pemilik modal dengan para petani kelapa. Selain itu, pola lain dalam tata niaga di Makassar terkait dengan kerjasama perdagangan antara pengusaha dengan pemilik kapal. Kapal niaga yang disewa oleh pengusaha di Makassar terbuka untuk menanamkan sahamnya atau sebagai pemilik modal.

Selain kopra sebagai komoditas primadona, komoditas lain yang juga dihasilkan Makassar adalah beras. Beras digunakan sebagai bahan makanan pokok bagi masyarakat Sulawesi Selatan sehingga kemudian wilayah ini juga memiliki areal persawahan yang luas. Hasil beras yang

dihasilkan sebagian dikonsumsi masyarakat Sulawesi Selatan, kemudian kelebihannya diekspor ke berbagai wilayah. Pada pertengahan kedua tahun 1911 harga beras di pasar dunia mulai melonjak. Pada tahun 1911 harga beras berkisar 3.50 gulden sampai 8 gulden perpikul.[98]

Di wilayah Makassar dan sekitarnya, daerah penghasil beras di antaranya adalah Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai. Dari Sinjai selama ini di ekspor 24.331 pikul beras. Dari Bulu (Soppeng) pada bulan kedua di tahun 1913 diekspor sebanyak 5.747 pikul beras, yang senilai 32.631 gulden dan di tahun 1914 diekspor lagi 3.251 pikul beras. Daerah hasil produksi beras pada tahun 1920 adalah Pallime (Bone) yang menghasilkan beras 109.000 pikul, tahun 1921 beras berjumlah 146.631 pikul, pada tahun 1922 berjumlah 84.890 pikul beras dan selanjutnya pada tahun 1923 terdapat 64.192 pikul beras.[99]

Beras yang dihasilkan dari berbagai wilayah tersebut kemudian diekspor untuk kebutuhan negara lain maupun domestik. Data pada tahun 1910-1913 memperlihatkan ekspor beras dari Makassar ke negara-negara lain di sekitar Hindia Belanda yakni Portugis yang berada di Pulau Timor, Australia, dan Koloni Jerman di New Guinea. Dari data berikut terlihat bahwa ekspor terbesar di antara ketiga wilayah itu adalah ke wilayah Portugis-Timor yang mencapai puncaknya pada 1911 hingga hampir mencapai 500.000 kg beras. Sementara yang terendah adalah Australia yang hanya 3.000 kg beras pada 1913, dikarenakan beras bukan menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk Australia. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Data Ekspor Beras Makassar Menurut Negara Tujuan Tahun 1910-1913 (dalam kg)

Negara Tujuan	1910	1911	1912	1913
Portugis (Timor)	295.444	495.690	140.070	425.925
Australia	141.200	130.000	12.000	3.050
New Guinea-Jerman	131.240	28.800	115.250	186.011

Sumber: *Jaarverslag van de Kamer van koophandel en Nijverheid te Makassar over het jaar, 1910-1913*

98 Nahdia Nur, (2016:20)

99 *Ibid.*

Selain mengekspor ke negara lain, pengiriman atau ekspor beras juga dilakukan antar pulau di wilayah Hindia Belanda. Data berikut menunjukkan ekspor beras Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda pada tahun 1934-1935. Dari tabel berikut dapat dilihat wilayah terbesar penerima beras dari Makassar adalah Kalimantan yakni sebesar 154.980 ton pada 1934. Sementara wilayah yang menerima paling sedikit adalah Maluku yang hanya menerima sekitar 10.100 ton pada 1935. Lebih lengkap dapat melihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Ekspor Beras Makassar ke Berbagai Wilayah di Hindia Belanda 1934-1935 (dalam ton)

Tahun	Bali/Lombok	Jawa	Maluku	Manado	Kalimantan	Total
1934	16.440	58.190	12.280	12.240	154.980	254.130
1935	26.340	66.840	10.100	22.280	146.230	271.790

Sumber: *Memorie van Overgave van Gouverneurs Celebes en Onderhoorigheden,* No.32, 1941.

Salah satu komoditas penting lain yang diekspor dari Makassar dan sekitarnya adalah kopi. Tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan kerajaan Gowa. Dalam periode ini masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengembangkan tanaman kopi di gunung Lompobattang dan Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangannya di Toraja berlangsung bersamaan dengan di Gowa (Gunung Lompobattang). Namun, komersialisasi komoditas kopi baru dilakukan pada tahun 1830 seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.[100]

Di wilayah Makassar dan sekitarnya, kopi diproduksi di berbagai daerah. Pada tahun 1861 kopi yang diproduksi di wilayah Bone sebanyak 2.000 pikul, Gowa 10.000 pikul, Sidenreng dan Sulawesi Tengah 10.000 pikul serta Mandar 500 pikul. Hampir seluruhnya produksi kopi dihasilkan dari perkebunan-perkebunan rakyat di wilayah tersebut.

100 Poelinggomang, (2016:19)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang memungkinkan terjadinya sewa tanah oleh investor asing dalam jangka waktu paling lama 75 tahun, banyak perkebunan kopi yang muncul di Jawa, dan tidak terkecuali di Sulawesi Selatan, misalnya perkebunan kopi yang terdapat di Bakungan. Perkebunan ini merupakan perkebunan yang disewa oleh orang Eropa. Perkebunan ini dibuka tahun 1878 dan mempunyai luas 457 *bau*.[101] Perkebunan ini berkembang dengan baik sehingga penanaman kopi di perkebunan ini mengalami perluasan tiap tahunnya. Pada tahun 1881 penanaman kopi diperluas hingga 300 *bau*.[102]

Memasuki abad ke-20, kepopuleran kopi semakin meningkat. Kopi menjadi komoditas ekspor menguntungkan untuk dijual terutama ke negara-negara di Eropa sebagai konsumen utama industri kopi dunia. Konsumsi kopi meningkat terutama setelah kopi sudah semakin populer dan penggunaannya meluas bukan hanya dapat dinikmati para bangsawan di Eropa namun dapat dinikmati pula oleh rakyat biasa. Hingga kemudian mendatangkan permintaan yang semakin besar terhadap komoditas tersebut.

Ekspor dari Hindia Belanda, termasuk Makassar, kopi dikirimkan ke negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Walaupun bukan sebagai penghasil kopi terbesar di Hindia Belanda, namun Makassar juga merupakan salah satu wilayah yang aktif mengekspor kopi ke berbagai negara lain. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Belanda, Jerman, Portugal, Perancis, Denmark , Swedia, Austria, dan Amerika Serikat.[103]

Pada laporan *Kamer van koophandel en Nijverheid te Makassar* (Kamar Dagang Makassar) tahun 1903-1913 menunjukkan hasil ekspor kopi dari Makassar. Walaupun dari data ini terlihat penurunan ekspor kopi secara signifikan dari tahun ke tahun, namun tetap saja memperlihatkan betapa dinamis dan ramainya kegiatan ekspor-impor berbagai komoditas termasuk kopi di Makassar. Data ekspor kopi Makassar selama sepuluh tahun pada periode 1903-1913 adalah sebagai berikut:

---

101 1 *bau* = 0,7096 hektar atau 1 hektar = 1,4091 *bau*

102 Ashabul Kahpi, (2012:21)

103 Nahdia Nur, (2016:23)

Tabel 2.4.
Jumlah Ekspor Kopi Makassar 1903-1913 (dalam pikul)

Tahun	Jumlah
1903	40.138
1904	32.150
1905	29.000
1906	27.000
1907	24.187
1908	16.030
1909	15.775
1910	17.719
1911	36.933
1912	27.045
1913	21.543

Sumber: *Jaarverslag van de Kamer van koophandel en Nijverheid te Makassar* (1910-1913).

Dari dinamika perekonomian yang terjadi sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, memperlihatkan bagaimana Makassar menjelma menjadi pusat perdagangan berbagai komoditas ekspor yang dikirimkan ke berbagai negara di dunia. Makassar telah menjadi simpul mata rantai perdagangan internasional modern. Dinamika perdagangan yang semakin masif membuat lembaga perbankan tertarik untuk membuka kantornya di wilayah tersebut. Baru pada pertengahan abad ke-19, muncul lembaga perbankan pertama di wilayah Makassar dengan nama De Javasche Bank pada 1867. Kemudian pada awal abad ke-20, seiring dengan perekonomian yang semakin maju, bagai jamur di musim hujan, lembaga perbankan berlomba-lomba untuk membuka kantornya di Kota Makassar.

De Javasche Bank *Agentschap* Makassar

Perekonomian Makassar yang semakin berkembang tidak hanya menghasilkan peningkatan lalu lintas perdagangan secara signifikan, namun juga membuat kebutuhan akan lembaga perbankan menjadi

sesuatu yang esensial untuk memfasilitasi perkembangan tersebut. Ide untuk mendirikan lembaga perbankan milik pemerintah melalui pendirian kantor cabang De Javasche Bank (DJB) di Kota Makassar sebenarnya telah lama muncul terutama ketika Kota Makassar menjadi kota pelabuhan penting untuk wilayah Timur Besar.

Kebutuhan akan sebuah lembaga perbankan terutama bank sirkulasi telah diinisiasi sejak awal abad ke-19. Setelah pembubaran VOC, rezim pemerintah kolonial merasakan beratnya beban kegiatan perekonomian Hindia Belanda, termasuk kesulitan dalam pengaturan keuangan pemerintah. Akibat ketiadaan bank sirkulasi di Hindia Belanda semua pengaturan keuangan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial merasa kewalahan dalam menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara bersamaan tanpa bantuan lembaga lainnya. Selain itu, dalam hubungan ekspor-impor antara Hindia Belanda dan Negeri Belanda, dibutuhkan emas dan perak guna menutupi nilai defisit dalam neraca perdagangan. Kedua alat bayar itu harus selalu didatangkan dari Negeri Belanda yang tentunya akan lebih mudah jika dilakukan langsung oleh lembaga perbankan.

Hal itulah yang melatarbelakangi gagasan pendirian bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Pada 1816, di Negeri Belanda, dalam upacara penyerahan kembali Hindia Belanda dari Inggris, gagasan pendirian bank sirkulasi untuk wilayah koloni itu menjadi pembicaraan hangat antar pejabat Belanda. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Belanda juga muncul desakan kuat dari kalangan pengusaha agar segera mendirikan lembaga bank untuk memperlancar kepentingan bisnis mereka.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, Hoofd-Directie van Financien, pada 10 Oktober 1820 berhasil membuat suatu konsep Bank van Leening[104] yang pada masa VOC juga pernah didirikan. Namun, van der Capellen tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap niat pendirian bank itu. Para pengusaha di Hindia Belanda terus berupaya menyusun konsep suatu bank, tetapi tak kunjung terealisasi,

104 Bank van Leening serta bank-bank lain sejenisnya yang didirikan sebelum De Nederlandsche Bank (1814), jenis kegiatannya tidak lebih dari suatu "rumah pegadaian" yang memberikan uang muka dengan jaminan barang. Lihat, Arsip Bank Indonesia, "Sekilas Keberadaan Bank van Leening dan Bankcourant en Bank van Leening."

meski pada 16 Juli 1823 Negeri Belanda mengirimkan rancangan oktroi untuk suatu bank yang akan dinamakan De Nederlandsche Oost-Indische Bank.[105] Polemik tersebut membuat Raja Willem I kemudian turun tangan. Pada 1825, Raja mengambil inisiatif awal untuk pendirian suatu bank di Hindia Belanda. Pada 29 Desember 1826, Raja Willem I mengirimkan Surat Kuasa No. 85 kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda Leonard du Bus de Gisignies untuk segera merundingkan dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pembentukan suatu bank di Jawa berdasarkan oktroi, yaitu pemberian wewenang dan hak tunggal dari pemerintah dengan jangka waktu tertentu.

Dalam surat kuasa tersebut, Raja Willem I menguasakan kepada Menteri Urusan Jajahan untuk menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Komisaris Jenderal serta mengikutsertakan Nederlandsch Handels Maatschappij dalam pendirian DJB.[106] Dalam Surat Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 28 tanggal 11 Desember 1827 ditetapkan oktroi khusus bagi DJB sebagai ketentuan dan pedoman dalam menjalankan usahanya. Komisaris Jenderal Du Bus mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25 tanggal 24 Januari 1828 yang menyatakan bahwa De Javasche Bank secara resmi telah berdiri. Surat keputusan itu disebut sebagai akta pendirian De Javasche Bank, maka pada 24 Januari 1828 adalah tanggal berdiri De Javasche Bank, meski bank baru beroperasi pada 8 April 1828.[107]

Ketika dibentuk pada 1828, De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Posisi itu dapat dilihat pada Oktroi Pertama yang diberikan pada lembaga tersebut. Oktroi berlaku sejak 1 Januari 1823 sampai dengan 31 Desember 1837, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Maret 1838 melalui Oktroi Kedua. Dengan hak oktroi itu DJB untuk pertama kali menerbitkan mata uang. Berdasarkan surat (*missive*) Nomor 38 tanggal 30 Januari 1827, DJB memesan kertas blanko untuk penerbitan uang kertas dari Percetakan Enschede en Zoonen di Haarlem, Negeri Belanda. Berdasarkan Pasal 35 Oktroi Pertama, uang kertas yang dikeluarkan DJB hanya berlaku di Jawa dan Madura, sesuai dengan arti

105 Kusuma (2014: 12).

106 De Bree, Jilid II (1928).

107 De Bree, Jilid II (1928).

namanya, Bank Jawa. Uang tersebut dicetak sebanyak 12.200 lembar yang memiliki total nilai 1.120.000 gulden.[108]

Gambar 2.5. Contoh Uang Kertas Gulden Terbitan De Javasche Bank



Ket.Gambar: pecahan 25 gulden, penandatangan: Praasterink, Dr. G.G.v.B. Wichers, ukuran: 169x98 mm, warna dominan/ desain utama depan: coklat/ Jan Pieterszoon Coen dalam bingkai oval, belakang: coklat; jingga; hijau/ gedung De Javasche Bank & teks undang-undang 4 bahasa.

Sumber: Bank Indonesia (2015: 101-102)

Sejak awal pembentukannya di Batavia pada 1828, hingga tiga dasawarsa kemudian, DJB menjadi lembaga perbankan tunggal di Hindia Belanda. Kondisi tanpa saingan itu, menyebabkan DJB pada tahun-tahun pertama operasionalnya mampu meraih keuntungan besar, yakni

108 Darsono, dkk. (2016: 34).

sebanyak 4.183.794,94 gulden. Namun sejak pelaksanaan Tanam Paksa dan pemaksaan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch untuk menyukseskan praktik yang memonopoli semua komoditas ekspor itu membuat aktivitas DJB menjadi terganggu.[109]

Intervensi Gubernur Jenderal yang mewakili unsur pemerintah menyebabkan terganggunya aktivitas dan pelayanan serta perolehan keuntungan DJB. Di tengah terganggunya kinerja bank itu, terjadi perubahan politik yang cukup drastis di Negeri Belanda. Memasuki kurun 1850-an golongan konservatif yang selama itu berkuasa di parlemen Belanda dikalahkan oleh golongan liberal. Kemenangan kaum liberal memiliki arti yang besar bagi kehidupan politik dan ekonomi Tanah Jajahan. Tidak seperti kaum konservatif yang menganggap negeri jajahan seperti sapi perahan, maka kaum liberal ingin menjadikan koloni sebagai daerah yang mendukung negeri induk. Walaupun sama-sama mengandung sifat eksploitatif, namun politik ekonomi kaum liberal setidaknya berisikan upaya untuk "menghidupkan" Tanah Jajahan. Perubahan politik itu hampir bersamaan dengan Revolusi Industri yang menyebabkan surplus produksi sejumlah produk yang dihasilkan Eropa, dan surplus itu harus dipasarkan ke tanah jajahan. Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan (terutama bahan baku) industri dibutuhkan pasokan dari Tanah Jajahan. Perkembangan itu menyebabkan dibukanya pintu bagi modal swasta masuk ke Hindia Belanda.

Dalam hubungan dengan perkembangan itulah, sejak pertengahan abad ke-19 berbagai perusahaan swasta yang menginvestasikan modal mereka dalam perkebunan, pertambangan, transportasi, dan lain sebagainya, masuk ke Hindia Belanda. Masuknya pengusaha berbagai perusahaan itu menyebabkan kebutuhan akan lembaga keuangan semakin tinggi. DJB sebagai satu-satunya bank di Hindia Belanda dianggap tidak mampu memenuhi desakan perkembangan baru ini. Oleh karena itu,

109 DJB misalnya kesulitan mempertahankan cadangan emas dan peraknya karena para pengusaha ekspor-impor cenderung mengkonversi uang kertas menjadi emas dan perak untuk bisnis mereka. Selain itu, DJB dipaksa oleh Van den Bosch untuk tidak memberikan kredit kepada pihak swasta dan dipaksa untuk mengedarkan uang tembaga. Untuk menyukseskan program Tanam Paksa van den Bosch menjalankan politik pembatasan atau kalau perlu penihilan peran dan keberadan pedagang swasta. Di mata van den Bosch peran dan keberadan pedagang swasta akan mengganggu pelaksanan praktik Tanam Paksa.

sejak dasawarsa 1850-an pemerintah mengizinkan pembukaan sejumlah bank lain di Hindia Belanda. Beberapa bank yang didirikan sebagai "buah" dari sistem ekonomi baru Hindia Belanda adalah Nederlandsch Indische Escompto Bank (NIEB) yang didirikan 1857, Nederlandsch Indische Handelsbank (NIHB, 1863) dan International Credit en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio, 1864). Tidak hanya bank milik orang atau bangsa Belanda yang beraktivitas di Hindia Belanda, tetapi juga ada bank milik Inggris, seperti Chartered Bank of India, Australia & Cina yang membuka cabang di Batavia pada 1863.[110]

Memasuki perempat terakhir abad ke-18, seiring dengan semakin banyaknya pemodal yang membuka usaha di Hindia Belanda, maka jumlah bank yang berdiri serta beroperasi juga semakin meningkat. Pada 1878 berdiri Handels Vereniging Amsterdam (HVA), disusul oleh Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij (NILM, 1884), dan Cultuurmaatschappij Vorsterlanden (1888). Sebelumnya, NHM juga membuka layanan perbankan (1874). Pada kurun waktu itu juga beroperasi sejumlah bank milik Inggris dan Jepang, seperti Hongkong and Shanghai Bank Coorporation; bank milik Jepang seperti Bank of Taiwan, The Yokohama Specie Bank dan Mitsui Bank.[111]

Sementara itu, untuk memperluas jaringan operasinya, DJB melebarkan sayap dengan membuka kantor-kantor cabang di seluruh Hindia Belanda. Ide pembukaan kantor cabang DJB di Kota Makassar sesuai dengan pola kebijakan pembukaan kantor cabang DJB di suatu kota pada masa-masa awal. DJB sangat tertarik untuk membuka kantor cabangnya di kota-kota dengan pelabuhan yang ramai. Oleh karena itu sebagian kantor cabang DJB didirikan di kota-kota pelabuhan yang menjadi pintu masuk perdagangan ekspor-impor yang memerlukan dukungan dana besar, sebagian lagi di kota-kota perkebunan tebu, tembakau, dan palawija. Keberadaan DJB di kota-kota pelabuhan dan sentra perdagangan mengakibatkan peredaran uang di kota-kota tersebut sangat besar yang secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi

110 Hartono (1976: 22).

111 Hartono (1976); lihat juga Darsono, dkk. (2016: 79).

masyarakat setempat dan juga pembangunan infrastruktur kota, seperti pelabuhan, jembatan, jalur kereta api, dan jalan raya. Perkembangan perkebunan di beberapa daerah dan kelancaran arus perdagangan ekspor-impor, pada sisi lain, juga menguntungkan Hindia Belanda untuk meningkatkan pundi-pundi penghasilan.[112]

Upaya pendirian kantor cabang DJB di luar Pulau Jawa, termasuk Makassar, merupakan sebuah keinginan besar dari DJB untuk memperluas cakupan wilayah operasionalnya. Rencana perluasan itu sesungguhnya telah disuarakan sejak pertengahan 1850-an, saat Direksi DJB mengajukan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar bank itu diizinkan melebarkan sayap operasinya keluar Jawa. Namun usulan itu ditolak karena, sesuai dengan namanya, De Javasche Bank hanya didirikan di Jawa. Ditegaskan pula dalam Pasal 65 Oktroi I pendiriannya, DJB hanya diizinkan beroperasi di Pulau Jawa dan Madura. Di samping itu, Pasal 35 Oktroi menegaskan bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh bank itu hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura.[113]

Pelbagai hambatan tersebut sesungguhnya dapat diatasi jika oktroi diubah. Maka sejak menjelang akhir 1850-an nyaring terdengar suara yang menginginkan perubahan oktroi. Awalnya, usulan perubahan oktroi disuarakan sendiri oleh Direksi DJB. Perubahan memang sangat dimungkinkan, karena oktroi dirancang untuk masa sepuluh tahun, dan setelah itu ditetapkan kembali dengan atau tanpa ada perubahan. Ketetapan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham DJB.

Di luar hambatan tersebut, terutama ketentuan dalam oktroi, keinginan untuk memperluas wilayah operasi itu tetap menjadi agenda petinggi DJB. Ketika oktroi pendirian ketiga hampir berakhir, muncul usulan agar diadakan perubahan isi pasal yang membatasi wilayah operasi dan peredaran uang kertas yang dikeluarkan DJB. Setelah dirumuskan oleh Tim Perumus Oktroi IV dan melalui perdebatan dalam rapat pemegang saham serta melakukan sejumlah lobi dengan pemerintah maka pada 23 November 1859 disetujui pembukaan cabang DJB di luar Jawa.

112 Darsono, dkk. (2016: 42).

113 De Bree, Jilid II (1928: 86).

Keputusan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 oktroi keempat dan dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsche Indië Nomor 98 Tahun 1860. Secara lengkap Pasal 5 berbunyi,

> *De bank blijft vooreerst gevestigt te Batavia, doch wanner de Gouverneur Generaal, om gewigtige redenen, de verplaatsing van het hoofdbureau der instelling gelast, moet de bank zich daaran onderwerpen.*
>
> *De bank heft vast agentschappen te Semarang en Soerabaija, en wijders overal in Nederlandch-Indie, waar zij na gebleken behoefte, daartoe van den Gouverneur-Generaal vergunning heeft verkregen.*
>
> Terjemahan:
>
> Bank [DJB] pertama-tama akan bertempat di Batavia, namun jika Gubernur Jenderal memerintahkan untuk memindahkan kantor pusatnya dengan alasan-alasan penting, bank harus patuh terhadap keputusan tersebut.
>
> Bank memiliki kantor cabang tetap di Semarang dan Surabaya, dan dapat meluas ke seluruh Hindia Belanda, yang harus mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal untuk hal ini.

Desakan untuk melakukan pembukaan kantor cabang DJB di luar Jawa juga muncul dari pihak swasta. Para pengusaha yang tergabung dalam Kamer van Koophandel en Nijverheid (Kamar Dagang dan Industri) yang dibentuk pada 29 Oktober 1863 di beberapa kota—Batavia, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar—ikut serta mengusulkan pembukaan kantor cabang DJB di luar Jawa. Pada 24 Maret 1864, Kamer van Koophandel mengirimkan surat kepada Direksi DJB yang berisi desakan agar DJB segera membuka kantor cabang di Padang dan Makassar. Desakan itu terekam dalam *Gedenboek van De Javasche Bank* sebagai berikut,

> *De Kamer tot Batavia wended zich reeds bij missive No. 34 dd. 24 Maart 1864 tot de Directie van De Javasche Bank, aandringende op de vestiging van Agentschappen op andere plaatsen, dan de hoofdplaatsen van Java o.a. te Padang en te Makassar.*[114]
>
> *[Kamar Dagang di Batavia telah mengirimkan suratnya No. 34 tanggal 24 Maret 1864 kepada Direksi De Javasche Bank, yang mendesak untuk pendirian kantor-kantor cabang di tempat-tempat lain, selain di kota-kota besar di Jawa, antara lain di Padang dan Makassar.]*

114 De Bree, Jilid II (1928: 85).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham DJB pada 6 Agustus 1864 dilakukan *voting* terhadap usulan pembukaan kantor cabang di Padang dan Makassar. Sebanyak 207 suara mendukung pembukaan DJB *Agentschap* Padang dan DJB *Agentschap* Makassar, sedangkan dua suara menolak. Berdasar hasil RUPS pemegang saham DJB tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerbitkan surat persetujuan pembukaan DJB *Agentschap* Padang dan DJB *Agentschap* Makassar melalui Surat Keputusan Nomor 2, 11 Agustus 1864. Setelah kurang-lebih 35 tahun sejak pembukaan DJB di Batavia, akhirnya DJB membuka kantor cabang Padang pada 29 Agustus 1864 dengan pimpinan pertama A. W. Verkouteren.[115]

Gambar 2.6. Foto Pegawai Kantor DJB *Agentschap* Makassar tahun 1925



Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

Kantor Cabang DJB Padang merupakan yang pertama di luar Pulau Jawa atau merupakan cabang ketiga setelah Kantor Cabang Semarang (1 Maret 1829) dan Kantor Cabang Surabaya (14 September 1829).

115 De Bree, Jilid II (1928: 86–7).

Sementara itu, Kantor Cabang Makassar dibuka pada 21 Desember 1864, dan D. Schuurman diangkat menjadi pimpinannya yang pertama. Kantor Cabang DJB Makassar merupakan yang kedua di luar Pulau Jawa dan sebagai kantor cabang keempat di Hindia Belanda. Setelah Makassar, pembukaan kantor cabang DJB hingga memasuki abad ke-20 kembali terpusat di wilayah Jawa, yakni Cirebon (1866), Solo (1867), dan Yogyakarta (1879).[116]

Perbankan di Makassar

Selain De Javasche Bank, di Kota Makassar juga berdiri berbagai lembaga perusahaan perbankan antara lain: NHM, Perusahaan Nederlandsch Indische Handelsbank (Bank Dagang Hindia Belanda), Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij, Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), Chartered Bank of India, Australia & China, Chartered Mercantile Bank of India, London, & China, Spaarbank van Makassar (Bank Tabungan Makassar), Taiwan Bank, Mitsui Bank, Yokohama Specie Bank, Bank Dagang Reiss & Co., dan lain-lain.[117]

Bank swasta Belanda pertama yang dibuka di Makassar adalah Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij (Bank Escompto) yang membuka kantor cabang di Makassar tahun 1910.[118] Bank Escompto didirikan di Batavia pada tahun 1857 oleh Paulus Tiedeman Jr. dan Carel Wiggers van Kerchem, yang merupakan bank swasta Belanda ketiga yang berdiri di Hindia Belanda setelah NHM dan NIHB.[119] Walaupun kehadirannya dianggap sebagai saingan dari De Javasche Bank, pendirian Bank Escompto ternyata dibantu oleh DJB. Modal sebesar ƒ7,5 juta diberikan oleh De Javasche Bank kepada Escompto yang bisnisnya terutama sebagai bank pemberi kredit pada sektor pertanian.[120]

116 De Bree, Jilid II (1928).

117 NAD, Arsip NHM Makassar tahun 1916, No. Inv. 5112. Lihat pula Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 6 September 1921.

118 Lihat Wirawan (2013:138).

119 Claver, (2014:49)

120 Lihat De Bree, Jilid I (1928: 89-90).

Gambar 2.7. Gedung Kantor Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij (Bank Escompto) di Batavia yang Dibentuk Tahun 1857



Sumber: Koleksi Tropenmuseum

Pada awalnya manajemen Bank Escompto dipercayakan kepada perusahaan Tiedeman & van Kerchem, yang merupakan gabungan kedua pendiri bank tersebut. Pada tahun 1901 pada pertemuan umum pemegang saham, ditentukan bahwa Bank Escompto membentuk manajemen mandiri yang terlepas dari Tiedeman & van Kerchem. Bank ini merupakan salah satu bank swasta besar yang aktif memberikan berbagai kredit permodalan yang digunakan oleh para pedagang Eropa di Makassar untuk menjalankan bisnisnya.[121]

Bank swasta lain yang terdapat di Makassar adalah de Nederlands Indische Handelsbank (NIHB) yang didirikan di Amsterdam 14 Juli 1863. Pada 1913, bank yang berkantor pusat di Amsterdam ini membuka kantor cabangnya di Makassar untuk melayani aktivitas perbankan perusahaan-perusahaan perdagangan Eropa. Sebelum membuka cabangnya di Makassar, NIHB telah terlebih dahulu membuka kantor cabang di

121 *Ibid.*

berbagai kota di Hindia-Belanda, yakni: Weltevreden-Batavia (1900), Indramayu (1900), Bandung (1904), Besuki (1911), Probolinggo (1911), Cirebon (1913), Cilacap (1912), Pekalongan (1913), dan Medan (1914). Di tahun yang sama dengan pembukaan cabang Medan (1914), NIHB juga membuka kantor cabangnya di Kalibuntu. Hingga pertengahan abad ke-20, NIHB telah membuka cabang di 29 kota di Hindia-Belanda mulai dari Jawa, Sumatera, Lombok, Kalimantan, serta Sulawesi dan daerah lain yang memiliki industri perkebunan dan eksplorasi tambang.[122]

Selain memiliki kantor cabang di Hindia Belanda, NIHB pada awal abad ke-20 adalah sebuah lembaga keuangan dengan jaringan internasional yang mantap. Hal ini terbukti dengan dibukanya kantor cabang di berbagai kota penting di Asia seperti: Singapura (1901), Hongkong (1906), Shanghai (1919), Kobe (1920), Bombay (1920), Calcutta (1920), Swatow (1924), Amoy (1924), Tokyo (1926), Yokohama (1926), dan Manila (1937). Tahun 1940 bank ini juga membuka kantor cabang di New York dan Kanada.

Akibat tingginya aktivitas ekonomi dan perbankan terutama akibat meningkatnya perekonomian di Makassar, bank ini kemudian tertarik untuk membuka kantor cabangnya di Makassar. Selain melakukan pelayanan perbankan dalam pembukaan rekening serta pengedaran dan penukaran mata uang, NIHB juga memberikan fasilitas kredit kepada berbagai pengusaha perkebunan dan industri milik Belanda.[123]

Institusi bank swasta lainnya yang ikut meramaikan lalu lintas moneter dan perbankan di Makassar adalah perusahaan dagang Belanda Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Sebelumnya, NHM hanya berfungsi sebagai maskapai dagang Belanda yang berperan penting dalam menjual barang-barang hasil bumi Indonesia ke berbagai wilayah di Eropa. Namun memasuki awal abad ke-20, NHM mulai masuk ke bidang perbankan dan menjadikan kegiatan perbankan sebagai fokus utamanya.

122 National Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, "de Nederlands-Indische Handelsbank (1863–1965)". (1972:9–14).

123 Altes (2004: 203).

Gambar 2.8. Logo Perusahaan Dagang Belanda Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang Berdiri Tahun 1824. Pada Awal Abad Ke-20 NHM Mulai Masuk ke Bidang Perbankan



Sumber: Public Source

Bank swasta Eropa lainnya yang beroperasi di Makassar pada awal abad ke-20 adalah Standard Chartered Bank of India, Australia, and China atau lebih dikenal dengan Standard Chartered Bank. Bank ini merupakan salah satu bank yang sangat berpengaruh di Inggris pada abad ke-19. Standard Chartered Bank didirikan oleh James Wilson (1853) melalui pemberian Royal Charter oleh Ratu Victoria. Modal awal pendirian bank ini sebesar tiga juta pound. Chartered Bank memiliki kantor pusat di London, dan telah memiliki cabang di berbagai tempat seperti di Eropa, Asia, serta Amerika. Pembukaan cabang Standard Chartered Bank di berbagai kawasan tersebut akibat perkembangan komoditas ekspor perkebunan dan pertambangan di daerah koloni Inggris seperti teh, opium, kapas, kopi, tembakau, karet, dan logam mulia yang sangat membutuhkan layanan perbankan.[124]

124 Zhaojin Ji, (2003:43-44).

Gambar 2.9. Gedung Kantor Standard Chartered Bank of India, Australia, and China atau lebih dikenal dengan Standard Chartered Bank di Batavia



Sumber: KITLV

Pembukaan Standard Chartered Bank of India, Australia, and China dibuka di Makassar bertujuan untuk melayani kebutuhan perbankan perusahaan-perusahaan perdagangan di Makassar. Sebagai bank umum, aktivitas perbankan yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank cabang Makassar sama dengan aktivitas Standard Chartered Bank lainnya seperti: menerima simpanan nasabah, transaksi valuta asing, penukaran uang, pemberian pinjaman dan kredit.

Dunia perbankan di Makassar juga diramaikan oleh kehadiran bank-bank dari Asia terutama Jepang dan Cina. Sebagai bagian dari ekspansi bank-bank Jepang ke berbagai wilayah di Asia, beberapa bank baru yang membuka cabangnya di Makassar antara lain Bank of Taiwan yang berkedudukan di Taihoku (ibu kota Taiwan). Selain membuka cabangnya di Makassar, bank tersebut juga membuka cabang di Batavia dan Semarang. Bank lain adalah The Yokohama Specie Bank, yang juga membuka cabangnya di beberapa kota besar di Hindia Belanda. Bank

tersebut berkedudukan di kota Yokohama, Jepang. The Yokohama Specie Bank termasuk bank milik Jepang yang sangat kuat, karena selain membuka cabangnya di Indonesia, juga memiliki filial di Asia, Eropa, Amerika dan Australia sejak 1918. Bank Jepang lain yang membuka cabangnya Makassar, Surabaya, Batavia, dan Semarang pada periode ini adalah Mitsui Bank yang berkedudukan di Tokyo.[125]

Sementara itu, bank Cina yang pertama berdiri di Makassar adalah Hoa Kiauw Gin Hang yang dibentuk tahun 1914. Bank ini dipimpin oleh Thoeng Tiong Pie. Pengelolaannya diserahkan kepada pebisnis-pebisnis besar saat itu, yakni Nio Eng Boe, Lie Lean Tjoan, Liem Tjin Eng, dan Oei Lioe Oei. Bank ini merupakan bank tabungan (*spaarbank*). Rekening pertama di bank ini dibuka oleh seorang bernama Yap Giok Seng.

Dalam sebuah artikel tahun 1921 yang ditulis oleh Thio A Han, disebutkan bahwa mereka menawarkan bunga sebesar 4% untuk uang yang disimpan pada bank tersebut. Pada tahun 1932, bank ini mengalami krisis keuangan akibat penarikan uang massal (*rush*) yang disimpan oleh para nasabah mereka akibat situasi ekonomi global yang mengalami resesi besar saat itu. De Javasche Bank menawarkan untuk menyuntikkan dana jika bank tersebut membutuhkan bantuan.[126] Tampaknya bank Cina ini berhasil melalui masa krisis dengan baik karena pada tahun 1936 nama bank itu kembali muncul dalam iklan di koran menawarkan bunga sebesar 3% bagi mereka yang menyimpankan uangnya.[127]

Kehadiran berbagai institusi bank swasta di atas memperlihatkan tingginya aktivitas moneter dan perbankan di Makassar sebagai bagian dari jaringan perdagangan dunia. Posisi Makassar sebagai kawasan strategis semakin menguatkan besarnya eksistensi daerah ini dalam peta perekonomian internasional. Selain itu, keberadaan bank-bank swasta tersebut juga memperlihatkan bagaimana institusi bank menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Makassar.

De Javasche Bank yang ketika didirikan oleh pemerintah Belanda di Batavia (1828), semula hanya bergerak dalam menghitung nilai kurs dari

125 Tim Penulis LP3ES (1996: 45).

126 *Sin Po*, 11 Juli 1914; Wirawan (2013: 38).

127 *Ibid.*

surat-surat perjanjian bagi para eksportir dan importir dalam transaksi pembelian barang. Namun pada tahun 1850 berkembang dalam bidang pemberian kredit kepada para pedagang yang berhubungan dengan pengelolaan Sistem Tanam Paksa.

Di Makassar, De Javasche Bank praktis mulai memberikan kredit pada akhir abad ke-19 ketika jaringan transportasi dan pengangkutan di Wilayah Timur Besar semakin pesat terutama setelah munculnya Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Para pedagang-pedagang Eropa yang berkedudukan di Makassar mulai meminjam kredit, meskipun perizinan pemberian kredit masih berpusat di Batavia.[128] Untuk menarik minat para pengusaha meminjam kredit ke DJB, bank ini memberikan suku bunga kredit lebih rendah dari pada Bank Escompto, namun walaupun begitu, Bank Escompto memiliki keunggulan ketimbang DJB yakni memberikan fasilitas kredit dengan plafon lebih besar, biasanya rata-rata 500 ribu gulden ke atas per kreditur. Namun DJB memiliki keistimewaan yang saat itu belum dimiliki bank lain, yakni dapat melayani pengiriman uang lewat wesel juga penyediaan lalu lintas giro.[129]

Saingan utama Bank Escompto adalah bank swasta Manders Seeman & Co. Bank ini pada awalnya hanyalah sebuah perusahaan ekspor-impor milik pengusaha Eropa di Makassar yang kemudian juga meluaskan bisnis dengan membuka bank. Selain Bank Manders Seeman & Co, perusahaan perdagangan yang juga membuka lembaga bank di Makassar adalah Bank Dagang Reiss & Co. Bank ini merupakan milik perusahaan perdagangan Reiss & Co. yang merupakan salah satu perusahaan Eropa terbesar yang beroperasi di wilayah Makassar.[130]

Pemberian kredit oleh DJB ini tidak saja diberikan kepada perusahaan-perusahaan perdagangan, namun juga diberikan kepada para pengusaha individual yang dapat mengajukan kredit kepada DJB. Adapun beberapa nama penerima kredit dari DJB dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

128 Van Laanen dalam Booth, dkk. (ed.) (1988: 342).

129 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 7 Januari 1909.

130 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 14 Oktober 1908.

Tabel 2.5.
Daftar Nama Pedagang Kopra yang Menerima Bantuan Kredit dari De Javasche Bank, 1918

Nama Penerima	Asal	Jumlah
Perorangan		
H. Esenring	Makassar	*f* 87,35
J. Jonquiere	Makassar	*f* 90
J.M. Chs. Nyland	Surabaya	*f* 511,50
RV. Duivenbode	Ternate	*f* 2767,12
Gebr Mahieu	Gorontalo	*f* 35.094.90
Tjia Kae Tae	Manado	*f* 69.968,40
Perusahaan		
Dordtsche Petrolium Maatschappij	Makassar	*f* 84,37
Lindeteves Stokvis	Makassar	*f* 326,07
Becker & Co	Surabaya	*f* 38.658.38
Van Viet & Zonen	Surabaya	*f* 52,55
G.C.T. van Dorp & Co	Surabaya	*f* 145,76
Eles & Co	Surabaya	*f* 315
H. Oving-Yzer & Staathandel	Surabaya	*f* 65,78
Int Cred. & Hs Ver Rotterdam	Surabaya	*f* 22.125
West Java Hl.My	Bandung	*f* 3,30
Moluksche Handelvennootschap	Ambon	*f* 40.004

Sumber: Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar Staat van Crediteuren bulan Maret 1918, no. Inv. 555.

Selain De Javasche Bank, di Makassar juga terdapat rangsangan kredit pemerintah melalui Bank Perkreditan Rakyat (Volkscredit Bank) Makassar yang dibentuk pada tahun 1925. Secara khusus bank tersebut menyediakan kredit niaga yang jangka waktunya hanya berlaku satu tahun. Pada tahun 1928 bank tersebut telah melayani kredit bagi pedagang Cina dan penduduk pribumi yang kaya. Bank itu bunganya sangat rendah yaitu hanya 12% per tahun.

Meskipun telah disediakan fasilitas kredit secara resmi bagi penduduk pribumi, namun tidak semua penduduk memanfaatkannya dengan baik. Petani pribumi yang berada pada level bawah tidak tersentuh dengan lembaga perbankan. Bank rakyat tetap tidak bersentuhan dengan

masyarakat desa. Umumnya petani yang kekurangan uang lebih senang berhubungan dengan para pedagang perantara, terutama pedagang Cina. Tampaknya ada masalah keengganan bila berhubungan dengan lembaga perbankan. Selain petani yang tampaknya lebih suka secara praktis didatangi oleh pedagang perantara dari pada berhubungan dengan bank yang kadang kala meminta berbagai bukti kepemilikan jaminan. Ledakan besar moneterisasi kebutuhan akan uang meluas. Terlepas dari mendapatkan uang tunai (misalnya dalam pertanian ekspor atau pekerjaan pemerintah seperti membangun jalan), ada beberapa cara lain untuk memperoleh uang; saling pinjam dan meminjam, memperoleh pinjaman dari para kreditur atau pedagang perantara atau menggunakan fasilitas kredit yang dibentuk oleh pemerintah.

Selain bank pemerintah juga terdapat bank swasta seperti Escompto Bank dan Hongkong & Shanghai Banking Corporation atau lebih populer dengan HSBC (Bank Hongkong). Bank Hongkong banyak memberikan fasilitas kepada nasabah karena juga bertindak sebagai lembaga penukar uang. Dalam tahun 1918 telah mendapat keuntungan dalam bidang penukaran uang senilai 174.000 gulden. Angka tersebut naik bila dibandingkan pada pada tahun 1917 hanya mencapai 100.000 gulden.[131] Salah satu cara untuk menarik nasabah adalah dengan memberikan kredit bagi perdagangan hasil bumi dalam bentuk pembiayaan ekspor.

Di Ternate pada tahun 1920an Nederlandsch Indische Handelsbank dan Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij hampir semua menguasai pemberian kredit untuk pembelian kopra. Begitu pula di Ambon, Nederlandsch Indische Handelsbank (NIHB) memberikan kredit pada berbagai perusahaan dagang yang membeli kopra. Lain halnya Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij lebih banyak memberikan kredit kepada Perusahaan Dagang Maluku.[132]

Munculnya persaingan di antara berbagai lembaga perbankan di Makassar membuat para eksportir kopra dapat bebas memilih bank yang lebih menguntungkan. Sebagian besar eksportir dagang Eropa melakukan transaksi lewat bank yang telah mereka tunjuk. Namun dalam

131 NAD, NHM Makassar tahun 1918, No. Inv. 5112.

132 NAD, NHM Makassar tahun 1925, No. Inv. 5113.

skala perdagangan antar pulau di wilayah Timur Besar, para eksportir hampir semuanya memakai sistem pengiriman uang melalui wesel.[133] Hal itu disebabkan fasilitas perbankan di Makassar lebih memungkinkan dari pada daerah-daerah lainnya di wilayah Timur Besar.

Tentang Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij pada tahun 1918 juga mengalami persaingan dalam penukaran wesel gulden Belanda dan dalam bentuk dollar Amerika Serikat. Untuk memperluas jaringannya, perusahaan ini berusaha memperluas hubungannya dengan kalangan perusahaan dagang Eropa. Namun hal tersebut kurang berhasil karena Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij disibukkan dengan urusan wesel sebagai salah satu produk unggulan mereka.

Majunya perdagangan di Makassar berindikasi pada kemunculan berbagai lembaga pemberi bantuan kredit seperti misalnya pada tahun 1930an di Sulawesi Selatan telah muncul lembaga perbankan seperti Bank Rakyat Makassar, Bank Rakyat Bonthain, Bank Rakyat Pare-pare, dan Bank Wadjo. Bank ini memberikan kredit kepada pedagang-pedagang pribumi yang mampu dan para pedagang Cina untuk membeli kopra. Sementara untuk pemasukannya, sejumlah besar pemasukan bank-bank di Makassar berasal dari simpanan masyarakat baik dari rakyat, pedagang Cina, maupun pegawai pemerintah.[134]

Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat (Algemeene Volkscredit Bank, AVB) Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1904 tampaknya lebih banyak berpengaruh di Jawa bila dibandingkan dengan luar Jawa. Perkreditan rakyat di luar Jawa baru mulai ramai dibicarakan ketika Bank Tonsea muncul pada tahun 1914. Di Makassar, perkreditan rakyat baru berkembang pesat pada tahun 1924, yaitu ketika pendirian bank perkreditan rakyat diprioritaskan sebagai lembaga pemberi kredit. Untuk lebih mendekatkan kepada rakyat kecil maka pada tahun 1934 lembaga itu berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Umum Makassar (Algemeene Volkscredit Bank Makassar). Bank tersebut merupakan lembaga baru yang resmi dan bebas dari campur tangan pemerintah. Salah satu misi utamanya adalah mengawasi dan memberi kredit bagi bank-bank desa.

133 NAD, NHM Makassar tahun 1932, No. Inv. 5114.

134 NAD, NHM Makassar, 1930. No. Inv. 5113.

Gambar 2.10. Logo Algemeene Volkscredit Bank (AVB) Sebagai Lembaga Resmi yang Dibentuk Pemerintah Kolonial Untuk Memberikan Kredit Perdesaan. Lembaga ini merupakan Cikal Bakal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)



Sumber: Public Source

Selain bank perkreditan swasta besar, juga hadir lembaga perkreditan yang muncul pada tingkat akar rumput. Lembaga tersebut di antaranya adalah bank desa dan bank distrik. Mengenai bank desa, bank ini biasanya dikelola di bawah pengawasan para pejabat sipil. Model bank tersebut jarang ditemukan di luar Jawa, karena lebih dari 90% bank desa berada di Jawa. Dalam tahun 1930 sekitar 6.000 bank desa berada di Jawa, hanya 624 bank desa berada di luar Jawa. Secara keseluruhan jumlah modal bank desa pada tahun 1929 sekitar 90 juta gulden, 19 juta gulden di antaranya beredar di Luar Jawa. Secara total permodalan tersebut bila dilihat secara rinci maka terdapat 14 juta gulden berada pada petani, 76 juta gulden berada dalam bentuk simpanan penduduk pribumi. Selain bank desa juga terdapat bank distrik. Jumlah bank distrik di seluruh Hindia Belanda pada tahun 1930 terdapat 59 bank di antaranya 35 buah terdapat di Jawa dan sisanya 24 bank berada di luar Jawa, rinciannya

adalah 18 berada di Sumatera, 2 di Kalimantan dan 4 di Sulawesi. Bagi para petani, bank desa lebih digemari karena lebih mudah dijangkau apabila dibandingkan dengan bank distrik. Bank desa memberikan pinjaman kecil dengan suku bunga lebih rendah dari pada bank distrik. Selain itu, proses untuk memperoleh kredit tidak terlalu berbelit-belit bahkan kredit dapat diberikan tanpa ada jaminan.[135]

Di luar Sulawesi Selatan, banyak petani kelapa tergantung pada para pedagang atau lembaga pemberi kredit untuk memperoleh uang. Biasanya uang itu diterima petani dari pedagang perantara sebelum masa panen tiba. Bunga pinjaman yang diperoleh petani dari pedagang perantara sangat tinggi, sehingga petani merasa kesulitan untuk membayarnya. Akibatnya ketergantungan petani semakin tinggi kepada pihak kreditur. Itulah sebabnya pihak AVB sebagai wadah perkreditan rakyat Hindia Belanda, termasuk di Makassar, mengalami kesulitan jika petani tidak memutuskan hubungannya dengan kreditur (pedagang perantara).

Ketika perkreditan rakyat berkembang pesat di Jawa pada tahun 1930an petani-petani di Sulawesi Selatan masih kurang memiliki perhatian terhadap sistem kredit rakyat. Pada umumnya petani kelapa dihantui oleh berita-berita jeritan petani kelapa Sulawesi Utara yang terlilit oleh hutang karena kontrak kopra. Secara umum Bank Perkreditan Rakyat di Makassar dan Pare-Pare hanya digunakan untuk memperoleh jaminan hak pensiun, gaji, dan cicilan rumah. Aktivitas bank kredit yang menyandang nama "kredit rakyat" dalam arti kata untuk rakyat hanya berlaku bagi para pengusaha besar. Harapan agar kredit rakyat bisa menjadi kekuatan yang merangsang dan membangkitkan perekonomian rakyat sesuai tujuan pembentukannya hanya sebagai retorika kekuasaan.[136]

Sejak tahun 1934 Bank Perkreditan Rakyat terus berkembang dengan pesat. Hal itu ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh sebesar 1.631.000 gulden pada tahun 1940 dengan jumlah modal keseluruhan mencapai sekitar 11 juta gulden.[137] Hingga tahun 1949 Bank Perkreditan Rakyat Makassar (AVB Makassar) telah mengeluarkan

135 Rasyid Asba, (2007:173).

136 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5113.

137 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5114

pinjaman kredit kepada petani senilai 184.000 gulden, 173.000 gulden untuk para pegawai negeri, 94.000 gulden untuk para pedagang dan 124.000 gulden dari berbagai macam industri. Pinjaman berbagai macam industri termasuk juga usaha desa bagi para petani kelapa.

Namun di balik itu, lembaga perkreditan rakyat tidak bisa hanya mengejar keuntungan, karena lembaga itu merupakan badan sosial yang bekerja di bawah naungan pemerintah dengan memajukan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Pada prinsipnya motif keuntungan bukan jadi prioritas utama, tetapi lebih diarahkan pada pelayanan sosial yang mengutamakan petani kecil. Dilema antara mengejar keuntungan dengan pelayanan sosial memang menimbulkan pertanyaan sejak dari awal pada saat pembentukan kredit rakyat. Namun diharapkan dapat menarik garis perbedaan yang jelas sehingga misi kredit rakyat jelas. Mungkin jawabannya harus dilihat mengapa petani kelapa lebih senang berhubungan dengan petani perantara lewat kontrak kopra. Peraturan Kontrak Kopra tahun 1939 yang menghasilkan undang-undang yang membatasi penindasan petani kelapa tidak berdampak langsung pada petani kecuali kredit rakyat dapat tersentuh.[138]

Asumsi penilaian Bank Perkreditan Rakyat tentang hanya mencari keuntungan dihilangkan. Bank tersebut harus lebih mengutamakan misi sosialnya dari pada kepentingan ekonominya yang hanya mencari keuntungan. Untuk itu dibutuhkan suatu bank kredit rakyat yang benar-benar dapat membantu petani. Mereka harus mendorong tumbuhnya ekonomi bagi rakyat kecil agar dapat menciptakan ekonomi yang kuat. Bank Perkreditan Rakyat harus berpandangan modern yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.[139]

138 Laporan NHM Makassar tahun 1934, No Inv. 5113.

139 *Ibid.*

De Javasche Bank dan Ekonomi Makassar Awal Abad ke-20

Memasuki abad ke-20, wilayah Hindia Belanda memasuki perdagangan global, yang menyebabkan arus perdagangan ekspor dan impor menjadi sangat dinamis. Dinamika tersebut sangat terasa di pelabuhan Makassar yang telah menjadi pelabuhan ekspor dan impor sejak jauh sejak abad ke-17. Terutama sejak Gubernur Jenderal J.B. van Heutz yang memegang kendali pemerintahan pada 1904, dengan gencar ia mengaitkan Indonesia ke dalam perdagangan global. Hal ini berdampak positif pada perdagangan Kota Makassar yang meningkat pesat, karena posisinya sebagai kota yang memiliki peran simpul antara kawasan Timur Indonesia dengan pusat-pusat perdagangan dunia

Kemajuan perekonomian di Makassar dapat dikatakan dipengaruhi akibat semakin majunya teknologi pelayaran, sehingga membuat jarak tempuh antara Eropa dan Hindia Belanda menjadi semakin singkat. Selain itu, teknologi pelayaran memungkinkan pengangkutan barang dan orang menjadi semakin masif dan cepat dengan rute-rute pelayaran yang juga semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin dinamisnya kegiatan perdagangan terutama ekspor-impor di Makassar. Pada periode ini, dinamika perekonomian Makassar dihiasi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan perdagangan dan juga perkembangan dunia perbankan termasuk DJB Makassar yang semakin maju.

Perkembangan perdagangan di Kota Makassar membuat bermunculannya para pedagang Eropa yang membuka kantornya di Kota Makassar. Pada tahun 1910, Handelsvereeniging van Makassar (Kamar Dagang Makassar) mencatat setidaknya telah terdapat delapan perusahaan ekspor di Makassar. Mengenai sejak kapan perusahaan-perusahaan Eropa tersebut berdiri tidak dapat diketahui secara pasti. Kemungkinan besar mereka telah hadir dan membuka perusahaannya sejak akhir abad ke-19 ketika perdagangan di Makassar semakin maju terutama akibat dari bergairahnya perdagangan kopra di Makassar. Beberapa perusahaan-perusahaan itu di antaranya adalah WB Ledeboer

& Co. (ekspor-impor), Michael Stephens & Co. (ekspor-impor), Firma Veth Bersaudara yang sebelumnya bernama J. Mohrmann & Co. (ekspor-impor), Firma Reiss & Co. (ekspor-impor), A Schmidt, Moreaux & Co. (ekspor-impor), dan HJ Valk (ekspor-impor). Jumlah perusahaan sejenis bertambah setiap tahunnya. Dalam periode tahun 1911-1917 terdaftar antara lain perusahaan Manders Seeman & Co., Stephen Gregory, Carl Shlipper & Co., Stephens P & Co., dan Geo Wehry & Co. Bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan tersebut memberikan tanda bahwa Makassar terus berkembang sebagai kota pusat perdagangan.

Meningkatnya permintaan kopra membuat sejumlah perusahaan dagang Eropa turut masuk dan mencoba peruntungannya di Makassar. Hampir semua perusahaan dagang Eropa memusatkan aktivitasnya pada ekspor kopra, walaupun lini bisnis mereka tidak hanya dalam perdagangan kopra. Perusahaan-perusahaan Eropa itu di antaranya adalah Firma Veth Bersaudara, Macassar Produce & Co., dan WB Ledeboer & Co. Kadang-kadang ada juga dari perusahaan Eropa yang ada di Makassar yang memusatkan usahanya pada ekspor kopi, rotan, damar, dan getah. Manders Seeman & Co. misalnya, bergiat dalam perdagangan rotan dan kopra. Sementara Oei, Seeuwen & Co. bergerak dalam pengumpulan damar, getah, dan kopra. Sedangkan perusahaan Reiss & Co., selain berdagang kopra, juga lebih berkonsentrasi pada perdagangan hasil-hasil laut.[140]

Kekuatan ekonomi pedagang Eropa di Makassar tidak terbatas pada perdagangan ekspor, tetapi juga perdagangan impor. Importir Eropa menyerahkan komoditasnya seperti tekstil, benang, barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan berbagai jenis minuman. Kekuatan bisnis pengusaha Eropa ini semakin diperkuat dengan memperluas bisnis mereka melalui pihak perantara. Perusahaan-perusahaan Eropa ini bertindak sebagai pemilik modal yang kemudian meminjamkan uangnya ke pedagang-pedagang Cina yang telah lama membuka jaringan dengan daerah pedalaman. Modal itu membuat jaringan pedagang Cina menjadi semakin kuat. Pedagang Cina lah yang masuk ke daerah pedalaman untuk bertemu dengan para pedagang pribumi. Selanjutnya, para pedagang

140 NAD, NHM Makassar, 1915, No. Inv. 5112.

pribumi menghubungi petani produsen kelapa. Jaringan pedagangan yang semakin kuat dan lancar membuat permintaan akan kopra semakin meningkat.[141]

Para pedagang perantara pada umumnya adalah orang Tionghoa. Mereka merupakan kelompok yang mendapatkan bantuan modal dari para eksportir Eropa di Makassar. Para pedagang perantara ini kemudian meminjamkan pinjaman uang muka atau juga sistem bagi hasil (kongsi) kepada petani kopra dengan jaminan sejumlah pikul kopra atau beras yang diikat melalui kontrak atau sewa kebun.

Di Makassar banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh para pengusaha Cina yang turut mewarnai dinamika ekonomi Makassar pada awal abad ke-20. Untuk memperkuat jaringan perdagangan Cina di Makassar, para pedagang Cina itu tidak jarang membentuk kongsi dagang atau perusahaan. Mereka menyadari bahwa bisnis mereka akan lebih kuat dan sehat jika mereka menjalin kerjasama satu sama lain. Perusahaan milik pengusaha Cina yang ada di Makassar di antaranya adalah Koe & Co., Tan Teng, Tan Soen & Co., Hoo Thong, Tan Hok Soei & Co., Thio Tiang Tjiong, Tan Koo & Co., Sie Hok Goang, Tjoa Djid Soeng, dan lain sebagainya.

Perusahaan-perusahaan Cina itu tidak hanya terbatas pada bidang perdagangan kopra saja, namun juga bidang perdagangan barang-barang sehari-hari seperti barang-barang untuk toko kelontong, beras, hingga tekstil. Seperti misalnya perusahaan Sie Hok Goang yang didirikan pada 1895 oleh pemiliknya, Sie Hok Goang, yang memiliki modal sebesar 10.000 gulden. Bisnis firma ini adalah toko yang bergerak di bidang bahan pokok, minuman, dll. Lalu ada firma Tjoa Djid Soeng yang memiliki usaha toko yang menggunakan namanya sendiri. Bergerak di bidang bahan pokok, minuman, dll, sama seperti Sie Hok Goang. Dengan modal sebesar 25.000 gulden, ia berbisnis dengan memesan barang-barang dagangannya dalam jumlah besar secara langsung dari Eropa.[142] Lalu ada juga perusahaan Cina bernama Tan Hok Soei & Co. yang merupakan perusahaan milik dua pengusaha Cina yakni Tan Hok Soei dan Tan Hok

141 Rasyid Asba, Kopra Makassar (2007:125).

142 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 27 Agustus 1908.

Lok yang sepakat membentuk sebuah firma dengan modal 30.000 gulden yang didirikan pada 30 Juni 1903. Tan Hok Soei & Co. menjalin relasi bisnis dengan Firma Heng Joo Seng yang berlokasi di Singapura. Bisnis utama dari Tan Hok Soei & Co. adalah ekspor beras ke Singapura melalui kerjasama dengan Firma Heng Joo Seng.[143]

Dapat terlihat bahwa skala bisnis perusahaan-perusahaan Cina yang ada tidak sebesar dan semasif perusahaan-perusahaan Eropa. Biasanya perusahaan Cina ini mendapatkan pinjaman modal usaha dari perusahaan-perusahaan Eropa, atau mereka dapat juga mengajukan kredit ke De Javasche Bank Makassar.

Selain mendirikan perusahaan, mereka juga berupaya untuk mendirikan bank-bank swasta milik pedagang Cina di Makassar. Dalam sebuah laporan DJB Makassar pada tanggal 14 Oktober 1908 dilaporkan muncul kabar yang beredar bahwa akan didirikan bank-bank Cina yang modalnya datang dari kongsi dagang Cina di Shanghai. Kabar tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

> *"Saya tidak dapat menunda untuk menyampaikan pada Anda bahwa berdasarkan kabar yang sedang beredar, dari Kongsi Dagang Cina di Shanghai telah muncul sebuah gerakan untuk mendirikan Bank-bank Cina di tempat-tempat yang berbeda sepanjang Selat dan Kepulauan tempat kita berada. Delegasi-delegasi dari Kongsi Dagang tersebut, yang beberapa hari terakhir berada di sini untuk membicarakan urusan bisnis, tidak menemui kesuksesan dibandingkan di tempat lain: menurut beberapa orang, bernilai f120.000, menurut yang lain masih belum mencapai f100.000, yang sebagian besar dari rencana tersebut memiliki kemungkinan berhasil, walaupun ada orang Tionghoa kaya dari Shanghai yang memiliki ketersediaan untuk penambahan modal yang dibutuhkan. Rincian lebih lanjut tidak dapat saya sebutkan di sini."*[144]

Pada dekade pertama abad ke-20, Pelabuhan Makassar menampung tiga konsorsium besar niaga Cina. Salah satu pedagang yang sukses dengan

143 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 30 Januari 1909.

144 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 14 Oktober 1908.

bisnisnya adalah Siang Hwee. Siang Hwee memiliki 300 anggota jaringan bisnis pada pertengahan tahun 1920an. Mereka memiliki perwakilan dagang di berbagai tempat seperti Manado, Ternate, Ambon, dan Timor. Semula Siang Hwee hanya membuka pertokoan di Makassar pada 1902. Ketika usahanya semakin berkembang, mereka mendatangkan rekan bisnis dari Jawa dan Singapura untuk membentuk jaringan niaga perdagangan kopra di Makassar. Setelah jaringan perdagangan kopra miliknya semakin besar, Siang Hwee diberikan kepercayaan sebagai pengumpul kopra bagi perusahaan-perusahaan Eropa di Makassar.[145]

Selain Siang Hwee, terdapat nama lainnya seperti Liem Boen Yad, Bio Tjioe, dan Kho Peng Hui. Liem Boen Yad dan kongsinya memiliki bisnis perdagangan kopra di Makassar dan Minahasa, dan bahkan sebagai pengatur perdagangan kopra Minahasa bekerja sama dengan perusahaan Cina lainnya di sana. Sementara Bio Tjioe dan Kho Peng Hui membentuk kongsi dengan merek dagang Heng Seng dan mengusai ekspor kopra untuk wilayah Sulawesi Tengah.[146]

Tidak semua perusahaan Cina bernasib sama dengan Siang Hwee dan lainnya. Banyak pula dari perusahaan Cina di Makassar yang terpaksa harus mengalami kebangkrutan (pailit) sebelum sempat berkembang. Kemungkinan besar hal ini terjadi akibat dari persaingan usaha di Makassar yang sangat ketat. Dalam sebuah laporan DJB Makassar tanggal 2 September 1908 disebutkan adanya deklarasi pailit yang dilaporkan ke DJB Makassar sesuai dengan keputusan Raad van Justitie (Dewan Pengadilan) tanggal 20 Agustus 1908. Perusahaan itu adalah Firma Tan Koe & Co. yang telah berhenti beroperasi pada bulan Mei 1908 dan telah sejak bulan Juni tahun sebelumnya firma tersebut kesulitan untuk mengembalikan kredit kepada para krediturnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebagai pedagang perantara, untuk menjalankan bisnisnya para perusahaan Cina mendapatkan modal usaha dari perusahaan-perusahaan Eropa. Di dalam laporan ini dikatakan bahwa pemberi modal terbesar dari firma Cina Tan Koe & Co. adalah Firma W.B. Ledeboer & Co.

145 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5111.

146 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5111.

Perusahaan Eropa tersebut menanamkan modalnya pada Firma Tan Koe & Co hingga sebesar 54.000 gulden.[147]

Bahkan akibat dari banyaknya perusahaan Cina yang bangkrut membuat Firma W.B. Ledeboer & Co. sebagai perusahaan besar pemberi kredit harus mengalami kerugian hingga sebesar 200.000 gulden. Kerugian tersebut akibat banyaknya kredit macet dari para perusahaan Cina yang tidak mampu mengembalikan kreditnya pada Firma W.B. Ledeboer & Co. dan bahkan beberapa dinyatakan pailit.[148]

Seperti pada penjelasan sebelumnya, selain berfungsi sebagai bank sirkulasi, De Javasche Bank juga memiliki fungsi sebagai bank komersil. Seluruh kantor DJB termasuk DJB Makassar memiliki fasilitas berupa penerimaan simpanan uang dari masyarakat, pemberian kredit, giro, kliring, hingga menyediakan pengiriman uang melalui fasilitas wesel.[149]

Dalam hal pemberian kredit, DJB menggunakan instrumen hipotek[150] sebagai salah satu penjaminan bagi para debiturnya mampu mengembalikan uang tersebut. Para peminjam dana (debitur) memberikan sertifikat kepemilikan tanah atau rumah kepada pemberi kredit (kreditur) sebagai jaminan bahwa sewaktu-waktu ia tidak mampu membayar kredit tersebut, maka aset miliknya akan disita oleh pihak kreditur. Seperti misalnya dalam laporan DJB Makassar tercatat bahwa Firma Michael Stephen & Co. meminjam kredit kepada DJB Makassar sebesar 50.000 gulden dengan jaminan beberapa rumah milik Tuan Seth Paul sebagai salah satu petinggi firma tersebut.

> *"Rumah-rumah milik tuan Seth Paul yang saat ini terhubung dengan bank Anda karena hutang firma Michael Stephens & Co. kepada De Javasche Bank sejumlah f50.000,- dengan properti yang sudah tentu berharga."*[151]

147 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 2 September 1908.

148 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 17 September 1908.

149 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 7 Januari 1909.

150 Menurut KBBI, pengertian hipotek adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak; sementara menurut Kitab Hukum Perdata Bab XXI Pasal 1162, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan satu perikatan.

151 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 September 1906.

Selain jaminan dalam bentuk properti berupa rumah dan atau tanah, banyak dari perusahaan-perusahaan dagang yang ingin mendapatkan kredit dari DJB Makassar juga menjaminkan gudang kopra beserta isinya kepada DJB Makassar. Seperti misalnya dalam satu laporan DJB Makassar tanggal 25 November 1927, mengatakan bahwa Firma Schmid & Jeandel, Co. berupaya mendapatkan kredit usaha dari DJB Makassar dengan menjaminkan dua gudang kopra beserta isinya sebesar 9.220 *pikul* yang terletak di kawasan pelabuhan kepada DJB Makassar. Sayangnya di dalam laporan tersebut tidak disebutkan jumlah kredit yang didapatkan oleh firma tersebut dari DJB. Walaupun begitu dari laporan itu tetap dapat dilihat bahwa instrumen penjaminan digunakan dalam pemberian kredit.

> *"...ia terus menyerahkan isi dari kedua gudang sebagai jaminan kepada De Javasche Bank, sehingga produk-produk yang disebutkan dalam buku (boeken) hanyalah bagian (yang pada kenyataannya) dari kendali De Javasche Bank. Setidaknya ketika gudang-gudang di buka."*[152]

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ramainya lembaga perbankan (baik milik pemerintah maupun swasta) di Makassar membuat terjadinya persaingan antar lembaga perbankan dalam kegiatan bisnisnya. Salah satu persaingan yang terjadi adalah dalam hal pemberian kredit antar DJB Makassar dan bank-bank swasta lain. Persaingan tersebut membuat DJB Makassar mengeluarkan kebijakan memberikan potongan bunga kredit berjalan atau disebut dengan kredit diskonto. Selain DJB, bank swasta seperti Spaarbank van Makassar (Bank Tabungan Makassar), Bank Escompto, Bank Hongkong (HSBC), dan beberapa bank lain berlomba-lomba memberikan kreditnya kepada para calon debitur dengan bunga yang menarik. Dalam sebuah laporan DJB Makassar tanggal 13 November 1906 dikatakan bahwa DJB Makassar memberikan kredit diskonto kepada debiturnya:

> *"...mereka tidak akan pernah menginformasikan permintaan kredit ini kepada pesaing Anda, bahwa mereka menikmati kredit diskonto dari De Javasche Bank. Tentu saja, sudah ada alasan bagi pesaing Anda untuk memberikan kredit… Namun demikian harus diketahui*

152 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 25 November 1927.

bahwa pesaing Anda melakukan segala kemungkinan untuk menarik perusahaan yang sedang atau telah Anda diakreditasi, baik untuk kredit diskonto atau untuk transaksi pinjaman, hingga menyediakan peminjaman fasilitas."[153]

Salah satu debitur yang mendapatkan kredit diskonto dari DJB Makassar adalah seorang pengusaha keturunan Armenia yang memiliki beberapa toko makanan di Makassar bernama Tuan Simon yang diberikan diskonto sebesar 10.000 gulden. Hal ini tercatat dalam laporan DJB Makassar kepada Direksi DJB di Batavia yang mengatakan bahwa: *"Bersama di sini, saya ingin memberitahukan pada Anda penelusuran mengenai Tuan Simon, seorang Armenia, untuk mendapatkan kredit-diskonto dari De Javasche Bank, sebesar 10.000 gulden."*[154]

Pemberian kredit oleh DJB Makassar tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan dagang di Makassar. Kredit juga diberikan kepada pihak Pemerintah Kota (*Gemeente*) Makassar. Kredit tersebut digunakan oleh *Gemeente* Makassar untuk melakukan pembangunan infrastrukur penunjang kota. Pihak *Gemeente* Makassar dan DJB Makassar berkorespondensi erat antara satu sama lain dalam hal pengelolaan kota. Selain sebagai kreditur, DJB Makassar juga memiliki peran dalam pengelolaan perbankan di Kota Makassar. Seperti terlihat dalam satu laporan korespondensi antara DJB Makassar dengan *Gemeente* Makassar tanggal 8 Februari 1922 yang mengatakan bahwa DJB Makassar memberikan *Gemeente* Makassar diskonto sebesar 6% dari tagihan pembayaran kredit kepada DJB Makassar sebesar 160.000 gulden yang digunakan untuk membangun infrastruktur kota.

"Sehubungan dengan surat saya G.Z.No.79, saya menginformasikan terkait non-betaling (belum melakukan pembayaran) promes (surat sanggup bayar) sebesar f160.000 yang dibebankan pada Gemeente Makassar… dengan adanya peningkatan diskonto 6%..."[155]

Sebagai bank sirkulasi, De Javasche Bank memiliki fungsi untuk mencetak dan mengedarkan uang, selain itu salah satu fungsi lainnya

153 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 September 1906.

154 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 27 Agustus 1908.

155 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 8 Februari 1922.

adalah mengendalikan jumlah uang beredar. Untuk mengendalikan jumlah kelebihan uang beredar di Kota Makassar, DJB Makassar mengambil kebijakan bahwa kelebihan uang yang terdapat pada satu wilayah harus disetorkan kepada DJB untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk obligasi atau disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit. Seperti misalnya kelebihan kas dari wilayah Bima sebesar 60.000 gulden disetorkan ke DJB Makassar untuk kemudian diinvestasikan pada obligasi sebesar 4% di Amsterdam.

> *"Uang yang berlebih baru-baru ini di kas harus selanjutnya secara beruntun disetor untuk diinvestasikan pada De Javasche Bank; beberapa direktur perlu mengikuti instruksi dari Gubernur. Kini melalui Otoritas dari Bima, uang yang berlebih dari Kas Wilayah Bima sebesar 60.000 gulden disetorkan pada saya, yang 40.000 di antaranya harus digunakan untuk investasi di Amsterdam dengan 4% Obligasi, seperti yang telah Anda tuliskan pada saya dalam surat dengan nomor No. 81/51. Secara beruntun Kas Wilayah yang tersisa akan mengikuti untuk digunakan."* [156]

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa, perkembangan perdagangan kopra dapat dikatakan mencapai puncak pada dekade 1920. Walaupun dalam tahun 1915-1919 ekspor sempat menurun sebagai akibat Perang Dunia I. Setelah perang usai, ekspor kopra naik secara mencolok yaitu dekade 1920 sampai dekade 1930. Dalam tahun 1920 nilai ekspor kopra Hindia Belanda mencapai 58.272.000 gulden. Itu berarti nilai ekspor kopra berada pada peringkat ketiga setelah gula dan karet. Komoditas lain yang juga memberikan andil nilai ekspor Hindia Belanda berturut-turut adalah lada sejumlah 49 juta gulden, ketela tapioka 21 juta gulden, rami 21 juta gulden, kapok 16 juta gulden, minyak kelapa sawit 13 juta gulden, Jagung 12 juta gulden, kina 10 juta gulden, damar dan rotan 10 juta gulden dan minyak serai 3 juta gulden.[157]

---

156 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 7 Januari 1909.

157 Dalam fase kedua abad ke-20 minyak bumi dan karet menempati urutan pertama yaitu 42% dari jumlah ekspor Hindia Belanda. Untuk rincian yang lebih jelas lihat Allen M. Sievers. *The Mistical World of Indonesia Culture & Economic Development in Conflict* (London: The John Hopkins University Press, 1974), hlm. 141-142.
Ibid, hlm, 142; Lihat pula Colin Barlow dan John Drabble "Pemerintah dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia". Dalam Anne Booth William J.O 'Malley Anna Weidemann. *Peny. Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES.1988), hlm. 260-265.

Pada periode ini kemajuan perdagangan kopra turut memengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Makassar dan sekitarnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil peran dalam jaringan perdagangan kopra baik perusahaan swasta seperti Firma Veth Bersaudara, Macassar Produce & Co., WB Ledeboer & Co., Manders Seeman & Co. Reiss & Co., dan perusahaan lainnya. Sementara dari pihak pemerintah, untuk memfasilitasi perdagangan kopra, pemerintah kolonial membentuk sebuah perusahaan penyulingan minyak kelapa bernama Oliefabrieken Insulinde Makassar (OFI).

OFI Makassar didirikan pada tahun 1913 yang merupakan bagian dari beberapa perusahaan minyak yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Oliefabrieken Insulinde adalah perusahaan industri yang cukup diperhitungkan di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia I.[158] Secara keseluruhan, di Hindia Belanda telah berdiri beberapa Oliefabrieken Insulinde di berbagai daerah seperti Oliefabrieken Insulinde Kediri, Sontono, Blitar, Tulung Agung, Banyuwangi, Kebumen, Rangkas Bitung, Bandung, Padang, dan Makassar.[159]

Pendirian OFI Makassar didanai dari pembiayaan berbagai investor, baik perusahaan maupun perorangan. Berbagai investor menanamkan modalnya di OFI, antara lain: Sech bin Aoem Alamri, J. Caffin, Gebr. Mahieu, dari Gorontalo; Sie Ka The, Ong Soei Song, Thio Tjin Ton, E. Toemoando, Tjia Kae Tae dan Tjia Tjin Tai masing dari Manado; Badjamal dari Donggala; R.v. Duivenbods dari Ternate. Di samping milik perorangan juga terlibat beberapa perusahaan seperti: H. Ensering, J. Jonquire, Dordtsche Patrolium Maatschappij dan Lindeteves-Stokokvis, KPM dari Makassar; J.M. chs. Nyland, G.C.T. van Dorp & Co, Becker & Co, Van Vliet & Zonnenz, Eles & Co, H. Oving-Yzer Staathandel dan Internationaal Crediet & Handels Vereeniging Rotterdam masing-masing dari Surabaya;

158 J Th Lindblad, *Bussines Strategies in Late Kolonial Indonesia* dalam J Th Lindblad, ed. *Historical Foundations of a Natioonal Economy in Indonesia, 1890s-1990s* Amsterdam: Royal Netherlands Academy 0f Arts and Sciences, 1994, hlm. 209.

159 Gemeentearchief Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar, No Inv 590. Lihat pula RNJ Kamerling. *De NV Olifabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*, Uitgeverij T Wever BV Franeker, 1982, hlm. 65-71.

Working & Co. dari Bandung dan Moluksche Handelsvennootschap dari Ambon.[160]

Selain mengolah kopra menjadi minyak kelapa, OFI (termasuk Makassar) juga membeli dan memasarkan kopra. Untuk menampung ekspansi perdagangan kopra, dalam tahun 1917 gudang penampungan kopra milik OFI Makassar diperluas sampai di luar pelabuhan yaitu di kampung Maroangin dekat Potere, sekitar dua kilometer dari Pelabuhan Makassar. Ekspansi perluasan pergudangan kopra memberikan isyarat bahwa OFI Makassar terus menunjukkan perkembangan. Perkembangan itu bukan hanya disebabkan karena minyak yang dihasilkan dari tahun ke tahun terus berkembang tetapi juga karena OFI Makassar memperluas usahanya sebagai eksportir kopra.

Untuk mendukung pengembangan usaha OFI Makassar, dalam pembelian kopra lembaga ini mendapat dukungan kredit dari Pemerintah Kolonial Belanda melalui DJB Agentschap Makassar. Paling sedikit setiap bulannya Javasche Bank mengeluarkan kredit sebesar 1.500.000 gulden kepada perusahaan-perusahaan dagang kopra untuk melakukan pembelian kopra ke petani kelapa dan kemudian diharuskan menyetorkan sejumlah kopra kepada OFI Makassar. Misalnya saja dalam bulan Januari dan Februari 1918 telah dikeluarkan kredit dari DJB Makassar sejumlah 3.733.469,99 gulden kepada OFI Makassar untuk membantu pembelian kopra.[161]

Selain DJB, bank-bank di Makassar juga melakukan fasilitas pemberian kredit pada perusahaan-perusahaan minyak kelapa di Makassar. Bank-bank tersebut misalnya adalah Bank Escompto dan Bank Manders Seeman & Co. Kedua bank tersebut gencar memberikan kredit dalam upaya mendapatkan keuntungan lebih besar dan berusaha melakukan monopoli dalam pemberian kredit dalam pembelian kopra.[162]

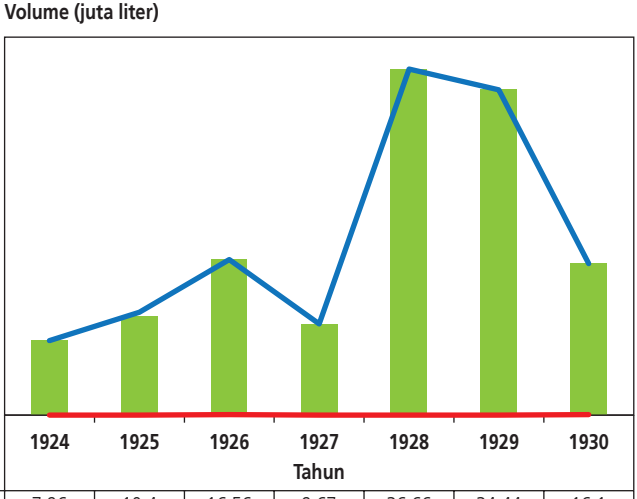
160 Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 561.

161 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 27 Februari 1918. Lihat pula Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 531 dan Oliefabrieken Insulinde Makassar Staat van Crediteuren bulan Maret 1918, no. Inv. 555.

162 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 2 Juli 1918

Kelancaran pendanaan dan operasional membuat OFI Makassar setiap tahun mengalami peningkatan dalam hal ekspor minyak kelapa ke luar negeri. Misalnya dalam tahun 1924, jumlah ekspor minyak kelapa Hindia Belanda ke Eropa sekitar 7.96 juta liter, tahun 1925 menjadi 10.93 juta liter dan pada tahun 1928 meningkat menjadi 36.66 juta liter, dan tahun 1930 turun menjadi 16.01 juta liter akibat terjadinya Krisis *Malaise*, lebih lengkap dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.4. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Periode Tahun 1924 -1930



	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Hindia Belanda	7,96	10,4	16,56	9,67	36,66	34,44	16,1
Jawa & Madura	7,93	10,93	16,5	9,65	36,62	34,43	16,03
Luar Jawa	0,03	0,01	0,06	0,02	0,04	0,01	0,07

Sumber: Amsterdam, Gemeentearchief, Oliefabrieken Insulinde Makassar No.Inv. 590. Lihat pula R,N.J Kamerling. *De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*, Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal, 65-71. lihat juga Mededeeling van het Centraal Kantoor voorde Statistiek, Afdeelingen Landbouw en Handelsstatistiek, dalam *Economisch Weekblad* 14 April 1933, hlm, 1700.

Kehadiran OFI Makassar secara politis sangat strategis, karena selain misinya sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, lembaga ini diharapkan juga mampu mengimbangi laju

pertumbuhan ekonomi Singapura, sehingga pedagang-pedagang Cina Makassar dapat memutus krediturnya di Singapura dan beralih mencari kredit usaha dari perbankan di Makassar. Dengan demikian mereka dapat lebih mudah diawasi, diatur, dan bahkan menjalin hubungan dagang dengan OFI Makassar. Keberadaan OFI Makassar bukan hanya sebagai penghasil minyak kelapa, tetapi berfungsi pula menjadi pusat penyimpanan dan penimbunan kopra di wilayah Timur Besar.

Lembaga ini muncul sebagai induk berbagai perusahaan eksportir yang ada di Makassar. Sebagai lembaga bentukan pemerintah, OFI Makassar mendapatkan privilese yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Para pedagang yang di bawah naungan OFI Makassar dapat mengekspor kopra, asalkan memakai merek "Kopra OFI Makassar". Dalam hal operasional, OFI Makassar didukung oleh modal keuangan yang kuat, yang disokong oleh De Javasche Bank. Selain itu, para pedagang kopra yang mendapatkan kredit dari DJB Makassar diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah kopra kepada OFI Makassar. Untuk menampung kopra-kopra yang dibeli dari pedagang kopra tersebut, pihak OFI Makassar menyediakan sarana pergudangan yang memadai. Privilese lainnya adalah kopra yang akan diekspor harus mendapat rekomendasi dari OFI Makassar. Hal itu merupakan keunggulan OFI Makassar bila dibandingkan dengan berbagai eksportir lainnya yang ada di Makassar.

Kekuatan OFI Makassar sebagai lembaga bisnis bukan saja karena dukungan pemerintah melalui De Javasche Bank, tetapi juga munculnya kerjasama dengan berbagai perusahaan termasuk dengan perusahaan swasta seperti NV Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, sebuah perusahaan internasional dari Belanda dengan permodalan yang sangat kuat.[163] Perusahaan tersebut menanamkan modalnya dalam usaha

163 NV Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken didirikan oleh Anton Jurgens yang bergerak di bidang pembuatan margarin. Perusahaan ini bersama-sama dengan Lever Brother Ltd, sebuah perusahan asal Inggris merupakan perusahaan pendahulu dari Perusahaan Unilever. Kedua perusahan tersebut bergabung (merger) menjadi Unilever, N.V. pada bulan September 1929. Hingga kini perusahaan Unilever tetap eksis dan menjadi salah satu perusahaan raksasa dengan 400 merek di bidang barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Kisah merger kedua perusahaan ini dapat dilihat pada Eelco Boss, *The Scramble for Palms: A Comparative Historical Investigation: Two Companies sourcing, Two Commodities in Two Colonies, Tesis Master pada Universiteit Utrech,* (Utrech: Universiteit Utrech, 2014).

pergudangan dan pengembangan tangki minyak. Selain itu, perusahaan ini juga diberi tugas khusus untuk memasarkan minyak kelapa di berbagai perusahaan margarin di Eropa. Politik penetrasi Jurgens memiliki dampak luas bagi struktur OFI Makassar, karena OFI menjadi lembaga perminyakan yang semakin kuat. Aturan kerjasama antara OFI Makassar dengan Jurgens pada intinya antara lain: (a) Jurgens diberi hak untuk mengelola sebahagian pabrik minyak milik OFI Makassar sesuai dengan investasi modal yang dimiliki; (b) Jurgen diberi hak untuk memasarkan minyak (c) Dalam rangka pengembangan pabrik minyak pihak Jurgens memusatkan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa.[164]

Untuk menjamin kelangsungan OFI Makassar, maka setiap bulannya perusahaan itu membeli kopra dari berbagai daerah. Mereka membeli kopra baik melalui para pedagang maupun lewat perusahaan-perusahan besar.[165] Dalam tahun 1914 para perusahaan besar itu rata-rata membeli kopra 26.173,67 pikul perbulan.[166] Kopra yang dibeli dimasukkan dan ditampung pada gudang-gudang yang telah disediakan OFI Makassar. Tampak jumlah kopra yang dibeli itu masih jauh dari kebutuhan OFI Makassar sebenarnya, karena rata-rata setiap bulan mengonsumsi kopra rata-rata sekitar 50 ribu pikul.[167] Harga pembelian kopra OFI Makassar pada bulan November 1914 rata-rata 12 gulden perpikul ditambah biaya pengangkutan 1 gulden, biaya pengelolaan 50 sen, biaya komisi 25 sen, sehingga jumlah keseluruhan mencapai *f*13,75 perpikul. Dalam sepikul

164 R. N.J Kamerling. *Oliefabrieken Insulinde in Nederlands Indie*. Uitgeverij T. Wefer by Franeker. 1982, hlm. 68.

165 Para pedagang itu antara lain: Sech bin Aoem Alamri, J. Caffin, Gebr. Mahieu, dari Gorontalo; Sie Ka The, Ong Soei Song, Thio Tjin Ton, E. Toemoando, Tjia Kae Tae dan Tjia Tjin Tai masing dari Manado; Badjamal dari Donggala; R.v. Duivenbods dari Ternate. Sedangkan beberapa perusahaan yang masuk dalam kelompoknya adalah: H. Ensering, J. Jonquire, Dordtsche Patrolium Maatschappij dan Lindeteves-Stokokvis, KPM dari Makassar; J.M. chs. Nyland, G.C.T. van Dorp & Co, Becker & Co, Van Vliet & Zonnenz, Eles & Co, H. Oving-Yzer Staathandel dan Int. Cred. & Hs. Ver: " Rotterdam" masing-masing dari Surabaya; Working & Co. dari Bandung dan Moluksche Handelsvennootschap dari Ambon. Lihat Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 561, Lihat pula *Verslag Nopens de Reis van de Directeur van Economic Zaken en de Hoofdinspectuur Hoofd van de Dienst van Scheepvaart naar Celebes en de Molukken in September 1938*, hlm. 119-120.

166 Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 590.

167 Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 555.

kopra diperlukan 240-300 kelapa, satu biji kelapa bisa dinilai 4,1 sen. Dari harga kopra bulan November tahun 1914 dapat dikatakan harganya menurun bila dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun 1912 dengan harga perpikul kopra rata-rata 15,50 gulden.[168]

Pada umumnya kopra yang dibeli melalui ikatan kontrak, dengan catatan terlebih dahulu kopra dimasukkan ke dalam gudang untuk diperiksa. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah spekulasi para pembeli agar kopra yang diambil sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan pihak OFI Makassar. Salah satu perusahaan yang telah ditunjuk oleh OFI Makassar dalam hal pembelian kopra untuk wilayah Makassar adalah Perusahaan Firma Veth Bersaudara.[169]

Selain OFI Makassar bekerjasama dengan pihak Firma Veth Bersaudara**,** juga pihak OFI membuka kerjasama dengan OFI Padang dan berbagai berbagai pabrik minyak di Pulau Jawa. OFI Makassar akan mengirim kopra ke OFI Kediri, hal itu dilakukan jika persediaan kopra lokal di Kediri menipis akibat bencana musim kemarau yang panjang. Seperti misalnya terjadi pada tahun 1918 ketika kemarau panjang terjadi di Kediri dan gangguan letusan Gunung Kelud pada tahun 1919.[170]

Meningkatnya produksi minyak kelapa dan peningkatan permintaan di pasaran internasional membuat OFI Makassar melebarkan bisnisnya dengan membuka cabang di Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli tahun 1918. Cabang itu bergerak pada bidang pengadaan tangki minyak di dua tempat yaitu di San Francisco dan New York. Modal pembukaan itu menelan biaya 2 juta gulden (200 saham @ 10.000 gulden) yang terdiri dari 125 lembar saham, di mana 107 dimiliki OFI dan 18 lembar dimiliki oleh perusahaan *Clement*s asal Amerika. Dalam pembukaan cabang di Amerika Serikat itu pihak perusahaan Clements ditunjuk sebagai perwakilan OFI untuk wilayah Amerika Serikat. [171]

---

168 *Verslag van den Economischen Toestand der Inlandsche Bevolking over het jaar 1924*

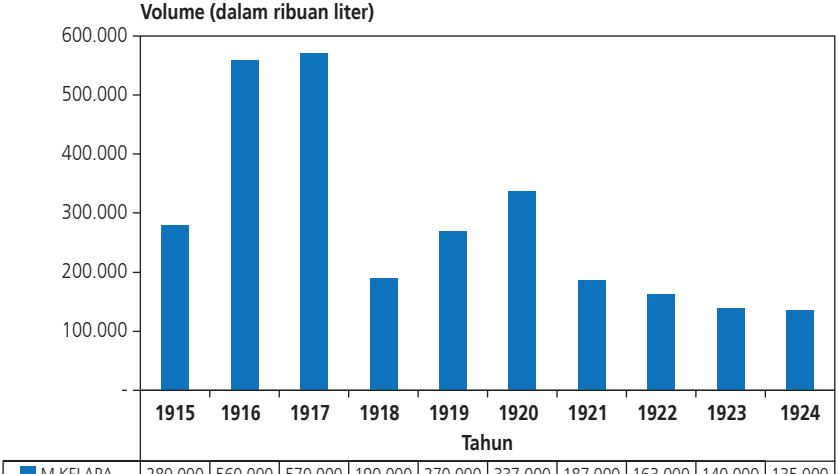
169 Gemeentearchief Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar. Inventarisasi No.555

170 Gemeetearchief, Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar, "Inventerisasi Laporan OFI Makassar 3 April 1919" No. 531.

171 R. N.J Kamerling. *Op.Cit,* hlm. 71.

Pembukaan cabang tersebut dilatari oleh permintaan ekspor minyak kelapa dengan jumlah yang besar ke Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan minyak kelapa di Amerika Serikat pada masa Perang Dunia I (1914-1918) yang besar. Kopra digunakan dalam pembuatan sabun sebagai bahan dasar pembuatan bom dalam menghadapi Perang Dunia I.[172] Dapat dilihat bahwa pada 1916 ekspor minyak kelapa OFI Makassar ke Amerika Serikat sebesar 560 ribu liter dan setahun kemudian pada 1917 meningkat ke angka 570 ribu liter. Hal ini lah yang kemudian membuat OFI Makassar berani untuk membuka cabangnya di Amerika Serikat. Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5. Ekspor Minyak Kelapa Makassar ke Amerika Serikat (1915-1924)



	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
M.KELAPA	280.000	560.000	570.000	190.000	270.000	337.000	187.000	163.000	140.000	135.000

Sumber: NAD, NHM Makassar, tahun 1915-1924, No Inv.5112. Lihat juga Rapporten WGH Ensenrin De Administrateur OFI Makassar, 1924, No Inv 590.

172 Sabun bukan saja digunakan sebagai alat pencuci atau pembersih pada toilet-toilet tetapi juga sebadai bahan alat pembuatan bom, di mana pemakaian senjata semakin meningkat pada perang Dunia I. untuk lebih jelanya lihat laporan Arsip NHM Makassar, No. inv 5112

Kegemilangan ekonomi Makassar terutama dari hasil ekspor kopra dan minyak kelapa ke pasar internasional harus terhenti akibat dari jatuhnya ekonomi dunia saat itu. Perekonomian dunia masuk pada periode kemerosotan ekonomi yang amat besar seringkali disebut sebagai Depresi Besar (*Great Depression*) atau Krisis *Malaise* yang terjadi pada dekade 1930. Depresi ekonomi ini berdampak luas di dunia, termasuk hingga ke Hindia Belanda, dalam hal ini Makassar. Penjelasan mengenai Depresi Besar dan kondisi ekonomi Makassar pada periode tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

BAB III
DEPRESI DAN KRISIS (1930–45)

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, resesi dan depresi ekonomi telah berulang kali terjadi. Resesi ekonomi ini berdampak luas pada penurunan kondisi ekonomi suatu wilayah dalam hal ini terutama pada sektor perdagangan. Dalam kamus ekonomi, resesi dan ekonomi mengacu pada suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, penurunan aktivitas perdagangan, dan maraknya penutupan perusahaan akibat kebangkrutan.

Krisis terjadi pada 1929 merupakan salah satu bencana ekonomi terbesar pada abad ke-20. Krisis yang juga dikenal sebagai *malaise* itu bermula ketika Amerika Serikat memasuki masa resesi ekonomi pada musim panas (Mei–Juli) 1929. Selama masa resesi tersebut, daya beli masyarakat menurun sehingga mengakibatkan penumpukan barang dan menghambat laju produksi. Di sisi lain, harga saham mengalami kenaikan.[173] Hingga musim gugur (Agustus–Oktober) 1929, terjadi penjualan saham besar-besaran. Pada 24 Oktober 1929, bursa saham di Wall Street New York, menjual sekitar 13 juta lembar saham sehingga membuat nilainya merosot tajam dan jatuh di bawah harga pasar yang sangat rendah. Momen itu kemudian dikenal dengan nama 'Kamis Hitam'. Lima hari berselang, gelombang kepanikan kembali menerpa Wall Street ketika penjualan saham menembus angka 16 juta lembar.[174] Hal tersebut berdampak langsung pada kemerosotan ekonomi dunia.

173 Booth (1998: 36–9).

174 Booth (1998).

Para ekonom dunia berpandangan bahwa depresi ekonomi yang terjadi pada kurun 1930-an adalah akibat kekeliruan pengelolaan kebijakan ekonomi pada dekade sebelumnya (1920-an). Periode tersebut ditandai dengan munculnya ledakan produksi tanpa diikuti dengan keuntungan yang memadai pada petani dan pekerja, namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni meningkatnya pembangunan pabrik baru yang berdampak pada barang-barang produksi yang dihasilkan jumlahnya lebih besar dari pada tingkat kebutuhan konsumen. Dalam logika sederhana, saat itu produksi (penawaran) lebih besar daripada kebutuhan konsumen (permintaan) sehingga menyebabkan harga-harga jatuh.

Bab ini akan menjelaskan dua periode kemerosotan ekonomi Makassar, yakni 'depresi' ekonomi 1930 dan masa 'krisis' akibat Pendudukan Jepang pada 1942. Pada periode depresi, akan dibahas kondisi ekonomi pada masa depresi serta dampak yang ditimbulkan di Makassar. Dalam menanggulangi pengaruh kemerosotan ekonomi akibat depresi, De Javasche Bank (DJB) sebagai kepanjangtanganan Pemerintah Kolonial dalam bidang ekonomi dan moneter melakukan beberapa kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. Sementara pada bagian 'krisis' ekonomi dan politik masa Pendudukan Jepang, akan dibahas mengenai kedatangan Jepang hingga kebijakan ekonomi yang salah satunya adalah melikuidasi bank-bank Eropa, termasuk DJB yang diganti menjadi Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).

De Javasche Bank dan Krisis Ekonomi Dunia

Runtuhnya pasar modal di Amerika Serikat berimbas pula pada situasi perdagangan bagi pasar ekspor-impor di Eropa ataupun negara-negara koloni. Di Hindia Belanda, pada saat itu terjadi penurunan daya beli dan penumpukan hasil produksi akibat permintaan yang menurun. Depresi ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda pada periode tersebut merupakan titik balik dari masa-masa puncak kegiatan ekspor yang pernah dicapai dalam kurun 1920-an. Depresi ekonomi yang terjadi berdampak pada penurunan nilai ekspor Hindia Belanda secara drastis. Hal itu kemudian

berimbas pada munculnya kesulitan ekonomi, penurunan hubungan perdagangan dan bahkan banyak perusahaan ditutup sehingga mengakibatkan pendapatan Hindia Belanda menjadi merosot.

Keadaan itu juga diperparah dengan mahalnya nilai tukar emas terhadap mata uang gulden. Pemerintah kolonial saat itu tetap berpegang pada standar emas tanpa mendevaluasi nilai mata uang, sementara persaingan dengan negara-negara Blok-Sterling yang melalukan devaluasi semakin menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan di Hindia-Belanda.[175] Puncak krisis terjadi pada 1935, ketika nilai ekspor Hindia Belanda pada 1929 berjumlah 1.483.000.000 gulden terjun menjadi 447.000.000 gulden. Data lebih lengkap mengenai penurunan nilai ekspor Hindia Belanda dapat dilihat pula dari angka indeks nilai dan volume perdagangan berikut. Tabel 3.1 menggambarkan situasi pasar ekspor Hindia Belanda secara keseluruhan selama periode depresi.

Tabel 3.1.
Nilai Perdagangan Hindia Belanda 1928–36

NILAI EKSPOR HINDIA BELANDA 1929–36 (DALAM JUTA GULDEN)								
	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Ekspor	1.483	1.160	749	544	470	489	447	539
NILAI INDEKS PERDAGANGAN HINDIA BELANDA								
	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Nilai	100	92	73	47	34	31	34	30	37
Volume	100	106	103	84	89	88	94	98	102

Sumber: Djojohadikusumo (1989: 28–9).

Dalam perkembangan ekonomi dunia, masa depresi yang mengakibatkan lambatnya perputaran perdagangan sebenarnya telah berulang kali terjadi di Hindia Belanda. Sejak 1925, terjadi penurunan nilai ekspor perdagangan. Data statistik menunjukkan bahwa pada 1900 nilai ekspor berjumlah 258 juta gulden. Jumlah tersebut naik menjadi 2.228 juta gulden pada 1920. Sebaliknya, penurunan terjadi pada 1925, yaitu

175 Djojohadikusumo (1989: 28–9).

hanya 1.801 gulden dan pada 1930 menjadi 1.160 juta gulden. Jumlah itu terus berlanjut hingga pada 1940 hanya mencapai 825 juta gulden.[176]

Bagi Hindia Belanda sebagai salah satu produsen kopra terbesar, perdagangan kopra mempunyai arti yang cukup besar. Ekspor Hindia Belanda pada 1934 yang mencapai jumlah 25.577.000 gulden, salah satu komponennya berasal dari kopra dan minyak kelapa yang masing-masing menduduki peringkat ke-10 dan ke-13 dengan nilai masing-masing sebesar 16.860.000 gulden dan 8.717.000 gulden. Kedua jenis produk tersebut merupakan sumber pendapatan yang penting dan berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduk pribumi karena merupakan hasil perkebunan rakyat. Oleh karena itu, turunnya harga kopra dan minyak kelapa pada awal 1930-an itu memengaruhi kehidupan petani kelapa, meskipun tidak separah yang dialami oleh pedagang kopra termasuk para eksportir kopra.

Seperti telah digambarkan pada bagian sebelumnya, pertumbuhan nilai ekspor yang terjadi pada 1920-an merupakan periode puncak dari berbagai jenis ekspor di Hindia Belanda. Nilai ekspor yang menurun pada 1925 dapat dikatakan tetap tinggi bila dibandingkan dengan nilai ekspor yang dicapai pada 1900, yaitu sekitar empat kali lipat. Sementara itu jumlah ekspor yang diraih pada 1930 terus menurun hingga tahun 1940. Hal tersebut terlihat bahwa sejak 1930 Hindia Belanda—seperti negara-negara lain di dunia—mengalami krisis ekonomi yang membuat terjadinya penurunan kondisi ekonomi. Menurunnya hasil ekspor pada masa depresi 1930-an ditunjukkan dengan menurunnya nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas ekspor.

Perdagangan kopra pada masa depresi di Hindia Belanda mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Hal itu karena permintaan kopra di pasaran dunia mengalami penurunan akibat kurangnya permintaan di pasaran Eropa dan dipengaruhi juga oleh munculnya kebangkrutan berbagai perusahaan. Penurunan permintaan kopra dipengaruhi juga oleh kemunculan berbagai macam minyak subtitusi yang bahan dasarnya bukan dari kopra, tetapi ikan, penyu, lemak babi, biji kapas, dan kacang-kacangan. Munculnya berbagai macam minyak selain kopra tersebut

176 Sievers (1974: 134).

menyebabkan terjadinya kelebihan produksi. Akibatnya harga kopra di pasar dunia terus menurun terutama pada masa-masa depresi.[177]

Melemahnya aktivitas perdagangan kopra dunia pada tahun 1930 hingga 1932 lebih banyak disebabkan oleh beredarnya produksi minyak ikan paus dan minyak dari biji kapas, serta minyak dari kacang-kacangan. Jenis minyak tersebut sejak 1929, menjelang awal krisis, memang sudah cukup banyak tersedia. Di Eropa dan Amerika Serikat tersimpan ratusan ribu ton minyak nonkopra. Namun awal 1933 jenis minyak tersebut mulai berkurang. Oleh karena itu, permintaan kopra mulai membaik yang ditunjukkan dengan naiknya ekspor kopra Makassar ke Amerika, yaitu 8,79 ton pada tahun 1930 menjadi 38.000 ton pada 1933.[178]

Di Amerika Serikat sejak 1931 terjadi penurunan permintaan kopra akibat kenaikan permintaan minyak biji kapas. Untuk memenuhi permintaan tersebut sejumlah besar biji kapas mentah telah dibeli oleh pabrik-pabrik penggilingan untuk diproduksi. Puncak produksi minyak biji kapas terjadi pada 1936. Di Amerika Serikat produksi minyak tersebut mulai naik mencapai 93.770.000 pon, bahkan pada 1936 mencapai 145.129.000 pon.[179]

Lain halnya di pasaran Eropa, fluktuasi penggunaan minyak kelapa sangat ditentukan oleh tersedianya minyak ikan paus di pasaran. Di Norwegia, misalnya, pada 1936 penggunaan minyak kelapa terus meningkat karena pemerintah Norwegia mengeluarkan aturan larangan penangkapan ikan paus pada 10 Juni 1935. Sejak itu, pemakaian kopra yang dipasok melalui Denmark terus meningkat,[180] namun sebaliknya penggunaan minyak ikan paus terus menurun yaitu hanya sekitar 400.000 ton pada periode 1934–35.[181]

Sementara itu, sejak 1928 ekspor kopra Hindia Belanda ke Jerman terus mengalami penurunan yang cukup berarti. Impor kopra dari Jawa

177 Asba, (2007: 158).

178 NAD, Arsip NHM Makassar 1930, 1933, No. Inv. 5113.

179 Memorie van Overgave. Laporan Asisten Residen Manado A. Stuurman, 10 Juli 1936.

180 Ekspor kopra dari Makassar ke Denmark pada 1930 hanya mencapai 13.790 ton dan pada 1936 naik menjadi 29.465 ton; lihat *Jaarverslag van de Handelsveeniging Makassar 1930*, hlm. 6 dan Laporan NHM Makassar 1936, No. Inv. 5113.

181 Memorie van Overgave. Laporan Asisten Residen Manado A. Stuurman (1936).

misalnya, dari 15.000 ton pada 1928 turun menjadi 1.000 ton pada 1930 dan dari luar Jawa pada periode yang sama sejumlah 81.000 ton menjadi 43.000 ton. Penurunan ekspor kopra ke Jerman pada periode tersebut disebabkan oleh munculnya lemak gemuk dari Amerika Serikat.[182]

Salah satu negara yang tetap menjadi pengimpor kopra Hindia Belanda adalah Denmark. Hingga 1935 permintaan terhadap kopra dari negara tersebut cukup tinggi. Mereka mengimpor kopra sebagai bahan dasar pembuatan lemak nabati sehingga ekspor kopra ke Denmark dapat terus berlangsung tanpa rintangan. Hasil industri pengolahan minyak menjadi berbagai produk dari Denmark setengahnya dikirim ke luar negeri, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan pembuatan mentega.

Perkembangan perdagangan ekspor kopra yang begitu masif nyatanya tidak mampu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi petani kelapa. Walaupun secara rasional tingginya volume perdagangan akan mendatangkan keuntungan yang besar namun pada praktiknya hal tersebut tidak terjadi bagi golongan petani kelapa. Terdapat beberapa faktor penghambat yang tidak bisa diukur secara pasti mengenai biaya-biaya produksi dalam industri rumah tangga pribumi yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep ekonomi Barat secara rasional. Ada faktor-faktor tenaga kerja yang semestinya memerlukan biaya namun para petani tidak diperhitungkan sebagai ongkos karena dikerjakan secara padat karya. Di samping itu, berbagai cara yang dilakukan petani sehingga mereka tidak mengeluarkan biaya karena harga kopra rendah. Berbeda jika pada saat harga kopra tinggi petani bebas menyewa pekerja dari luar keluarga dan dibayar dengan sistem gaji harian. Pada saat harga kopra jatuh para pekerja dibayar dengan sistem bagi hasil atau bekerja tanpa upah dengan sistem kekeluargaan.

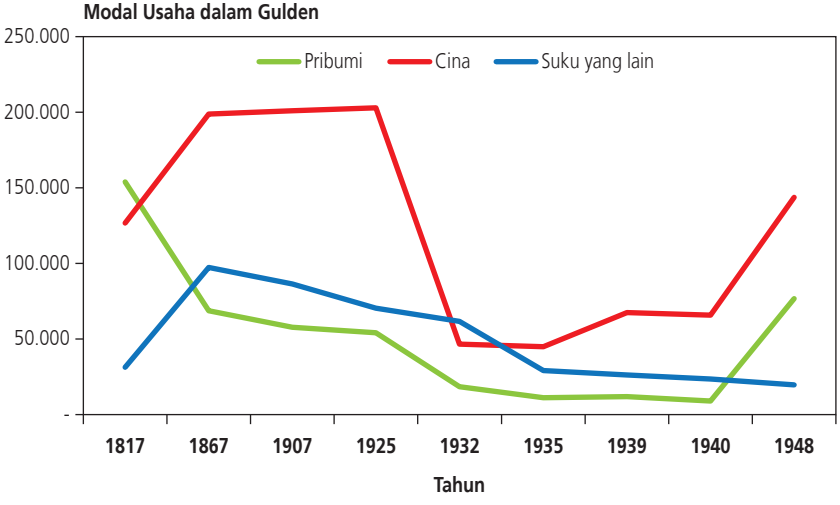
Untuk wilayah Minahasa, pihak petani hanya bisa memperoleh hasil perkebunan sebesar 40 persen dari keseluruhan harga pasaran, 20 persen digunakan untuk biaya angkutan (gerobak) yang sebenarnya itu hak petani sendiri sehingga sebenarnya total yang bisa didapatkan petani bisa mencapai 60 persen. Sementara itu di Jawa, turunnya harga kopra menyebabkan banyak petani kelapa tidak menjual kelapanya, tetapi

182 Memorie van Overgave. Laporan Asisten Residen Manado A. Stuurman (1936).

diolah menjadi minyak kelapa untuk kepentingan rumah tangga sendiri. Hal itu merupakan salah satu sebabnya minyak kelapa yang diproduksi oleh pabrik minyak kelapa milik orang Tionghoa kurang laku di pasaran.[183]

Depresi ekonomi yang terjadi selain memengaruhi ekspor, juga berpengaruh pada permodalan dari rangkaian bisnis ekspor kopra di Makassar. Pada periode 1925–32 terjadi penurunan luar biasa investasi modal dari para pebisnis Cina pada bidang perkopraan. Pada periode 1925, modal dari pebisnis Cina berada pada angka rata-rata 200.000 gulden per pengusaha, namun memasuki 1932 angka tersebut turun drastis menjadi hanya 50.000 per pengusaha. Sementara untuk pengusaha pribumi dalam tahun 1925 berada pada angka rata-rata 50.000 per pengusaha dan pada 1932 turun menjadi setengahnya. Untuk pengusaha lainnya (India, Jepang, Arab) juga mengalami penurunan dalam permodalan, pada 1925 berada pada angka rata-rata 75.000 gulden per pengusaha dan pada 1932 turun menjadi hampir menuju 50.000 gulden per pengusaha. Mengenai

Grafik 3.1. Perkembangan Kepemilikan Modal Usaha di Makassar 1817–1948 (dalam Gulden)



Sumber: ANRI Makassar, No. 354 (1846); Memorie van Overgave 1937–41; Laporan Perdagangan NIT (1949).

183 NAD, Arsip NHM Makassar 1934, No. Inv. 5113.

modal dari pengusaha Eropa tidak diketahui dengan pasti. Namun dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan pula dalam segi investasi modal pada bisnis kopra. Data lebih lengkap dari modal usaha dalam bisnis kopra dapat dilihat dalam Grafik 3.1. di atas.

Sementara itu akibat dari produksi yang melimpah sementara permintaan pasar dari Eropa dan Amerika Serikat menurun dengan drastis akibat depresi membuat harga kopra harus mengalami penurunan signifikan. Sebagaimana dilihat pada laporan De Handelsvereeniging Makassar (1930–40), harga kopra jenis matahari di Makassar berada di titik terendah pada 1934 yakni sekitar 1,15 hingga 1,25 gulden (April/Mei) per 1.200 kilogram. Padahal pada 1931, berada di angka 6,55–5,05 gulden (April/Mei) per 1.200 kilogram. Fluktuasi harga kopra di Makassar pada periode depresi dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Harga Kopra Jenis Matahari di Makassar 1931–40
(dalam Gulden; per 1.200 Kilogram)

BULAN	TAHUN						
	1931	1934	1935	1936	1937	1939	1940
Januari	6,50	1,60	2,25	3,70	13,30	4,15	5,10
Februari	6,50	1,50	2,80	3,35	10,95	4,75	5,35
Maret	6,80	1,40	2,45	3,90	10,55	4,60	5,40
April	6,55	1,15	2,35	3,95	9,35	4,50	4,80
Mei	5,05	1,25	2,75	2,85	8,10	4,80	2,50
Juni	4,45	1,45	2,40	3,05	7,30	4,70	3,80
Juli	5,35	1,35	1,90	3,05	7,70	5	3,60
Agustus	4,40	1,35	2	3,45	7,30	-	2,70
September	3,10	1,20	2,20	4,75	6,90	-	3
Oktober	4	1,30	2,85	5,15	7,30	-	2,60
November	3,75	1,25	3,20	5,90	6,10	-	2,40
Desember	3,30	1,55	3,85	7,25	6,10	-	2,65

Sumber: Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar Over 1930–1940.

Naik turunnya harga kopra sangat ditentukan oleh perkembangan permintaan minyak kopra di pasaran dunia. Pada bulan Agustus hingga

Desember 1939 tidak dicantumkan karena peluang ekspor kopra Makassar ke luar negeri hilang akibat blokade perang, jatuhya Denmark dan Norwegia (April 1940) kemudian diperburuk lagi dengan jatuhnya Belanda, Belgia, dan Luxemburg pada bulan berikutnya, menyebabkan harga kopra jatuh sampai titik yang paling rendah.

Membaiknya permintaan kopra pada September 1937 membuat Departemen Perdagangan Hindia Belanda mengatur langsung pembeliannya. Ketika itu harga kopra membaik karena Amerika Serikat membutuhkan pasokan kopra dalam skala besar sebagai reaksi kegagalan panen kopra di Filipina. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah itu permintaan menjadi lebih kecil dari penawaran sehingga harga kopra kembali turun.[184]

Keadaan lebih memprihatinkan ketika pasar ekspor kopra Hindia Belanda terutama Makassar—yang sebagian besar berada di Eropa Barat seperti Belanda, Belgia, dan Prancis—tidak menerima lagi kopra dari Makassar karena negara-negara tersebut diduduki oleh Jerman. Akibatnya penjualan kopra ke negara-negara tersebut praktis berhenti. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Hindia Belanda memberikan jaminan kestabilan harga dengan bantuan pembelian kopra. Alasan pemerintah membeli kopra secara langsung adalah untuk menjaga alat produksi dan perdagangan tetap bisa berjalan, sehingga pengendalian harga dari berbagai komoditas ekspor yang harganya terus merosot di pasaran dunia dapat dicegah. Oleh karena itu pemerintah mencoba mengeluarkan dana yang besar melalui De Javasche Bank untuk membangun berbagai gudang penampungan bagi tiap-tiap wilayah produsen.[185]

Hal lain yang dilakukan DJB Makassar pada periode tersebut adalah menjaga persaingan antara bank-bank komersial di Makassar. Akibat dari kemerosotan ekonomi, pemasukan bagi bank-bank komersial menurun. Untuk membuat atmosfer bisnis di Makassar tetap sehat, DJB memberikan perhatian lebih pada persaingan bisnis perbankan. Namun karena bertindak sebagai bank sirkulasi, DJB tidak bisa memasuki seluruh ranah kompetisi bisnis di Makassar, dan hanya bertindak mengawal dan

184 De Bergcultures, No. 36. Pedoman Tani (1940: 10–125).

185 NAD, Arsip NHM Makassar No. Inv. 5114.

memastikan bisnis berjalan dengan baik. Dalam sebuah surat tanggal 12 September 1937 dikatakan bahwa DJB berupaya mengawasi usaha perbankan di Makassar dengan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi ekonomi di Makassar kepada para direksi di Batavia.[186]

Untuk menstimulus ekonomi yang lesu akibat depresi, DJB lebih banyak memberikan kredit usaha kepada perusahaan-perusahaan besar dan bank-bank lain ketimbang kepada perseorangan. Hal ini karena pengusaha besar dan perbankan memiliki keuangan yang lebih sehat daripada pengusaha kecil ataupun perseorangan. Hal yang membedakan periode ini dengan sebelumnya adalah mengenai pengawasan dan birokrasi kredit yang lebih ketat. Dalam laporan-laporan DJB Makassar sejak masa depresi hingga menjelang kedatangan Jepang berlangsung korespondensi antara pihak DJB Makassar dengan direksi di Batavia mengenai permohonan arahan khusus pemberian kredit kepada beberapa perusahaan di Makassar. Dari korespondensi itu terlihat pola hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang DJB dalam hal pemberian kredit. Pola birokrasinya adalah kantor cabang mengajukan usulan pemberian pinjaman dan informasi lengkap kelayakan penerima pinjaman kepada kantor pusat. Kantor pusat kemudian melakukan analisis kredit dan memberikan keputusan persetujuan untuk dieksekusi oleh kantor cabang.[187]

Telah disebutkan, De Javasche Bank hadir sebagai perwakilan pemerintah dalam bidang perekonomian terutama moneter dan perbankan. Peran DJB tidak hanya terlibat dalam pengembangan perekonomian Kota Makassar melalui pemberian kredit kepada para pengusaha, namun juga berkontribusi dalam pemberian kredit kepada pemerintah Kota Makassar. Pemberian kredit DJB digunakan oleh pemerintah kolonial untuk melakukan pembangunan infrastrukur kota.

Dalam Memorie van Overgave van Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden (naskah serah terima jabatan) 1931, dikatakan bahwa DJB turut berkontribusi dalam pembangunan berbagai irigasi di Makassar dan sekitarnya dengan memberikan kredit modal kepada pemerintah.

186 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 12 September 1937.

187 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar (1929–41).

Irigasi yang dibangun itu antara lain di daerah Bila, Bengo, Leworang, Palakka, Tempe, Sidenreng, Tallo dan Jeneponto.[188]

Tujuan utama pembangunan irigasi tersebut adalah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat depresi dengan meningkatkan hasil panen melalui upaya memperluas areal persawahan yang menggunakan irigasi. Hal ini karena kebanyakan sawah di wilayah tersebut masih mengandalkan curah hujan sehingga hasil panennya tidak sebanyak areal sawah yang telah menggunakan irigasi. Di Sulawesi Selatan, pada 1920 luas areal irigasi persawahan adalah 20.500 hektar dan meningkat menjadi 57.000 hektar pada 1936. Namun luas areal irigasi persawahan itu masih sangat rendah dibandingkan dengan total luas arel persawahan Sulawesi Selatan yang pada 1936 seluas 227.193 hektar. Meluasnya areal persawahan yang menggunakan irigasi berpengaruh langsung pada peningkatan produksi beras. Pada 1936, nilai ekspor beras Sulawesi Selatan meningkat menjadi 3.300.000 gulden dari 300.000 gulden pada 1920.[189]

Selain bantuan kredit untuk pembangunan irigasi, DJB Makassar juga memberikan kredit kepada Gemeente Makassar untuk pembangunan infrastruktur kota. Pada laporan DJB Makassar (5 Februari 1940) disebutkan bahwa pada 1939 DJB telah memberikan kredit kepada Gemeente Makassar sebesar 626.270 gulden. Dari jumlah tersebut, dana dialokasikan untuk perawatan pekerjaan publik sekitar 40.000 gulden; perbaikan kampung 20.000 gulden; perbaikan jalan, jembatan, dan selokan 15.000 gulden; pembangunan taman 5.000 gulden; pembangunan lima sekolah publik 6.000 gulden; dan pembangunan poliklinik 22.000 gulden.[190]

Sementara itu, posisi utang Gemeente Makassar pada 1940 seperti yang dilaporkan kepada DJB Makassar sebesar 1.812.902,59 gulden dengan rincian sebesar 1.392.000 gulden pinjaman dari NHM yang digunakan untuk pembangunan pipa air di Kota Makassar, lalu sebesar 396.000 gulden pinjaman dari DJB Makassar, dan 24.902,59 gulden

188 Lebih lanjut dalam Memorie van Overgave van Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden dan Laporan F.O. van Deursen, 11 Oktober 1931.

189 ANRI, Memorie van Overgave van Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden, 24 Februari 1940.

190 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 5 Februari 1940.

berasal dari NV Volkhuisvesting te Makassar (Perumahan Rakyat Makassar) yang digunakan sebagai pinjaman para pegawai Eropa. Sebagai jaminan pembayaran utang tersebut, pihak Gemeente Makassar menjaminkan aset-aset tidak bergerak (hipotek) berupa tanah milik *gemeente*.[191]

Aktivitas pemberian kredit dan pengawasan perbankan terus dilakukan oleh DJB Makassar hingga menjelang kedatangan Jepang pada 1942. Kala itu DJB sibuk melalukan antisipasi dan bersiap-siap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang diambil DJB menjelang kedatangan Jepang akan dijelaskan pada bagian berikut.

Menjelang Kedatangan Jepang

Kondisi ekonomi Hindia Belanda, khususnya Makassar, berangsur-angsur pulih menjelang akhir 1930-an. Perdagangan kembali lancar dengan harga kopra yang kembali naik. Bahkan pada Januari 1937 merupakan puncak harga kopra yakni sebesar 13,30 gulden per 1.200 kilogram dibandingkan dengan bulan Januari 1936 yang hanya 3,70 gulden per 1.200 kilogram. Walaupun demikian kondisi kenaikan harga kopra tersebut tidak berlangsung lama. Pada 1939, harga kopra turun kembali menjadi 4,15 gulden.[192] Penurunan terjadi karena Perang Dunia II di Eropa. Sebagai pasar utama kopra Hindia Belanda, permintaan dari negara-negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Perancis, dan Denmark, harus terhenti karena wilayahnya diduduki oleh pasukan Jerman.

Untuk mengembalikan harga kopra seperti sebelum depresi ekonomi, maka pada September 1939 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Het *Coprafonds*.[193] Lembaga tersebut bertujuan mengatur pembelian, penggudangan dan penjualan kopra, sehingga harga kopra yang semakin merosot di pasaran akibat depresi dapat ditanggulangi. Selain itu, lembaga tersebut juga bertujuan mengatasi kemerosotan harga

191 Arsip Bank Indonesia, 5 Februari 1940.

192 Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar over 1930–1940.

193 *Pemberitaan Makassar*, 25 September 1939.

sebagai akibat konsumen utama kopra di Eropa Barat menurun karena gangguan perang.[194] Akibatnya, penjualan kopra ke negara-negara Eropa praktis terhenti. Untuk mengatasi hal itu pemerintah memberikan jaminan kestabilan harga melalaui bantuan pembelian kopra. Kopra yang dibeli kemudian ditimbun dan baru dijual kembali ketika harga berangsur normal. Untuk memperkuat kebijakan itu maka pemerintah kolonial menunjuk DJB mendanai *Coprafonds*.[195]

Berbagai langkah dilakukan pemerintah kolonial, antara lain dengan menurunkan biaya pengangkutan dan membangun gudang penampungan kopra. Mengenai upaya menurunkan biaya pengangkutan kopra yang harganya terus merosot di pasaran dunia, pemerintah kolonial mengadakan Bataviasche Vracht Conferentie (BVC) pada 1937 yang meminta kepada para penyedia jasa angkutan laut untuk menurunkan biaya pengangkutan dengan subsidi dari pemerintah.[196]

Keterlibatan langsung pemerintah dalam tataniaga kopra mengundang protes dari berbagai perusahaan dagang di Makassar. Mereka menganggap bahwa keterlibatan pemerintah tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Pemerintah menjawab melalui Direktur Urusan Ekonomi Hindia Belanda G. H. C. Hart, yang mengatakan bahwa keterlibatan langsung pemerintah mengatur perdagangan kopra dilihat sebagai cara yang tidak bisa dihindari pada masa krisis untuk mengatasi situasi yang menjadi semakin buruk. Kebijakan pemerintah tersebut bukanlah bertujuan menghalangi pasar bebas, melainkan menyelamatkan harga komoditas kopra yang terus merosot tajam.[197]

De Javasche Bank Makassar turut pula memperhatikan kondisi tersebut. Pada sebuah laporan DJB Makassar (10 April 1940) diberitakan mengenai kondisi ekspor kopra dari Timur Besar ke Eropa yang sedang dilanda peperangan. DJB melaporkan bahwa dalam kondisi yang tidak

194 KITLV Leiden, Jaarverslag van de Handelvereeniging Makassar over 1940: 10.

195 Gemeentearchief, Oliefabrieken Insulinde Makassar, No. Inv. 590. Lihat juga Laporan NHM Makassar, No. Inv. 5113.

196 *Pemberitaan Makassar*, 25 September 1940.

197 Ministerie van Buitenlandse Zaken Archief, "Copra en *Coprafonds* in Oost-Indonesië. Dominerende positie van copra in Oost-Indonesie," No. Inv. 02024.

menentu tersebut belum diketahui apakah pengiriman kopra ke Eropa akan terus dilakukan atau akan dihentikan sementara. Selain itu, DJB mendapatkan analisa dari Kamar Dagang Makassar bahwa ada ide untuk mencari pasar lain di luar Eropa, namun hal tersebut pasti akan sangat sulit mengingat kondisi yang tidak menentu akibat perang. Petikan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

> *Semenjak beberapa waktu yang lalu kamar dagang di Makassar sibuk menganalisis situasi, yang akan terjadi sebagai akibat dari keadaan perang di Eropa, penjualan kopra dari "De Groote Oost" akan mengalami perhentian baik sementara atau dalam jangka yang panjang. Meskipun dalam lingkup pengiriman, terlihat bahwa pengirimannya cukup teratur dan terdapat perkembangan pasar yang tak terduga sejak Oktober 1939, kemungkinan menganggap sudah memperdalam masalah ini, ingin mencegah kantor kami bahwa itu selain berguna, tetapi juga ada alasan yang cukup untuk kemungkinan situasi semacam itu, yang dapat membawa konsekuensi yang serius. Sudah jelas bahwa dalam keadaan seperti ini, harus mencari pasar lain untuk kopra kami. Tetapi menurut kami perubahan seperti ini akan sangat sulit.*[198]

Menurut Kamar Dagang Makassar lewat korespondensi dengan DJB Makassar, dengan situasi perang yang terjadi, akan sangat merugikan bagi jalannya perdagangan kopra ke pasaran Eropa. Terganggunya perdagangan kopra akibat permintaan yang menurun dan blokade pasukan Jerman menurut mereka "akan sangat merusak tingkat kemakmuran penduduk di wilayah produksi."[199] Untuk menanggulangi kondisi seperti itu, Kamar Dagang Makassar merekomendasikan memperkuat ekonomi dengan mengurangi utang (kredit) dan mengalihkan modal usaha melalui pembiayaan mandiri lewat kelompok orang kaya dan orang-orang Tionghoa yang mampu berbisnis tanpa mengandalkan kredit. Lalu mereka menyarankan untuk menjadikan Makassar sebagai pusat penimbunan kopra di Timur Besar karena saat itu masih terdapat pusat penimbunan kopra lainnya seperti di Manado.

> *Khususnya di Makassar terdapat kelompok orang kaya dan orang-orang Tionghoa yang tanpa pinjaman, sudah pasti siap untuk membiayai kopra untuk rekening mereka sendiri atau untuk rekening asing, bukan hanya dari spekulatif oleh produk. Dalam hal stagnasi kopra pelayaran ke luar negeri atau karena komplikasi internasional penjualan produk ini, ketika Makassar akan berfungsi sebagai tempat penimbunan,*

198 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 5 Februari 1940.

199 Arsip Bank Indonesia, 5 Februari 1940.

hal ini akan menjadi pendukung utama untuk perdagangan impor di daerah pesisir di "De Groote Oost."[200]

Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan mengurangi biaya angkut kopra yang dianggap mahal. Mereka menilai bahwa jumlah kopra yang diangkut dari Makassar tidak proporsional dengan biaya operasional pengirimannya ke Eropa. Biaya pengangkutan kopra Makassar pada 1939 sebesar 69 gulden per ton. Penurunan jumlah kopra yang dimuat di dalam kapal untuk dikirim ke Eropa terjadi karena permintaan yang menurun drastis. Usaha untuk menurunkan biaya angkut kopra telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui BVC dengan memberikan subsidi pengangkutan kepada operator pelayaran. Menurut Kamar Dagang Makassar upaya tersebut merupakan tindakan rasional yang diambil pemerintah. Namun, perlu ditekankan selain memberikan subsidi, pemerintah juga seharusnya mampu memberikan jaminan atas rute pelayaran yang aman agar pengiriman dapat sampai ke Eropa dengan selamat. Kamar Dagang Makassar dalam analisisnya memberikan solusi dengan menggabungkan muatan kopra dengan muatan produk komoditas lain dari Makassar untuk dikirimkan ke Eropa. Menurut mereka hal itu akan mampu membantu mengurangi mahalnya biaya angkut karena biaya operasional pelayaran dapat dibebankan pula pada komoditas lain bukan hanya dibebankan seutuhnya pada komoditas kopra.[201]

Untuk memperkuat jaringan perdagangan kopra di Hindia Belanda di tengah kondisi Perang Dunia II yang memengaruhi kondisi ekonomi, pemerintah kolonial melalui Departemen Ekonomi di Batavia mendorong pembentukkan sebuah asosiasi eksportir kopra di Sulawesi dengan nama Vereeniging van Exporteurs op Celebes van Copra (Excelco) pada 13 Januari 1941. Tujuan pembentukan asosiasi itu untuk bersama-sama melakukan perdagangan kopra dengan destinasi Meksiko dan Pesisir Pasifik atau destinasi lainnya yang akan dipilih bersama-sama oleh para mitra yang tergabung di dalamnya.[202] Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka membutuhkan pasar alternatif pengganti

200 Arsip Bank Indonesia, 5 Februari 1940.

201 Arsip Bank Indonesia, 5 Februari 1940

202 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 Januari 1941.

pasar Eropa yang sudah tidak berjalan akibat perang. Adapun perusahaan-perusahaan eksportir kopra yang bergabung di dalam asosiasi ini adalah sebagai berikut (Tabel 3.3).

Tabel 3.3.
Daftar Perusahaan yang Tergabung dalam Excelco

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ASAL	KEPEMILIKAN SAHAM (PERSEN)
1	Firma Gebroeders Bouvy	Manado	16
2	Handel Mij Lie Boen Yat	Manado	16
3	Handel Mij Kian Gwan	Makassar	16
4	Michael Stephens Ltd.	Makassar	16
5	Poo Kheng Hoo	Gorontalo	16
6	Molukksche Handelsvenn	Makassar	10
7	Maintz Productenhandel	Makassar	5
8	Mirandolle Voute & Co.	Makassar	5

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 Januari 1941.

Asosiasi berbentuk firma dengan pembagian saham proporsional sesuai dengan besaran investasi masing-masing dalam firma. Modal firma diperoleh dari dana investasi masing-masing anggota, kemudian dituangkan ke dalam bentuk saham. Pembagian saham terbesar sejumlah 16 persen sementara penerima saham terkecil adalah sebesar 5 persen. Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang melakukan transaksi pembiayaan dengan pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika gagal dalam menaati perjanjian ini maka akan dikenakan denda sebesar 30.000 gulden.[203]

Permintaan kredit kepada perbankan di Makassar harus atas nama Exelco, bukan atas nama masing-masing perusahaan. Setiap tahun pada 31 Desember akan dilakukan penutupan pembukuan laba rugi dari asosiasi. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan secara merata sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.[204]

203 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 Januari 1941.

204 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 13 Januari 1941.

Pendirian Excelco menjadi perhatian DJB Makassar dan kemudian dilaporkan kepada direksi DJB di Batavia. Dalam sebuah surat dari direksi DJB kepada DJB Makassar dikatakan bahwa terkait dengan persaingan pemberian kredit kepada Excelco, direksi meminta DJB Makassar melakukan koordinasi dengan bank-bank di Makassar. Hal lainnya adalah perihal *wisselmateriaal* (wesel) antarbank. Menurut direksi DJB akan sulit untuk menyamakan pandangan mengenai sistem wesel ini, terutama menciptakan keadilan dalam penggunaan fasilitas wesel tersebut. "*Seperti yang Anda takuti bahwa terbukti tidak mungkin untuk mencapai distribusi bahan tukar yang adil antar bank, saya menyarankan Anda agar kami dapat membicarakan masalah ini dengan Direksi yang bersangkutan*."[205]

Sementara itu, kondisi keuangan para pengusaha pascadepresi masih belum pulih total. Hal itu terlihat dari permohonan pembatalan kredit yang diajukan ke DJB Makassar oleh Firma Michael Stephens & Co. sebesar 200.000 gulden karena ketidakyakinan pihak firma akan mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut. Mengenai kondisi perbankan, DJB Makassar berupaya memulihkan ekonomi dengan melakukan koordinasi intensif dengan bank-bank swasta komersial di Makassar terutama dalam memfasilitasi pengajuan kredit para pengusaha. Akan tetapi koordinasi itu dinilai sulit oleh DJB; mereka menyimpulkan, "*Dapat saya simpulkan bahwa kerja sama dengan bank-bank di sini tidak mampu mencapai keinginan yang dikehendaki.*"[206]

Dalam bidang politik, kecamuk perang yang semakin hebat terutama setelah Belanda berhasil diduduki oleh Jerman pada Perang Dunia II membuat pemerintahan kolonial goyah akibat komunikasi dan koordinasi antara Hindia Belanda dengan Kerajaan Belanda tidak berjalan dengan baik. Sejak 15 Mei 1940, pemerintahan Kerajaan Belanda mengungsi ke London, Inggris, akibat pendudukan Nazi Jerman tersebut. Ratu Wilhelmina beserta keluarga dan petinggi pemerintahan Belanda lainnya pindah ke Inggris. Di Inggris, Ratu Wilhelmina mendirikan Pemerintahan Pengungsian Belanda (Nederlandse Regering in Ballingschap) berkedudukan di London.

---

205 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 16 Januari 1941.

206 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 4 Juni 1940.

Pemerintahan Pengasingan Belanda itu dikenal sebagai Kabinet London atau *Londens Cabinet*.[207]

Di Belanda, Mr. Spit, pejabat Kementerian Tanah Jajahan menginisiasi pengumpulan dana perang dengan nama *Hollandfonds* untuk membantu biaya operasional peperangan dan pemerintahan pengasingan di London. Hindia Belanda termasuk wilayah yang turut serta dalam penggalangan dana tersebut. Di Makassar, penggalangan *Hollandfonds* dilakukan dan telah terkumpul sekitar 100.000 gulden hingga akhir April 1940. Penggalangan dana tersebut dilakukan melalui DJB Makassar yang digabungkan dengan daerah-daerah lain di Hindia Belanda melalui DJB pusat di Batavia, kemudian dana tersebut dikirimkan ke London. Laporan DJB Makassar menyebutkan, "*Bujukan dari Mr. Spit untuk berkontribusi dalam Hollandfonds di Makassar telah diserukan dan menghasilkan dana yang berhasil digalang kira-kira saat ini sekitar 100.000 gulden yang besar kecilnya berasal dari seluruh kota dan ras.*"[208]

Tidak diketahui lebih lanjut berapa jumlah dana yang berhasil terkumpul dan dikirimkan dari Hindia Belanda. Namun, dari laporan DJB Makassar tersebut dikatakan bahwa "*sikap penduduk pribumi dan Cina menunjukkan simpati dan loyalitas yang besar, yang dimanifestasikan dalam berbagai demonstrasi.*"

Saat mengetahui pasukan Nazi Jerman menduduki Negeri Belanda, penduduk Hindia Belanda bereaksi keras. Di Makassar, penduduk melakukan demonstrasi menentang pendudukan tersebut. Bahkan, penduduk melakukan *sweeping* dan penangkapan kepada semua warga negara Jerman di Makassar untuk dibawa ke Batavia. DJB Makassar melaporkan kejadian tersebut sebagai berikut,

> *Tak lama setelah itu, dilakukan penangkapan terhadap semua orang Jerman yang tinggal di Makassar, hal itu terjadi tanpa adanya insiden. Pertama-tama berbagai anggota N.S.B. ditangkap yang di antaranya adalah Tuan H. J. van der Zee, advokat; Tuan C. van Sprang, Ged. Lid Weeskamer; A. Wieland, penjaga hotel; E. Endert dan Ir. H. Keller, pimpinan perusahaan telepon dan telegraf; semua yang dicurigai pro*

207 Foray (2012).

208 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 20 Mei 1940.

terhadap Jerman diputuskan dengan semua hubungannya dan akan dibawa ke Batavia.[209]

Sementara itu, dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya di Asia, tentara Jepang berhadapan melawan pasukan Sekutu yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Perang yang terjadi di kawasan itu bermula dari ekspansi besar-besaran yang dilancarkan Jepang dengan menginvasi wilayah di sekitar Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Mancuria. Tidak hanya pada daerah-daerah tersebut, Jepang memperluas ekspansinya ke wilayah Asia Tenggara. Keinginan Jepang menguasai Asia Tenggara dalam rangka mendapatkan pusat-pusat pemasok bahan mentah bagi industri Jepang.

Ekspansi Jepang yang semakin masif ke selatan membuat Pemerintah Hindia Belanda khawatir dengan terus mengawasi setiap pergerakan tentara Jepang di Asia Tenggara. Kekhawatiran tersebut juga dikuatkan dengan banyaknya kaum imigran Jepang ke Hindia Belanda, yang sebagian di antaranya dicurigai sebagai mata-mata untuk kepentingan militer Jepang.[210] Pemerintah Hindia Belanda mencurigai aktivitas subversif orang Jepang yang diduga merupakan langkah persiapan invasi ke Hindia Belanda, seperti membanjirnya barang Jepang, propaganda untuk memengaruhi kaum muda pribumi, kelompok Islam, dan kaum pergerakan baik melalui radio maupun pers.[211] Langkah politik Pemerintah Hindia Belanda ialah melarang masuknya migran Jepang ke Hindia Belanda pada 1936.

Pemerintah Hindia Belanda semakin bertindak tegas dengan membekukan seluruh aset milik Jepang dan perjanjian yang diadakan dengan negara itu, serta menghentikan pengiriman semua pasokan bahan mentah setelah ekspansi Jepang ke Indo-China pada 24 Juli 1941.[212] Kekhawatiran atas ekspansi Jepang menjadi kenyataan dan dengan cepat kekuatan militer Jepang menyerbu ke 'Daerah Selatan'. Lebih spesifik, dalam dokumen yang ditulis oleh Jenderal Sugiyama Hajime pada 15

209 Arsip Bank Indonesia, 20 Mei 1940.

210 Onghokham (1989: 40).

211 Netherlands Information Bureau (1944: 21–35).

212 Mengenai kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda terhadap ekspansi Jepang ke selatan, lihat Onghokham (1989).

November 1941, daerah tersebut meliputi Filipina, Malaya, Hindia Belanda, dan Burma.[213]

Gambar 3.1. Presiden DJB G. G. van Buttingha Wichers pada periode menjelang kedatangan Tentara Pendudukan Jepang



Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

Sebelum kedatangan Jepang di Hindia Belanda, Presiden DJB G. G. van Buttingha Wichers telah memperingatkan perlunya memperhitungkan kemungkinan meluasnya wilayah Perang Dunia II di Eropa hingga ke Asia Pasifik.[214] Melihat suasana politik dunia, khususnya di Pasifik yang

213 Ooi Keat Gin (2011: 30).

214 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*

semakin gawat seperti di Eropa, maka pimpinan DJB menunjuk Direktur DJB, R. E. Smits, untuk menyertai Letnan Gubernur Jenderal Van Mook ke daerah yang relatif aman dan membentuk atau mendirikan kantor perwakilan. Tugas utamanya adalah mewakili dan membela kepentingan Hindia Belanda di dunia internasional serta mempersiapkan pembangunan kembali aparat perbankan dengan segera bila tiba saatnya Hindia Belanda diduduki kembali.[215]

Di Makassar, sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama perang berlangsung, DJB Makassar memperkuat keamanan kantornya dengan menambah portal penjagaan, memperkuat dinding khasanah, dan merenovasi khasanah agar dapat digunakan sebagai ruang perlindungan sekaligus ruang kerja jika terjadi pengeboman oleh pesawat perang Jepang.[216]

Terkait keamanan atas invasi Jepang ke Hindia Belanda yang sudah di depan mata, maka pada 27 Februari 1942, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan kepada direksi bank-bank utama di Hindia Belanda, yaitu DJB, NHM, dan NIEM, untuk memindahkan kantor pusatnya ke Bandung. Kepindahan ini juga diikuti oleh pejabat tinggi pemerintah termasuk Gubernur Jenderal. Pada 28 Februari 1942, kantor pusat DJB berada di De Javasche Bank Agentschap Bandoeng.[217]

Bersamaan dengan pemindahan kantor pusat DJB ke Bandung, Presiden DJB berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke wilayah yang dianggap aman, yakni ke Australia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Emas moneter tersebut setelah dikapalkan ke luar Hindia Belanda disimpan dalam khazanah Commonwealth Bank of Australia dan dalam khazanah de Reserve Bank van Zuid Afrika di Pretoria. Pemindahan tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Cilacap.[218]

Dalam suasana perang yang mencekam itu, Pemerintah Hindia Belanda juga meminta kepada bank-bank agar tetap mempertahankan

215 Hartono (1976: 28–9).

216 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 20 Oktober 1941.

217 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*

218 Kelder (2006: 392–5).

aparatnya secara terbatas dan terus melanjutkan kegiatan perbankan guna menghindari lumpuhnya kegiatan perekonomian secara total. Berdasarkan instruksi pemerintah tersebut, DJB meminta kepada para pemimpin cabangnya untuk tetap berada di pos masing-masing. Selain itu, direksi DJB memerintahkan mencabut kembali instruksi pemusnahan persediaan kas yang pernah dikeluarkan sebelumnya.[219]

Di Makassar, sebelum instruksi tersebut dicabut, telah terjadi pemusnahan uang DJB secara besar-besaran. Tujuannya agar uang tersebut tidak jatuh ke tangan Balatentara Jepang untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan perang. Dalam laporan Kepala Cabang (*Agent*) DJB Makassar, dinyatakan bahwa ia dan beberapa staf DJB Makassar pada 8 Februari 1942 telah memusnahkan sejumlah uang DJB. Sangat disayangkan di dalam laporan tersebut tidak disebutkan berapa jumlah uang yang dimusnahkan.

> *Pada pagi hari di waktu fajar, entah bagaimana, kedua kasir dan juru gambar telah mengambil resiko dan berhasil mencapai gedung untuk mengumpulkan kertas bank . . . Dari gedung bank kami pergi ke rumah saya dan di sana, di hadapan semua orang, saya membakar kertas bank, bersama dengan saldo uang tunai. . .. Saya tidak bisa berhenti memuji sikap seluruh staf bank, mereka telah melakukan tugas mereka. Pembakaran kertas bank itu tidak mudah, meskipun saya sudah memesan beberapa kaleng minyak untuk melakukan ini. Sekitar jam setengah 10 seluruh persediaan kertas dibakar. Saya tidak punya waktu untuk membakar koin sebanyak 145.000 gulden.*[220]

Selain pemusnahan uang DJB, Kepala Cabang DJB Makassar juga melaporkan bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke Batavia. Uang yang dikirimkan tersebut sejumlah 6.157.000 gulden, namun tidak ada keterangan lebih lanjut untuk apa uang tersebut digunakan di Batavia. [221]

---

219 Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda, beberapa inventaris DJB Agentschap Bandoeng seperti pagar besi yang mengelilingi kantor dan pagar loket yang terbuat dari kuningan dibongkar dan diangkut oleh Jepang untuk kepentingan mereka. Lihat Bank Indonesia, Catatan No. C-25/002/UKP, 19 Juni 1992.

220 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 20 September 1945.

221 Arsip Bank Indonesia, 20 September 1945.

Tidak terkecuali dengan De Javasche Bank, di Makassar lembaga ini melaporkan bahwa situasi menjelang kedatangan Jepang semakin mencekam. Kedatangan Jepang yang bisa terjadi kapan saja membuat DJB Makassar semakin khawatir. Mereka melaporkan segala situasi yang terjadi ke DJB di Batavia. Salah satu kutipannya,

> *Jumat malam di bulan dan tahun ini pukul 07.00, situasi sangat mencekam, pendaratan tentara Jepang di Makassar setiap saat dapat terjadi. Hari Sabtu, keadaan di sini semakin kritis tetapi mungkin karena adanya intervensi dari aliansi pasukan di Jalan Makassar, akhirnya kami berhasil diloloskan dari invasi Jepang. Ada beberapa tentara yang mendarat di Kendari. Sekitar 10 kilometer di sana terdapat sebuah bandar udara Hindia Belanda yang sangat bagus. Apakah bandara tersebut sudah dikuasai Jepang, kami belum mengetahuinya. Aktivitas lalu lintas udara semakin lama semakin ramai oleh pesawat Jepang, pagi hari ini sekitar jam 08.00 ada 3 pesawat dengan ketinggian rendah menembaki beberapa tangki minyak milik BPM. Namun tangki-tangki tersebut kosong. Lapangan udara juga dibombardir.*[222]

Kekacauan menjelang kedatangan Jepang tercatat dalam laporan Kepala Cabang DJB Makassar yang menceritakan pengalamannya ketika pada Minggu (8 Februari 19942) saat Jepang melakukan pengeboman di Kota Makassar. Dalam kesaksiannya ia melihat Jepang mengirimkan pesawat-pesawatnya untuk mengebom Kota Makassar. Akibat pengeboman itu beberapa lokasi hancur dan banyak warga masyarakat mengamankan diri ke wilayah Malino. Kesaksian lengkapnya,

> *. . . hampir semua kamp Cina di kompleks pelabuhan dan beberapa bangunan penting di distrik-distrik Eropa mengalami ledakan ringan. Pembangkit listrik juga hancur, yang secara otomatis mengakibatkan pipa air juga rusak. Banyak orang melarikan diri ke Malino menggunakan mobil, selain itu, setelahnya, ada tiga orang pihak kepolisian Eropa melarikan diri sehingga segelintir orang Eropa yang, menurut pendapat mereka, harus tetap di Makassar, tetap tidak terlindungi di kota yang sedang terbakar dengan populasi yang dilanda bencana.*[223]

Lebih lanjut ia menggambarkan kondisi bangunan di Makassar yang terkena pengeboman pesawat-pesawat Jepang, terutama gedung-gedung perkantoran milik Belanda. Dilaporkan,

---

222 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 26 Januari 1942.

223 Arsip Bank Indonesia, 20 September 1945.

Gedung bank masih utuh, hanya trotoar saja yang rusak. Kantor K.P.M. di belakang gedung kami juga hampir tidak rusak. Selain itu, seluruh kamp Tiongkok praktis telah dihancurkan. Gedung N.I. Handelbank dan kantor N.H.M. rusak, sejauh yang saya bisa lihat, bangunan Escompto masih bisa diperbaiki.[224]

Kekhawatiran akan serangan yang semakin besar dan berbahaya membuat DJB Makassar memutuskan memindahkan kantornya ke tempat yang lebih aman. Keputusan DJB Makassar itu diikuti oleh lembaga lain seperti NHM. Pemindahan kantor tersebut akibat pengeboman pesawat Jepang di *Pasarstraat* yang membuat tiga buah gudang meledak. DJB dan NHM memindahkan kantornya ke rumah tinggal pemimpin cabang masing-masing yang berlokasi lebih aman.

Terdapat 3 gudang yang berada tepat di depan gedung DJB yang meledak. Hal ini yang membuat saya mengosongkan dan memindahkan kantor di Pasarstraat atau tempat gedung kita berada. Pimpinan Cabang NHM memindahkan kantornya ke rumah tinggalnya. Saya mulai memindahkan kantor DJB ke rumah saya pada akhir Desember. Ada beberapa kotak Lips (1 besar dan 2 kecil). Memang tidak dikunci karena adanya bombardir di wilayah penduduk Cina menyebabkan kebakaran besar dan kantor DJB tidak dapat dijangkau.[225]

Apa yang dikhawatirkan pemerintah dan para anggota direksi DJB akhirnya terjadi. Pada akhir Maret 1942, bala tentara Jepang mendarat di Banten dan Eretan Wetan, Cirebon, setelah sebelumnya Armada Selatan di bawah pimpinan Laksamana Madya Kondo Nobutake berhasil mengalahkan Angkatan Laut Sekutu di bawah pimpinan Laksamana Muda Karel Doorman (Belanda) dalam pertempuran dramatis di Laut Jawa. Tentara Ke-16 Jepang di bawah komando Letnan Jenderal Imamura Hitoshi mendarat sekaligus di tiga tempat di Jawa, yaitu di Teluk Betung, Banten; Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat; dan di Kragan, Jawa Tengah. Dari Kragan, Divisi Ke-48 bergerak ketiga jurusan, yakni ke Surabaya, Semarang, dan Cilacap.

Sejak awal Maret 1942, yaitu ketika Pemerintah Militer Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda, semua kegiatan perbankan di Hindia Belanda termasuk DJB, praktis terhenti. Kondisi ini tercermin antara

224 Arsip Bank Indonesia, 20 September 1945.

225 Arsip Bank Indonesia, 26 Januari 1942.

lain dari laporan penutupan buku ke-114 (akhir Maret 1942) yang dilakukan tidak sebaik laporan-laporan tahun sebelumnya. Sementara itu Van Buttingha Wichers selaku Presiden DJB tetap tinggal di Hindia Belanda untuk memimpin bank tersebut. Namun tidak beberapa lama, ia ditangkap dan ditawan oleh Jepang. Sementara itu, Pemerintah Militer Jepang mengganti kedudukan DJB dengan mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi di Indonesia.

Kebijakan Politik dan Ekonomi Pendudukan Jepang

Ketika Belanda akhirnya menyatakan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, hal itu menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal itu juga menandai periode baru dalam perjalanan sejarah di Indonesia yaitu masa pendudukan Jepang. Invasi Jepang ke Asia Tenggara bertujuan mengamankan pasokan bahan mentah dari Indonesia yang mereka gunakan untuk kepentingan perang.[226]

Pendudukan Jepang di Indonesia tidak berlangsung sekaligus, namun secara bertahap mulai dari daerah luar Pulau Jawa. Daerah yang pertama kali dikuasai dan diduduki oleh Jepang adalah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942, yang tidak lama kemudian melebar ke daerah Kalimantan lainnya dan pelbagai wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya, 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerahkan kekuasannya di Indonesia kepada Jepang.

Penguasaan militer Jepang atas Indonesia mengakibatkan berbagai perubahan mendasar dalam pola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam pembagian wilayah pemerintahan. Sebelum pendudukan Jepang berlangsung, hanya terdapat satu pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintahan sipil. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah pemerintahan militer yaitu (a) Sumatera di

226 Reid (2011: 155).

bawah komando Angkatan Darat (Rikugun) Ke-25 berpusat di Bukittinggi; (b) Jawa dan Madura di bawah komando Angkatan Darat (Rikugun) Ke-16 berpusat di Jakarta; dan (c) Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah komando Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan Kedua dengan menjadikan Makassar sebagai pusatnya.[227]

Di Pulau Sulawesi, Jepang datang melalui sisi utara setelah menguasai wilayah Filipina dan sekitarnya. Filipina memang dijadikan daerah awal untuk menyerang wilayah Indonesia termasuk Pulau Sulawesi. Penyerbuan itu dimaksudkan untuk mengejar tentara Hindia Belanda yang bertugas di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.[228]

Melalui operasi militer yang dipimpin Laksamana Kurita dari Angkatan Laut Jepang, serangan tentara Jepang semakin masif ke arah selatan, menduduki kota-kota penting di Sulawesi. Hingga kemudian pada 9 Februari tentara Jepang berhasil menduduki Sinjai di pesisir timur Sulawesi Selatan.

Pada hari yang sama, Kota Makassar dikuasai Jepang yang mendarat di Barombong di selatan kota tersebut. Tidak ada perlawanan yang berarti dari tentara Belanda yang semakin terdesak dan akhirnya mundur keluar Kota Makassar, ke wilayah Maros, terus ke Camba, dan bertahan di pertahanan terakhir mereka di Enrekang. Walaupun telah bergabung dengan pasukan Belanda lain yang mundur dari Bone, tetapi pada akhirnya Belanda menyerah kalah di Enrekang. Walaupun begitu, seluruh Pulau Sulawesi dapat dikuasai setelah perlawanan terakhir Pasukan Belanda terjadi di Kolonedale di bawah pimpinan Letnan de Jong yang kemudian menyerah kalah.[229]

Sebelum terjadi ekspansi dan pendudukan oleh tentara Jepang, di Indonesia khususnya di Makassar, telah terjadi kontak antara penduduk Makassar dan orang-orang Jepang. Di wilayah tersebut telah bermukim beberapa orang Jepang sebagai pengusaha, yang melakukan kontak

227 Reid (2011: 157).

228 Melamba (2013: 362).

229 Kadir, dkk. (t.t.: 104–5); lihat Wirawan (2013: 206).

dengan penduduk sekitar melalui perdagangan. Di Makassar berdiri sejumlah toko kelontong milik orang Jepang yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang ternyata juga bertindak sebagai mata-mata sebelum melakukan penguasaan di Indonesia. Mereka bertugas mengumpulkan informasi tentang pusat ekonomi, makanan, dan tambang yang ada di daerah sekitar Sulawesi Selatan. Ketika Jepang akhirnya tiba, para pengusaha tersebut kemudian berpakaian mililter bahkan ada yang berpangkat perwira. Mereka itu antara lain bekas pengusaha Toko Kaneko, Toko Toyoda, dan Tuan Sugita, seorang pedagang kayu bakau dari Palopo.[230]

Setelah menguasai Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, balatentara Jepang berusaha menarik hati rakyat Sulawesi Selatan dengan berbagai jenis propaganda, seperti semboyan Gerakan Tiga A—Nippon adalah 'cahaya', 'pelindung', dan 'pemimpin' Asia. Dengan semboyan itu masyarakat Sulawesi Selatan menyambut dengan gembira dan menganggap Jepang sebagai pihak yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda selama ratusan tahun. Melihat sambutan baik dari masyarakat, Jepang segera memperkuat kedudukannya dengan menguasai daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Selatan.

Guna mengokohkan kekuasaannya, Pemerintah Militer Jepang tidak mengubah kekuasaan raja-raja lokal, mereka diperkenankan tetap memerintah dengan memberi mereka jabatan *sutjo* (*su-cho*). Hanya pejabat Belanda yang diganti oleh pejabat Jepang. Asisten residen, misalnya, diganti *ken karikan*, dan kontrolir diganti *bunken kanrikan*. Pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, sebagai gantinya digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu.

Pemerintah Militer Jepang juga berupaya mencari dukungan dari seluruh golongan baik bangsawan, Islam maupun nasionalis. Panglima tertinggi Angkatan Laut Jepang, *Minsei-Fu*, di Makassar berupaya menjalin dukungan dengan para pemimpin nasionalis seperti Lanto Daeng Pasewang, H. Sewang Daeng Muntu, M. A. Pelupessy, Tio Heng Sui dan H. Nusu Daeng Mannangkasi serta Nadjamuddin Daeng Malewa

230 Kadir, dkk. (t.t.: 105)

dengan cara mengangkat mereka menjadi anggota Badan Penasihat Jepang.[231] Situasi berbeda terjadi pada orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Indonesia. Banyak orang Belanda melarikan diri ke Memasa atau pedalaman, bahkan ditawan dan dipekerjakan sebagai tawanan.[232]

Selain perubahan dalam struktur pemerintahan, Jepang melakukan perubahan dalam tata kelola ekonomi di wilayah pendudukannya di Indonesia. Secara struktural, kekuasaan dan kebijakan keuangan ditetapkan oleh *Gunseikanbu* atau pemerintah militer pusat. Departemen pemerintahan sipil seperti Departemen Keuangan (*Zaimubu*) semuanya berada di bawah komando pemerintahan militer dan bertindak sebagai unit administrasi belaka.

Sebelum berhasil menguasai daerah-daerah taklukannya, Jepang telah mempersiapkan para bankir dan beberapa jenis mata uang yang akan diedarkan di daerah-daerah target tersebut. Mata uang tersebut dikenal sebagai mata uang invasi (*invasion money*), antara lain gulden untuk Hindia Belanda, *straits dollar* untuk wilayah Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara, *rupee* untuk wilayah Burma, *peso* untuk wilayah Filipina, *pound* untuk wilayah Australia. Nilai atau kurs mata-mata uang tersebut sama dengan 1 yen Jepang, kecuali *pound* yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang sama dengan 10 yen.[233]

Untuk memperluas penggunaan mata uang baru tersebut, Jepang melakukan kebijakan penukaran uang gulden Hindia Belanda ke mata uang Jepang (yen) yang dilakukan pada Juni 1942. Agar banyak orang mau menukarkan uangnya, kedua mata uang tersebut diperlakukan memiliki nilai tukar yang sama, satu gulden ditukar dengan satu yen pula. Namun, tanpa suatu sebab yang jelas, penduduk di perdesaan kurang mempercayai uang Jepang tersebut. Mereka lebih menyukai tukar-menukar barang (barter) daripada menerima pembayaran dalam bentuk uang. Cara barter tersebut oleh penduduk Makassar disebut *sikokang*.[234]

231 Kadir, dkk. (t.t.: 106).

232 Asba (2007: 241).

233 Yoshimasa (1996: 701).

234 Pawiloy (1982: 3).

Sebelum penyerbuan ke Hindia Belanda, Jepang telah melakukan persiapan dalam bidang keuangan dengan menyediakan uang gulden senilai 81.783 juta gulden sebagai biaya operasi pendaratan Tentara Ke-16 di Jawa, Tentara Ke-25 di wilayah Singapura dan Sumatera, serta penugasan Angkatan Laut Ke-2 di wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.[235] Sementara berdasarkan catatan pada 6 Desember 1941, paling tidak jumlah eks-uang Belanda yang diedarkan oleh DJB adalah sekitar 316 juta gulden. Ditambah lagi, Jepang juga mengedarkan uang di Jawa 26,445 juta gulden dan 5,567 juta gulden di wilayah Sumatera. Hal itu berdampak signifikan terhadap peningkatan inflasi di wilayah Hindia Belanda.

Nanpo Kaihatsu Ginko Menggantikan De Javasche Bank

De Javasche Bank menghadapi penutupan Tahun Pembukuan ke-114 pada akhir Maret 1942 yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, untuk menghindari jatuhnya seluruh aset DJB ke tangan musuh, maka dengan persetujuan pemerintah Hindia Belanda seluruh persediaan emas DJB diamankan ke Australia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan melalui Pelabuhan Cilacap tepat menjelang kedatangan Jepang ke Pulau Jawa.

Keputusan tersebut diambil dalam situasi yang amat mendesak. Pemerintah Belanda mempertimbangkan bahwa setelah Perang Dunia II berakhir akan kembali mendirikan De Javasche Bank di wilayah Indonesia. Untuk itu, mereka membawa aset DJB berupa emas tidak ke negeri induk Belanda melainkan ke daerah aman untuk sementara waktu. Mereka berkeyakinan bahwa perang tidak akan berlangsung lama dan mereka akan berkuasa kembali di tanah Indonesia.

Segera setelah menaklukkan Hindia Belanda, tentara Jepang membekukan seluruh bank milik Belanda kecuali bank-bank milik Cina

235 Pawiloy (1982).

yang tidak berapa lama kemudian diizinkan beroperasi kembali. Tidak lama kemudian para direksi De Javasche Bank dipaksa Jepang menandatangani pernyataan penyerahan seluruh aset dan kepemilikan bank-bank di Hindia Belanda termasuk De Javasche Bank kepada Jepang tanpa syarat. Dengan penyerahan tersebut, kepemilikan DJB resmi beralih ke tangan pemerintah militer Jepang.[236]

Sebagai kelanjutannya, pada 11 April 1942 pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan moratorium atau penangguhan pembayaran kewajiban-kewajibannya berdasarkan Undang-undang Nomor 9/1942. Kemudian pada 20 Oktober 1942, pimpinan komando militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44/1942 tentang likuidasi seluruh bank-bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina. Peraturan tersebut juga berlaku di beberapa wilayah lain di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, termasuk Sulawesi.[237]

Setelah penutupan bank-bank Belanda dan bank asing lainnya dan agar perekonomian dan keuangan dapat lebih dikendalikan, maka fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang, seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank, yang telah beroperasi di Indonesia sebelum perang dan sempat ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Harian *Asia Raya* mengabarkan bahwa bank-bank Jepang mulai beroperasi kembali di Jawa pada 10 Mei 1942.[238] Bank-bank tersebut langsung berada di bawah kendali penguasa militer Jepang dan melakukan kegiatan perbankan seperti penyimpanan deposito, simpan-pinjam dan pekerjaan lainnya yang diizinkan oleh pemerintah militer Jepang.

Pemerintah militer pusat kemudian menetapkan dan mengumumkan bahwa sebagai ganti De Javasche Bank dibentuk Nanpo Kaihatsu Ginko

---

236 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*.

237 http://www.bi.go.id/en/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/historybeforebi5.aspx

238 Bank-bank Jepang ini telah berdiri di Hindia Belanda jauh sebelum kedatangan Jepang, tetapi kemudian ditutup oleh Pemerintah Hindia Belanda karena pecah Perang Dunia II yang melibatkan Jepang. Ketika berhasil menduduki Indonesia, pemerintah militer Jepang membuka kembali bank-bank Jepang tersebut pada 10 Mei 1942. Lihat *Asia Raya*, 10 dan 20 Mei 2602 (1942).

(NKG) yang didirikan pada April 1943.[239] Para pegawai perbankan berkebangsaan Belanda dan Eropa lainnya kemudian ditahan dan dimasukkan ke dalam sel atau kamp konsentrasi. Namun karena pada pelaksanaannya terasa kekurangan tenaga perbankan yang terampil dan tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja pribumi, maka pemerintah militer Jepang memutuskan mempekerjakan kembali beberapa pegawai DJB di lembaga-lembaga perbankan dengan status tetap sebagai tahanan.[240]

Nanpo Kaihatsu Ginko memiliki arti 'Bank Pembangunan Daerah Selatan', telah disiapkan oleh Pemerintah Jepang sejak Desember 1941 untuk mengatur sistem moneter di wilayah pendudukan. Setelah Jepang berkuasa, secara resmi NKG menggantikan peran DJB dalam menjalankan tugas sebagai bank sirkulasi.

Sebagai bank sirkulasi, NKG bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Tugas lain NKG pada awal pembentukannya adalah sebagai likuidator bank-bank milik Belanda, yang di dalamnya terdiri dari orang-orang Jepang yang dibantu oleh staf dan tenaga dari bank-bank bersangkutan. Tugas likuidator tersebut adalah, pertama, menyelesaikan tagihan bank-bank, namun usaha ini tidak mendatangkan hasil, sebagaimana telah dibayangkan sebelumnya. Kedua, pembayaran kembali kepada kreditur; dibayarkan kepada pemegang rekening yang bukan "musuh" sebesar 30 persen. Bagi yang tidak mau dan tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut, jumlah yang seharusnya dibayarkan akan dipindahkan kepada NKG. Ketiga, penyelesaian simpanan tertutup dan *safe-loketten* (*safe deposit box*); simpanan tertutup dan *safe-loketten* yang tidak langsung berguna untuk balatentara Jepang akan dikembalikan kepada pemilik, namun dalam kenyataannya kalimat "tidak langsung berguna" tersebut ternyata sangat elastis sehingga dalam praktiknya banyak barang

239 Dalam sumber lain Nanpo Kaihatsu Ginko disebut berbeda: 'Nanpo Kaihatsu Kinko' dan 'Nampo Kaihatsu Ginko'. Namun, perbedaan itu merujuk pada sebuah institusi yang sama yakni Bank Pembangunan Daerah Selatan. Lihat Yoshimasa (1996: 177).

240 Darsono dkk. (2016: 175).

simpanan yang hilang atau kepada mereka diganti dengan semacam tanda memiliki tagihan terhadap NKG.[241]

Secara khusus tugas dan fungsi NKG di Indonesia diserahkan kepada Yokohama Specie Bank dan Taiwan Bank. Kedua bank tersebut yang melakukan kegiatan operasional harian di berbagai kota di Indonesia. Yokohama Specie Bank menjalankan tugas mengawasi bank-bank lokal di daerah pendudukan di wilayah Jawa, sementara Taiwan Bank mengawasi wilayah luar Jawa, termasuk Sulawesi.[242] Kedua bank tersebut telah memiliki pengalaman beroperasi di Hindia Belanda sebelum dibekukan oleh pemerintah kolonial saat perang mulai pecah dan kembali masuk ke Hindia Belanda bersama dengan tentara Jepang.

Kedua bank tersebut dinamakan *Tokushu Ginko* 'bank khusus' dengan tugas menjadi penghubung antara lembaga perbankan dengan pemerintah Jepang. Kantor pusat NKG berada di Tokyo. Di wilayah Asia Tenggara yang berhasil diduduki Jepang, NKG hadir dalam bentuk kantor-kantor cabang. Beberapa kota yang memiliki kantor cabang NKG di Hindia Belanda antara lain Jakarta, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Seram, dan Manokwari. Selain mendirikan kantor cabang, NKG membuka kantor-kantor perwakilan di daerah lainnya yang masing-masing dipegang oleh Yokohaman Specie Bank dan Taiwan Bank, seperti di Surabaya, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Tarakan, dan Manado.[243]

Di Makassar, kisah pembukaan kantor cabang Taiwan Bank sebagai kepanjangan tangan NKG di Sulawesi tercatat dalam laporan Kepala Cabang DJB Makassar yang menyaksikan bekas kantornya diambil alih oleh Jepang dan harus menyaksikan bagaimana pembukaan kantor Taiwan Bank yang diwarnai banyak karangan bunga pada acara pembukaan tersebut. Petikannya,

> *Sekitar 4 bulan setelah invasi, Bank of Taiwan membuka kantornya di gedung bank kami. Saya harus menyaksikan pembukaan resmi (banyak rangkaian bunga!) dan itu adalah salah satu momen paling tidak menyenangkan dalam hidup saya ketika*

241 Hartono (1976: 28–9).

242 Tschoegl (2001).

243 Yoshimasa (1996: 699–724); lihat juga Post dan Touwen-Bouwsma (ed.) (1997).

saya diperkenalkan ke kantor lama saya dan menemukan seluruh staf saya di sana di bawah bimbingan para pejabat Jepang. Tentu saja mereka dipaksa bekerja di Bank of Taiwan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terhadap itu.[244]

Selain mengatur peredaran uang, NKG berperan sebagai "banknya bank" karena bank itu juga menyalurkan pinjaman kepada Yokohama dan Taiwan Bank untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang secara umum merupakan perusahaan-perusahaan Jepang. Misalnya pada 1942, pinjaman terbesar NKG diberikan kepada Kawasaki Heavy Industri Company dengan jumlah pinjaman 1,2 juta gulden. Secara berturut-turut, pinjaman dengan nilai cukup besar juga diberikan kepada Taiwu Industrial Company, Yoshiwara Oil Manufacturing Company, Harima Shipbuilding Company, Ishihara Industry and Shipping Company, dan Tokyo Warehouse Company.[245] Dari berbagai perusahaan tersebut tampak bahwa pemerintah Jepang selama masa pendudukannya mendorong pengusaha Jepang untuk bergerak di sektor pertambangan, manufaktur, komunikasi dan transportasi.

Ide mengenai pembentukan bank sirkulasi dengan tugas utama mencetak dan mengedarkan uang di wilayah Pendudukan Jepang, terutama Indonesia, bermula ketika Direktur Biro Keuangan Pemerintah Militer Jepang menyetujui rencana mendirikan bank sirkulasi yang dipandang penting dan harus segera dibentuk sesegera mungkin. Pembentukan bank sirkulasi yang baru sangat sesuai dengan situasi ekonomi di Jawa, dan dalam pandangan mengenai pengendalian mata uang, diharapkan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi dapat menggantikan mata uang yang sebelumnya telah dikeluarkan pihak militer.[246]

Pada masa Pendudukan Jepang, jumlah peredaran mata uang di Hindia Belanda meningkat pesat. Hal itu terjadi karena invasi Jepang bukan hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mata uang. Di bawah Undang-Undang Nomor 1, kepala militer pasukan Jepang mengumumkan

244 Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van DJB Makassar, 20 September 1945.

245 Post dan Touwen-Bouwsma (ed.) (1997: 177–202).

246 Yoshimasa (1996: 189).

melalui surat kabar bahwa sejak 11 Maret 1942, untuk sementara waktu gulden Jepang dan mata uang militer merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan agar tidak terjadi guncangan ekonomi akibat perubahan kebijakan yang drastis. Kebijakan tersebut hanya berlaku hingga NKG mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian ditetapkan hanya uang NKG yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebelum NKG didirikan, pemerintah militer Jepang mengeluarkan mata uang yang dikenal sebagai uang invasi (*invasion money*) atau uang militer (*gunpyo*) yang dibubuhi tanda *De Japansche Regeering betaalt aan toonder* atau "Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa." Uang tersebut secara khusus dibuat untuk diedarkan di Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang sebelum mereka memasuki Indonesia. Uang tersebut telah didistribusikan di atas geladak kapal dan langsung dibawa oleh balatentara Jepang ketika mendarat di Indonesia. Pada uang itu masih digunakan satuan gulden dan penggunaan bahasa Belanda agar masyarakat Indonesia tidak merasa asing dengan uang yang dikeluarkan Jepang saat itu. Terdapat tujuh denominasi mata uang Jepang tersebut, yakni 1 gulden, ½ gulden, 5 gulden, 10 gulden, serta 1 sen, 5 sen, dan 10 sen.[247]

247 Yoshimasa (1996: 189).

Gambar 3.2. Uang Invasi (*Invation Money*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang dengan pecahan 10 gulden.

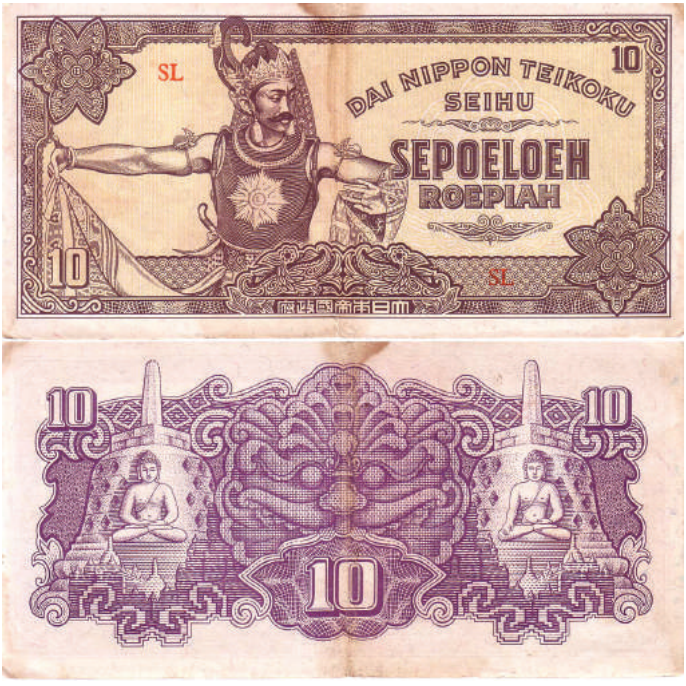


Ket.Gambar: pecahan: 10 gulden, penandatangan: -, ukuran: 161x78 mm, warna dominan/ desain utama depan: coklat/ nilai nominal, pohon pisang & kelapa, tulisan bahasa Jepang, belakang: coklat/ angka 10 dan guilloche, pohon kelapa dan laut, pencetak: Djakarta Insatsu Kodjo, tanggal penerbitan: 1942, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: Bank Indonesia (2015: 187-8)

Pada September 1944, NKG mengeluarkan mata uang yang disebut *Nanpatsu*. Uang itu memiliki ciri-ciri khusus yakni tanda *Dai Nippon Teikoku Seifu* (Administrasi Tentara Jepang) dan menggunakan rupiah sebagai nilainya. Mata uang tersebut dicetak di Jawa dalam nominasi ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah. Tidak hanya di Jawa, uang itu juga disebarkan ke Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian Timur. Secara sporadis Jepang juga mengeluarkan uang logam dari alumunium terdiri dari pecahan 1, 5, dan 10 sen dengan peredaran amat terbatas.

Gambar 3.3. Uang seri *Nanpatsu* yang dikeluarkan oleh NKG dengan mata uang rupiah pecahan 10 Rupiah



Ket.Gambar: pecahan: 10 Roepiah, penandatangan: -, ukuran: 159x77 mm, warna dominan/ desain utama depan: coklat/ nilai nominal, penari wayang, tulisan bahasa Jepang, belakang: ungu/ angka 10 dan guilloche, arca Buddha dan stupa, pencetak: Djakarta Insatsu Kodjo, tanggal penerbitan: 1942, tanggal penarikan kembali: -.

Sumber: Bank Indonesia (2015: 193-4)

Hingga pertengahan 1945, telah beredar mata uang Pendudukan sebesar 2,4 miliar gulden; sebanyak 1,4 miliar gulden beredar di Sumatera, sementara untuk Kalimantan dan Sulawesi beredar dalam jumlah yang lebih kecil. Dari jumlah tersebut, NKG telah menambahkan 87 juta gulden ke dalam peredaran. Uang tersebut berasal dari uang yang belum diedarkan oleh DJB ketika bank itu masih berdiri; sekitar 20 juta gulden koin perak diambil alih oleh Jepang dari DJB. Kemudian pada 15 Agustus 1945, NKG menambahkan lagi sebanyak dua miliar gulden dalam peredaran di wilayah Hindia Belanda. Sebagian dari uang

tambahan itu berasal dari uang yang "dicuri" oleh tentara Jepang dari bank-bank di Sumatera, dan sebagian lain diambil dari DJB Surabaya dan beberapa tempat lainnya.[248]

Sebagai bank sirkulasi, Nanpo Kaihatsu Ginko memusatkan kegiatannya pada sirkulasi uang-uang Jepang di Indonesia. Walaupun memiliki kantor pusat di Tokyo, dalam melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia, NKG memilih Jakarta sebagai kantor pusat. Hal itu karena mereka melanjutkan apa yang dilakukan DJB yang memilih Jakarta (Batavia) sebagai kantor pusatnya. NKG juga membuka kantor cabang di beberapa kota di Indonesia yaitu Medan, Palembang, dan Padang. Kota Palembang dipilih sebagai kantor cabang NKG di Sumatera.[249]

Pada kenyataannya tidak semua kantor De Javasche Bank digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Di Kalimantan dan Sulawesi, yang bertindak sebagai kepanjangan tangan NKG adalah Taiwan Shomin Ginko atau Taiwan Bank.[250] Dapat dikatakan NKG hanya memusatkan operasinya di Jawa dan Sumatera akibat perbedaan yurisdiksi kekuasaan militer yang ada saat itu. Jawa dan Sumatera berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat sementara Kalimantan dan Indonesia bagian Timur berada di bawah Angkatan Laut. Hal itu menyebabkan perbedaan alur koordinasi antara satu angkatan dengan lainnya.

Sementara itu, tugas pengawasan rekening perbankan di wilayah Jawa dan Sumatera diserahkan kepada Yokohama Specie Bank. Sementara itu, di Semenanjung Malaya, terutama Singapura sebagai pusat kekuatan Angkatan Darat Jepang di Asia Tenggara, NKG menguasai dan mengambil alih tampuk kepemimpinan Malay-Sumatra Banker's Association (Asosiasi Bankir Malaya-Sumatera) yang terdiri dari bank-bank asal Jepang, Cina, dan India, yang diperbantukan dalam mengontrol seluruh perbankan di wilayah Malaya dan Sumatera.[251] Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian Timur tugas pengawasan perbankan diserahkan kepada Taiwan Bank.

---

248 Arsip Bank Indonesia, Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947.

249 Yoshimasa (1996: 187).

250 Arsip Bank Indonesia, Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947.

251 Tschoegl (2001: 5).

Melalui Undang-Undang Nomor 13/1942 tanggal 20 Oktober 1942 tentang pengambilalihan aset dan kepemilikan bank-bank swasta milik musuh. Pemerintah Militer Jepang memerintahkan aparaturnya melikuidasi seluruh bank swasta milik Belanda, Inggris, dan bank-bank lokal di Jawa dan pulau lain di Indonesia. Namun terdapat beberapa pengecualian seperti bank-bank Cina tetap diperbolehkan beroperasi kembali. Kebijakan seperti itu juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Makassar dan wilayah Timur Besar. Bank-bank swasta Belanda yang dilikuidasi antara lain Nederlandsche Handel-Maatschappij, Nederlands-Indische Escompto Bank, Nederlands-Indische Handelsbank, dan Bavaria Bank. Sementara bank-bank milik swasta asing lainnya di antaranya adalah The Chartered Bank of India, Australia, and China, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., dan Overseas Chinese Banking Corporation.[252]

Pemerintah Militer Jepang tetap mengizinkan koperasi-koperasi kredit dan bank-bank komersial milik orang Tionghoa membuka usahanya. Begitu pula kantor De Algemeene Volkscredietbank, yang notabene milik Belanda, tidak ditutup walaupun segala operasinya diambil alih dan dikuasai oleh Syomin Ginko.[253] Izin operasi terhadap AVB didasarkan pada pertimbangan karena bank tersebut bergerak dalam penyaluran kredit pertanian yang dirasa sebagai penunjang yang sangat penting bagi Jepang untuk memenangi perang.

Tugas NKG di Sumatera adalah menyediakan dana untuk pembelian barang-barang keperluan militer Jepang dengan cara terus mencetak uang. Barang-barang keperluan militer sangat vital demi memenangi perang. Pencetakan uang juga sangat mendesak untuk pembelian barang keperluan sehari-hari yang saat itu amat sulit ditemukan akibat merosotnya ekonomi di daerah tersebut.[254]

Sejak awal, pemerintah pendudukan Jepang berupaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya menjaga agar nilai mata uang Jepang

252 Arsip Bank Indonesia, Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947.

253 Hartono (1996: 29).

254 Hartono (1976: 191).

tetap tinggi. Namun upaya tersebut tidak berhasil akibat kinerja ekonomi pemerintahan militer yang lemah. Pengamanan terhadap alat-alat produksi lebih banyak ditekankan pada faktor mengamankan pasokan bahan-bahan mentah strategis untuk keperluan perang, seperti minyak, karet, timah, dan bahan-bahan logam lainnya. Perhatian terhadap sektor pertanian juga besar khususnya pangan dan palawija. Hal itu terjadi setelah armada laut Jepang mengalami kekalahan berat pada pertengahan 1943. Melemahnya kontrol armada laut terhadap wilayah pendudukan membuat Jepang menetapkan kebijakan swasembada ekonomi bagi tiap-tiap daerah pendudukan.[255]

Sementara itu, meski segala kegiatannya praktis terhenti dan segala asetnya diambil alih oleh pemerintah militer Jepang, De Javasche Bank bukan berarti bubar. Pihak Belanda melalui Presiden DJB saat itu, Smits, membuka kantor perwakilan di tempat pengasingan di Australia dengan tujuan melayani masalah tagihan dan kewajiban bank kepada para nasabahnya, terutama bagi nasabah yang telah keluar dari Hindia Belanda. Selain itu, Smits ditunjuk Pemerintah Belanda sebagai Pejabat Direktur Keuangan Pemerintah Pengasingan Hindia Belanda yang berkedudukan di Melbourne dan Brisbane.[256]

Dalam pada itu, kebijakan Pemerintah Militer Jepang melikuidasi bank-bank Belanda memberikan kesan kepada perwakilan Hindia Belanda bahwa kondisi perbankan di tanah jajahan telah runtuh dan tidak mungkin dipulihkan kembali saat perang usai. Akibatnya, pemerintah Kerajaan Belanda di pengasingan di London mengeluarkan Surat Keputusan E-10 tanggal 3 Februari 1944 yang melarang segala kegiatan perbankan di Hindia Belanda tanpa ada izin dan atas nama Gubernur Jenderal.

Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tanggal 21 Februari 1944 tentang pembentukan De Bank voor Nederlandsch-Indië di Paramaribo, Suriname, sebagai satu-satunya wilayah koloni Belanda yang tetap berada di bawah Kerajaan Belanda. De Bank voor Nederlandsch-Indië merupakan bank gabungan sebagai wadah

255 Darsono, dkk. (2016: 177).

256 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*.

institusi perbankan terutama perbankan swasta yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Para pemegang saham bank tersebut adalah Pemerintah Hindia Belanda, NHM, NIHB, dan NIEM. Saham milik Pemerintah Hindia Belanda dialihkan ke kantor DJB dalam pengasingan di Australia. Dengan demikian, De Bank voor Nederlandsch-Indië pada dasarnya merupakan gabungan bank-bank yang pernah didirikan semasa pemerintahan Hindia Belanda.[257]

Pada 15 Agustus 1945, pasukan Sekutu—yang terdiri dari tentara Amerika dan Inggris—mendarat di Indonesia setelah mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia. Tugas tentara Sekutu adalah melucuti tentara Jepang dan menjaga *status quo* di Indonesia. Bersamaan dengan kedatangan tentara Inggris pada 1 Oktober, ikut pula unsur militer Belanda yang bergabung dalam NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Badan pemerintahan sipil Hindia Belanda yang seluruhnya terdiri dari orang Belanda merupakan gabungan dari tentara Sekutu yang bertujuan membantu militer di bidang urusan sipil. Termasuk di dalamnya NICA-*paymasters* yang khusus menangani peredaran uang baru gulden Hindia Belanda. Uang baru ini dikenal dengan nama 'uang NICA' yang dicetak di American Bank Note Company, Amerika Serikat, pada 1943 dan direncanakan untuk menggantikan keanekaragaman uang yang masih beredar di Indonesia yaitu uang DJB, uang Pemerintah Hindia Belanda dan juga uang kertas Jepang.[258]

Segera setelah pendaratan tentara Sekutu dan NICA, bank-bank Jepang di Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur ditutup, dan uang NICA mulai diedarkan. Sementara di Jawa dan Sumatera, bank-bank Jepang masih tetap bekerja berhubung tingginya instabilitas militer, politik, dan ekonomi akibat sengketa bersenjata dengan pihak Republik Indonesia. Demikian pula dengan uang Jepang yang masih beredar dalam masyarakat sehingga uang NICA belum bisa beredar sepenuhnya. Hal itu di luar dugaan pihak Belanda karena ternyata uang Jepang masih memiliki

257 Arsip Bank Indonesia, *Verslag van De Javasche Bank, 1941/1947*. Tidak banyak diketahui bagaimana kelanjutan perkembangan De Bank voor Nederlandsch-Indië berhubung tidak atau belum ditemukan sumber informasi lebih lanjut.

258 Arsip Bank Indonesia, Verslag van de Javasche Bank, 1941/1947.

nilai dan daya beli yang kuat dalam masyarakat. Pada 10 Oktober 1945, bank-bank Jepang mulai berada di bawah pengawasan DJB dan NHM, yang kemudian disusul tindakan likuidasi dan penutupannya pada 15 Januari 1946.[259]

259 Arsip Bank Indonesia, Verslag van de Javasche Bank, 1941/1947. Pembahasan tentang kembalinya DJB di Makassar dan kiprahnya pada masa revolusi dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB IV
DE JAVASCHE BANK KEKUATAN EKONOMI FEDERAL? (1945–50)

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengubah konstelasi politik di wilayah Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, Indonesia dihadapkan dengan sederet masalah yang harus dihadapi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu upaya terbesar adalah kembalinya Belanda ke Indonesia untuk menguasai wilayah ini seperti sebelum terjadinya perang. Melalui Sekutu, Belanda hadir bersama seperangkat alat untuk menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia, yakni NICA (Netherlands Indies Civil Administration) dan terutama adalah DJB (De Javasche Bank). Belanda menyadari bahwa dalam upaya mengembalikan kekuasaannya, mereka harus menguasai sektor perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran kembali DJB – setelah sempat dilikuidasi pada masa Pendudukan Jepang – menjadi sangat vital dalam upaya tersebut.

Sementara itu, Belanda juga berupaya untuk menguasai Indonesia melalui jalur politik. Melalui NICA, sederet perundingan dilakukan ketika upaya militer mengalami kebuntuan. Belanda berupaya untuk mengembalikan pengaruh politik mereka dengan membentuk apa yang disebut sebagai negara-negara boneka. Tujuannya jelas, yakni berupaya

untuk memecah kekuatan Indonesia dengan membentuk negara-negara federal yang salah satunya adalah Negara Indonesia Timur (NIT). NIT merupakan representasi kekuatan politik daerah-daerah Indonesia Timur yang masih terdapat banyak dukungan kepada Belanda. NIT berpusat di Makassar yang juga sebagai pusat ekonomi untuk wilayah Indonesia Timur.

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara NIT dengan DJB sebagai seperangkat alat Belanda dalam menguasai Indonesia. Pada bab ini dijelaskan peranan dan kiprah yang dilakukan oleh DJB Agentschap Makassar sebagai representasi kekuatan ekonomi Belanda di wilayah Indonesia Timur. Dapat dikatakan bahwa DJB menjadi motor ekonomi NIT dalam melaksanakan pemerintahannya. Untuk melihat dinamika politik dan ekonomi pada periode ini, maka perlu pula penjelasan mengenai jalinan erat antara NIT dan DJB yang semuanya disajikan pada bab ini.

Kemerdekaan Indonesia dan Kembalinya De Javasche Bank di Makassar

Pada 1945, Perang Dunia II berakhir setelah dua kota di Jepang—Hiroshima dan Nagasaki—dihancurkan oleh tentara Sekutu. Kemenangan Sekutu itu melahirkan semangat kemerdekaan pada berbagai masyarakat terjajah di Asia. Bagi Indonesia, akhir peperangan itu bermakna sebagai kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dan menegakkan eksistensi sebagai negara-bangsa (*nation state*) yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Implikasi lain dari kemenangan atas perang itu ialah bahwa pemerintahan militer Jepang atau segala unsur kekuasaan asing di Indonesia harus pula berakhir. Dalam pada itu, tentara Sekutu mendapat mandat dari negara-negara pemenang perang untuk menyelesaikan berbagai persoalan pascaperang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Akan tetapi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa akhir perang dunia tidak dengan sendirinya mewujudkan proses dekolonisasi bagi

masyarakat terjajah secara damai dan adil. Dalam kaitan dengan Indonesia, jalan menuju kemerdekaan itu bahkan melahirkan perang baru atau revolusi yang terpaksa harus dihadapi. Pokok persoalannya ialah bahwa hak sebagai bangsa merdeka—sebagaimana terkandung dalam deklarasi universal—berusaha direnggut oleh kekuatan asing yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Adalah pihak Belanda yang menyatakan niatnya bergabung dengan tentara Sekutu untuk datang kembali di Indonesia. Tampaknya Belanda masih beranggapan sebagai pemerintah pengasingan Hindia Belanda—berkedudukan di Australia—yang berkewajiban menjaga ketertiban di wilayah yang pernah dikuasainya.

Tampaknya pula Belanda telah mempersiapkan kembali ke Indonesia dengan merancang Netherlands-Indies Civil Affairs (NICA) untuk ikut serta dalam pasukan Sekutu dengan tugas menangani urusan pemerintahan sipil. Berdasar kesepakatan dalam Civil Affairs Agreement di London (24 Agustus 1945), Inggris sebagai anggota Sekutu—yang ditugasi menjaga *status quo* di wilayah Asia Tenggara— menyetujui proposal Belanda untuk datang kembali di Indonesia.[260] Persetujuan Inggris tersebut didasari pandangan bahwa "pemerintah Hindia Belanda" turut menyatakan perang terhadap Jepang; dan mendengar bahwa di Indonesia terdapat kelompok pemimpin pergerakan yang berkolaborasi dengan Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu kedatangan ataupun persetujuan Sekutu.

Tugas untuk menangani pemerintahan sipil di "Hindia Belanda" tersebut menjadi dasar perubahan sebutan 'Netherlands-Indies Civil Affairs' menjadi 'Netherlands-Indies Civil Administration' dengan tetap menggunakan singkatan NICA. Bersama pasukan asal Australia—sebagai representasi tentara Sekutu—yang bertanggung jawab atas penanganan keamanan pascaperang di kawasan Timur Besar (atau Kawasan Timur Indonesia sekarang) dan Kalimantan, Belanda/NICA mendarat di Makassar pada 21 September 1945.[261] Begitu mendarat, aparat NICA langsung bergerak bersama pasukan Sekutu membebaskan tawanan, menghimpun

260 Ijzereef (1984: 17); Kadir, dkk. (t.t.: 153); lihat juga R. W. Kofman dalam arsip Laporan NEFIS Makassar, 5 Februari 1947. Koleksi National Archief Den Haag.

261 Kementerian Penerangan (1953: 223); Kadir, dkk. (t.t.: 154).

dan menghubungi raja-raja lokal untuk menerima kembali pemerintahan Hindia Belanda. Hal itu menyulut protes penduduk di Kota Makassar pada 27 September 1945 dengan aksi pengibaran bendera Merah Putih.

Aksi tersebut merupakan titik awal gerakan perlawanan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap rekayasa "pemulihan kembali" kekuasaan kolonial Belanda, dan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, "revolusi" di Sulawesi Selatan sejatinya telah dimulai beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dari Jakarta dan terdengar melalui *Domei*, pemancar radio eks-Jepang. Di Kota Makassar, sambutan terhadap berita proklamasi pertama-tama muncul dari kalangan intelektual nasionalis yang berlatar belakang kelas menengah dan elite masyarakat. Mereka telah berjuang selama pendudukan Jepang di bawah tanah dan menyambut kedatangan Sukarno pada akhir April 1945 di Makassar untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia yang akan tiba beberapa bulan kemudian.[262]

Selanjutnya, pasukan Belanda terus melakukan upaya "pemulihan kembali" struktur pemerintahan kolonial lama di wilayah bekas Gouvernement van Celebes.[263] Melihat gelagat itu, kekuatan nasionalis pro-Republik di Sulawesi Selatan segera melakukan konsolidasi kekuatan untuk menentang pemulihan struktur kolonial lama. Langkah mereka adalah menguasai infrastruktur strategis yang direbut dari tangan tentara Jepang dan digunakan untuk kepentingan Republik, khususnya untuk mencegah tentara pendudukan Belanda menggunakannya. Namun demikian, situasi politik di Jawa yang menunjukkan sikap moderat terhadap kehadiran pasukan Sekutu membuat para pemimpin nasionalis di Makassar juga menurunkan tensi ketegangan dengan menyatakan siap bekerja sama pada pertengahan November 1945.[264]

Kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan setelah perang menunjukkan kemacetan. Pada saat penyerahan Jepang diketahui

262 Menyambut kunjungan Sukarno di Makassar, Panglima Armada Laut II Jepang mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih dan pelantunan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*. Lihat Hering (2003: 352).

263 "Bereid tot onderhandelingen," *De Heerenveensche koerier*, 26 Oktober 1945.

264 "Goeden wil op Celebes," *De Nieuwe Nederlander*, 15 November 1945.

bahwa sektor transportasi publik mengalami kemunduran drastis. Selain kerusakan akibat perang, fasilitas pendukung perekonomian lainnya tidak tersedia karena kurangnya perawatan atas prasarana lama, sementara praktis tidak ada pembangunan fasilitas baru.[265] Begitu pula dengan sektor komunikasi, tidak ada sarana publikasi yang bisa dipertahankan. Situasi itu mengakibatkan kedua pihak—Indonesia dan Belanda—sepakat untuk memperbaiki kehidupan sosial yang bertujuan menyelamatkan masyarakat dari kesulitan. Untuk kepentingan penerangan masyarakat, pada 8 November 1945 diterbitkan surat kabar berbahasa Belanda *De Dag* dan surat kabar berbahasa Melayu di Makassar.[266]

Seperti diketahui, tugas kedatangan pasukan Australia sebagai wakil Sekutu adalah membebaskan tawanan perang dan mengangkut tentara Jepang kembali ke negaranya. Pada Desember 1945, tentara Jepang yang diangkut dari seluruh wilayah Indonesia Timur ditampung di Makassar. Sementara itu 150 orang tentara Jepang yang ditugasi menjaga keamanan di Kota Makassar juga dibawa pergi pada awal Desember 1945 dengan kapal perang Amerika Serikat.[267]

Akan tetapi setelah tugas berakhir, tentara Belanda terus berdatangan dalam jumlah yang semakin banyak sehingga memunculkan ketegangan politik dengan kelompok nasionalis yang mulai memantapkan diri dalam pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Seminggu setelah peristiwa pertempuran Surabaya (10 November 1945), reaksi kelompok nasionalis di Makassar menjadi keras. Mereka menolak segala upaya Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan dan pemerintahan lama di Sulawesi Selatan. Sebaliknya mereka menuntut Belanda agar menghormati struktur pemerintahan pro-Republik yang dideklarasikan.[268]

Reaksi Belanda justru sebaliknya dengan menunjukkan kesiapan membentuk pemerintahan sipil yang baru (NICA) dengan mendatangkan aparat dari Australia ke Makassar. Mereka tidak mau mengakui keberadaan

265 "Nederlandsch vliegtuigen over Java en Sumatra," *Leeuwarder Koerir*, 7 Agustus 1945.

266 "De Dag," *Het Dagblad*, 15 November 1945.

267 "Onze krijgsgevangenen in Manila," *Het Dagblad*, 7 Desember 1945.

268 "Nationalisten op Celebes willen samenwerken," *Provinciale Drentsche en Asser Courant*, 16 November 1945.

wali kota republik Nadjamoeddin dan sejumlah pejabat Indonesia yang telah mengambil alih fungsi dari aparat Jepang. Sebaliknya mereka mengangkat wali kota sendiri yang merupakan eks-walikota Makassar sebelum perang. Untuk mengisi jajaran birokrasi, Belanda melakukan pendekatan kepada kelompok mantan birokrat pada masa kolonial dan para penguasa kerajaan lokal agar mau bergabung dengan pemerintahan baru NICA.[269]

Langkah tersebut mulai mengarah pada konflik dengan kelompok nasionalis. Mereka menekan dan mengancam jajaran birokrasi di sekitar Makassar dan daerah pedalaman agar menolak tawaran bekerja bersama Belanda. Mereka juga berusaha melakukan blokade pengangkutan bahan pangan dari pedalaman ke kota dengan cara mencegat kendaraan pengangkut masuk kota. Dengan strategi demikian, kelompok nasionalis berharap bisa mempersulit posisi Belanda dan menggagalkan rencana Belanda untuk menegakkan struktur pemerintahan di Sulawesi Selatan.[270]

Pihak Belanda tetap meneruskan langkahnya meskipun ada perlawanan dari kelompok nasionalis republik yang didukung oleh para pemuda. Mereka menekan Wali Kota Nadjamoeddin dan Tadjoedin Noor, dua petinggi Republik di Kota Makassar, agar bersedia bekerja sama. Selain itu, Belanda menempati Hotel Empress sebagai pusat pemerintahan NICA di Sulawesi Selatan dan mendatangkan pasukan dari Manado untuk memperkuat pos-pos keamanannya. Sementara itu, tanggung jawab keamanan masih dipegang oleh komandan pasukan Australia sebagai tentara pendudukan hingga 25 Mei 1946.

Dari golongan pemuda, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia diwujudkan dengan cara membentuk berbagai kelompok pemuda atau laskar yang radikal patriotik. Berbagai kelompok pemuda radikal itu melakukan bermacam aksi untuk melawan keberadaan Belanda di tanah Sulawesi Selatan. Serangan yang dilakukan serentak pada pagi buta di beberapa tempat, yang mula-mula memperoleh hasil yang gemilang seperti di Stadion Merdekaya, Stadion Radio Mattoangin dan Hazo Kiyoku, Hotel Empres berhasil direbut dan diduduki. Mereka

269 "Rust op Timor en Celebes," *De Tijd*, 25 Oktober 1945.

270 "Toestand op Celebes," *Het Dagblad*, 19 November 1945.

juga berupaya melakukan aksi menaikkan bendera Sang Merah Putih di atas Gedung Conica menggantikan bendera Belanda, namun ternyata menemui kegagalan. Belum sempat para pemuda konsolidasi pasukan, pada jam 10.00 pagi tentara Australia (Sekutu) sebagai penanggung jawab keamanan serentak bertindak melakukan penangkapan dan melucuti kembali pemuda-pemuda yang merampas senjata.[271]

Situasi yang mencekam akibat berbagai aksi yang dilakukan kelompok-kelompok pemuda radikal membuat pemerintah Belanda (NICA) berupaya untuk mengendalikan situasi. Atas dasar kondisi itu, tanggal 11 Desember 1946 Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan keputusan tentang SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) atau Undang-undang Keadaan Darurat yang berlaku di 4 *afdeling* dalam wilayah Sulawesi Selatan yaitu :

1. *Afdeling* Makassar (meliputi Jeneponto, Takalar, Gowa Ujungpandang, Maros dan Pangkajene Kepulauan).
2. *Afdeling* Parepare (meliputi Parepare, Kotamadya Parepare, Pinrang, Sidenreng dan Enrekang).
3. *Afdeling* Majene (meliputi Mamuju, Majene dan Polmas).
4. *Afdeling* Bonthain (meliputi Sinjai, Bulukumba, Selayar dan Bonthain).

Sementara itu, demi menegakkan kekuasaannya kembali di Indonesia, Belanda melakukan kebijakan dan upaya, salah satunya dengan memecah kekuatan Indonesia melalui pembentukan 'negara boneka'—menurut pandangan pihak Republik Indonesia. Belanda mengupayakan membentuk sebuah negara serikat berupa pemerintahan federal dengan pusat kekuasaan monarki berada di Ratu Belanda.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Belanda berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pribumi. Tindakan Belanda mencari dukungan dari kalangan elite masyarakat setempat tidak hanya terbatas pada kalangan birokrat yang telah diangkat oleh pemerintahan pro-Republik, tetapi juga dari kalangan penguasa swapraja feodal yang pada masa sebelum perang telah terikat dalam kontrak

271 Andi Mattalatta, *Meniti Siri dan Harga Diri: Catatan dan Kenangan,* (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, Cet kedua, 2014), hlm. 11- 13.

politik dengan Belanda. Untuk itu Belanda merencanakan mengadakan pertemuan formal dengan para penguasa feodal pada akhir Desember 1945 dengan tujuan membahas masa depan Sulawesi Selatan.[272]

Upaya Belanda tersebut memperoleh tanggapan positif dari beberapa kalangan elite feodal. Raja Bone menanggapinya dengan baik dan mengusulkan agar konferensi para penguasa feodal dilaksanakan pada awal 1946 di Makassar dan dirinya bersedia hadir.[273] Begitu pula dengan Raja Luwu, tanggapan positif terhadap tawaran Belanda segera disampaikan dengan menerima utusan NICA Kontrolir Wolhof, yang melaporkan ke Makassar bahwa kerja sama bisa dijamin dari para penguasa swapraja di Sulawesi Tenggara dan Buton, terutama setelah pendaratan tentara Belanda di Buton pada 30 November 1945.[274]

Meskipun upaya Belanda mendekati kelompok penguasa lokal bisa dianggap berhasil sebagai cara menekan aksi dari pihak kelompok nasionalis, Letnan Gubernur Jenderal H. Van Mook menganggap bahwa upaya itu hanya merupakan awal dan menjadi bagian dari program besar jangka panjangnya dalam menentukan masa depan Indonesia. Van Mook menyadari bahwa perjuangan memulihkan tatanan kolonial seperti sebelum perang tidak lagi dimungkinkan dan arah menuju dekolonisasi tidak dapat dihindari. Untuk mengikat kepentingan Belanda terhadap Indonesia di masa depan perlu diterapkan suatu strategi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dan ini akan diwujudkan setelah tentara Sekutu menarik diri dari Indonesia agar memberi kesempatan pemerintah Belanda menyusun kekuatan.[275]

Untuk mendukung rencananya, Van Mook menganggap bahwa kekuatan elite lokal yang setia kepada tujuan Belanda sangat penting, khususnya untuk mengimbangi kekuatan pro-nasionalis di tingkat

272 "Rijksconferentie op komst?" *De Waarheid*, 22 Desember 1945.

273 "Celebes," *Het Dagblad*, 31 Desember 1945.

274 "Hartleijke Ontvangst op Boeton," *Het Dagblad*, 11 Desember 1945.

275 Langkah Van Mook cukup sulit karena baik pihak Belanda maupun Indonesia mencurigai kebijakannya. Pihak Belanda yang terutama didominasi sayap kanan mengritik langkahnya sebagai petualang politik karena bersedia berunding dengan kaum teroris dan ekstremis Indonesia, sementara pihak Indonesia memandang Van Mook sebagai agen kolonialisme modern. Dengan demikian langkah federal ini menjadi solusi tengah yang dianggapnya paling tepat untuk menyatukan dia dengan kepentingan tersebut. Lihat Van Klinken (2003: 171).

daerah. Elite lokal yang bisa diharapkan oleh Van Mook adalah mereka yang telah terbukti kesetiaannya dan bekerja sama dengan Belanda sebelum kedatangan tentara Jepang pada 1942. Selain menjamin loyalitas dan komitmen mereka, Van Mook bisa memanfaatkan pengaruhnya untuk mengimbangi pengaruh propaganda pihak Republik yang juga mendapatkan dukungan di kalangan tokoh intelektual dan elite informal.[276]

Menimbang hal tersebut, Van Mook memutuskan melaksanakan program politiknya tentang pembentukan Indonesia federal dengan melibatkan kelompok elite politik tradisional. Dalam rancangannya itu, Indonesia akan merdeka dalam ikatan dengan Belanda dan terdiri atas kumpulan negara bagian (serikat) di bawah kontrol Belanda. Dengan demikian menurut tujuan Van Mook, dalam jangka panjang posisi dominan Belanda atas Indonesia secara ekonomi dan politik masih tetap dijamin walaupun dalam bentuk yang berbeda dengan ikatan kolonial lama.[277]

Dalam konteks demikian, wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan, dianggap sangat penting. Van Mook memandang Indonesia Timur sangat potensial untuk dijadikan negara serikat karena selain siap menyambut tatanan struktural Belanda, di kawasan itu pengaruh ide-ide kemerdekaan dari revolusi nasional Jawa sangat rendah. Kecuali di Sulawesi Selatan, praktis tidak ada elite pendukung revolusi yang cukup kuat bertahan. Selain itu, kehadiran pasukan pendudukan Sekutu yang lebih awal memudahkan Belanda untuk mengambil alih kekuasaan secepatnya.

Sulawesi Selatan dianggap cukup strategis dalam konteks politik Belanda terhadap Indonesia Timur. Makassar sebagai ibu kota sejak

276 Ketika van Mook tiba di Jakarta pada 3 Oktober 1945, ia terkejut mengetahui struktur pemerintahan Republik Indonesia sudah terbentuk secara lengkap. Awalnya, ia memang ingin mengubah hubungan kolonial dalam sistem pemerintahan menjadi suatu bentuk kontrol modern yang ditopang dengan konsultasi antara pemerintah Belanda dan unsur-unsur dalam masyarakat di Indonesia. Lihat Ooi (2013: 19).

277 Dalam konsep federalisme Van Mook, beberapa bidang kewenangan masih dipegang oleh Belanda seperti pertahanan, keuangan nasional dan hubungan luar negeri; Belanda mengontrol dan bertanggung jawab atas ketiga sektor ini. Sebenarnya negara federal tipe Van Mook itu lebih mirip sebagai daerah dengan otonomi khusus. Lihat Brown (2001: 11).

zaman sebelum perang telah menjadi pusat pemerintahan regional di seluruh wilayah itu dengan yang dipimpin seorang gubernur. Begitu pula pada masa pemerintahan militer Jepang yang menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan kawasan Angkatan Laut (*kaigun*) di Indonesia. Penguasaan mutlak dan kontrol atas fungsi Makassar akan bermakna strategis karena juga Belanda akan mematahkan kekuatan dan pertumbuhan pendukung revolusi nasional Indonesia.

Kota Makassar memiliki nilai strategis tersendiri. Selain menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, kota itu menjadi pintu gerbang yang mengontrol perekonomian kawasan timur Indonesia karena fungsi pelabuhannya sebagai tempat transito yang dominan. Kota tersebut juga menjadi pusat pendidikan bagi elite lokal yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan modern. Dari situ dapat diduga bahwa Makassar menjadi sentra berkumpulnya elite intelektual pribumi dari berbagai daerah di wilayah timur Indonesia dan mereka menjadi kekuatan potensial untuk dimanfaatkan demi kepentingan Belanda sejauh belum terpengaruh oleh ide-ide revolusi yang mendukung kemerdekaan nasional.

Gambar 4.1. Pelabuhan Makassar sebagai Pusat Transito dan Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.



Sumber: Nationaal Archief (www.gahetna.nl)

Berdasar pikiran atau kenyataan tersebut, Van Mook memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam mewujudkan rancangan Indonesia federal di Makassar, yaitu dengan menyelenggarakan sebuah konferensi yang disponsori pihak Belanda di Malino, sebuah tempat peristirahatan di sebelah timur Makassar, pada 16–25 Juli 1946. Beberapa bulan sebelumnya, pada 10 Februari 1946, Van Mook telah mengumumkan rencana penyelenggaraan konferensi tersebut sebulan setelah pengambilalihan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dari Sekutu oleh NICA. Peserta yang diundang dalam konferensi adalah kelompok penguasa tradisional, kelompok minoritas agama dan etnis, serta perwakilan dari daerah yang dijamin pro-Belanda. Tujuannya penyelenggaraan tidak lain adalah untuk membahas persiapan pembentukan negara-negara federal.[278]

Sasaran Van Mook adalah mewujudkan sebuah negara Indonesia federal di bawah kontrol dan kerja sama dengan Belanda yang berarti akan melemahkan kekuatan revolusi nasional yang bertujuan membentuk negara merdeka seratus persen. Selain itu, melalui pembentukan negara federal, Van Mook berharap agar Belanda tetap dianggap bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia dalam sikapnya terhadap bekas koloninya sekaligus menjamin kesetiaan dan keterikatan bekas koloninya itu kepada pemerintah Belanda. Kebijakan itu selanjutnya sering dikenal sebagai *Malino policy* atau 'politik Malino'.[279]

Sebagai hasil pertama dari Konferensi Malino dan langkah-langkah lebih lanjut adalah pembentukan Negara Indonesia Timur pada 24 Desember 1946 dengan pusat pemerintahannya di Makassar. Negara Indonesia Timur yang mencakup seluruh kawasan timur Indonesia minus Papua itu dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Untuk menciptakan keseimbangan, Van Mook meminta seorang bangsawan Bali, Tjokorda Gde Raka Soekawati, sebagai presiden, sementara bekas wali kota Makassar, Nadjamoeddin Daeng Malewa, menjadi perdana

278 Pluvier (1974: 428).

279 Kuyper dan Kapteyn dalam Panhuys (ed.) (1980: 164).

menteri.[280] Dengan langkah itu, Van Mook telah melemahkan kekuatan pro-Republik di antara kelompok intelektual sekaligus menjamin kerja sama dari elite tradisional.

Gambar 4.2. Presiden Negara Indonesia Timur, Tjokorda Gde Raka Soekawati (tengah) bersama Istrinya yang Berkebangsaan Prancis, ketika Mengunjungi Makassar pada Tahun 1947.



Sumber: Koleksi Tropenmuseum

Meskipun ada perlawanan pada proses pembentukannya, seperti protes yang dilontarkan oleh Partai Nasional Indonesia cabang Sulawesi Makassar pada 11 September 1946, dan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di pinggiran kota dan pedalaman pada pertengahan Oktober 1946, Van Mook tetap meneruskan langkahnya. Ia mengeluarkan

280 Preston dan Best (2001: 15). Nadjamoeddin juga memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha kaya yang sukses dalam sektor perkapalan sebelum perang.

pengumuman kondisi darurat perang untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada 11 November 1946, yang menjadi dasar bagi operasi pembersihan oleh kesatuan pasukan khusus Belanda (*korps speciale troepen*) di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling pada pertengahan Desember 1946 yang meminta korban ribuan orang penduduk Sulawesi Selatan.[281]

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Timur adalah parlementer dengan pemerintahan kabinet perdana menteri yang didampingi oleh badan perwakilan yang diangkat dari wakil-wakil kelompok masyarakat. Pada 3 Januari 1947 kabinet pertama dibentuk yang terdiri atas sembilan menteri. Dalam kabinet itu, Menteri Keuangan dijabat oleh Kepala Cabang (*Agent*) De Javasche Bank untuk Sulawesi Selatan Mr. M. Hamelink. Sementara itu para menteri yang lain mewakili daerah-daerah yang ikut serta dalam struktur geografi kawasan Indonesia Timur di bawah pemerintahan negara ini.[282]

Gambar 4.3. Mr. M. Hamelink, Kepala Cabang De Javasche Bank Agentschap Makassar yang diangkat menjadi Menteri Keuangan Negara Indonesia Timur



Sumber: https://geheugenvannederland.nl

281 Reid (1974: 108). Tindakan Westerling meninggalkan kesan buruk dalam pikiran banyak orang Sulawesi Selatan terhadap Belanda dan kemudian juga terhadap orang-orang Indonesia yang duduk dalam pemerintahan NIT sebagai antek Belanda. Hal itu menjadi alasan kurangnya dukungan kalangan bawah masyarakat terhadap bentuk federal di Indonesia Timur.

282 Gde Agung (1996: 145).

Negara Indonesia Timur merupakan negara federal pertama, terluas dan paling lama bertahan dalam struktur federalisme di Indonesia. Dengan mencakup kawasan hampir separuh wilayah Indonesia, dan terdiri atas unsur paling heterogen secara etnis, sosial dan budaya, NIT menjadi salah satu pilar dari program Republik Indonesia Serikat karya van Mook, yang sebelumnya dirancang untuk empat negara bagian, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur.

Akan tetapi sejak awal pembentukannya, kelemahan telah tampak secara internal dalam struktur pemerintahan Negara Indonesia Timur. Para elite politik yang ikut duduk dalam struktur dan menghadiri Konferensi Denpasar pada Desember 1946 untuk membentuk negara itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap rencana Van Mook. Dalam perkiraan mereka, NIT dianggap sebagai negara yang merdeka meskipun dalam konteks federal. Dengan demikian kontrol Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan Belanda dianggap hanya sementara dan ketika NIT berhasil memantapkan posisinya, mereka akan melepaskan diri dari kontrol itu dan bisa berhubungan langsung dengan luar negeri.[283]

Untuk memperkuat pengaruh ekonomi Belanda di NIT, terutama di Kota Makassar, pada 10 Oktober 1945 rezim NICA membuka kembali De Javasche Bank Agentschap Makassar yang sempat ditutup oleh Jepang. DJB difungsikan sebagai bank sirkulasi yang mengedarkan uang Belanda. Pembukaan kembali DJB Makassar berkat jaminan keamanan pasukan Australia.[284] Sebaliknya, bank-bank Jepang yang beroperasi selama masa pemerintahannya harus ditutup, termasuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang menjadi bank sirkulasi selama pemerintah militer Jepang berkuasa di Indonesia.

Pada bulan-bulan pertama beroperasi, DJB mengalami kesulitan kelengkapan pegawai dan staf akibat banyak pegawai yang bekerja sebelum perang mengungsi meninggalkan kota Makassar. Selain itu, DJB mengalami kelangkaan cadangan uang yang saat itu tinggal 8 juta gulden,

283 Kahin (2012: 65). Terutama hal itu tampak sebagai akibat ada lawan bersama yaitu dorongan untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, suatu struktur yang sangat ditakuti dan dibenci oleh kelompok pendukung federal atau pro-Belanda.

284 Lihat Rahardjo, dkk (1995)

sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan 600 juta gulden pada 1940. Begitu pula dengan persediaan uang logam perak gulden senilai 20 juta gulden yang hilang saat pendudukan Jepang. Oleh sebab itu, ketika pada Februari 1946 Direksi DJB Pusat di Jakarta memberikan izin kepada perwakilan di Makassar untuk beroperasi kembali, kesulitan itu segera ditanggulangi. Pimpinan DJB Makassar bekerja keras merekrut kembali pegawai lama yang masih ada termasuk dari masa pendudukan Jepang. Usaha itu berhasil dilakukan selama sepuluh bulan sehingga pada November 1946 seluruh struktur kepegawaian DJB Makassar telah terisi kembali.[285]

Dalam tenggat waktu satu bulan setelah pembukaan kembali DJB, Direksi diperintahkan mengganti uang Jepang yang masih beredar dengan uang gulden, dengan nilai tukar (kurs) 1 gulden, setara dengan 10 rupiah uang Jepang.[286] Penukaran uang tidak terbatas hanya pada uang kertas yang diterbitkan oleh rezim militer Jepang, melainkan juga uang zaman Hindia Belanda yang masih disimpan oleh masyarakat dapat ditukar dengan mata uang baru dengan nilai tukar yang sama. Untuk itu pemerintah pendudukan Belanda melalui DJB menerbitkan uang kertas baru sebagai sarana penukaran sah, yang berlaku sejak pertengahan November 1945.[287]

Selain mata uang, surat tagih (bilyet) dari DJB lama juga dinyatakan bisa ditukarkan. Hal itu disampaikan oleh pejabat NICA di Makassar pada pertengahan Desember 1945, dengan pertimbangan bahwa dengan meningkatnya kestabilan dan keamanan maka ekonomi akan kembali bergairah dan dinamis sehingga diperlukan sarana pendukung seperti sirkulasi alat tukar yang lancar. Bahkan untuk mengimbangi pertumbuhan pesat sektor perdagangan dan industri, pihak DJB Makassar mengeluarkan pernyataan bahwa pemegang surat tagih bisa melakukan pembayaran untuk jangka waktu yang tidak dibatasi.[288]

---

285 "De Javasche Bank heeft haar apparatuur hersteld," *Algemeen Handelsblad*, 19 November 1946.

286 "Het Japansche geld," *Het Dagblad*, 31 Desember 1945.

287 "Oud Indisch Bankpapier omwiselbaar tegen nieuw tegen 100%," *Het Financieele dagblad*, 17 November 1945.

288 "Papiergeld De Javasche Bank," *Het Dagblad*, 15 Desember 1945.

Di sisi lain, dengan pembukaan kembali kantor De Javasche Bank—yang juga terjadi pada beberapa cabang di daerah lain—hubungan dengan bank sentral dalam pengasingan, yaitu De Bank voor Nederlandsch Indië di Paramaribo, dihentikan. Selama itu bank sentral dalam pengasingan tersebut, yang dibuka pada September 1944, bertugas memasok mata uang bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda di pengasingan, termasuk menyuntikkan modal baru ke DJB. Setelah pemerintah NICA dapat menerbitkan uang sendiri, yang dikenal sebagai uang pemerintah Belanda, maka mata uang dari Paramaribo dihentikan dan sejak November 1946 DJB kembali menerbitkan mata uangnya untuk menggantikan mata uang NICA.

Pemerintah NICA menyatakan bahwa peraturan penukaran uang dan sarana transaksi lain yang dilakukan lewat DJB hanya berlaku untuk daerah pendudukan Belanda. Hal itu membuktikan peranan penting DJB dalam rangka memulihkan kembali penegakan struktur kolonial baru.

Peran De Javasche Bank dalam Ekonomi Negara Indonesia Timur

Sejak pembentukan Negara Indonesia Timur hingga perjalanan awal negara ini, terlihat bahwa pemerintahan NICA amat menghargai kontribusi dan peran penting DJB dalam mendukung keberhasilan misi politik mereka, khususnya melalui kebijakan federal Van Mook. Terbukti, seperti telah disebutkan, ketika Pemimpin Cabang DJB Makassar, M. Hamelink, diangkat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Nadjamoeddin Daeng Malewa pertama. Hal itu sekaligus sebagai pengakuan bahwa DJB memiliki posisi strategis tidak hanya bagi daerah pendudukan tetapi juga di NIT.

Hamelink dipandang penting dan dibutuhkan untuk menstabilkan kembali sistem moneter di wilayah kinerja DJB di Sulawesi. Dalam rangka upaya mengganti mata uang Jepang dengan mata uang gulden yang baru, CONICA (*Commanding Officer* NICA atau komandan NICA) pada 3 Januari 1946 memutuskan membentuk komisi khusus di bawah

kendalinya dengan penugasan untuk *muntzuivering* atau pemurnian uang. Dalam hal ini Hamelink kembali ditunjuk memimpin komisi tersebut yang berarti bahwa DJB dilibatkan dalam kebijakan itu.[289]

Kebijakan tersebut tidak terlepas dari kepentingan pemerintahan NICA yang mencanangkan pembangunan dan pengembangan kota Makassar sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada Februari 1946, dikeluarkan rencana pembangunan kembali Pelabuhan Makassar dan perluasan jalan-jalan di dalam Kota Makassar sebagai sarana transportasi.[290] Dengan harapan bahwa majunya perdagangan akan mendorong meningkatkan kemakmuran penduduk maka persoalan sektor moneter harus diselesaikan terlebih dulu dengan menjamin nilai tukar mata uang yang stabil melalui mata uang gulden baik logam maupun kertas yang diedarkan oleh DJB.

Tanggapan dunia usaha atas kebijakan ekonomi pemerintahan NICA disambut sangat positif terbukti dengan pembentukan Organisasi Exportir Makassar (*Vereeniging Exporteer*) sebagai cabang dari induk organisasi yang dibentuk di Batavia pada Juni 1946. Organisasi itu menampung para pedagang eksportir yang akan membeli produk lokal sebagai komoditas ekspor untuk kemudian dikirim ke pasar luar negeri melalui Pelabuhan Makassar. Animo positif publik terhadap langkah-langkah ekonomi mikro pemerintahan NICA telah memengaruhi dinamika kehidupan ekonomi moneter di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.[291]

Setelah pembentukan kabinet Negara Indonesia Timur, peran DJB di negara ini menjadi sangat besar. Bank itu tidak lagi terbatas sebagai agen atau perwakilan dari pusat perusahaan di Jakarta, melainkan juga berperan dan bertanggung jawab sebagai bank sirkulasi bagi negara federal dan menentukan kebijakan moneter dan fiskal negara. Untuk itu wilayah kerjanya diperluas sehingga mencakup seluruh wilayah NIT.

Dengan perubahan tersebut, pimpinan DJB pusat di Jakarta menyetujui permintaan Hamelink mengenai pembentukan Dewan

289 "Makassar: muntzuivering," *Het Dagblad*, 9 Januari 1946.

290 "Makassar als handelscentrum," *Het Dagblad*, 8 Februari 1946.

291 "Vereenigde Exporteurs Makassar," *Het Dagblad*, 24 Juni 1946.

Komisaris yang membantu *Agent* (pemimpin cabang) DJB Makassar. Keberadaan dewan itu sangat diperlukan ketika Hamelink sendiri harus menempati kantor baru di Kementerian Keuangan, sementara pengelolaan sehari-hari DJB diserahkan kepada wakilnya. Kantor pusat menyetujui usul itu dan sejak 1 April 1947, Dewan Komisaris dibentuk yang terdiri atas tujuh orang anggota, dengan komposisi seorang Eropa, lima orang pribumi dan satu orang Tionghoa.[292]

Dalam sebuah wawancara dengan media pers di Belanda pada awal Januari 1947, Hamelink menyatakan kesiapan DJB untuk mendukung kinerja kabinet NIT. Pengalamannya sebelum perang sebagai presiden *Coprafonds* di Makassar telah membuatnya banyak bergaul dengan kalangan ekonom dan tokoh adat Sulawesi Selatan. Hamelink tidak khawatir terhadap pengaruh semangat nasionalisme yang didengungkan oleh Proklamasi di Jakarta, karena ia yakin kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki rasa kedaerahan yang tinggi dan pihak Belanda harus memanfaatkan situasi ini.[293]

Hamelink dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 9 April 1947.[294] Sebelum pelantikannya ia telah menerima jabatan menteri itu dan mendampingi Presiden NIT, Tjokorda Gde Raka Soekawati, dalam kunjungan dinas ke Negeri Belanda pada 24 Januari hingga 25 Februari 1947. Misi kunjungan resmi pertama Presiden NIT adalah bertemu dengan Ratu Juliana dan Perdana Menteri Belanda, serta menyampaikan pidato di depan sidang Parlemen Belanda.[295]

---

292 "De Javasche Bank," *Het Dagblad*, 27 Maret 1947. Dari komposisi itu tampak bahwa dominasi pribumi tampak dalam kedudukan Dewan. Apakah hal itu karena tekanan dari kantor pusat ataukah merupakan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan politik NIT tidak bisa dijelaskan.

293 "Interview met Mr. M. Hamerlink," *Algemeen Indisch Dagblad*, 17 Januari 1947.

294 "Ministers beedigd," *Het Dagblad*, 10 April 1947. Hamelink baru disumpah dan dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 9 April 1947 bersama E. Katopo sebagai Menteri Pendidikan karena pada saat upacara pelantikan anggota kabinet di Jakarta (13 Januari 1947), keduanya tidak bisa hadir berhubung sangat sibuk.

295 "Soekawati naar Nederland," *Het Dagblad*, 24 Januari 1947.

Gambar 4.4. Istana atau Kediaman Resmi Presiden Negara Indonesia Timur, Tjokorda Gde Raka Soekawati pada Tahun 1947



Sumber: Nationaal Archief (www.gahetna.nl)

Pada kesempatan mendampingi Soekawati tersebut, Hamelink menyatakan pada sebuah konferensi pers bahwa NIT memerlukan kehadiran DJB sebagai sebuah lembaga sirkulasi keuangan negara, dan berharap DJB Makassar tetap menjadi institusi yang kuat karena bertanggung jawab dan menopang keseimbangan neraca pembayaran dan pendapatan yang mengandalkan sektor ekspor-impor. Mengingat sektor ini sangat potensial bagi NIT dengan daerah pedalamannya yang kaya akan komoditas ekspor sehingga kebijakan DJB untuk mendukung kesehatan ekonomi NIT sangat diperlukan.[296]

Pernyataan itu bukannya tanpa alasan karena, seperti disebut Hamelink, kawasan Indonesia Timur menjadi incaran potensial bagi para investor, khususnya dalam sektor industri. Saat itu saja di wilayah Sulawesi Selatan terdapat investasi sebesar 200 juta gulden dalam

296 "Economische vooruitzichten Oost Indonesie," *De Tijd*, 6 Februari 1947.

sektor perkebunan. Ada tiga prioritas yang akan dikembangkan yaitu swasembada pangan, peningkatan produksi tanaman rakyat, dan pertumbuhan sektor industri. Untuk mendukung ketiganya, sektor transportasi sangat menentukan dan berperan penting.[297]

Setiba kembali di Makassar, Hamelink melontarkan pernyataan yang sesuai dengan apa yang disampaikannya di Belanda. Dalam konferensi pers pada akhir Maret 1947, ia menuntut agar semua pihak yang tergabung dalam NIT bekerja sama dengan satu tujuan yaitu untuk memperkuat dan memajukan perekonomian wilayah. Pemerintah Belanda dijamin dukungannya yang akan memudahkan perdagangan dan pemasaran komoditas dari NIT sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara kedua pihak.[298]

Sebagai Menteri Keuangan, Hamelink disibukkan oleh tugas pembenahan perekonomian NIT. Menurutnya fondasi perekonomian di wilayah NIT cukup kuat, karena dengan cepat tonase perdagangan bisa dipulihkan seperti sebelum perang asalkan fasilitas transportasi mendukungnya. Begitu pula dengan neraca pembayaran dalam laporan DJB yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat dengan pengeluaran yang mencapai 100 juta gulden selama tahun 1947 masih bisa ditekan di bawah pemasukan. Hamelink yakin bahwa pada 1949 lonjakan perekonomian NIT akan dicapai.[299]

Menurut pertimbangannya, sektor perkapalan tetap menjadi fokus utama karena menjadi sumber pemasukan bagi keuangan NIT. Akan tetapi untuk bisa menarik perkapalan dunia, NIT memerlukan fasilitas perkapalan baru yang modern. Oleh karena itu Hamerlink melakukan kunjungan ke Negeri Belanda pada 25 Juni 1947 untuk melobi kalangan industrialis dan para pengusaha kapal Swedia agar bersedia melakukan investasi di Makassar dan kota-kota pelabuhan lain di NIT.[300] Dalam kunjungan itu, Hamelink juga memberikan informasi yang perlu diketahui oleh pejabat dan publik Belanda tentang NIT, sekaligus mengadukan

297 "Oost Indonesie toekomst," *Algemeen Indisch Dagblad*, 7 Maret 1947.

298 "Toespraak van Minister Hamelink," *Algemeen Indisch Dagblad*, 29 Maret 1947.

299 "Financieele toestand Oost Indonesie gezond," *Leeuwarder Courant*, 30 April 1947.

300 "M. Hamelink naar Nederland," *De Tijd*, 25 Juni 1947.

persoalan tentang kekurangan tenaga ahli untuk mengisi departemennya yang diharapkan dapat diisi dari Belanda.[301]

Secara garis besar sektor perkapalan di KTI menunjukkan kecenderungan membaik terlihat dari lalu lintas kapal di Pelabuhan Makassar yang makin meningkat. Dalam laporannya, Perdana Menteri NIT Nadjamoeddin Daeng Malewa menyebutkan tiga indikator yang membuat perekonomian NIT sehat. *Pertama*, hasil neraca perdagangan NIT berjalan normal, baik ekspor ke luar negeri maupun antarpulau. *Kedua*, hasil produksi bahan makanan yang melebihi keperluan sendiri. Terakhir, *ketiga*, terdapat kemampuan menghasilkan kebutuhan dalam lingkungannya sendiri tanpa bergantung dan terikat pada perusahaan Barat.[302]

Aktivitas ekspor dan impor yang ditandai dengan arus kapal barang yang makin meningkat di Pelabuhan Makassar selama tahun 1946 membuat terjadi penumpukan barang di pelabuhan, karena menunggu giliran pengangkutan. Di lain tempat, produksi hasil pertanian di daerah Wajo dan Soppeng juga menunggu pengangkutan dari Makassar. Saat itu terjadi surplus dari kelebihan jagung dan beras di kedua daerah tersebut.[303]

Peningkatan aktivitas pengangkutan hasil bumi yang semakin bertambah kemudian mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perdana Menteri Nadjamoeddin Daeng Malewa kemudian melakukan kebijakan dalam usaha meningkatkan ekonomi perusahaan pelayaran rakyat melalui penyerahan wewenang secara langsung atas pelayaran kecil berkenaan dengan pelayaran yang mengangkut barang dagangan terutama kopra dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.[304]

---

301 "Minister Hamelinks reis," *Het Dagblad*, 25 Juni 1947.

302 Poelinggomang, dkk. (2005).

303 Poelinggomang (2005: 242).

304 Daerah Miangas merupakan salah satu penghasil kopra terbanyak di wilayah NIT. Berdasar laporan Kementrian Penerangan NIT, kopra yang diangkut dari Miangas sangat berlimpah. Kopra dibawa dengan menggunakan 10 perahu yang merupakan milik penduduk sendiri yang dilayarkan ke Talaud. Jika musim selatan datang, kopra tidak dikirim ke Talud melainkan dibawa ke Filipina yang memakan waktu berlayar kurang lebih 24 jam. Pengangkutan ke daerah tersebut tidak termasuk dalam jangkauan kapal-kapal KPM, demikian pula dengan *coaster* maskapai Nocomo. Oleh karena itu, pengangkutan barang-barang dagangan penduduk mesti menggunakan alat-alat sendiri atau dengan cara menjual barang dagangan mereka ke Filipina. Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Wajo No. Reg. 123.

Akibat dari peperangan yang terjadi sebelumnya telah membuat hampir 50 persen dari perahu-perahu hancur karena bom dan peluru sehingga perdagangan dan perekonomian umumnya tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Berhubung dengan itu Nadjamoeddin Daeng Malewa selaku Perdana Menteri NIT, mendirikan badan *Fonds* Perahu Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Makassar. Selain sebagai perdana menteri. Nadjamoeddin juga seorang pedagang yang merupakan putra daerah atau asli dari Sulawesi Selatan.

Fonds Perahu Sulawesi Selatan bertujuan membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Melalui badan itu para nelayan bisa memperoleh pinjaman untuk memperbaiki ataupun membuat perahu yang baru. Perahu yang dihasilkan ada yang menggunakan motor ada pula nirmotor. Perahu-perahu itu menghubungkan seluruh pulau di Indonesia. Pada 1947, sebanyak 92 persen perahu yang berukuran lebih dari 20 meter kubik di NIT berasal dari Sulawesi Selatan. Dengan demikian patut diakui bahwa perahu-perahu Bugis/Makassar merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia.

Pinjaman dana dari *Fonds* Perahu Sulawesi Selatan bisa diakses oleh para nelayan laut maupun nelayan pesisir, yang bisa diangsur pengembaliannya berdasar kesepakatan nilai barang yang mereka muat di atas perahu. Kehadiran badan itu juga membantu tersedianya pendidikan terutama dalam hal peningkatan keahlian seperti pendidikan bagi pegawai teknisi, kelasi perahu ataupun pegawai kantor.

Fonds Perahu Sulawesi Selatan juga menjadi jembatan aspirasi antara nelayan dan pemerintah dalam merencanakan dan merancang aturan tentang urusan pelayaran antarpulau di Indonesia. Badan itu juga berperan khusus dalam menciptakan perusahaan Veem yang menjadi tempat pembuatan kapal.[305]

Pemerintah, melalui DJB Makassar, memberi bantuan uang sejumlah 1.200.000 gulden kepada *Fonds*. Selain itu, dalam usaha meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan, pemerintahan Nadjamoeddin menganjurkan agar sektor transportasi pelayaran ditingkatkan.

305 *Negara Baroe*, 20 Oktober 1947, hlm. 2.

Pengangkutan baik melalui kapal maupun perahu rakyat mesti didukung, termasuk perikanan. Oleh karena itu, Nadjamoeddin minta bantuan fasilitas perlengkapan motor dan mesin yang diberikan kepada para nelayan untuk meningkatkan operasi pelayaran di Indonesia. Posisi strategis wilayah Indonesia, demikian pula Sulawesi Selatan, memiliki potensi perekonomian rakyat yang cukup besar sehingga memungkinkan membangun ekonomi bangsa dengan baik.

Gambar 4.5. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur Nadjamoeddin Daeng Malewa



Collectie Moluks Historisch Museum

Sumber: www.geheugenvannederland.nl.

Beberapa usaha untuk memperbanyak jumlah perahu di Sulawesi Selatan antara lain mengadakan sebuah badan khusus untuk membuat perahu di Boetoeng. Pertimbangan lain adalah, akses untuk mendapatkan kayu dan buruh yang lebih dekat, lokasi yang dekat dengan tempat kedudukan pangreh praja, rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu upah buruh pun masih rendah.

Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah NIT terutama Menteri Keuangan Hamelink adalah industri kopra. Pada awal Agustus 1947, Menteri Hamelink dalam program kerja ekonominya memberikan perhatian pada industri kopra. Ia menyatakan bahwa *Coprafonds*[306] menjadi aset penting bagi NIT dan perlu didukung sepenuhnya sebagai suatu organ pemerintah yang mendorong ekspor kopra dan meningkatkan kemakmuran petani kopra. Dalam hal ini DJB bisa digunakan sebagai lembaga satu-satunya penyalur kredit bagi para petani kopra yang tergabung dalam *Coprafonds*. Dengan adanya monopoli itu diharapkan tidak terjadi spekulasi di kalangan para pedagang yang akan merugikan petani kopra.[307]

Pada 7 September 1947, rombongan delegasi Presiden NIT Soekawati melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Beel di Den Haag.[308] Dalam pertemuan itu, delegasi NIT mengharapkan pemerintah Belanda ikut membangun kota Makassar agar bisa dikembangkan sebagai bandar perdagangan internasional di Indonesia Timur atau sebagai "*Amsterdam van de Oost*" atau Amsterdam dari Timur.[309] Untuk mewujudkan keinginan itu, Pemerintah NIT membangun pelabuhan-pelabuhan kapal di sepanjang pantai Pulau Sulawesi, antara lain Pelabuhan Makassar, selain terdapat pelabuhan di Teluk Parepare, di Teluk Kendari, dan di Teluk Kolonedale. Semuanya merupakan pelabuhan alam yang sering dikunjungi kapal-kapal besar.

Sebagai pusat perekonomian di NIT, Pelabuhan Makassar ramai dikunjungi tidak saja oleh kapal-kapal KPM, tetapi juga yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Jepang, Filipina, dan Australia.[310] Meningkatnya jumlah perdagangan di Makassar dipengaruhi oleh kebijakan NIT yang menempatkan Makassar sebagai pelabuhan bebas bagi kapal-kapal asing. Lokasi yang terlindungi oleh kumpulan pulau-pulau kecil Spermonde membuat Pelabuhan Makassar sangat aman bagi aktivitas pelayaran.

306 Pembahasan tentang *Coprafonds* lebih lanjut lihat Asba (2007: 189).

307 "Welvaartspeil van de bevolking zal worden opgevoerd," *Het vrije volk*, 14 Agustus 1947.

308 "De Oost Indonesië delegatie: audientie bij minister president," *De Tijd,* 8 September 1947.

309 "De hoofdstad hernieuwt de banden met de Oost," *De Gooi en Eemlander*, 10 September 1947.

310 Asba (2007).

Gambar 4.6. Kapal-kapal di Pelabuhan Makassar, 1947



Sumber: Nationaal Archief (www.gahetna.nl)

Wartawan-wartawan yang berkunjung ke Makassar pada 1946, menceritakan kota Makassar yang sudah mengalami kemajuan. Sulawesi Selatan sudah mengalami taraf perkembangan baru. Pembangunan yang sedang dilaksanakan membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Selain itu, dibutuhkan impor obat-obatan, tekstil, bahan bangunan dan lain-lain. Saat bertemu dengan Van Mook, seiring kerja sama politiknya, Nadjamoeddin meminta sarana yang harus segera diadakan untuk melancarkan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Nadjamoeddin ingin meningkatkan ekspor dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari kopra, rotan, damar kopi, kayu, nikel yang bisa bernilai sekitar 30 juta gulden, yang dimaksudkan untuk menutupi biaya impor yang dibutuhkan rakyat. Selain itu, tambang minyak di Buton dan Bone juga dapat dieksplorasi untuk menunjang ekonomi rakyat. Adapun sektor yang bisa dimanfaatkan adalah pertanian. Sulawesi Selatan memiliki kelebihan

bahan makanan (beras) sekitar 60.000 ton yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan makanan di seluruh wilayah Indonesia Timur.[311]

Namun, sebelum semua itu dapat terwujud, terjadi eskalasi politik di dalam tubuh NIT. Terjadi *reshuffle* dalam Kabinet NIT, Nadjamoeddin Daeng Malewa mengundurkan diri pada bulan Oktober 1947 dan digantikan oleh S. J. Warouw sebagai perdana menteri. Dalam perubahan kabinet itu, Hamelink untuk ketiga kalinya tetap menjabat sebagai menteri keuangan. Begitu pula saat perubahan susunan kabinet pada Desember 1947 ketika S. J. Warouw digantikan dengan Ide Anak Agung Gde Agung, posisi Hamelink tetap bertahan sebagai satu-satunya orang Belanda dalam kabinet NIT.[312]

Selanjutnya pada tiga bulan terakhir 1947, fokus program kerja Hamelink beralih dari pembangunan pelabuhan dan transportasi menuju sektor industri, yang tampak dipengaruhi oleh hasil kunjungannya ke Negeri Belanda. Ada tiga pabrik yang direncanakan dibangun dan dikembangkan untuk menjadikan sektor industri andalan bagi pemasukan negara yaitu bijih nikel di Kolaka, pabrik gula, dan pabrik pil kina. Hamelink menghubungi kantor departemen urusan ekonomi di Jakarta dan membicarakannya sebagai program industrialisasi Indonesia Timur pada tahun berikutnya.[313]

Lahirnya industri di Indonesia Timur didukung oleh kemunculan sumber daya energi yang menghidupkan pabrik-pabrik. Beberapa sumber pembangkit listrik di Sulawesi Selatan berasal dari pengairan. Pembangkit listrik tenaga air itu berada di wilayah NIT tepatnya di daerah Saddang, Teppo dekat Pinrang. Pengairan itu akan menggerakan motor-motor pembangkit yang kemudian menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan untuk pabrik di sekitarnya. Selain di Saddang, ada juga pengairan yang menjadi pusat pembangkit tenaga air di daerah Pinrang, Parepare, Rappang, Pangkajene, Tanroe Tedong, Sengkang dan Watangsoppeng. Sementara untuk daerah Sulawesi Utara terdapat di Minahasa, di Kali Tondano. Pembangkit tersebut juga berfungsi sebagai sumber listrik untuk industri.[314]

311 Gde Agung (1996: 86).

312 "Nieuwe Kabinet in Oost Indonesie," *Twentsch Dagblad*, 16 Desember 1947.

313 "Grote economische projecten op Celebes," *Leeuwarder Courant*, 14 Oktober 1947.

314 *Negara Baroe*, 11 Oktober 1947.

Dalam hal pemulihan ekonomi pascaperang, khususnya dalam memenuhi jumlah stok makanan, beberapa usaha yang ditempuh pemerintah NIT, antara lain mengembalikan sebagian tugas perniagaan kepada para pedagang beras swasta. Selain itu, pemerintah membebaskan pengangkutan antarpulau bagi bahan makanan. Hasil nyata usaha itu ditandai oleh keberhasilan pihak swasta mengirim 988 ton beras ke daerah-daerah di luar wilayah NIT yang kekurangan beras. Menjelang pertengahan Januari 1949 pengiriman semakin meningkat menjadi 2.000 ton beras, 750 ton jagung dan kacang ijo, ke berbagai daerah yang berkekurangan seperti Flores, Sumba, dan Timor. Pada bulan yang sama juga dikirim 80 ton gula pasir ke Manado.

Pada 28 Desember 1947, Dewan Ekonomi NIT mengeluarkan peraturan pemungutan cukai kopra di wilayah NIT dengan tiga ketentuan pokok. *Pertama*, cukai kopra akan berlaku pada ekspor dan antarpulau lainnya, termasuk penjualan kopra di wilayah NIT. *Kedua*, pajak penghasilan kopra dan cukai yang ditetapkan pemerintah akan ditinjau ulang apabila terlalu membebankan penduduk wilayah di NIT. *Ketiga*, sebagian besar sarana NIT digunakan untuk menjangkau seluruh produksi kopra di daerah.[315]

NIT yang menghasilkan lebih dari 320.000 ton kopra setahun merupakan pintu sektor perekonomian baru di Indonesia, selain masih dimungkinkan mengembangkan industri lain seperti kain, tembakau dan kulit binatang.[316] Hal itu mendorong perhatian besar negara-negara Barat terhadap sektor ekonomi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yang terlihat dengan peningkatan kunjungan Direksi Lever Brothers & Unilever Limited, yang merupakan maskapai besar dari Inggris. Kunjungannya itu terkait dengan keinginan perusahaan tersebut mendirikan pabrik sabun untuk mencukupi kebutuhan sabun di wilayah NIT dan Kalimantan, sejalan dengan keberadaan NIT sebagai salah satu daerah sumber pemasok kopra tertinggi.

Seperti telah dijelaskan, sejak periode kolonial produk ekspor utama Indonesia Timur adalah kopra. Setelah Perang Dunia II, dalam

315 Asba (2007: 200).

316 *Negara Baroe*, 11 Oktober 1947.

rangka mengembalikan kedudukan kopra sebagai penopang utama perekonomian, pemerintah NIT berupaya memperbaiki perdagangan kopra yang sempat tidak stabil akibat perang. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali *Het Coprafonds* di Makassar.

Dalam membangun kembali perdagangan kopra di Sulawesi Selatan, pemerintah menghadapi banyak persoalan. Pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan, ditemukan sejumlah masalah pengelolaan kopra. Selain bagaimana cara menggairahkan petani mengelola kopra, terdapat masalah teknik pengumpulan kopra oleh pedagang perantara. Para petani dan pedagang perantara di daerah produsen kopra dikumpulkan oleh pihak *Coprafonds* untuk mendapatkan penyuluhan tentang tata niaga kopra. Pihak *Coprafonds* menyediakan gudang penampungan serta modal bagi para pedagang perantara, tetapi ternyata kurang diminati karena kopra yang dibeli dipantau secara langsung oleh cabang *Coprafonds* di daerah. Selain itu harga pembelian kopra dipatok oleh *Coprafonds* sesuai standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk memulihkan tata niaga ekspor kopra maka langkah *Coprafonds* adalah, *pertama*, memulihan produksi dan ekspor kopra secepat mungkin melalui perbaikan sarana pengangkutan, seperti halnya pada masa sebelum perang. *Kedua*, membangun kekuatan ekonomi penghasil kopra melalui cabang-cabang *Coprafonds* di setiap daerah.[317]

Sebagai lembaga ekonomi yang cabangnya tersebar di berbagai daerah, *Coprafonds* memiliki arti penting bagi munculnya integrasi perdagangan antarpulau. Para pedagang Cina tetap menjadi pedagang perantara seperti masa sebelum perang. Hanya saja jika sebelum perang mereka bebas menjual dan membeli kopra, maka setelah *Coprafonds* menguasai perdagangan kopra, mereka harus mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh *Coprafonds* di setiap cabang. Para pedagang perantara tidak lagi bebas menetapkan harga kopra. Selain itu, pedagang perantara dianjurkan menampung kopra pada gudang atau toko yang telah ditentukan pihak *Coprafonds*. Bahkan di Selayar dan Sinjai, para pedagang Cina menjadi perwakilan *Coprafonds* di tingkat distrik.

317 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5114.

Pada umumnya daerah-daerah yang mata pencahariannya hanya tergantung dari kopra, senantiasa membutuhkan impor beras dari luar sebagai kebutuhan sehari-hari. Daerah-daerah yang mengalami surplus beras selalu membawa beras ke daerah-daerah penghasil kopra. Hubungan simbiotik antara beras dan kopra membuat wilayah Indonesia Timur sangat penting dalam perdagangan antarpulau. Itulah sebabnya kehadiran KPM sebagai armada pengangkutan kopra dan beras sangat didukung di wilayah itu. Hal itu menjadikan posisi Makassar makin penting dalam sebagai lumbung beras di wilayah Indonesia Timur.[318]

Untuk menjamin penyediaan beras dan tekstil di wilayah Indonesia Timur, maka pada 1946 Direktur Het *Coprafonds* mendesak pemerintah agar beras dan tekstil disebarkan ke wilayah-wilayah produsen kopra. Dalam tahun tersebut telah dibagikan sebanyak 1.340.000 meter tekstil ke berbagai daerah di Indonesia bagian timur. Jumlah penyebaran tekstil setiap tahun terus naik, yaitu 3.050.000 meter pada 1947 dan 7.890.000 meter pada 1948.[319] Penyaluran tekstil tersebut bertujuan merangsang secara langsung para petani yang selama masa Perang Pasifik banyak kekurangan sandang. Saat itu banyak penduduk di Indonesia Timur memakai pakaian yang terbuat dari karung goni (*gararo*). Hal ini juga untuk merangsang petani agar dapat mengelola kopra dengan baik setelah kebutuhan sandang pangan mereka tercukupi.

Pada 1947, Het *Coprafonds* membeli 155.000 ton kopra,[320] kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 278.000 ribu ton pada 1948, dan sekitar 450.000 ton pada 1949. Wilayah pembelian menyangkut seluruh wilayah Indonesia bagian timur kecuali Bali dan Lombok.[321] *Coprafonds* sebagai lembaga penampungan kopra, tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan KPM sebagai sarana transportasi yang utama. Kopra yang tidak merata tempatnya di Indonesia bagian timur dilayari oleh KPM. KPM mengumpulkan kopra dari pelabuhan-pelabuhan kecil dibawa menuju Makassar untuk kemudian diekspor. Hal itu memudahkan

318 Department of Economic Affairs (t.t.: 58–9).

319 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5114-

320 NAD, NHM Makassar, No. Inv. 5114.

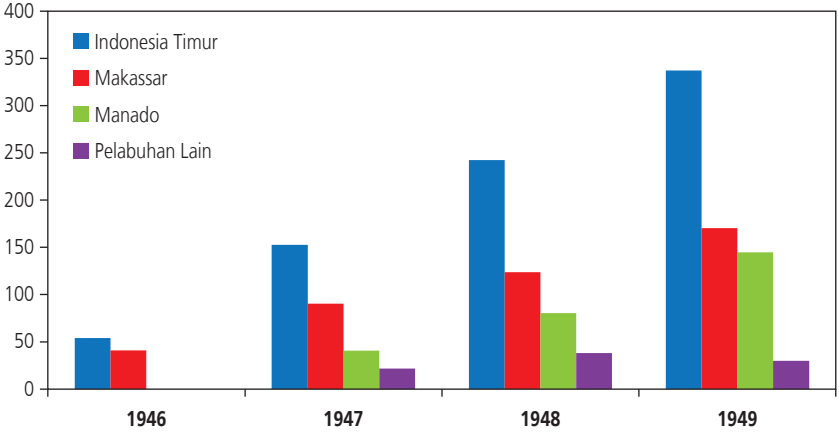
321 Arsip, Ministerie van Buitendlandse Zaken, No. Inv. 02024.

kapal-kapal uap mengangkut kopra secara langsung, karena melalui Pelabuhan Makassar akan lebih mempermudah dan memperpendek jarak pengangkutan dengan wilayah produsen kopra. Hal itu juga berpengaruh pada peningkatan kapal-kapal asing yang masuk di Makassar.

Pada tabel ekspor kopra di Indonesia Timur periode tahun 1946-1949 menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan jumlah ekspor ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan konsumen kopra di pasaran dunia, serta semakin membaiknya fasilitas dan prasarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, posisi strategis Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Timur turut menunjang keterlibatan orang asing khususnya Belanda yang turut mendapat keuntungan dari ekspor kopra.

Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor NIT—antara lain Eropa, Amerika Serikat, Hongkong dan Singapura—juga menjadi tujuan ekspor barang-barang hasil hutan, rempah-rempah, hasil laut dan hasil lainnya dari Indonesia Timur yang sangat dibutuhan oleh negara-negara tersebut.[322]

Grafik 4.1. Ekspor Kopra di Indonesia Timur 1946–49



Sumber : Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2. Hal 243.

322 Poelinggomang, dkk. (2005: 244).

Tabel 4.1.
Daerah Tujuan Ekspor Kopra Makassar 1949

DAERAH TUJUAN EKSPOR	JUMLAH MUATAN (TON)
Belanda	108.038
Jerman	8.548
Amerika Serikat	13.310
Inggris	14.731
Belgia	4.064
Cekoslavia	2.438
Kanada	3.709
Afrika Selatan	2.540
Polandia	505
Swiss	1.016
Singapura	2.134
Jepang	7.112
Jumlah (Ton)	**168.145**

Sumber: Asba (2007: 208).

Potensi komoditas hasil bumi NIT yang didukung oleh ketersediaan fasilitas transportasi yang baik telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan kemakmuran ekonomi di sana sehingga menjadi kunci sukses berdirinya negara federal tersebut. Kemakmuran rakyat terlihat dari terpenuhinya keperluan akan barang kebutuhan sehari-hari baik di wilayah pusat perdagangan seperti Makassar, maupun daerah di pedalaman. Memasuki kurun 1950, terutama ketika NIT dibubarkan, terjadi penurunan kondisi ekonomi di Sulawesi Selatan. Penurunan jumlah itu dipengaruhi oleh situasi politik di Sulawesi Selatan yang tidak menentu akibat gejolak sosial serta beberapa pergolakan daerah yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.[323]

323 Poelinggomang, dkk. (2005: 247).

Moneter dan Perbankan Masa Revolusi

Pada awal kemerdekaan, di wilayah kepulauan Indonesia terdapat tiga jenis mata uang yang beredar. Pertama, uang DJB yang dicetak oleh De Javasche Bank sebelum pecah Perang Dunia II, berupa pecahan dengan nilai nominal 5 gulden ke atas. Kedua, uang pemerintah Hindia Belanda atau dikenal sebagai uang NICA yang dicetak oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nominal di bawah 5 gulden. Ketiga, uang invasi Jepang atau rupiah Jepang (dicetak oleh Syomin Ginko dan tentara Dai Nippon) yang mulai diedarkan oleh Jepang sejak awal kekuasaannya di Indonesia. Peredaran ketiga jenis mata uang tersebut menjadi salah satu faktor kekacauan ekonomi yang ditinggal oleh Jepang sekaligus harus ditanggulangi oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka.[324]

Selanjutnya Pemerintah NICA mengumumkan bahwa semua bank Jepang yang hingga awal bulan Oktober masih melakukan kegiatan perbankan dinyatakan berada di bawah pengawasan Pemerintah NICA. Penguasa Jepang mengizinkan penguasa NICA memasuki kantor-kantor besar bank Jepang. Neraca bank-bank Jepang segera disusun dengan disertai penjelasan tentang permasalahannya diserahkan kepada Pemerintah NICA. Bank-bank Jepang yang dilikuidasi oleh Pemerintah NICA adalah Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, Mitsui Bank, dan Nanpo Kaihatsu Ginko yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi Pemerintah Militer Jepang di Indonesia.

Letnan Gubernur Jenderal Van Mook atas nama Pemerintah NICA menggunakan wewenangnya sesuai dengan perundangan yang berlaku melikuidasi Nanpo Kaihatsu Ginko dan menerima laporan neraca keuangan yang disusun oleh pimpinan bank Jepang tersebut, yang kemudian diserahkan kepada DJB. Selain itu, DJB menerima pula penyerahan Percetakan Kolf & Co. di Jakarta beserta sejumlah uang Jepang yang tersimpan di gudangnya, yang ditaksir sekitar 2,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diedarkan oleh Pemerintah NICA/DJB ke masyarakat sehingga inflasi mata uang Jepang pun tidak terhindarkan

324 Oey (1991: 22).

dan semuanya menjadi tanggung jawab pihak RI yang mengakui mata uang Jepang itu sebagai alat pembayaran yang sah karena saat itu RI belum memiliki mata uang sendiri.[325]

Namun, tidak mudah mengatur penggunaan dan peredaran uang Jepang dalam waktu cepat sehingga mata uang Jepang yang menjadi alat pembayaran sah selama pendudukan rezim militer masih digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi dan jual-beli pada awal setelah penyerahan Jepang. Pemerintah pendudukan Belanda segera mempertimbangkan langkah cepat untuk mengganti uang Jepang itu dengan uang gulden sambil menunggu pasokan devisa dari Eropa. Pada Desember 1945, kiriman devisa gulden tiba di Makassar dan oleh Pemerintah NICA kemudian mulai diedarkan ke masyarakat sambil secara bertahap menarik peredaran uang Jepang.

Sebenarnya, sebelumnya para pejabat NICA seperti Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook dan Dr. C. van der Plas sejak September 1945 menyatakan tidak setuju dengan kebijakan untuk secepatnya mengedarkan mata uang NICA. Menurut mereka, pengedaran mata uang NICA justru akan mempersulit jalan penegakan kembali kekuasaan Belanda di kepulauan Indonesia.

Van Mook berpandangan agar pemerintahan NICA menarik mata uang Jepang terlebih dulu. Melalui suratnya kepada Van Mook (6 Oktober 1945), Menteri Jajahan Logeman menyatakan persetujuannya menarik mata uang Jepang dari peredaran dan diganti dengan uang Hindia Belanda sebelum lalu lintas uang luar negeri berkembang lebih jauh di kepulauan Indonesia. Namun dalam surat balasannya (16 Oktober 1945), Van Mook menyatakan tidak setuju dengan gagasan penggantian mata uang Jepang dengan uang Hindia Belanda sebelum ada pembicaraan dengan Pemerintah RI. Namun Van Mook setuju jika mata uang NICA diedarkan di luar Pulau Jawa dengan kurs yang telah ditetapkan, yaitu setiap 1 rupiah Jepang ditukar dengan 45 sen uang NICA.[326]

325 Van der Wal (1976: 404).

326 Darsono, dkk. (2016: 192).

Akan tetapi berhubung persediaan mata uang Jepang pada pembendaharaan NICA makin menipis, Direktur Keuangan NICA mendesak kepada Van Mook segera menerbitkan surat keputusan tentang peredaran mata uang baru Hindia Belanda sebagai alat pembayaran yang sah. Akhirnya Van Mook setuju mengedarkan uang NICA ke wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 6 Maret 1946, Pemerintah NICA melalui Komandan Pasukan Sekutu Sir Montagne Stopford, secara resmi mulai mengedarkan uang NICA di daerah-daerah yang mereka duduki. Pada Maret itu juga Pemerintah NICA dan DJB menerbitkan kebijakan mengganti mata uang rupiah Jepang dengan mata uang NICA. Berdasarkan surat edaran DJB Nomor 119/1 Administratie, 10 April 1946, kurs yang digunakan untuk penukaran waktu itu adalah 3 gulden (uang NICA) = 100 (rupiah Jepang).[327]

Sebenarnya mata uang yang dicetak atas nama Pemerintah NICA telah dipersiapkan sejak Desember 1942. Uang NICA atau yang lebih populer dikenal sebagai "uang merah" dicetak di Amerika oleh American Bank Note Company, terdiri dari sembilan pecahan yaitu 50 sen, pecahan 1, 2, 5, 5, 10, 50, 100, dan 500 rupiah. Belanda juga mencetak koin 1/5, 1, dan 2,5 sen serta 0,25 gulden. Penggunaan mata uang rupiah adalah bagian dari strategi Belanda untuk menarik rakyat Indonesia di tengah kecamuk perang. Uang NICA menjadi salah satu alat perang Belanda untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Ditambah lagi, seperti dijelaskan sebelumnya, Belanda juga menggunakan uang Jepang yang diperoleh dari bank-bank yang berhasil diambil alih di kota-kota besar di Indonesia. Uang Jepang itu dimanfaatkan Belanda untuk menggaji pegawai (terutama pribumi) yang berjumlah sangat banyak sehingga timbul inflasi. Memburuknya ekonomi sebenarnya telah dimulai sejak masa pendudukan Jepang yang mengedarkan uang terlalu banyak yaitu 4 miliar rupiah.

327 Darsono, dkk. (2016: 194).

Gambar 4.7. "Uang Merah" yang diterbitkan oleh NICA



Ket. gambar: Pecahan 50 cent; Penandatangan: Dr. H.J.v Mook & Dr. R.E. Smits ; Ukuran (mm): 126 x 73 ; Warna dominan/desain utama depan : merah / lambang Belanda & Ratu Wihelmina dalam bingkai oval ; Warna dominan/desain utama belakang: Hijau/ Nilai angka 50 cents dan teks Undang-undang 2 bahasa ; Pencetak: American Banknote Company ; Tanggal penerbitan: 2 Maret 1943 (diedarkan tahun 1945 saat NICA masuk Indonesia); Tanggal penarikan kembali: -

Sumber: Bank Indonesia (2015: 131-2)

Untuk mengatasi derasnya peredaran uang NICA, Pemerintah RI segera mengeluarkan beberapa maklumat pemerintah tentang mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran. Pertama, Maklumat Pemerintah tanggal 2 Oktober 1945 menetapkan pelarangan penggunanaan uang NICA di wilayah RI. Kedua, Maklumat Presiden 3 Oktober 1945

menetapkan jenis mata uang yang berlaku sementara waktu sebagai alat pembayaran yang sah yaitu:

1) Uang kerja DJB yang diterbitkan antara 1925–41 yang terdiri dari delapan pecahan rupiah, yaitu 1000, 500, 200, 100, 50, 25, 10, dan 5 rupiah;
2) Uang kertas Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1940–41 yaitu pecahan 2,5 dan 1 rupiah;
3) Uang kertas Jepang di Jawa yang terdiri atas pecahan 100, 10, 5, dan 1 rupiah, serta 50, 10, 5, dan 1 sen;
4) Uang logam Belanda yang dikeluarkan sebelum 1942, terbuat dari bahan emas: pecahan 10 dan 5 rupiah; bahan perak: pecahan 2,50 rupiah (*ringgitan*), 1 rupiah (*perakan*), 50 sen (*tengahan*), 25 sen (*talinan*), dan 10 sen (*picisan*); bahan nikel: pecahan 5 sen; dan dari tembaga: pecahan 2,5 sen (*gobangan*), 1 sen (*senan*), dan 0,5 sen (*peseran*).[328]

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena peredaran ketiga jenis mata uang tersebut ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Mereka yang menerima uang NICA dicurigai pro-Belanda dan membahayakan dirinya. Ketika pemerintah RI sedang merencanakan mengeluarkan mata uang sendiri, NICA masih mengedarkan mata uangnya di daerah yang dikuasainya. Mereka yang bekerja di wilayah itu menerima upah dalam bentuk uang NICA, tetapi untuk berbelanja mereka membutuhkan uang Jepang karena uang NICA ditolak pedagang. Hal itulah yang mengacaukan perekonomian dan inflasi.

Peredaran uang cetakan NICA yang dianggap masyarakat menjadi masalah akhirnya disiasati oleh pemerintah Belanda dengan mencetak uang terbitan De Javasche Bank mulai tahun 1946 untuk wilayah-wilayah yang berhasil diduduki kembali, termasuk di Makassar. Setidaknya ada tiga kali pencetakan uang DJB seri federal yang dicetak melalui perusahaan percetakan Johan Enshede en Zonen dan G. Kolff, yaitu pada Seri Federal I (terbit 1946); Seri Federal II (terbit 1947); Seri Federal III (terbit 1948).

328 Kusnodiprodjo (1951: 51–2).

Ketiga seri uang federal DJB itu memiliki pecahan mulai dari 10 sen, 25 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 2½ rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 100 rupiah dan 1.000 rupiah. Keberadaan uang DJB sebagai pengganti uang NICA tersebut mendapat dukungan pasukan Sekutu sehingga makin menjatuhkan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang baru saja merdeka.[329]

Gambar 4.8. Uang De Javasche Bank Emisi 1948 Federal Seri III



Ket.gambar: Pecahan 1/2 Roepiah, Penandatangan: H. Teunissen & Dr. R.E. Smits; Ukuran (mm): 124x64; Warna dominan/desain utama depan: Ungu muda/bunga anggrek bulan; Warna dominan/desain utama belakang: Ungu muda/logo DJB & teks Undang-undang 4 bahasa ; Penceta: Johan Enschende en Zonen; Tanggal penerbitan: 1948; Tanggal penarikan kembali: -

Sumber: Bank Indonesia (2015: 167-8)

329 Darsono, dkk. (2017: 222).

Pemerintah RI menanggapi peredaran uang DJB dan beberapa mata uang lainnya dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia atau ORI. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri muncul keyakinan bahwa mata uang Jepang secepatnya ditarik dari peredaran sebagai syarat pemulihan kembali perekonomian dan keuangan. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah RI agar secepatnya menerbitkan mata uang sendiri. Sejalan dengan itu, sekelompok masyarakat Indonesia mendesak pula agar Pemerintah RI secepatnya mendirikan sebuah bank nasional yang berfungsi seperti halnya DJB. Kedua usul atau tuntutan itu akhirnya diterima oleh Pemerintah RI yang ditindaklanjuti dengan membentuk tim yang mempersiapkan penerbitan uang dan pembentukan bank nasional.

Dalam sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat pada 28 Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengatakan bahwa Pemerintah RI akan segera menerbitkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang tersebut akan terbukti sebagai senjata yang tepat untuk mencegah bangsa Belanda menimbulkan kekacauan ekonomi.[330] Pernyataan Hatta itu mengecewakan dan meragukan Gosen, Direktur Keuangan NICA, terhadap sikap Pemerintah RI dalam masalah keuangan. Sjafruddin Prawiranegara mengatakan, dalam pertemuannya dengan Hatta sekitar September–Oktober 1945, bahwa banyak kalangan masyarakat yang mengusulkan agar Pemerintah RI yang baru berdiri segera menerbitkan mata uang sendiri. Kehadiran ORI pun bukan lagi sekadar sebagai alat tukar yang sah, melainkan simbol kedaulatan ekonomi ataupun representasi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.[331]

Percetakan ORI diawali dengan instruksi menteri keuangan A. A. Maramis pada 24 Oktober 1945 kepada tim Serikat Buruh Percetakan G. Kolff di Jakarta untuk mencari pencetakan uang yang modern. Akhirnya diputuskan bahwa Percetakan G. Kolff dan Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken di Malang sebagai pencetak ORI. Selanjutnya Kementerian Keuangan membentuk Panitia Penyelenggara

330 Darsono, dkk. (2017: 180).

331 Oey (1991).

Pencetakan Uang Kertas RI, yang diketuai T. R. B. Sabaroedin dari kantor Bank Rakyat Indonesia. Sejak Januari 1946 pencetakan ORI dimulai, dibantu oleh percetakan Balai Pustaka selaku pembuat desain dan bahan baku (*master*) berupa negatif kaca yang dilakukan oleh Boenjamin Soerjohardjo, sedangkan Abdussalam dan Soerono sebagai pelukis pertama ORI.[332] Proses pencetakan akhir (*offset*) dilakukan Percetakan Republik Indonesia di Jakarta di bawah Kementerian Penerangan. Namun pada Mei 1946, berhubung situasi keamanan yang mengkhawatirkan, pencetakan ORI di

Gambar 4.9. Oeang Republik Indonesia (ORI) Seri I



Pecahan: 1 rupiah; Penandatangan: A.A. Maramis; Ukuran (mm): 138x65; Warna dominan/desain utama depan: Biru tua/Presiden Soekarno dengan latar belakang gunung merapi ; Warna dominan/desain utama belakang: hijau/teks Undang-undang dan gambar gunung merapi; Pencetak: Canisius 1946; Tanggal penerbitan: 17 Oktober 1945; Tanggal penarikan kembali: -

Sumber: Bank Indonesia (2015: 207-8)

332 Darsono, dkk. (2016: 181).

Jakarta dihentikan dan dipindahkan ke daerah seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Ponorogo, dengan menafaatkan perusahaan percetakan swasta yang tepercaya. Pencetakan ORI di Surakarta diawasi oleh panitia khusus yang dibentuk Menteri Keuangan pada 16 September 1946. Bahan dan alat-alat harus diselundupkan dari daerah pendudukan Belanda yang penuh bahaya. Pencetakan ORI dilakukan oleh perusahaan Pertjetakan Gading di Kampung Tjokrodiningratan di bawah pimpinan Soedarbo dan Soekijo.

Mengenai peredaran ORI di Negara Indonesia Timur, terutama Kota Makassar, tidak diketahui secara pasti. Pemerintah Republik Indonesia di Makassar sendiri belum sempat mengedarkan ORI, ketika kota itu diduduki kembali oleh tentara Belanda pada Oktober 1945 yang segera diikuti dengan penegakan kembali pemerintahan Belanda oleh NICA.[333] Dari situ terlihat bahwa ORI tidak pernah masuk dan beredar di wilayah Makassar karena berdasarkan Perundingan Linggarjati, Makassar berada di wilayah kekuasaan Belanda, bukan masuk wilayah Republik Indonesia. Dapat dipastikan bahwa uang yang beredar dan berlaku di wilayah tersebut adalah uang-uang NICA dan De Javasche Bank terutama setelah pembukaan kembali DJB Makassar sebagai pusat sirkulasi uang DJB untuk wilayah NIT.

Selain berupaya menerbitkan uang sendiri, Pemerintah RI berupaya mendirikan bank nasional yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Keputusan mendirikan bank sirkulasi itu sesuai dengan Pasal 23 dan Aturan Peralihan Pasal 4 UUD 1945. Persiapan pembentukan bank tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak September 1945, diprakarsai oleh R. M. Margono Djojohadikoesoemo yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung. Margono menginginkan bank tersebut bertugas sebagai bank umum sekaligus bank sirkulasi.

Margono Djojohadikoesoemo kemudian menemui Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menyambut positif gagasannya. Mereka

333 Oey (1991: 69). ORI pertama kali diterbitkan pada 16 Oktober 1945 dengan tanda tangan Menteri Keuangan A. A. Maramis, dan mulai diedarkan 30 Oktober 1945, tetapi pada Maret 1950 ditarik kembali setelah ada mata uang rupiah yang beredar secara resmi.

berdua segera menyusun mandat atau surat kuasa dari pemerintah kepada Margono untuk mendirikan suatu bank. Mandat tersebut pada 19 September 1945 ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan mandat atau surat kuasa tersebut, Margono segera menghubungi para pengusaha Indonesia yang berada di Bandung, Yogyakarta, Solo dan Surabaya untuk mengumpulkan dana sebagai modal awal. Pada umumnya para pengusaha menyambut baik gagasan tersebut, tetapi ternyata realisasinya tidak pernah terwujud.[334] Dengan mandat itu pula, R. M. Margono Djojohadikoesoemo, berdasarkan saran dari R. M. Soerojo, kemudian mendirikan sebuah yayasan guna mempersiapkan pembentukan bank sentral. Yayasan yang diberi nama Jajasan Poesat Bank Indonesia akhirnya resmi berdiri pada 5 Juli 1946, dan diketuai oleh Mohammad Hatta.[335]

Kemudian berdasar Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946, pada 5 Juli 1946 Jajasan Poesat Bank Indonesia dilebur dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI.[336] Pembentukan BNI merupakan realisasi dari rencana dan persiapan untuk mendirikan bank sirkulasi bagi negara Indonesia yang langkah-langkah awalnya telah dilakukan ketika Pemerintah Republik Indonesia masih berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, BNI merupakan bank sirkulasi, dan juga bertindak sebagai bank umum, dengan modal yang ditetapkan sebesar 10.000.000 gulden. Peresmian BNI dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di Gedung De Javasche Bank Yogyakarta. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, BNI ternyata tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai bank sirkulasi.[337]

Tak lama setelah BNI berdiri, Pemerintah RI menetapkan untuk menarik beberapa mata uang dari peredaran, yaitu uang De Javasche Bank, uang Pemerintah Hindia Belanda (NICA), dan uang Pemerintah

334 Djojohadikoesoemo (1962: 128).

335 Darsono, dkk. (2016: 184).

336 Bank Indonesia (2005: 22–3).

337 Bank Indonesia (2005).

Pendudukan Jepang. Mulai 15 Juli 1946, semua uang Jepang dan Hindia Belanda yang dimiliki masyarakat, perusahaan, dan badan-badan lain, harus disimpan pada bank-bank yang ditunjuk, yaitu BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai. Setiap penduduk diperbolehkan memegang uang maksimal 50 rupiah Jepang untuk keperluan melanjutkan usahanya ataupun untuk keperluan sehari-hari.[338]

338 Darsono, dkk. (2016: 184).

BAB V
PEMBENTUKAN BANK INDONESIA (1950–68)

Kurun 1950-an bagi De Javasche Bank di Makassar merupakan masa sangat penting dan menentukan. Setidaknya dua peristiwa strategis dialami oleh lembaga perbankan satu-satunya warisan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan ini. Pertama, perubahannya menjadi Bank Indonesia sebagai bagian dari program nasionalisasi atas lembaga induknya di kantor pusat Jakarta pada 1953. Sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter itu, De Javasche Bank di seluruh Indonesia berubah menjadi bank sirkulasi resmi pemerintah Republik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Kedua, peran dan keterlibatan lembaga ini di Makassar dalam pergolakan daerah 1950-an.

Setelah perang kemerdekaan berakhir yang ditandai dengan pengakuan dan pelimpahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada akhir Desember 1949, situasi dalam negeri Indonesia masih belum kondusif dan justru memulai sejarah pergolakan daerah. Sulawesi Selatan menjadi medan pertarungan politik dan perebutan pengaruh setelah berakhirnya pergolakan tahap pertama dalam kurun perang kemerdekaan. Selama dekade 1950-an wilayah itu bisa dikatakan sebagai medan pergolakan lokal silih berganti,[339] dari aksi Andi Azis (1950), Kahar Muzakkar yang mendukung gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

339 Martyn (2005: 190).

di Jawa, dan akhirnya perlawanan Perjuangan Rakyat Revolusioner Indonesia/Permesta terjadi pada 1956.

Semua pergolakan daerah itu tidak hanya mempersulit konsolidasi dalam negeri dan regional di bidang ekonomi tetapi juga membawa perubahan dalam struktur dan tatanan pemerintahan secara signifikan. Lembaga-lembaga pusat yang berada di daerah sering menjadi target dari pergolakan itu, termasuk De Javasche Bank atau Bank Indonesia yang dipandang sebagai mewakili kehadiran kekuatan ekonomi pusat di daerah. Akibatnya dekade 1950-an selain mengakhiri kehadiran De Javasche Bank juga menjadi ujian terberat bagi lembaga keuangan sirkulasi nasional ini di Sulawesi Selatan.

Situasi Politik-Ekonomi dan Upaya Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Konferensi Meja Bundar (1949) telah mempertemukan pihak Republik Indonesia dan Belanda. Peristiwa itu merupakan tonggak penting bagi kelangsungan entitas politik Indonesia di mata dunia. Setidaknya dalam prinsip kesepakatannya, konferensi tersebut memuat pengakuan pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun Republik Indonesia menjadi bagian penting dari RIS, yang menempatkan presiden dan wakil presiden RI sebagai presiden dan wakil presiden RIS, namun Belanda tetap hanya bersedia melimpahkan semua kewenangan dan tanggung jawabnya kepada RIS. Penyerahan kedaulatan tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949, dan dengan demikian sejak itu, masing-masing negara bagian bersama RI akan berdiri sendiri dalam struktur negara federal RIS, tanpa intervensi dan perlindungan Belanda lagi.

Dampak yang jelas segera dirasakan oleh masing-masing negara anggota federalisme Indonesia tersebut. Sebagian dari negara federal ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh sehingga hanya dalam waktu beberapa minggu sebagian negara itu bubar dan memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Penyebabnya selain konflik internal di setiap elite penguasa mereka, antara pendukung kembali

kepada kesatuan dan pendukung federal, juga modal dasar yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk bertahan cukup lemah. Sementara itu, pukulan yang telak dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RIS pada 2 Maret 1950 yang menetapkan bahwa ada peluang bagi negara-negara bagian itu untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Seminggu kemudian Presiden Sukarno sebagai presiden RIS mengeluarkan keputusan yang memuat tentang kewenangan dalam kondisi darurat oleh presiden. Dalam keputusan yang diterbitkan 8 Maret 1950 itu, negara-negara bagian bisa dibubarkan dan semuanya berubah menjadi negara kesatuan apabila terdapat situasi darurat seperti ancaman dari luar atau karena kesepakatan internal dari setiap negara.

Dalam waktu beberapa hari, RIS mengalami pengurangan jumlah pengikut sehingga pada 4 April 1950 hanya terdiri atas empat negara yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, dan Negara Kalimantan Barat. Akan tetapi Negara Kalimantan Barat tidak bertahan lama karena dari hasil penyelidikan oleh aparat keamanan RIS terhadap peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pada Februari 1950 di Bandung di bawah Kapten R. Westerling, terungkap bahwa presiden Negara Kalimantan Barat Sultan Hamid II terlibat dan harus ditangkap serta diadili. Dengan demikian Negara Kalimantan Barat tidak lagi bisa bertahan dan memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia.[340]

Pergolakan politik yang terjadi di wilayah Indonesia Timur sangat berkaitan erat dengan situasi ekonomi. Salah satu pencetus adalah dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta yang dirasa stagnan pada kebijakan ekonomi. Rasa ketidakadilan muncul di mata masyarakat akibat dari sikap pemerintah yang hanya memusatkan pembangunan di wilayah Jawa terutama Jakarta. Sementara di daerah lain dirasa dibatasi pada setiap kesempatan bagi pengembangan daerahnya. Namun situasi keamanan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Kota Makassar, yang memburuk akibat pergolakan politik juga telah membuat fokus

340 Kahin (2003: 455). Hamid ditangkap pada 5 April 1950 bersamaan dengan meledaknya kerusuhan di Makassar di bawah Andi Azis. Dalam pemeriksaan pada 19 April 1950, Hamid mengakui bahwa aksi Westerling merupakan rekayasanya dan akhirnya ia dijebloskan dalam penjara.

pemerintah lebih pada upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan dibandingkan peningkatan atau perbaikan ekonomi.

Memasuki kurun 1950-an kondisi politik di wilayah itu tidak kondusif bagi pembangunan dan pengembangan potensi lokal karena diwarnai oleh perlawanan pelbagai kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah pusat. Bahkan Negara Indonesia Timur yang hanya bertahan tidak lebih dari empat tahun tidak mampu melakukan konsolidasi kekuatan dan mengatur wilayahnya yang sangat luas, termasuk di Makassar dan sekitarnya. Keruntuhan dan integrasinya ke dalam tubuh Republik Indonesia menandai awal dari gejolak kedaerahan oleh unsur-unsur yang sebelumnya ditampungnya atau yang berafiliasi dan berorientasi ideologis terhadap pusat pergerakan di Jawa.

Gerakan perlawanan pertama setelah pembubaran NIT dikobarkan oleh seorang bekas perwira Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) yakni Kapten Andi Azis, bangsawan Barru.[341] Perlawanan Andi Azis dimulai dengan peristiwa pada 5 April 1950, ketika ia memimpin sekitar 300 orang pasukannya untuk menyerang barak CPM (Corps Polisi Militer) dan TNI, memprotes pengiriman satu batalyon pasukan TNI ke Sulawesi Selatan. Ia juga mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital serta menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A. J. Mokoginta.

Atas hasutan bekas kesatuan kolonial lain yang masih ditempatkan di Sulawesi Selatan,[342] Andi Azis justru mengerahkan pasukannya untuk menguasai Kota Makassar dengan maksud merebut kekuasaan di NIT. Peringatan yang dikirimkan oleh panglima Angkatan Perang RIS tidak digubris dan Azis tetap melakukan pendudukan atas Kota Makassar pada minggu pertama April 1950. Sejumlah bangunan strategis dikuasai oleh pasukannya termasuk gedung kantor De Javasche Bank Makassar dan rumah-rumah dinas milik TNI dan asrama CPM di Verlengde Klapperlaan, yang diduduki dan diamankan oleh kesatuan pendukung Andi Azis.[343]

---

341 Notosusanto (1980: 130).

342 Patang (1967: 141). Di antara mereka yang menghasut Andi Azis untuk memberontak terhadap Jakarta adalah Jaksa Agung NIT Dr. Soumoukil, yang kelak menjadi tokoh penting dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan di Kepulauan Maluku.

343 Ramadhan K.H. (1988: 195).

Pendudukan atas gedung De Javasche Bank dilakukan pada malam hari pertama ketika gerakan perlawanan dimulai, yaitu antara 5–6 April 1950. Kantor itu diduduki bersama gudang amunisi milik TNI di pusat Kota Makassar yang dianggap strategis karena keduanya memasok perbekalan ekonomi dan mesiu untuk perjuangannya. Kesatuan polisi militer yang digerakkan oleh Letnan Kolonel Mokoginta untuk mencegah pendudukan atas kedua bangunan itu menemui perlawanan dari pasukan pendukung Azis sehingga tiga orang dari mereka jatuh korban.[344]

Setelah berhasil menjamin keamanan kota, Azis membawa kekuatan induk pasukannya keluar kota Makassar menuju Sungguminasa. Di sana ia mengkonsolidasikan perlawanan terhadap serangan TNI yang diduga akan terjadi karena Mokoginta telah memerintahkan pasukan bantuan didatangkan ke Makassar. Dalam persembunyiannya, Azis mendengar pidato panglima KNIL Letnan Jenderal Buurman van Vreeden melalui radio yang melarang kesatuan KNIL terlibat dalam persoalan di Makassar karena dianggap sebagai persoalan internal RIS.

Pada 8 April 1950, Pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan Andi Azis agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4 x 24 jam, selain perintah untuk menarik pasukan, menyerahkan senjata, dan membebaskan tawanan. Namun, batas waktu ultimatum itu diabaikan Azis sehingga pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran. Pada 5 Agustus 1950, tiba-tiba Markas Staf Brigade 10/Garuda Makassar dikepung oleh pengikut Andi Azis, tetapi berhasil dipukul mundur oleh TNI. Setelah terjadi pertempuran selama dua hari, pasukan KNIL yang mendukung gerakan Andi Azis minta berunding.

Setelah Andi Azis meminta berunding, kesatuan Worang mendarat di Pelabuhan Makassar pada 19 April 1950. Mereka segera memasuki kota, melucuti pasukan Azis dan membebaskan gedung-gedung strategis termasuk De Javasche Bank dari pendudukan pasukan pemberontak. Pendudukan atas Makassar oleh pasukan TNI diperintahkan kepada

344 "RIS gelast Abdul Azis naar Djakarta te komen," *De gooi en eenlander*, 6 April 1950.

Mayor Pieters yang mewakili Kawilarang, yang akan menjabat sebagai panglima setempat dan bekerja sama dengan pasukan APRIS di NIT untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban. Sementara itu, kesatuan Worang bergerak ke Jeneponto untuk menduduki daerah itu.[345]

Pada 8 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Jenderal Scheffelaar (KNIL), yang berisi tentang penghentian tembak-menembak, dan KNIL harus meninggalkan Makassar dan seluruh persenjataanya. Andi Azis kemudian ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Fenomena perlawanan Andi Azis menjadi awal dari serangkaian pergolakan daerah di Sulawesi Selatan selama 1950-an. Meskipun perlawanan yang berlangsung selama dua minggu itu sempat menghebohkan publik di Indonesia, aksinya tetap terbatas di Kota Makassar dan sekitarnya, dan hanya penguasaan administratif dan infrastruktur. Tidak terjadi pertempuran berskala besar atau gerakan perlawanan untuk jangka waktu lama. Kesatuannya juga tetap utuh dan menyerahkan diri secara damai.

Berbeda halnya dengan gerakan perlawanan Abdul Kahar Muzakkar di daerah yang sama. Memiliki nama asli La Romeng, Kahar Muzakkar seorang keturunan Luwu, aktif dalam pergerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan setelah 1945 dan bergabung dalam KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). Pengalaman militernya diperoleh saat ia memimpin suatu kesatuan gerilya di pedalaman Sulawesi Selatan sejak 1946, kemudian pindah ke Jawa dan terlibat dalam perang gerilya melawan aksi militer Belanda (Juli 1947) di daerah Malang.[346]

Setelah KMB dan pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda, Kahar Muzakkar kembali ke Makassar pada 22 Juni 1950 dan bergabung dengan kesatuan APRIS. Berkat pengalaman militernya, ia memperoleh pangkat letnan kolonel dan memimpin pasukan. Namun hal itu tidak lama karena pada akhir Juni 1950 ia mulai merasakan ketidakcocokan terhadap

345 "Azis troepen capituleeren," *De Locomotief,* 20 April 1950.

346 Boland (1982: 63).

kebijakan pemerintah NIT dan RIS.[347] Ia bertekad melakukan perlawanan dan bergerak ke luar Kota Makassar bersama pasukannya. Akibat tindakannya itu, Kolonel Kawilarang mengeluarkan Kahar Muzakkar dari kesatuan APRIS sejak 1 Juli 1950.[348]

Kahar Muzakkar memulai pengembaraannya di daerah pedalaman Sulawesi Selatan dengan menggunakan kekuatan eks-kesatuan gerilya Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang berada di bawah pimpinan Andi Sose. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil mengikuti integrasi kaum gerilyawan ke dalam tubuh TNI. Menurut Kawilarang, proses integrasi tersebut berakhir pada Agustus 1951, 70 persen kekuatan bekas gerilya telah bergabung dengan TNI. Dengan demikian, kekuatan Kahar Muzakkar hanya 30 persen dari bekas laskar gerilyawan.[349]

Meski kekuatan personel hanya sekitar sepertiga dibanding kekuatan TNI, pasukan Kahar Muzakkar memiliki persenjataan lengkap dan terdiri atas tokoh gerilya berpengalaman selama era revolusi dan menguasai medan. Selain itu, sebagai kekuatan ideologisnya, Kahar Muzakkar menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan perlawanan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah Kartosuwiryo yang mengobarkan pemberontakan di Jawa Barat. Dalam struktur pemerintahan DI/TII, Kahar Muzakkar diberi jabatan sebagai menteri pertahanan. Hal itu menegaskan status Kahar Muzakkar sebagai pihak yang menentang terhadap pemerintah pusat di Jakarta.[350]

Sejak itu, Kahar Muzakkar mengarahkan pasukannya untuk menyerang posisi Republik dan TNI di pusat-pusat perkotaan dalam serangan gerilya, khususnya terhadap Kota Makassar. Dengan membangun markas di bekas barak kesatuannya, Kahar Muzakkar mengendalikan serangan dan gangguan keamanan terhadap Kota Makassar. Hal itu memaksa

347 Sebastian (2006: 130). Dua hal mendorong naiknya pengaruh Kahar Muzakkar baik di kalangan penduduk sipil maupun militer; pertama adalah ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang mengarah pada tuntutan otonomi khusus; dan kedua, demobilisasi pasukan yang mengakibatkan pembubaran sejumlah kesatuan atas kebijakan kepemimpinan militer nasional di Jakarta.

348 "Guerilla problem in Celebes," *Java Bode*, 26 Agustus 1950.

349 Usman (2010: 76).

350 Ministry of Foreign Affairs (1958: 83).

Gubernur Sudiro dan Kolonel Kawilarang memutuskan membentuk suatu misi yang berusaha berunding dengan Kahar Muzakkar.[351] Namun ketika pada akhir Agustus 1951 misi ini gagal, alternatif berikutnya adalah penangkapan dan penaklukan dengan kekuatan bersenjata. Kawilarang kemudian melancarkan Operasi Merdeka pada 4 September 1951 dengan sasaran penguasaan atas kedudukan Kahar Muzakkar.[352]

Menghadapi kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang bersenjata lengkap, Kahar Muzakkar dan pasukannya menarik diri setelah bertahan selama beberapa jam. Mereka kemudian menuju luar kota ke arah Gunung Latimojong. Operasi pengejaran diteruskan selama beberapa hari dengan sasaran wilayah Kabupaten Makassar. Dalam pengejaran yang terjadi pada 10 September 1951, Kahar Muzakkar diketahui bersama pasukannya bertahan di Kampung Siwa, sebelah timur Gunung Latimojong dan bermaksud meninggalkan daerah itu dengan menaiki perahu. Ketika usahanya digagalkan oleh pasukan APRI, ia dan pasukannya memasuki hutan di lereng Gunung Latimojong dan bersembunyi di sana.[353]

Pihak aparat keamanan Kota Makassar melakukan deteksi terhadap tindak kejahatan di kota itu. Mereka menduga para pelaku gangguan keamanan memiliki afiliasi dengan kelompok perlawanan bersenjata. Oleh karena itu, polisi dan polisi militer dikerahkan untuk melakukan penjagaan terutama pada malam hari. Dugaan tersebut semakin jelas ketika pada malam tanggal 15 Oktober 1951 di bioskop Kota Makassar terjadi upaya pembakaran yang dilakukan oleh beberapa orang bersenjata tetapi berhasil digagalkan oleh kesatuan polisi militer.[354]

Menjelang akhir 1951 pasukan pemerintah terus melancarkan operasi militer untuk melemahkan kekuatan Kahar Muzakkar di dalam

351 "Nog een laatste beroep op Kahar Muzakkar," *Het nieuwsblad voor Sumatra*, 4 September 1951. Misi ini terdiri atas lima orang yaitu dua orang bekas raja dan tiga orang pemimpin organisasi rakyat. Tujuannya membujuk agar Kahar Muzakkar menerima tuntutan pemerintah sehubungan dengan bekas gerilya yang akan ditampung; "De kwestie Muzakkar," *Java Bode*, 1 September 1951.

352 "Militaire actie in Zuid Celebes," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 8 September 1951.

353 "Kahar Muzakkar trachte met een praauw uit Zuid Celebes te vluchten," *De Nieuwsgier*, 15 September 1951.

354 "Waarschuwingschoten in Makassar," *Nieuwe Courant*, 17 Oktober 1951.

dan di luar Kota Makassar. Hasilnya, banyak anggota gerilya pengikut Kahar yang tertangkap atau menyerahkan diri dan kemudian ditampung oleh pemerintah.[355] Kahar yang terus bergerak di daerah pedalaman kemudian menjalin kontak dengan sejumlah kepala distrik dan kampung yang bersedia mendukungnya. Selain itu, untuk memperkuat posisi politik dan militernya, ia menyatakan bergabung dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat dengan harapan bisa meningkatkan pengaruh dan komitmennya di mata publik bagi perjuangannya.[356]

Untuk menghadapi kemungkinan itu, Panglima Tentara Teritorium VII (TT VII) Kolonel Gatot Subroto menyusun rencana untuk mengakhiri perlawanan Kahar Muzakkar. Pada Desember 1952, Operasi Halilintar dilancarkan dengan target menghancurkan kekuatan dan menangkap Kahar yang masih bertahan di pedalaman Sulawesi Selatan. Di samping itu, sebagai bagian dari operasi, tentara melakukan aksi pembersihan di dalam Kota Makassar dan kota-kota lain yang dicurigai menampung pendukung Kahar.[357]

Bentuk perlawanan Kahar Muzakkar menunjukkan perubahan strategi. Jika awalnya mereka melakukan gangguan keamanan dan serangan terhadap sasaran instalasi pemerintah, kemudian berubah melakukan pembakaran dan penculikan terhadap orang-orang yang dianggap lawan. Beberapa pejabat daerah yang dianggap menghambat tujuan mereka dan tidak mau bekerja sama diculik, seperti yang terjadi pada minggu kedua April 1952 terhadap kepala distrik Borisale dan juru tulisnya, yang berada dalam jarak 40 kilometer dari kota Makassar.[358] Sebulan sebelumnya, penculikan dengan modus pencegatan di jalan juga terjadi terhadap kepala penjara Makassar yang sedang dalam perjalanan bersama empat orang pengawalnya dalam jarak 17 kilometer di luar kota Makassar.[359]

---

355 "Veiligheid in Zuid Celebes," *Java Bode*, 2 Mei 1952. Kepala Staf Tentara Teritorium VII Letnan Kolonel Warouw dalam konferensi pers menyatakan bahwa sampai akhir 1952 sebanyak 2.350 orang anggota gerakan Kahar telah menyerahkan diri.

356 "Kahar Muzakkar sloot zich aan bij Darul Islam," *Java Bode*, 2 Mei 1952.

357 "Actie tegen Kahar Muzakkar voortgezet," *De Nieuwsgier*, 12 Desember 1952.

358 "De Ontvoeringen bij Makassar," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 15 April 1952.

359 "De ontvoering bij Makassar," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 14 Maret 1952.

Pada awal Februari 1953, terjadi gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata yang tidak dapat dipastikan apakah tindakan itu di bawah perintah Kahar Muzakkar. Namun, Kahar menyampaikan pesan kepada Panglima TT VII untuk membantu mengatasi gangguan tersebut. Menanggapi pesan itu, Panglima TT VII menyatakan apabila Kahar serius berkomitmen mengatasi gangguan keamanan, seyogyanya ia menyerahkan anak buahnya yang melakukan penculikan dan menyerahkan seluruh senjatanya serta bersedia melakukan perundingan kembali.[360]

Menghadapi ketegangan tersebut, partai-partai politik di Makassar mendesak pemerintahan sipil agar mengambil inisiatif menyelesaikan masalah dengan cara mendorong perundingan antara Panglima TT VII dan Kamar Muzakkar. Usulan itu diajukan pada 22 Februari 1953 dengan harapan agar bisa segera terwujud.[361] Akan tetapi menurut Warouw, hal itu sulit dilakukan karena keberadaan Kahar Muzakkar dan pasukannya tidak diketahui. Juga gangguan keamanan dan penculikan yang dilakukan terhadap sejumlah aparat lokal tidak bisa dipastikan keterkaitannya dengan kelompok Kahar.[362]

Sementara itu aksi penculikan terus berlangsung dan meluas tidak lagi terbatas pada aparat daerah melainkan menyasar pula orang asing yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya. De Javasche Bank sebagai lembaga strategis di sektor perekonomian Kota Makassar tidak dapat dijangkau karena penjagaan yang ketat seperti yang terjadi dalam aksi Andi Azis. Namun, demikian orang-orang yang berhubungan dengan De Javasche Bank menjadi sasaran penculikan. Di antaranya adalah direktur perusahaan bengkel konstruksi Tello Muller dan pimpinan usahanya van Aalst yang baru mengambil gaji karyawannya di De Javasche Bank Makassar. Dalam perjalanan pulang pada 30 Juni 1953 mereka dicegat oleh gerombolan bersenjata dan diculik bersama uang yang diambil dari bank tersebut.[363]

---

360 "Oplossing de Zuid Celebes kwestie zonder geweld," *De Locomotief*, 13 Februari 1953.

361 "Overleg tot herstel der veiligheid," *De Nieuwsgier*, 25 Februari 1953.

362 "Federalistische beweging is gevolg van onveiligheid," *De Locomotief*, 23 Juli 1953.

363 "Door bende ontvoerd," *Algemeen Indisch Dagblad*, 2 Juli 1953.

Selama dekade 1950-an Sulawesi digoncang oleh gerakan perlawanan politik dan militer lainnya terhadap pemerintah pusat. Gerakan itu adalah Permesta (Perjuangan Semesta) yang dimotori oleh sejumlah perwira sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pusat. Seperti halnya dalam gerakan Andi Azis dan Kahar Muzakar, sejumlah politisi sipil ikut terlibat dalam Permesta tetapi gerakan ini dipelopori oleh para perwira militer lokal yang berdinas di Sulawesi. Seperti dengan kedua gerakan lainnya, mereka juga tidak merasa puas terhadap kesejahteraan penduduk Sulawesi dan khususnya anggota militer terkait dengan kebijakan ekonomi makro Jakarta yang dianggap mengabaikan pembangunan dan kemakmuran di daerah.

Bagi De Javasche Bank yang telah diambil alih menjadi Bank Indonesia pada 1953 sebagai bank sentral resmi pemerintah yang mengendalikan perekonomian dan moneter Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, pengalaman masa Permesta jauh lebih penting dan strategis dibandingkan dengan selama aksi Andi Azis dan Kahar Muzakkar. Jika pada kedua aksi tersebut BI lebih merupakan saksi peristiwa dan tidak memberikan kontribusi penyelesiannya, maka dalam aksi Permesta BI berperan penting sekaligus sebagai obyek sasaran gerakan perlawanan terhadap pemerintah itu.

Gerakan Permesta diawali dari "pengumuman" pada 2 Maret 1957 oleh sejumlah tokoh yang mengaku mewakili masyarakat seluruh Sulawesi di Balai Kota Makassar. Dalam pengumuman yang diikuti oleh sejumlah perwira militer TT VII itu dinyatakan bahwa mereka akan mewujudkan pembangunan kawasan Indonesia Timur dan menolak intervensi pemerintah pusat dalam eksploitasi hasil bumi Sulawesi. Oleh karena itu, satu-satunya langkah adalah menuntut otonomi khusus bagi Sulawesi khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya tetapi masih dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Untuk mewujudkan harapan itulah mereka membentuk suatu aksi yang disebut Perjuangan Permesta.[364]

Menyusul pengumuman tersebut, badan pengurus Permesta dibentuk yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan perwira militer. Salah satu dari mereka adalah Komandan Resimen Infanteri Ke-24 di

364 "Massa bijenkomst in Makassar eist herstel twee-eindheid," *Java Bode*, 12 Maret 1957.

Manado, Mayor Somba, yang menyatakan dirinya sebagai gubernur militer dan sipil untuk Sulawesi Utara dan mendukung gerakan Permesta terhitung sejak 3 Maret 1957. Sehari setelah pernyataan itu, ia bersama Letnan Kolonel Ventje H. N. Sumual berangkat ke Manado untuk memantau kondisi dan melakukan persiapan. Ia mengambil langkah politik dengan menampung belasan ribu eks-KNIL di Sulawesi Utara menjadi pasukan yang akan memperkuat gerakan Permesta.[365]

Sementara itu di Makassar, TT VII yang menjadi motor penggerak utama Permesta mengumpulkan massa sipil dengan tujuan memberikan penjelasan tentang gerakan dan meminta dukungan mereka. Untuk itu sebuah panitia dibentuk yang akan mengadakan kongres massal di Karebosi, Makassar. Kongres yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu dihadiri oleh sekitar seribu orang dan menegaskan maksud dan tujuan gerakan daerah bahwa mereka tetap menghendaki kesatuan dalam bingkai Republik Indonesia. Namun, menurut Kongres, perlu koreksi kepada pemerintah pusat dalam kebijakannya terhadap daerah.[366] Sumual yang ikut memberikan pidato berharap masyarakat Sulawesi mendukung gerakan sepenuhnya.[367]

Untuk membiayai semua gerakan dan persiapan perlawanan lebih lanjut di Sulawesi Utara, Somba memerintahkan pengambilan dana dari Bank Indonesia di Manado pada 18 Mei 1957 sebanyak 114 juta rupiah dengan anggapan bahwa dana itu merupakan hak dari daerah yang dirampas oleh pemerintah pusat dan wajib dikembalikan kepada daerah. Langkah itu juga diikuti oleh Panglima TT VII Letnan Kolonel Ventje Sumual pada 24 Mei 1957. Sumual memerintahkan kesatuannya mengambil dana pemerintah yang berada di BI Makassar sebanyak 100 juta rupiah untuk kepentingan perjuangan Permesta. Dalam pada itu, kepala perwakilan BI melaporkan kepada pemerintah pusat di Jakarta bahwa penarikan seluruh dana kontan di bank pemerintah tersebut akan berakibat terhentinya fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan mengancam kestabilan perekonomian regional. Menteri Keuangan Mr.

365 "Ex KNIL leden in TNI," *Java Bode*, 18 Maret 1957.

366 "Bhinneka Tunggal Ika congres," *Java Bode*, 10 Mei 1957.

367 "Bhinneka Tunggal Ika congres in Makassar gesloten," *Java Bode*, 16 Mei 1957.

Sutikno Slamet yang menerima laporan itu kemudian menghubungi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A. H. Nasution.[368]

Dalam perhitungan ekonomi, langkah tersebut sangat penting karena dalam beberapa bulan terakhir BI menerima setoran hasil penjualan komoditas ekspor lokal yang mengalami kenaikan, baik kuantitas ekspor maupun harga komoditasnya. Kopra sebagai komoditas ekspor andalan ke luar negeri dari pelabuhan Makassar mengalami kenaikan 15 persen dari tahun 1956 sementara harganya mengalami kenaikan 11 persen. Dari jumlah itu Rp153 juta mengalir ke kas negara melalui BI dibandingkan 140 juta rupiah pada 1956.[369]

Pihak pemerintah pusat berusaha menutupi kejadian di Makassar itu untuk mencegah krisis kepercayaan publik. Dua hari setelah kejadian, Gubernur BI saat itu, Mr. Lukman Hakim, mengadakan konferensi pers dengan menyatakan bahwa kondisi perekonomian dan keuangan di Sulawesi masih tetap stabil karena dana yang diambil oleh tentara akan segera diganti dengan pengiriman uang dari kantor pusat. Ketika ditanya oleh wartawan, ia menyatakan bahwa persoalan itu merupakan masalah internal BI dan akan segera diselesaikan. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sutikno Slamet yang menyebutkan bahwa BI di Makassar tetap akan kembali menyalurkan kreditnya saat itu kepada nasabah yang membutuhkannya.[370]

Akan tetapi di balik semua itu, Pemerintah Indonesia mencurahkan perhatian besar dan menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu tindakan pelanggaran serius terhadap integritas Bank Indonesia dan kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu, dalam sidang kabinet 28 Mei 1957, pemerintah memutuskan meminta pertanggung-jawaban kepala cabang (*agent*) BI di Sulawesi atas pengambilan dana oleh kedua perwira militer setempat. Dalam sidang itu diputuskan mengirimkan suatu tim ke Makassar yang melibatkan menteri keuangan, gubernur BI dan KSAD.

368 "Militaire commandanten namen Rp114 miljoen op bij Bank Indonesia op Sulawesi," *Java Bode*, 27 Mei 1957.

369 "Kwartaal verslag Bank Indonesia," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 17 April 1957.

370 "Import in Juni weer hervat," *Java Bode*, 29 Mei 1957.

Sementara itu, sebagai ketua Dewan Pengawas Pemulihan Keuangan ditunjuk Mr. A. K. Pringgodigdo.[371]

Di samping misi itu, kabinet memberikan kewenangan kepada KSAD Mayor Jenderal A. H. Nasution untuk mengambil tindakan terhadap para perwira daerah di Sulawesi. Nasution memandang bahwa gerakan mereka tidak lagi terbatas pada individu melainkan bentuk perlawanan politik teritorial. Meskipun tidak mengangkat senjata, gerakan mereka dianggap berpotensi menjadi separatisme yang dianggap lebih serius dibandingkan Kahar Muzakkar. Atas persetujuan kabinet, Nasution membentuk pemerintahan sipil dan militer atas seluruh Sulawesi di bawah Gubernur Kolonel Andi Pangeran Pettarani, sementara sebagai Komandan Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara ditunjuk Letnan Kolonel Andi Matalatta terhitung sejak 26 Mei 1957.[372]

Tim yang dibentuk oleh pemerintah itu mencakup unsur-unsur militer dan keuangan di bawah pimpinan Kolonel Dahlan Djambek sebagai Wakil KSAD. Mereka terdiri atas Kapten Abu Ismoyo, Mr. Burhanuddin, drs. C. Noor, yang ketiganya mewakili Kementerian Perdagangan; Mr. Harjono dari Kementerian Keuangan; dan Mr. Djumhana dari Bank Indonesia. Tugas mereka adalah menemui panglima TT VII yang menjadi penguasa daerah Sulawesi bagi solusi masalah keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.[373]

Dari penyelidikan yang dilakukan terhadap jajaran TT VII, tim memperoleh keterangan bahwa dana 100 juta rupiah yang diambil oleh Letnan Kolonel Sumual dari BI di Makassar sebagian diserahkan kepada komandan militer Sulawesi Tengah dan Utara sebanyak 15 juta rupiah, kemudian 12 juta rupiah diserahkan kepada komandan militer Maluku dan Papua, sedangkan sisanya dibagi di antara para kepala daerah melalui kedua komandan militer dan komandan militer Sulawesi Selatan di bawah

371 "Regering gelast onderzoek opname gelden in Makassar," *Het Nieuwsblad voor Sumatra,* 29 Mei 1957.

372 "Afzonderlijk commando voor Zuid Celebes geinstallerd," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 3 Juni 1957. Pengangkatan kedua perwira ini segera diikuti dengan pengangkatan tiga pejabat militer yaitu Kepala Staf Mayor Herstasning, Komandan Pemulihan Keamanan Sulawesi Selatan Kolonel Sudirman, dan pengangkatan Panglima Wilayah Indonesia Timur Letnan Kolonel Ventje Sumual. KSAD Nasution sebenarnya membubarkan TT VII dan melemahkan gerakan Permesta secara militer.

373 "Militaire en financiele experts naar Makassar," *Java Bode*, 29 Mei 1957.

tanggung jawab Panglima TT VII. Akan tetapi berdasarkan pengumuman Dinas Penerangan TT VII, uang tersebut tidak diambil begitu saja melainkan dipinjam berdasar kesepakatan perwakilan BI Makassar dan Panglima TT VII yang kelak akan dikembalikan dari hasil penjualan ekspor. Meski demikian, pengambilan itu sangat mengganggu sirkulasi uang BI yang mengakibatkan berkurangnya peredaran uang di lapangan dan pelemahan daya beli publik.[374]

Beberapa hari kemudian Kapten K. A. Matjik dari Dinas Penerangan TT VII mengeluarkan pernyataan bahwa pengambilan dana 100 juta rupiah diakui sebagai pinjaman darurat untuk dibagikan kepada para kepala daerah. Tujuannya untuk pembiayaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sangat diperlukan bagi peningkatan kesejahtaraan rakyat dan pendapatan daerah, mengingat selama itu permohonan bantuan dana kepada pemerintah pusat tidak pernah dikabulkan sedangkan ekspor dari Sulawesi ke luar negeri harus dilakukan lewat pusat. Keterangan itu sekaligus membantah apa yang ditulis harian *Suara Masjarakat* di Surabaya bahwa TT VII telah merampok kekayaan negara yang disimpan di Bank Indonesia di Makassar.[375]

Pernyataan tersebut diselidiki oleh tim pemerintah pusat yang masih berada di Makassar. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa dana tersebut telah dibagikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di 32 kabupaten dan masing-masing kabupaten menerima 2 juta rupiah, yang semuanya berada di kawasan Indonesia Timur wilayah kekuasaan TT VII Wirabuana. Sementara itu, dari perwakilan BI Makassar, informasi diperoleh bahwa pengambilan dana tersebut ternyata tidak memengaruhi sirkulasi uang karena jumlah yang diambil hanya separuh dari persediaan dana setempat yang masih bisa difungsikan bagi efisiensi ekonomi regional.[376]

Pada 6 Juni 1957, pembicaraan antara tim pemerintah pusat dan jajaran TT VII berlangsung di Makassar yang mengarah pada kesepakatan bahwa tim akan menyampaikan usul dan keberatan TT VII kepada

374 "Team centrale militaire gezag naar Makassar," *Algemeen Indisch Dagblad,* 35 Mei 1957.

375 "De in Makassar van de bank gehaalde gelden," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 4 Juni 1957.

376 "Zakelijke leeningen op basis overeenkomst," *Java Bode*, 8 Juni 1957.

pemerintah pusat agar diperhatikan dan ditindaklanjuti. Sementara itu, Mayor Jenderal Nasution yang tiba di Makassar memanggil Sumual di kantor Gubernur untuk memberitahukan pembebastugasannya sebagai panglima TT VII dan pengangkatannya sebagai panglima Indonesia Timur yang berada di bawah komando Kolonel Andi Pangeran Pettarani, yang akan langsung bertanggung jawab kepada KSAD di Jakarta.[377]

Setibanya kembali di Jakarta, Nasution menyampaikan laporan kerjanya di Makassar kepada Perdana Menteri Djuanda dan kabinet. Sidang kabinet yang diadakan pada 12 Juni 1957 pada prinsipnya menyetujui langkah-langkah Nasution dan merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi untuk mengatasi tuntutan daerah seperti yang dirumuskan pada Kongres Bhinneka Tunggal Ika pertengahan Mei 1957. Mengenai dana yang diambil oleh Sumual dari BI Makassar, pemerintah bersama BI pusat akan mengambil langkah-langkah yang sebijak mungkin dan akan dirumuskan dalam sebuah konferensi tentang rencana pembangunan wilayah Indonesia Timur.[378]

Sumual sendiri menyatakan komitmennya untuk mengembalikan dana tersebut lewat usaha swasembada lokal di bawah kekuasaannya. Meski sudah tidak lagi menjadi panglima TT VII, dalam kongres Dewan Pemuda Indonesia Timur di Tomohon pada 7 Juli 1957, Sumual menyatakan akan berusaha keras mendorong hubungan dagang di wilayah kekuasaannya, khususnya meminta kepada pemerintah militer pusat untuk mencabut sejumlah hambatan bagi perdagangan sehingga ekspor daerah bisa lebih lancar. Dari ekspor itu devisa akan mengalir yang bisa difungsikan untuk mengembalikan uang BI.[379]

Pernyataan Sumual tersebut jelas berlawanan dengan keterangan Nasution beberapa minggu sebelumnya yang disampaikan dalam konferensi pers di rumah dinas gubernur Makassar pada akhir Juni 1957. Nasution menyatakan bahwa persoalan uang 100 juta rupiah yang dipinjam dari BI oleh TT VII telah diambil alih pemerintah pusat

377 "Overeenkomst tussen chef-staf leger en Overste Sumual," *Java Bode*, 7 Juni 1957.

378 "Regeering keurt beleid van Nasution in Makassar goed," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 14 Juni 1957.

379 "Overste Sumual blijft trouw aan 2 maart proclamatie," *Java Bode*, 9 Juli 1957.

dan Angkatan Darat akan mengupayakan pengembaliannya. Dengan demikian TT VII yang sudah direorganisasi, dan khususnya Sumual, tidak lagi bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelesaikan masalah itu.[380]

Persoalan tersebut tidak lagi terbatas pada seputar masalah dana BI tetapi meluas menjadi perbedaan antara Nasution dan Sumual, atau dengan kata lain terjadi insubordinasi oleh Sumual yang telah diberhentikan sebagai panglima TT VII. Presiden Sukarno bermaksud mencegah kondisi menjadi semakin buruk sehingga memerintahkan Brigadir Jenderal Gatot Subroto yang merupakan wakil kepala staf dan bekas panglima TT VII sebagai atasan Sumual. Gatot Subroto berangkat ke Makassar pada 11 Juli 1957 dengan maksud menemui Sumual untuk membicarakan mengenai posisi terakhir dan kewenangannya di Indonesia Timur.[381]

Kunjungan Gatot Subroto hanya terbatas pada masalah militer, sementara persoalan politik tidak bisa diselesaikan. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh pengiriman misi pemerintah pusat ke Indonesia Timur untuk menemui Sumual di Manado pada 18 Juli 1957. Dalam pertemuan, misi pemerintah menyatakan bahwa mereka setuju dengan program yang diajukan dalam proklamasi 2 Maret 1957 dan dituangkan dalam Permesta tetapi tidak setuju keterlibatan Sumual dan Saleh Lahade dalam pelaksanaannya.[382]

Sebagai reaksi atas langkah pemerintah, Sumual membentuk Dewan Penasehat Permesta di Manado yang berada di bawah pimpinannya. Langkah itu dinilai oleh pemerintah sebagai tanda-tanda mengarah pada separatisme sehingga Perdana Menteri Djuanda memutuskan memanggil Sumual ke Jakarta pada akhir Agustus 1957 dengan maksud menjelaskan tindakan tersebut.[383] Sumual kembali ke Manado pada 2 September 1957 bersama Menteri Kehakiman Maengkom yang diundang untuk

380 "Afwikkeling van financiele en opbouwkwesties bevredigend," *Algemeen Indisch Dagblad*, 25 Juni 1957.

381 "Brigadier Generaal Gatot Subroto naar Makassar," *Java Bode*, 11 Juli 1957.

382 "Missie in Noord Sulawesi," *Java Bode*, 27 Juli 1957.

383 "Sumual in Djakarta aangekomen," *Java Bode*, 29 Agustus 1957.

menghadiri rapat pleno Dewan Permesta di bawah Letnan Kolonel Saleh Lahade.[384] Setelah tinggal beberapa hari di Manado, ia berangkat ke Makassar pada 6 September 1957, kemudian menyatakan bahwa pusat gerakan Permesta akan dipusatkan di Makassar sebagai kota paling strategis secara politis dan historis sekaligus militer, karena sejak dulu Makassar menjadi sentra semua kegiatan di Indonesia Timur.[385]

Sementara itu, dinamika ekonomi periode pertengahan dekade 1950 ditandai dengan banyak upaya penegakan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui tindakan nasionalisasi atas perusahaan Belanda di Indonesia. Dari tahun ke tahun, gerakan massa yang menuntut agar semua aset milik pemerintah dan swasta Belanda diambil alih atau dinasionalisasi oleh pemerintah semakin kuat. Apalagi sikap pemerintah Belanda, dinilai oleh sebagian pengamat dan politisi Indonesia selalu ingkar janji. Contohnya dalam kasus Irian Barat, yang seharusnya berdasarkan perjanjian KMB wilayah itu dikembalikan kepada Indonesia paling lambat setahun setelah perjanjian disepakati. Namun ternyata pihak Belanda selalu mengulur-ulur waktu penyerahan tersebut.

Upaya nasionalisasi juga bertujuan untuk penguatan fondasi ekonomi Indonesia melalui kepemilikan perusahaan-perusahaan besar yang saat itu masih dimiliki oleh Belanda. Nasionalisasi pada hakikatnya merupakan upaya penerapan semboyan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu "kebebasan politik melalui kemerdekaan adalah proses menuju kebebasan ekonomi." Semboyan tersebut menjadi tema Konferensi Pertama Ekonomi Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada 3 Februari 1946.[386] Konferensi yang berlangsung satu minggu itu, pada prinsipnya bertujuan untuk menata perekonomian nasional lewat nasionalisasi perusahaan asing.

Dalam konferensi di Yogyakarta tersebut diungkapkan bahwa salah satu tujuan membangun ekonomi nasional adalah mengganti perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Menurut Presiden Sukarno, perekonomian nasional bisa berkembang jika semua

384 "Elke gebiedsdeel zal vijf vertegenwoordigers zenden," *Java Bode*, 3 September 1957.

385 "Zending Permesta naar Makassar," *Java Bode*, 7 September 1957.

386 Sutter (1959: 671).

rakyat terlibat dalam membangun ekonomi nasional. Para eksportir, pedagang, industriawan, petani dan buruh harus bersatu padu bersama dengan pemerintah untuk membangun "ekonomi nasional." Melalui cara itu, Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut Sukarno, "kesejahteraan manusia tidak hanya dinikmati oleh ras kulit putih (Belanda) tetapi juga bangsa Indonesia yang bangun dari ketertindasan." Para pengusaha benar-benar memahami cita-cita ekonomi nasional dengan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bagaimana membangun ekonomi bangsanya.[387]

Dalam dimensi yang lain, nasionalisasi dapat dilihat lebih bermakna emosional dengan persiapan yang kurang matang. Keterbatasan tenaga ahli dan modal adalah persoalan yang hampir ditemukan pada setiap perusahaan yang dinasionalisasi. Politik nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda merupakan usaha untuk menyelamatkan kebangkrutan negara yang hanya bisa ditegakkan melalui revolusi dengan berbagai cara. Menurut Presiden Sukarno, untuk mampu mencapainya, "*. . . janganlah patah semangat, Bangsa Indonesia harus tabah, harus berani, harus melakukan judi dalam melakukan gelombangnya pergolakan, atau dengan kata lain bangsa Indonesia harus berani menghadapi kehidupan dengan gaya hidup 'bertualang'.*" Menurut Sukarno, tantangan bangsa Indonesia hanya bisa diatasi dengan melakukan usaha rekonstruksi ekonomi yang didasarkan atas penghentian ekonomi dari tangan-tangan liberalisme melalui penerapan demokrasi terpimpin, penyederhanaan sistem partai politik dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing secara terus-menerus. Jika semua itu dapat dilakukan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[388]

Lebih dari sepuluh tahun sejak kemerdekaan Indonesia, tanda-tanda kebangkitan ekonomi belum juga terlihat. Kegagalan membangun ekonomi pada dekade 1950 terletak pada manajemen ekonomi Indonesia secara makro pada pasca-kemerdekaan diawali dengan kurang baik. Meskipun Indonesia berdaulat penuh setelah 1950, kelompok moderat merasa bahwa kemerdekaan politik tidak bisa disertai dengan

387 *Antara,* 5 Desember 1949.

388 Sanusi (1963: 90).

kemerdekaan ekonomi. Revolusi Indonesia belum saatnya memasuki revolusi ekonomi. Lebih dari seratus ribu warga Belanda tetap memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Perusahaan Belanda masih tetap mendominasi perdagangan ekspor-impor, perbankan, bahkan perkapalan. Lebih dari seribu pegawai negeri masih dipegang oleh orang Belanda yang menduduki posisi puncak birokrasi Indonesia. Banyak penasihat ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan Belanda yang secara otomatis mengurangi posisi ekonomi nasional.[389]

Gaung gelombang nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang tak terelakkan lagi bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Namun, "mengejutkan" karena penanganan nasionalisasi secara administratif masih berada di bawah pengawasan pemerintahan sipil. Baru pada 10 Desember 1957, dengan terbitnya Undang-Undang Nasionalisasi, pengawasannya di bawah langsung pada Pusat Administrasi Perang, yang ditandai dengan pemuatan UU Nasionalisasi dalam UU Darurat Militer 3 Desember 1957, yang menyatakan bahwa jabatan manajer perusahaan-perusahaan Belanda akan diserahkan kepada orang yang diangkat atau disetujui oleh penguasa militer. Sejak itu manajer-manajer perusahaan Belanda berada di tangan para perwira militer.[390]

Nasionalisasi De Javasche Bank

Nasionalisasi, atau disebut juga Indonesianisasi, terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu lembaga penting yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia adalah De Javasche Bank. Upaya pengambilalihan tersebut bermula dari keinginan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memiliki sebuah bank sentral yang sepenuhnya dikontrol oleh pihak Indonesia tanpa intervensi dari pihak mana pun.[391]

389 Tambunan (1996: 22–5).

390 Sutter (1959: 672).

391 Berdasarkan hasil KMB pada 1949 disepakati bahwa De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sirkulasi yang dikelola oleh pemerintah RIS.

Seperti telah dijelaskan, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaaan, pasukan NICA datang melalui pasukan Sekutu dan mengambil alih bank-bank Jepang, termasuk Nanpo Kaihatsu Ginko serta mengaktifkan kembali De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi di Indonesia. Sementara di Makassar, DJB telah membuka kembali kantornya di Makassar sejak 10 Oktober 1945. Tujuan utama pengaktifan kembali DJB adalah untuk menguasai dan mengontrol ekonomi di Indonesia setelah terjadi kemerosotan ekonomi akibat perang.

Berdasarkan hasil KMB dalam aspek ekonomi, ditetapkan bahwa De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang secara resmi beroperasi di Indonesia. Sementara bank yang dimaksudkan sebagai bank sentral milik Republik Indonesia saat itu, yakni Bank Negara Indonesia, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan, dengan pertimbangan bahwa bank pembangunan lebih dibutuhkan oleh negara yang baru merdeka. Namun bagi pihak RI memiliki pertimbangan lain yaitu bahwa Indonesia juga membutuhkan bank sentral sebagai penjaga dan pemelihara stabilitas moneter yang juga sebagai lambang kedaulatan ekonomi Indonesia.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Hatta selaku ketua delegasi Indonesia ke KMB yang mengatakan bahwa pada awalnya memang direncakan untuk menjadikan BNI sebagai bank sirkulasi. Akan tetapi berbagai masalah yang muncul setelah kemerdekaan membuat cita-cita itu terpaksa ditunda dahulu. Kemudian setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda (menurut Belanda menyerahkan kedaulatan) melalui keputusan KMB, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang lebih rasional, yaitu memilih De Javasche Bank yang diusulkan oleh delegasi Belanda. Belanda bersikeras menuntut DJB sebagai bank sirkulasi RIS. Sebab menurut mereka, DJB sudah memiliki aparatur yang lengkap yang dapat diteruskan sebagai bank sirkulasi.[392]

Alasan utama pihak Belanda untuk memaksakan De Javasche Bank sebagai bank sentral bagi Indonesia adalah sebagai sarana mengontrol pelunasan utang Indonesia yang disepakati dalam KMB akan dibayar kepada pemerintah Belanda sebagai akibat biaya agresi militer I dan II

392 Darsono, dkk. (2016: 212-13).

dalam perang kemerdekaan. Di samping itu, Belanda menilai bahwa BNI sebagai bank sentral Indonesia masih belum memiliki kekuatan moneter karena belum ada cadangan devisa dan masih dikuasai oleh DJB sebagai warisan sebelum perang.

Dalam salah satu poin hasil kesepakatan KMB terutama menyangkut aspek ekonomi dan perbankan, disebutkan pula bahwa selama RI masih berutang kepada Kerajaan Belanda,[393] maka dalam pengambilan keputusan menyangkut masalah moneter dan perbankan RIS harus bermusyawarah terlebih dulu dengan pemerintah Kerajaan Belanda, khususnya menyangkut (1) jika pemerintah RIS hendak mengubah undang-undang mata uang maupun undang-undang De Javasche Bank (*De Javasche Bankwet*) yang diberlakukan sejak isi perjanjian KMB disepakati; (2) jika pemerintah RIS hendak membuat undang-undang mata uang dan undang-undang bank sirkulasi yang baru.[394]

Sejak menjelang akhir 1950 rencana melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank muncul di kalangan elite politik. Namun demikian perdebatan tentang waktu masih menjadi agenda karena ada sebagian tokoh politik yang menyatakan bahwa Indonesia belum siap mengambil alih DJB sebab belum memiliki staf yang berpengalaman untuk mengelola dan menjalankan bank sentral.[395] Kabinet Natsir yang berkuasa satu bulan setelah negara kesatuan kembali terwujud, pada September 1950, mencantumkan agenda nasionalisasi DJB dalam program kerjanya. Dalam hal ini, Sumitro Djojohadikusumo sebagai menteri perdagangan menerima tugas berat untuk memperhitungkan proses dan dampak nasionalisasi tersebut.[396]

---

393 Berdasarkan hasil KMB, disepakati bahwa seluruh utang Hindia Belanda dibebankan kepada pemerintah RIS; RIS akan mengambil alih utang yang seluruhnya berjumlah 4.300 juta gulden (sekitar US$ 1.130 juta) dari pemerintah Hindia Belanda. Dari jumlah itu 3.000 juta gulden merupakan utang dalam negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda, 1.291 juta gulden merupakan utang luar negeri, 871 juta gulden merupakan utang konsolidasi kepada Negeri Belanda dan sisanya merupakan utang kepada negeri lainnya. Lihat Darsono, dkk. (2016: 211).

394 Darsono, dkk. (2016: 214).

395 Lindblad (2008: 110).

396 Djojohadikusumo (1953: 159). Bagi Sumitro, nasionalisasi bank sentral menjadi pintu pembuka bagi kemerdekaan ekonomi Indonesia dan pengambilalihan semua badan usaha Belanda yang masih beroperasi dan menguasai hajat hidup publik.

Meskipun ada kekhawatiran Sjafruddin Prawiranegara terhadap kesiapan Kabinet Natsir menasionalisasi De Javasche Bank, Jusuf Wibisono yang juga dari partai penguasa (Masyumi) saat itu tetap menekankan perlu secepat mungkin melakukan langkah nasionalisasi karena tindakan itu akan menegaskan kemerdekaan ekonomi bangsa Indonesia. Selama DJB masih berada dalam status dan posisinya seperti itu, menurut Jusuf Wibisono, tidak mungkin kemerdekaan ekonomi sepenuhnya dinikmati oleh bangsa Indonesia, karena kontrol moneter menjadi urat nadi penting menuju jantung perekonomian nasional.[397]

Meskipun sebagian masyarakat menolak nasionalisasi De Javasche Bank karena menganggap pengusaha Indonesia masih membutuhkan dana pinjaman dari bank tersebut untuk memulihkan usahanya setelah perang, begitu pula pemerintah Indonesia yang memerlukan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Tetapi karena euforia kemerdekaan yang sangat tinggi, gerakan untuk menasionalisasikan perusahaan milik Belanda mendapat dukungan yang lebih banyak.

Semangat anti-Belanda yang meningkat dalam dunia politik Indonesia pada masa itu ikut memengaruhi dorongan bagi nasionalisasi terhadap De Javasche Bank secepatnya, yang sampai saat itu di mata publik masih dianggap sebagai simbol hegemoni kolonial di sektor perekonomian. Di Surabaya, pada 20 Desember 1950 kantor cabang DJB diserbu oleh massa dan semua isinya dirampok sebagai bentuk luapan emosional terhadap Belanda. Hal itu segera diikuti ancaman dan reaksi antipati di sejumlah kota lain tempat cabang DJB masih beroperasi.[398]

Kabinet Sukiman/Suwiryo, yang berkuasa sejak 27 April 1951, membawa program kerja yang lebih nasionalis dan lebih tegas dalam menghadapi Belanda yang masih bertahan dengan kesepakatan KMB. Pada 30 April 1951, Menteri Keuangan Jusuf Wibisono dalam kabinet itu mengumumkan kepada pers dan publik bahwa Kabinet Sukiman/Suwiryo akan melakukan nasionalisasi terhadap DJB. Sebagai seorang kader Masyumi—seperti halnya Perdana Menteri—Jusuf merujuk pada hasil kongres Masyumi (1949) tentang nasionalisasi terhadap semua aset

397 Notodidjojo (1980: 95–6).

398 Spruyt (1979: 146).

Belanda di Indonesia.[399] Pengumuman itu menimbulkan reaksi keras dari pihak Belanda, khususnya dari jajaran direksi DJB. Presiden DJB, Dr. A. Houwink, menghadap Jusuf dan meminta penjelasan tentang pernyataan sepihak itu. Setelah melakukan diskusi dan tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya, Houwink mengundurkan diri dari jabatannya.[400]

Setelah pergantian pimpinan De Javasche Bank, dewan direksi diisi oleh orang Indonesia yaitu mantan menteri keuangan Sjafruddin Prawiranegara.[401] Langkah Jusuf berlanjut dengan membentuk Komisi Pengambilalihan DJB pada Mei 1951. Komisi inilah yang mempersiapkan dan mengolah pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan dari pengambilalihan DJB. Salah satu pendapat yang mendapat banyak persetujuan ialah agar Pemerintah Indonesia tidak mengambil alih secara paksa kepemilikan DJB karena tindakan tersebut akan mengakibatkan munculnya kecaman dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan di dunia. Akhirnya, panitia tersebut memutuskan untuk mengambil alih kepemilikan dengan cara Indonesianisasi saham DJB.

Panitia berupaya membeli saham De Javasche Bank sehingga mayoritas dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Dengan cara menguasai saham, pengambilalihan DJB sebagai program nasionalisasi ekonomi nasional diharapkan berlangsung secara suka rela tanpa menimbulkan gejolak yang mengakibatkan kerugian moneter dan gangguan pada kestabilan perekonomian nasional.[402]

Proses pembelian saham dengan upaya membeli seluruh saham De Javasche Bank sesuai harga pasar saat itu dan mengindonesiakan karyawan dan pimpinan DJB. Bahkan asas kewarganegaraan secara tegas dijadikan syarat mutlak bagi para pejabat direksi DJB dan merupakan salah satu masukan kepada panitia pembuat Rancangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Setelah itu, pihak Indonesia berupaya membeli saham DJB.[403]

---

399 Rahardjo (1995: 90).

400 Widjanarto (1993: 9).

401 Remy Madinier, *Islam and politics in Indonesia: the Masyumi Party between democracy and integralism* (Singapore: NUS Press, 2015), hlm. 197.

402 Rohaedi dan Haris (1994: 76).

403 Oey (1991).

Dengan bekerja cepat selama sebulan pertama pemerintahannya, Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo mengumumkan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 Mei 1951 bahwa pemerintah Indonesia telah siap melakukan nasionalisasi atas DJB. Untuk itu Sukiman meminta dukungan politik dari legislatif agar rencana tersebut bisa terlaksana. DPR menyetujui langkah itu dan menyiapkan dasar hukum bagi pelaksanaannya, yaitu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nasionalisasi De Javasche Bank. Melalui dukungan DPR ini, Sukiman menerbitkan surat keputusan pemerintah pada 2 Juli 1951 yang mengesahkan pembentukan suatu panitia pelaksana bagi nasionalisasi DJB.[404]

Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank dilantik oleh Sukiman pada 19 Juli 1951 di bawah pimpinan Mohammad Soediono, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian, pada 3 Agustus 1951 Pemerintah Indonesia menawarkan secara resmi membeli saham DJB. Pada awalnya Menteri Perekonomian Belanda tidak setuju dengan tawaran itu tetapi Pemerintah Indonesia meyakinkan akan membayar harga saham secara wajar. Melalui diplomasi dengan *Vereeniging voor de Effectenhandel* atau Perkumpulan Pedagang Efek, akhirnya banyak pemilik saham yang tertarik dengan penawaran Indonesia yang menggiurkan. Setelah itu pemerintah RI berhasil menguasai 97 persen saham bank tersebut dengan cara membeli 20 persen di atas harga normal.[405]

Dukungan pemerintah secara serius ditunjukkan melalui keputusan nomor 122 (12 Juli 1951) yang mengesahkan pemberhentian Dr. A. Houwink secara resmi dari jabatannya sebagai Presiden De Javasche Bank, dan keputusan nomor 123 tanggal yang sama untuk mengesahkan pengangkatan Sjafruddin Prawiranegara sebagai penggantinya. Selain Houwink, terdapat dua direktur berkebangsaan Belanda yaitu Paul Spies dan Th. Teunissen, dan dua direktur lain berkebangsaan Indonesia yaitu Indrakusuma dan Loekman Hakim. Kedua direktur Belanda menyadari bahwa posisi mereka cukup rentan terutama setelah Houwink mengundurkan diri. Berkat hubungan dekatnya, Spies mendukung

404 Rachmadi Usman, *Op.Cit,*.hlm. 26. Keputusan ini bernomor 118 tahun 1951. Selain ketua Mohammad Sediono, panitia terdiri atas Mr. Soetikno Slamet, Dr. R. M. Soemitro Djojohadikusumo, T. R. B. Sabarudin, dan Drs. Khouw Bian Tie.

405 Darsono, dkk. (2016: 228).

pengangkatan Sjafruddin sebagai pengganti Houwink, dan bersama Teunissen ia bersedia bekerja di bawah Sjafruddin hingga proses nasionalisasi DJB berakhir.[406]

Di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara, proses nasionalisasi atas De Javasche Bank lebih cepat dan lebih mudah dilaksanakan oleh panitia. Dalam waktu enam bulan proses berakhir dan Mohammad Sediono melaporkan kinerjanya kepada Perdana Menteri Sukiman. Oleh Sukiman laporan itu disertai rancangan keputusan nasionalisasi dan diserahkan kepada Presiden Sukarno sebagai kepala negara. Presiden segera menandatangani keputusan nasionalisasi itu dan meneruskannya kepada DPR. Dengan surat keputusan tersebut, DPR menjadikannya sebagai dasar bagi pengesahan Rancangan Undang-Undang Nasionalisasi De Javasche Bank yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 tanggal 15 Desember 1951.[407]

Pengesahan undang-undang tersebut memang mengakhiri dominasi ekonomi Belanda terakhir di sektor perbankan, tetapi bukan berarti segera melahirkan institusi perbankan nasional. Nama De Javasche Bank masih tetap digunakan dan susunan direksi juga tidak mengalami perubahan. Kesulitan mencari calon pengganti dan gejolak politik yang dialami Kabinet Sukiman sehubungan dengan tuntutan pembicaraan kembali dengan Belanda terkait masalah Papua mencegah perubahan lebih lanjut pada lembaga perbankan baru ini. Perubahan hanya terjadi pada status bahwa sejak UU Nomor 24/1951 disahkan, DJB masih menjadi bank sentral tetapi dimiliki oleh pemerintah RI dan wajib melaksanakan program kebijakan pemerintah sepenuhnya.

Seiring berkembangnya isu nasionalisasi bank sentral, maka terdapat wacana perubahan nama De Javasche Bank menjadi 'Bank Jawa' atau 'Bank Sirkulasi Indonesia'.[408] Wacana itu menjadi bahan pertimbangan komite yang dibentuk oleh perwakilan Departemen Keuangan dan Bank Negara Indonesia. Tetapi, komite ini menolak usulan untuk mengubah nama De Javasche Bank menjadi 'Bank Jawa' atau 'Bank Sirkulasi Indonesia'

406 Rosidi (1986: 172).

407 Kementerian BUMN (2014: 638).

408 Darsono, dkk. (2016: 234).

karena dirasa tidak cocok untuk dunia internasional. Para direktur DJB mengusulkan nama 'Bank Sentral Indonesia' sebagai alternatif nama baru tetapi usulan itu juga ditolak. Komite akhirnya menyetujui nama 'Bank Indonesia' sebagai pengganti nama De Javasche Bank.

Meskipun sebagian masyarakat menolak nasionalisasi De Javasche Bank karena menganggap pengusaha Indonesia masih membutuhkan dana pinjaman dari bank tersebut untuk memulihkan usahanya setelah perang, begitu pula pemerintah Indonesia yang memerlukan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Tetapi karena euforia kemerdekaan yang sangat tinggi, gerakan untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda mendapat dukungan yang lebih banyak.

Untuk memudahkan langkah kerjanya dan memiliki legitimasi yang kuat, panitia merancang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia selama dua tahun untuk persiapan membentuk bank sentral nasional.

Pada April 1952, Perdana Menteri Sukiman mengundurkan diri, digantikan oleh Wilopo dengan kabinet baru. Beberapa bulan pertama bekerja Kabinet Wilopo mendapat pukulan dalam sektor ekonomi makro sebagai akibat dari kemerosotan harga sejumlah komoditas ekspor yang berdampak pada defisit anggaran negara. Perang Korea berpengaruh terhadap ekspor Indonesia, sementara ekonomi domestik juga bergejolak seperti kegagalan panen dan penurunan produktivitas sektor perkebunan. Namun, Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo tetap bertekad melanjutkan program pemerintah mewujudkan nasionalisme di sektor perbankan.[409]

Pada 10 April 1953, DPR menyidangkan usulan RUU Pokok Bank Indonesia yang diajukan oleh Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank dan didukung oleh Menteri Keuangan Sumitro. Setelah disetujui, Presiden Sukarno mengesahkan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia, dan berlaku sejak 1 Juli 1953. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, nama De Javasche Bank resmi diganti menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan hanya ditetapkan sebagai bank sirkulasi tetapi juga sebagai bank sentral Republik Indonesia.

409 Feith (2009: 125).

Jika dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia dengan *De Javasche Bankwet* yang menjadi dasar hukum De Javasche Bank, terlihat perbedaan yang cukup mencolok dalam hal kemandiriannya.[410] Dalam *De Javasche Bankwet* disebutkan bahwa pemerintah tidak dapat mencampuri urusan DJB, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, pemerintah memiliki pengaruh terhadap Bank Indonesia. Dalam Pasal 21, misalnya, disebutkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh (1) Dewan Moneter, (2) Direksi, dan (3) Dewan Penasihat. Adapun Dewan, Dewan Moneter adalah pimpinan tertinggi Bank Indonesia yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia, dan masing-masing anggauta memiliki hak satu suara.[411] Melalui Dewan Moneter, posisi Gubernur Bank Indonesia memiliki keleluasaan yang terbatas oleh karena pada dewan tersebut juga terdapat pihak lain yakni Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian yang merupakan bagian dari jajaran Pemerintah RI. Terlihat bahwa dalam posisi tersebut pemerintah dapat melakukan intervensi pada kebijakan Bank Indonesia. Tetapi, menurut Sumitro Djojohadikusumo, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Gubernur Bank Indonesia tetap memiliki otonomi dan kebebasan yang besar. Suatu kebijakan Bank Indonesia baru bisa dihentikan apabila dinilai sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Pemerintah juga tidak bisa seenaknya meremehkan pendirian Direksi Bank Indonesia.[412]

Pembentukan Dewan Moneter digagas oleh Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Bank Indonesia pertama, yang bertujuan mencegah kemungkinan konflik antara pemerintah versus Bank Indonesia. Meskipun Pemerintah RI yang memiliki kata akhir untuk penyelesaian masalah, tetapi jika menyangkut keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang merupakan kewenangan Bank Indonesia.

Selain mengatur nilai satuan uang Indonesia demi tercapainya kemakmuran bangsa, Bank Indonesia bertugas menyelanggarakan

410 Darsono, dkk. (2016: 230).

411 Oey (1991).

412 Darsono, dkk. (2016: 236).

peredaran uang kertas, mempermudah jalan uang giral dan mengatur jalannya dengan luar negeri. Bank Indonesia memiliki kewenangan tunggal dalam mengeluarkan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.[413]

Kewenangan tunggal dalam pengedaran uang dipegang sepenuhnya oleh Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia. Bank Indonesia merumuskan kegiatan strategis dalam pengedaran uang, yaitu:

1. Penerbitan uang baru harus dilandasi dengan suatu penelitian dan perencanaan yang matang sehingga uang baru yang diterbitkan memiliki kualitas yang baik. Penelitian dan perencanaan dilakukan dalam rangka penetapan desain gambar uang, bahan uang, unsur pengaman, teknik cetak, serta kesesuaiannya dengan peralatan perkasan, seperti mesin sortasi, kemasan, dan sebagainya.
2. Kebijakan stok uang yang cukup memungkinkan selalu tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dengan berbagai pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Kebijakan ini harus didukung oleh rencana cetak yang akurat, kebijakan tingkat kelayakan edar dapat ditoleransi serta sistem distribusi yang memadai.
3. Pemilikan sistem distribusi uang yang efektif yang menjamin ketersediaan stok uang yang cukup, lancar, dan tepat waktu. Hal ini dapat terealisasi bila terdapat rencana distribusi uang yang akurat, kelancaran transportasi, dan efektivitas Depot Kas dalam melaksanakaan fungsinya.
4. Adanya suatu kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan perbankan maupun lembaga lainnya dalam membantu tugas pengedaran uang oleh Bank Indonesia.

413 Ismail (2009: 55–6).

Bank Indonesia di Makassar pada Periode Awal Pembentukan

Proses nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia berdampak secara nasional. Perubahan kelembagaan perbankan yang sebelumnya milik pemerintah kolonial Belanda menjadi sepenuhnya milik Pemerintah Indonesia. Seluruh aset dan jaringan yang sebelumnya dimiliki DJB selanjutnya menjadi milik Bank Indonesia, begitu pula seluruh kantor cabang DJB termasuk di Makassar. De Javasche Bank Agentshcap Makassar telah berganti menjadi Bank Indonesia Cabang Makassar. Pengambilalihan itu menjadi simbol perubahan menuju kedaulatan ekonomi baik di Indonesia maupun di Makassar.

Perubahan kelembagaan yang terjadi di Bank Indonesia Cabang Makassar dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakstabilan pengelolaan ekonomi-moneter di wilayah tersebut. Untuk itu dilakukan masa transisi dengan tetap menyertakan pejabat Belanda sebagai pemimpin kantor cabang. Pada awal berdiri Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, kepala cabang BI Makassar masih diduduki oleh pejabat berkebangsaan Belanda bernama P. Bordest yang menjabat sejak Juni 1953 hingga Oktober 1954. Setelah itu baru digantikan dengan pejabat bumiputera bernama Ag. Gelar Datuk Radjo nan Gadang yang menjabat dari bulan Oktober 1954 hingga Oktober 1957.[414]

Peresmian Bank Indonesia 1 Juli 1953 menandai dominasi ekonomi nasional dan fenomena ini menimbulkan gejolak emosional di daerah.[415] Di Makassar hal itu terjadi bahkan jauh sebelum proses nasionalisasi terhadap DJB berlangsung, sebagai bagian dari ketegangan politik makro di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia Timur setelah KMB, Makassar menjadi sentra kegiatan dan kebijakan ekonomi utama yang menopang kehidupan negara federal ini. Sejak awal bisa diketahui bahwa fondasi ekonomi negara ini sangat lemah dan di sektor moneter serta fiskal ketergantungan sangat kuat kepada pemerintah pusat di

414 Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Pendirian Kantor Cabang BI Ujung Pandang, hlm. 8.

415 Oey (1991: 115).

Jakarta tampak jelas. Hal itu terbukti pada bulan Maret 1950 ketika pemerintah Jakarta melakukan kebijakan *saneering* yang membawa gejolak ekonomi signifikan di Makassar. De Javasche Bank yang dijadikan sebagai bank sentral harus mengalami pukulan akibat keterlambatan pemberitahuan oleh kantor pusat terhadap tindakan itu dan ini menandai kerentanan struktur ekonomi negara federal tersebut.[416]

Ketika dampak dari kebijakan *saneering* belum tuntas teratasi, persoalan baru segera muncul sebagai akibat dari pergolakan politik yang bertujuan membubarkan Negara Indonesia Timur. Pada awal Juli 1950, dalam gelombang tuntutan pembubaran RIS, pemogokan besar-besaran terjadi di pelabuhan Makassar. Peristiwa itu mengakibatkan kemacetan perdagangan baik ekspor maupun impor sehingga para pelaku usaha di kota itu dan Sulawesi Selatan pada umumnya mengalami kerugian. Dampaknya meluas mengingat Makassar menjadi satu-satunya pintu gerbang perdagangan bagi NIT dan DJB terkena imbasnya dengan mencatat defisit pada anggarannya karena banyak pengusaha kemudian melakukan *rush* dan penarikan uang untuk menutup defisit investasinya.[417]

Sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut, pada 29 November 1950 DJB Makassar mencatat defisit dan utang terbesar dari perusahaan lain yang bekerja di Makassar. Untuk menutup dampak penarikan uang itu, DJB harus mengeluarkan sertifikat devisa yang menjadi surat jaminan penagihan bagi nasabah dan hal itu membuat negara berutang karena status bank itu sebagai bank sentral. Janji yang diberikan adalah surat itu akan dibayarkan sesuai nilai tagihan setelah neraca perdagangan ekspor-impor pulih kembali.[418]

Di bawah pengaruh tekanan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank di pusat, Gubernur Sudiro dalam pidato pelantikannya di Makassar (Juli 1951) menyatakan bahwa ia akan mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat termasuk di sektor ekonomi dengan tujuan

---

416 "Oost Indonesië protesteert tegen 'leg' in Djakarta," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 23 Maret 1950. Krisis tersebut segera mengancam cadangan devisa Javasche Bank di Makassar sebesar 64 juta gulden untuk menutup defisit akibat fluktuasi harga yang terjadi menyusul kebijakan *saneering*.

417 "Effect der geldzuivering weer te niet gedaan," *Algemeen Handelsblad*, 13 Juli 1950.

418 "De schuld van Rep. Indonesia," *De Locomotief*, 26 Desember 1950.

untuk memperkuat semangat perjuangan nasional.[419] Meskipun dirinya mengaku bahwa sikapnya itu bukan penampilannya selaku politikus melainkan pejabat pemerintah, pandangan itu menunjukkan bahwa unsur politik sangat besar dalam langkah-langkah yang diambilnya.

Ketika De Javasche Bank di Makassar diambil alih oleh pemerintah daerah menyusul nasionalisasi kantor pusatnya di Jakarta, kondisi defisit yang terjadi setahun sebelumnya masih belum tuntas teratasi. Hal itu tampak dari ketidakmampuan lembaga ini dalam menyalurkan dana untuk kebutuhan gaji pegawai pemerintah daerah. Panitia Penetapan Gaji yang dibentuk di bawah Sutardjo Hadikusumo memang berusaha memperbaiki gaji pegawai tetapi tidak mungkin dilakukan dalam kondisi defisit sehingga alternatif yang harus dilakukan adalah rasionalisasi pegawai eks-NIT.[420]

Di samping itu, tindakan tegas mulai diambil oleh pemerintah daerah Makassar dan Sulawesi Selatan untuk memulihkan perekonomian sehingga memicu kinerja perbankan yang sehat. Langkah yang diambil antara lain mengeluarkan peringatan keras terhadap para pelaku pemogokan di sentra-sentra ekonomi seperti pelabuhan dan bandar udara yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dan berdampak pada kesulitan moneter. Pada akhir April 1952, wali kota Makassar menegaskan peringatan itu kepada para buruh kota dan pelabuhan yang sering melakukan pemogokan.[421]

Sementara itu dari pihak DJB Makassar pembayaran terhadap para pemegang surat penagihan yang diterbitkan belum bisa segera terealisasi sehubungan dengan pemulihan ekonomi dan penataan kembali di kantor pusat bagi persiapan menjadi bank sentral Republik Indonesia. Di Makassar hal itu mengakibatkan masalah pada beberapa nasabah yang kemudian melakukan tindak kekerasan dan berujung pada proses hukum. Bahkan beberapa nasabah yang frustrasi terhadap kegagalan

419 "De ICTFU, ambtenaren, productie," *De Vrije Pers*, 9 Juli 1951.

420 "Wat andere schrijven," *Algemeen Indisch Dagblad*, 4 Desember 1951. Sebagai presiden De Javasche Bank yang baru, Sjafruddin Prawiranegara membuat alternatif untuk menutup defisit itu dengan menjual pabrik gula yang sudah tidak berfungsi maksimal.

421 "Makassar," *De Vrije Pers*, 28 April 1952.

penagihannya melakukan tindak kekerasan sehingga harus diseret ke depan pengadilan.[422]

Kepala perwakilan De Javasche Bank di Makassar, P. Bordest, berusaha keras mengatasi situasi tersebut sehingga tampak semakin membaik pada pergantian tahun 1952/53, seperti ia katakan dalam perayaan 125 tahun kantor De Javasche Bank di Makassar pada 27 Januari 1953. Bersama Gubernur Sudiro, P. Bordest menyatakan bahwa DJB Makassar siap berkontribusi bagi pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan melayani penduduk dalam pemberian kredit dan persoalan moneter lainnya. Pernyataan itu mendapatkan tanggapan positif dari perwakilan berbagai kelompok di Kota Makassar.[423]

Salah satu langkah DJB Makassar yang sangat menolong perekonomian lokal dan sekaligus kinerja lembaga itu adalah pemberlakuan kembali uang kertas lama yang diterbitkan oleh bank itu sebelum kebijakan *saneering* pemerintah Jakarta dikeluarkan. Atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi dan para kepala daerah lain, agen DJB di Makassar menerbitkan kembali keping uang tersebut sebagai alat pembayaran umum pada awal September 1953. Dengan pengawalan aparat kepolisian dalam mengawasi peredaran dan penggunaannya, keping uang 5, 10 dan 25 gulden kembali ditemukan di pasar-pasar lokal kota Makassar dan menyebar ke daerah lain.[424]

Kelembagaan Bank Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa proses pengambilalihan De Javasche Bank dilakukan dengan membeli saham DJB hingga 97 persen dari total saham yang dimiliki. Setelah proses Indonesianisasi tersebut selesai, secara resmi DJB berubah menjadi Bank Indonesia pada 1

422 "Spuwer voor de rechter," *De Vrije Pers*, 17 November 1952.

423 "Javasche Bank Jubileum in Makassar," *Java Bode*, 28 Januari 1953.

424 "Oud bankpapier," *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 7 September 1953.

Juli 1953 berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Berdasarkan undang-undang itu, Bank Indonesia resmi ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Undang-undang itu juga digunakan sebagai pengganti *De Javasche Bank Wet* yang telah berlaku sejak 1922. Undang-undang yang baru itu bertujuan menjadikan Bank Indonesia sabagai bank sentral modern dengan pola yang diterima oleh negara-negara Barat.[425] Dengan kata lain, Bank Indonesia didesain untuk bertanggung jawab terhadap perbankan modern yaitu untuk memonitor peredaran uang dan arus kredit. Undang-undang tersebut secara resmi menjadi panduan operasional Bank Indonesia dalam melakukan kegiatannya, termasuk menjadi landasan operasional bagi Kantor Cabang Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

Di dalam UUPBI, diatur mengenai hubungan antara Pemerintah dan Bank Indonesia secara intensif. Dalam Pasal 1, Ayat (2), Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum milik negara. Selain itu, diatur juga mengenai tugas Bank Indonesia dalam Pasal 7, Ayat (1–5) yang berisi sebagai berikut.

(1) Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil)

(2) Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia; sekadar peredaran uang itu terdiri dan uang-uang bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.

(3) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.

(4) Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.

(5) Menunggu terlaksananya suatu peraturan undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut

425 Arndt (1984: 136).

bagi Bank untuk menjalankan pengawasan yang dimaksud guna kepentingan kemampuan membayar (*solvabiliteit*) dan kelanjutan keuangan (*liquiditet*) badan-badan kredit, begitu pula untuk pemberian kredit secara sehat berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Kegiatan awal Bank Indonesia sebagai bank sentral diawali dengan membantu pemerintah dalam pengadaan uang secara luar biasa. Tidak lama setelah pengakuan kedaulatan, Pemerintah RIS mengalami defisit anggaran sebagai akibat berbagai perang yang terjadi pada masa awal kemerdekaan melawan Belanda. Selama dua dasawarsa pertama setelah kemerdekaan, defisit anggaran tidak terelakkan. Kas negara umumnya habis untuk proyek pembangunan dan rekonstruksi pascaperang, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan selama revolusi baik secara diplomasi maupun militer. Pemerintah berusaha menutupi defisit tersebut dengan mencetak uang yang justru mempercepat laju inflasi.[426]

Pada masa awal itu, selain sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia—seperti pada masa De Javasche Bank—turut pula menjalankan fungsi sebagai bank umum melalui departemen komersial. Sebagai bank umum, BI dapat menyalurkan kredit. Namun berbeda dengan praktik bank komersial lainnya, kredit yang disalurkan BI tidak berasal dari simpanan nasabah melainkan dari mencetak uang baru. Akan tetapi, BI sama sekali tidak menerima deposito dan tidak mencari keuntungan.[427]

Berdasarkan UUPBI, Pasal 36, Ayat (2), Bank Indonesia "secara berangsur-angsur melepaskan kegiatan komersilnya dan mengkhususkan tugas sebagai bank sentral yang sesungguhnya." Kegiatan di luar fungsi bank sentral harus diserahkan kepada bank-bank lain (yang akan ditunjuk oleh undang-undang) paling lambat 31 Desember 1953. Sebagai bank sentral, secara teoritis tidak seharusnya Bank Indonesia berhubungan langsung dengan dunia usaha melalui penciptaan kredit langsung. Fungsi tersebut sebenarnya harus diserahkan kepada bank-bank yang memang bergerak di bidang perkreditan, baik milik pemerintah maupun swasta.[428]

426 Prawiro (1998a: 27).

427 Djumhana (1996: 75).

428 Rahardjo (1995: 130).

Di Kota Makassar, kegiatan Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar pada masa awal tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan sebelum terjadi Indonesianisasi De Javasche Bank. Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar memiliki berbagai aktivitas sesuai dengan tugas yang diatur dalam undang-undang, yakni sebagai bank yang mengedarkan uang untuk wilayah Makassar dan kota-kota lain di sekitar Sulawesi Selatan, dan melakukan kegiatan pemberian dan pengawasan kredit. Dalam pengawasan urusan kredit (*toezich op credietwezen*) berlaku prinsip bahwa keadaan perkreditan di setiap negara sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan lembaga-lembaga kredit yang bersangkutan.[429] Pengawasan kredit tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tanggal 15 Januari yang berisi tentang kewajiban bank-bank agar menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia sebagai badan pengawasan dan pembinaan.[430]

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 terbit, menurut M. Djoeana Koesoemahardja (Gubernur Pengganti BI 1966–73), dunia perbankan di Indonesia berkembang tanpa pengawasan yang wajar dari BI. Hal itu terjadi karena belum ada landasan hukum dan tenaga ahli yang kompeten. Akibatnya, bank-bank berjalan menurut kehendak dan selera pimpinan masing-masing. Sementara itu, tata usaha bank-bank juga belum teratur sehingga menyulitkan pihak BI memperoleh gambaran yang tepat mengenai kegiatan dan kesehatan bank-bank tersebut.[431] Oleh karena itu, hampir sepanjang dekade 1950-an, BI lebih banyak berperan sebagai bank sirkulasi dan bank komersial daripada sebagai bank sentral. Hal itulah yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan undang-undang tersebut sebagai sebuah upaya menuju ke arah perbaikan terutama dari segi kelembagaan. Terkait dengan PP tersebut, Bank Indonesia membentuk suatu badan baru yaitu Bagian Pengawasan Urusan Kredit pada awal 1956.

Selain melakukan fungsi pengawasan, Bank Indonesia memiliki wewenang memberikan kredit. Adapun kredit yang disalurkan oleh Bank

429 Tim Penulis (2005: 187).

430 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955; Arsip Koleksi Bank Indonesia.

431 Darsono, dkk., (2016: 243).

Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni kredit bank sentral dan kredit bank umum. Kredit bank umum adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank umum milik pemerintah maupun swasta. Sementara kredit bank sentral dibagi lagi menjadi dua yaitu kredit langsung dan kredit likuiditas. Seperti telah disebutkan, kredit langsung pada dasarnya adalah kredit yang diberikan langsung oleh bank sentral kepada nasabah bukan-bank, seperti perusahaan negara dan badan pemerintah atau semi-pemerintah. Sementara itu, kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan bank sentral pada lembaga perkreditan, misalnya bank milik pemerintah ataupun partikelir.

Jumlah pemberian kredit bank sentral dan bank umum pemerintah terus menunjukkan peningkatan. Pada 1961, misalnya, sebesar 120.480 juta rupiah, meningkat menjadi 2.279.352 juta rupiah pada 1965, dan terus bertambah menjadi 4.086.000 juta rupiah pada 1966. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari derasnya laju inflasi dan penambahan uang kertas yang diedarkan.[432]

Menurut Laporan Tahun Pembukuan Bank Indonesia yang diterbitkan tahun 1953–1960, kredit langsung kepada lembaga nonbank paling banyak diberikan kepada perusahaan perdagangan dan industri, terutama industri perkebunan. Sementara itu pada tingkat kantor cabang, pemberian kredit dari Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar terbesar diberikan kepada perusahaan bukan-bank untuk membantu pengembangan usaha dari perusahaan tersebut.

Selain melakukan pemberian dan pengawasan kredit, Bank Indonesia bersama-sama Pemerintah membuat kebijakan terkait dengan bank pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh daerah pada era 1960-an, Bank Pembangunan Indonesia bertugas membiayai Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pemerintah menetapkan agar di setiap daerah tingkat I didirikan bank pembangunan daerah (BPD) yang dimiliki bersama oleh pemerintah daerah dan swasta. Bank pembangunan daerah diberi tugas membiayai proyek pembangunan daerah guna melengkapi proyek pembangunan nasional dengan jalan menghimpun dan mengerahkan dana pemerintah

432 Tim Penulis (2005: 69–129).

dan masyarakat setempat. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.[433]

Agar BPD dapat melayani kebutuhan daerah dengan sebaik-baiknya, diperlukan pengembangan usaha dengan membuka kantor-kantor cabang. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Menteri Urusan Bank Sentral dalam surat keputusannya Nomor 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963 menetapkan syarat-syarat pembukaan kantor cabang dan perwakilan dan BPD antara lain sebagai berikut.

1. Bagi setiap pembukaan cabang, bank harus menyediakan modal dan atau cadangan bebas sekurang-kurangnya 20 juta rupiah.
2. BPD diwajibkan menyampaikan kepada Bank Indonesia keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mempertimbangkan pemberian izin tersebut.[434]

Konstelasi politik dalam periode dekade 1950-an yang berjalan dengan sangat dinamis, memunculkan dinamika perubahan yang sangat cepat. Dalam bidang pemerintahan, kurun waktu itu ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Sementara itu, pada pengujung dekade itu Indonesia memasuki Indonesia kepolitikan baru yang disebut Demokrasi Terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membawa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, serta mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Dalam bidang ekonomi, Presiden Sukarno menetapkan sistem 'ekonomi terpimpin' yang berlaku berlaku untuk seluruh sendi ekonomi di Indonesia, termasuk dalam dunia perbankan. Setiap lembaga ekonomi, termasuk Bank Indonesia, diwajibkan bertindak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam pidato Gubernur Bank Indonesia Mr. Soemarno pada Konferensi Pemimpin Cabang Bank Indonesia pada 14 Februari 1961 di Jakarta. Mengenai tugas

433 Tim Penulis (2005: 165).

434 Tim Penulis (2005: 166).

Bank Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, Gubernur BI antara lain menyatakan,

> *Maka terasalah adanja kebutuhan untuk menindjau kembali fungsi serta tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam alam Ekonomi Terpimpin. Sebagaimana saja njatakan, tata kerdja Bank Indonesia haruslah disesuaikan dengan suasana Ekonomi Terpimpin agar kita dapat memberikan sumbangan jang se-efisien2nja. Akan tetapi tata kerdja tersebut akan banjak tergantung kepada fungsi serta tugas jang akan dipikulkan kepada Bank Indonesia. Diharapkan bahwa tidak lama lagi akan dibentuk panitya2 untuk merumuskan kembali Undang2 Pokok Bank Indonesia dan Undang2 Induk Perbankan jang mengatur bank2 negara serta bank2 lainnja.*

Selanjutnya, dikatakan,

> *Tugas2 Bank Indonesia di masa jang akan datang dapatlah diperkirakan akan makin menitik beratkan kepada membantu Pemerintah dalam segala kegiatannja di lapangan ekonomi/moneter. Sebagaimana halja sekarang, Bank Indonesia akan lebih banjak lagi membantu dan menguruskan kepentingan2 Pemerintah maupun dengan negara2 lain.*[435]

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Gubernur Bank Sentral ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan demikian, Dewan Moneter yang dibentuk pada 1953 dengan ketua Menteri Keuangan, anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan tidak berfungsi karena bank sentral tidak lagi terpisah dari pemerintahan. Perumusan kebijakan moneter dilakukan dan dilaksanakan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pada saat itulah, Bank Indonesia tidak independen lagi terhadap pemerintah.

Hal tersebut terlihat ketika BI harus mencetak uang untuk membiayai besarnya defisit anggaran pemerintah terutama karena pengeluaran pemerintah banyak digunakan untuk menasionalisasi puluhan perusahaan Belanda. Pada saat yang sama, aksi-aksi militer memadamkan pemberontakan daerah semakin membuat pengeluaran pemerintah membengkak. Defisit anggaran juga diperbesar oleh pengeluaran untuk propaganda politik seperti perjuangan pembebasan Irian Barat dari

435 Pidato Gubernur Bank Indonesia Mr. Soemarno pada Konferensi Pemimpin Cabang Bank Indonesia, Jakarta, 14 Februari 1961. Arsip; Koleksi Bank Indonesia. Ejaan kutipan sesuai dengan aslinya.

penguasaan Belanda, konfrontasi melawan Malaysia, dan pembangunan proyek-proyek "Mercusuar" seperti Gelora Senayan untuk keperluan Asian Games dan Ganefo, Monumen Nasional, dan Gedung DPR/MPR.[436]

Sebagai akibatnya, defisit anggaran terus membengkak dari tahun ke tahun. Defisit anggaran yang pada 1955 hanya sebesar 14 persen dari total penerimaan pemerintah, pada 1965 meningkat menjadi 174 persen.[437] Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah mencetak uang yang berdampak terhadap inflasi yang semakin tinggi pada 1965. Tingkat inflasi yang tinggi berpengaruh negatif terhadap dunia perbankan, terutama bank-bank swasta, karena tingkat suku bunga riil para deposan terkikis oleh laju inflasi bahkan menjadi negatif. Keadaan itu menyebabkan terjadi pelanggaran etika, yaitu uang simpanan nasabah atau pinjaman dari Bank Indonesia diperdagangkan oleh pemilik bank di luar perbankan dengan bunga yang tinggi, atau dengan kata lain dalam perdagangan komoditas yang untungnya lebih besar. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memperketat aturan terhadap bank-bank swasta nasional baik yang bersifat pembatasan gerak maupun peningkatan permodalan.

Untuk mengurangi hiperinflasi, Presiden memerintahkan pemberlakuan kebijakan sanering berupa penurunan nilai mata uang dari 1.000 rupiah menjadi 1 (satu) rupiah. Kebijakan itu merupakan pukulan terbesar bagi dunia perbankan swasta, terutama bagi mereka yang telah sempat menyetor tambahan modal sebagai akibat dari ketentuan baru. Para nasabah juga mengalami tingkat kerugian yang sama besarnya. Maka sesungguhnya, secara psikologis, pemotongan uang ini telah mengurangi minat masyarakat terhadap bank secara drastis.[438]

Akan tetapi, semua usaha memperbaiki keadaan ekonomi dan moneter tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Akibatnya, hiperinflasi tidak terhindarkan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno. Aksi-aksi demonstrasi yang semula menuntut perbaikan ekonomi berubah menjadi tuntutan politik dan pergantian kekuasaan.

436 Dick (2002: 188).

437 Mas'oed (1989: 47).

438 Perbanas (1973: 56).

Puncaknya adalah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965, sebuah upaya perebutan kekuasaan yang sah oleh Partai Komunis Indonesia. Kudeta itu semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya kondisi ekonomi dan politik kian memburuk dan berujung pada jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno.

Dalam konsepsi Ekonomi Terpimpin, semua unsur bangsa dituntut berperan sebagai "alat perjuangan" untuk mencapai tujuan revolusi. Mengacu pada konsep tersebut, Bank Indonesia dan perbankan termasuk dalam jajaran yang dituntut berperan sebagai alat revolusi. Bank Indonesia harus menyesuaikan diri agar dapat berjalan selaras dan sesuai dengan Ekonomi Terpimpin. Untuk itu, diperlukan perubahan dan penyesuaian institusional yang kerap kali menyebabkan departemen pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya seperti Bank Indonesia mengalami kesulitan menyesuaikan diri.

Untuk memperkuat pengaruhnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 yang berisi tentang tugas dan kebijakan tata kerja Bank Indonesia. Menurut peraturan tersebut, BI harus menyesuaikan tugas dan tata kerjanya dengan amanat Presiden yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional setahun sebelumnya (1959). Dalam mempertegas tugas dan kewajiban dunia perbankan sesuai dengan amanat tersebut, maka pada 1961 Presiden membentuk Panitia Negara Perbankan yang bertugas menyusun Rancangan Undang-Undang Perbankan dan Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang berdasarkan asas-asas Ekonomi Terpimpin, bersih dari kolonialisme dan feodalisme.[439]

Di Makassar, Bank Indonesia Kantor Cabang Makassar bertugas menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Termasuk mengenai pengejawantahan amanat Presiden Sukarno terhadap kelembagaan di Bank Indonesia. Mengenai tata kelembagaan Bank Indonesia Kantor Cabang Makassar pada 1961 melakukan perubahan posisi jabatan pejabat di lembaga tersebut. Sebelumnya jabatan pada Bank Indonesia Makassar terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan

439 Tim Penulis Bank Indonesia (1965: 3).

Cabang Pengganti (Deputi), dan Pemegang Buku. Kemudian diganti menjadi Pemimpin Cabang, Kuasa Kas, dan Pemegang Buku. Perubahan kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh upaya perbaikan kelembagaan dan penerapan garis ideologi Ekonomi Terpimpin di Bank Indonesia.[440]

Dalam sebuah laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Makassar dikatakan bahwa di Makassar terdapat enam bank devisen (devisa) termasuk Bank Indonesia. Walaupun tidak disebutkan secara rinci apa saja bank-bank tersebut, dikatakan bahwa bank-bank devisen tersebut menjalankan kegiatan usaha-usaha *commercial exchange business* (kegiatan perdagangan) yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia.[441]

Telah dijelaskan bahwa De Javasche Bank merupakan bank sirkulasi dan juga sebagai bank komersial yang melakukan pemberian kredit. Pada masa awal pengalihan DJB menjadi Bank Indonesia, kegiatan tersebut terus berlangsung dengan tujuan menstimulus kegiatan perdagangan. Namun pada perkembangannya terutama setelah UUPBI 1953, semangat menjadikan Bank Indonesia sebagai sebuah bank sentral yang murni dengan melepaskan kegiatan komersial terus digalakkan. Sejalan dengan semangat itu, Bank Indonesia Makassar secara perlahan-lahan meninggalkan kegiatan komersial dengan memberikan saran kepada pejabat kantor pusat untuk memberi izin kepada bank-bank swasta memberikan kredit kepada masyarakat. Menurut Pemimpin Cabang Makassar, dengan memberikan izin pemberian kredit maka Bank Indonesia dapat berfokus pada hal-hal lain terutama yang berkaitan dengan kegiatan moneter. Ia menambahkan bahwa

> *Kami melihat kemungkinan bahwa lambat laun bagian komersil dari Bank Indonesia Makassar tiada mempunyai arti lagi sebagai bagian dari pekerdjaannja (pemberian kredit) dan bahwa berkenaan dengan kepentingan daerah lebih banjak perhatian, bantuan dan nasehat akan diharapkan oleh Pemerintah Daerah dari pada Pemimpin Tjabang Bank Indonesia Makassar.*[442]

440 Laporan Pimpinan Tjabang Makassar pada Konferensi Pemimpin Cabang Bank Indonesia, Jakarta, 14 Februari 1961. Arsip; Koleksi Bank Indonesia.

441 Laporan Pimpinan Tjabang Makassar, *ibid*.

442 Laporan Pimpinan Tjabang Makassar. Ejaan kutipan langsung sesuai dengan aslinya.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi Kota Makassar, Bank Indonesia Cabang Makassar mengusulkan membentuk organisasi yang mengurus pembelian hasil-hasil alam (hutan, laut, dan hasil bumi) dan yang kemudian mengatur penjualannya ke luar negeri. Selain itu, diusulkan membentuk cabang organisasi tersebut di luar negeri yang memiliki tenaga ahli dalam penyortiran produk dan mengurus barang-barang ekspor tersebut. Kantor di luar negeri itu bertugas menampung hasil-hasil alam yang didatangkan dari daerah untuk disalurkan ke pasar dunia setelah disortir menurut jenis dan kualitas.[443]

Dalam kancah nasional, pada 1963 Presiden Sukarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai pengejawantahan sistem Ekonomi Terpimpin. Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan pembentukan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis indonesia dengan cara terpimpin. Selain itu, muncul gagasan untuk menyatukan semua lembaga perbankan milik negara dalam satu komando yang disebut sebagai Bank Berdjoang-Bank Tunggal. Penyatuan semua lembaga perbankan negara tersebut dilakukan dengan landasan bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu alat revolusi yang bertugas untuk menegakkan amanat revolusi.

Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berjuang dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo "lolos" dari proses pengintegrasian tersebut karena Presiden Direktur BDN, J. D. Massie, dalam kedudukannya sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional, cukup punya pengaruh untuk menolak atas penyatuan BDN dengan bank lainnya. Massie beralasan bahwa kebijakan itu akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini di bawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota Menteri

443 Laporan Pimpinan Tjabang Makassar.

Keuangan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.[444] Dalam kedudukan seperti itu, Bapindo cukup kuat untuk tidak terintegrasi ke dalam BNI.

Penyatuan itu juga sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang antara lain menghendaki agar diadakan penyesuaian tugas-tugas seluruh aparatur negara dalam rangka pelaksanaan Manipol dan Pembangunan Semesta Berencana. Pada saat itu juga terdapat usaha untuk meninjau kembali UUPBI 1953 dan menyusun undang-undang pokok perbankan baru yang telah ditugaskan kepada suatu panitia khusus pada 1961.

Presiden Sukarno menganggap UUPBI tidak cocok lagi untuk era Demokrasi Terpimpin karena di dalamnya masih terkandung paham kapitalisme dan feodalisme. Bertolak dari anggapan itu, pada 1961 Presiden Sukarno membentuk suatu Panitia Negara Perbankan yang bertugas menyusun undang-undang perbankan dan undang-undang Bank Indonesia yang baru. Seperti telah disebutkan, Presiden Sukarno menegaskan bahwa Bank Indonesia dan bank-bank negara lainnya adalah alat revolusi yang berkewajiban membantu pemerintah memenangkan revolusi, antara lain dengan aktif dalam doktrin "Bank Berdjoang."[445]

Selain itu, Presiden Sukarno juga mengangkat Gubernur Bank Indonesia menjadi Menteri Urusan Bank Sentral dan memasukkannya ke dalam jajaran Kabinet Kerja. Sejak itu, Gubernur Bank Indonesia—saat itu Jusuf Muda Dalam—merangkap jabatan sebagai menteri dan kedudukan Bank Indonesia berubah menjadi aparat pemerintah. Konsekuensi atas pengangkatan itu ialah hilangnya independensi Bank Indonesia. Demikian pula dengan Dewan Moneter yang semula berfungsi sebagai badan koordinasi antara Pemerintah dan Gubernur BI dalam merumuskan kebijakan moneter, praktis tidak diperlukan lagi. Perumusan kebijakan moneter dapat dikerjakan sendiri oleh Gubernur BI yang merangkap sebagai Menteri Urusan Bank Sentral yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan hilangnya independensi Bank Indonesia,

444 Prawirohardjo dalam Esmara (ed.) (1987: 195–6).

445 Darsono, dkk. (2016: 262).

praktis lembaga ini berada di bawah kendali langsung Presiden. Atas nama revolusi, Bank Indonesia saat itu diminta bertindak sebagai kasir pemerintah.

Bank Indonesia sebagai alat revolusi harus siap membantu pemerintah dalam menangani masalah perekonomian. Arah kebijakan BI yang semula mendukung pembiayaan sektor swasta, beralih ke proyek-proyek negara yang kental dengan unsur "mercusuar." Pada waktu itu, BI bertindak sebagai "pengucur dana" untuk proyek berdana besar dan isu-isu vital lainnya. Sebagai alat revolusi, BI digunakan untuk membiayai defisit anggaran dengan cara terus mencetak uang.[446] BI tidak lagi memiliki kewenangan untuk menolak permintaan pemerintah terhadap uang muka atau kredit. Apalagi karena mekanisme hukum dan pembatasan politis yang buruk, seperti pertimbangan akan jumlah cadangan BI atau persetujuan parlemen yang tidak berlaku lagi. Sejak itu, tidak ada pilihan lain bagi Bank Indonesia selain mempertahankan politik ekspansi uang (monetisasi) untuk membiayai proyek yang hampir semuanya tidak produktif atau tak layak secara ekonomi. Akibatnya terjadi inflasi yang amat besar yakni 635 persen pada 1966.

Rangkaian keputusan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa UUPBI 1953 yang menjadi landasan operasional BI tidak lagi diindahkan oleh pemerintah itu sendiri. Sejak terbit Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1960, terjadi penyimpangan terhadap UUPBI Nomor 11 Tahun 1953. Misalnya pada ketentuan dalam menjamin kewajiban moneter dengan emas dan devisa diabaikan, begitu pula dengan batasan jumlah uang muka yang dapat diberikan kepada pemerintah. Akibatnya, baik jumlah uang muka maupun jumlah uang beredar bertambah sangat pesat. Keadaan yang demikian mengarah kepada penyimpangan berikutnya yakni larangan menerbitkan Neraca Bank Indonesia.[447] Neraca yang tidak diumumkan itu mendorong usaha-usaha spekulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Selain neraca, Bank Indonesia juga dilarang mengumumkan serta menerbitkan angka-angka statistik moneter

446 Tim Penulis (2005: 69–70).

447 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/1961 tanggal 6 Januari 1961.

maupun perbankan.[448]Akibatnya, negara tidak mempunyai akses dan rekam jejak terhadap informasi finansial pada periode tersebut (1960–65). Mengenai hal ini, Radius Prawiro berkomentar, "Masa enam tahun ketika data keuangan Indonesia tidak diumumkan merupakan sebuah tabir kebodohan yang menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang begitu banyak."[449]

Sebagai sebuah doktrin, "Bank Berdjoang" memiliki tiga program kerja pokok. Pertama, menjurus pada makroekonomi yang memiliki cakupan nasional yang diarahkan pada Pembangunan Nasional Semesta; artinya bank tidak semata-mata mementingkan mikroekonomi serta penilaian berdasarkan untung rugi dengan motif utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan memberikan kredit berdasarkan permintaan yang aman jaminannya. Kedua, menuju kepada pemberian kredit berdasarkan atas rencana produksi yang diajukan. Ketiga, bersikap dinamis-aktif terjun ke tengah-tengah kehidupan ekonomi bangsa terutama pada masa kedapatan kemacetan.

Rencana peleburan bank-bank pemerintah mulai semakin jelas ketika pada 11 April 1965 Presiden Sukarno di hadapan Sidang Umum MPRS III menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan kepada sistem Bank Tunggal. Melalui sistem tersebut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan diharapkan dapat dijalankan secara efektif, efisien dan terpimpin demi suksesnya program perjuangan pemerintah.[450]

Upaya menyatukan bank-bank milik negara baru dapat terealisasi dengan terbitnya Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa dalam rangka penyederhanaan organisasi perbankan ke arah organisasi yang bersifat tunggal, dilakukan pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan, yang akan dilakukan dengan penetapan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri

448 Laporan Tahun Pembukuan 1960–1965. Arsip; Koleksi Bank Indonesia.

449 Prawiro (1998b: 48).

450 Arsip Bank Indonesia, Mukaddimah Dokumen Konperensi Kerdja Berdikari, 4-8 Mei 1965.

Urusan Bank Sentral. Tahap pertama dari pelaksanaan penyatuan bank-bank pemerintah ke dalam suatu bank tunggal adalah pengintegrasian bank-bank pemerintah ke dalam bank sentral (Bank Indonesia). Tidak lama berselang, pemerintah menetapkan pengintegrasian Bank Koperasi Tani dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia. Menyusul pengintegrasian Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia pada 21 Juni 1965.[451]

Tahap kedua adalah penerbitan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal milik negara. Bank tunggal tersebut bernama Bank Negara Indonesia. Dalam Penjelasan Penpres Nomor 17 Tahun 1965 dikemukakan bahwa keberadaan Bank Tunggal sebagai satu-satunya bank milik negara yang menjalankan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum, dipandang lebih menjamin secara tepat terarahnya program Bank Berdjoang. Bank Tunggal juga sebagai alat revolusi dan Abdi Ampera dalam segala tingkat perjuangan penyelesaian revolusi rakyat Indonesia membangun masyarakat sosialis yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[452]

Pemilihan nama Bank Negara Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa nama itu untuk pertama kali digunakan bagi bank ciptaan Pemerintah Republik Indonesia dalam revolusi fisik sehingga merupakan nama yang lahir dan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Untuk itu nama Bank Negara Indonesia resmi dipilih sebagai nama Bank Tunggal.[453]

Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang diintegrasikan melakukan usaha dengan nama BNI Unit, yaitu:

- Kantor-kantor Bank Indonesia menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I.
- Kantor-kantor Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II.

451 Tim Penulis (2005: 39–40).

452 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Arsip; Koleksi Bank Indonesia.

453 Tim Penulis (2005: 41).

- Kantor-kantor Bank Negara Indonesia menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit III.
- Kantor-kantor Bank Umum Negara menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit IV.
- Kantor-kantor Bank Tabungan Negara menjalankan usahanya dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit V.[454]

Berdasarkan hasil penggabungan bank-bank negara ke dalam Bank Tunggal, Bank Indonesia kemudian berubah menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I yang bertindak sebagai bank sentral. Perubahan itu secara otomatis berdampak pada Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar yang kemudian menjadi Kantor Cabang BNI Unit I Makassar.

Di Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar, secara khusus belum banyak diketahui mengenai dinamika kelembagaan yang terjadi pada masa pengintegrasian tersebut. Namun jika dilihat sekilas, tidak banyak perubahan berarti dari proses penggabungan Bank Indonesia ke dalam Bank Tunggal. Satu hal yang pasti adalah bahwa implementasi perubahan kelembagaan di Kantor Cabang BNI Unit I Makassar akan menerapkan kebijakan yang datang dari pusat.

Pelaksanaan Bank Tunggal tidak berlangsung lama. Setelah dibentuk lewat penetapan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, tiga tahun kemudian, yakni pada 31 Desember 1968 lewat Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank yang tergabung dalam Bank Tunggal dikembalikan menjadi Bank Pemerintah yang berdiri sendiri-sendiri. Bank Negara Indonesia Unit I pun kembali menjadi Bank Indonesia.

454 Tim Penulis (2005: 42).

BAB VI
MENGAWAL EKONOMI SULAWESI SELATAN (1968–2016)

Bank Indonesia memiliki peran yang tidak sedikit dalam upaya pengembangan ekonomi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Bahkan hal tersebut telah jauh dilakukan sejak masa kolonial melalui kehadiran De Javasche Bank Agentschap Makassar yang telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya. Pada masa kontemporer, Bank Indonesia dihadapkan dengan segenap permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan. Bergandengan tangan dengan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia hadir untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang hadir di tengah masyarakat.

Pada bab ini akan membahas dinamika kelembagaan Bank Indonesia yang terdiri dari perubahan fungsi dan tugas hingga posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Tidak lupa akan dibahas mengenai kontribusi dan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mengawal dan meningkatkan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Pengendalian inflasi, peningkatan UMKM, dan menjaga kestabilan keuangan dan sistem pembayaran adalah segelintir tugas dan peranan Bank Indonesia pada wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, ruang lingkup temporal yang akan dibahas pada bab ini adalah pada tahun 1968 dengan adanya

Undang-undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 hingga masa paling mutakhir dari perkembangan Bank Indonesia (2016).

Evolusi Kelembagaan

Sebagaimana terjadi di negara berkembang pada umumnya, peran dan tugas sebuah bank sentral mengalami evolusi yang cukup panjang, baik dari sisi kelembagaan, tujuan maupun fungsi. Demikian pula dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang baru terbentuk pada 1953. Sebelum itu, fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi.

Perkembangan mengenai status, landasan hukum, peran, dan tugas Bank Indonesia dapat dilihat dalam matriks pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Status, Landasan Hukum dan Peran Bank Indonesia

TAHUN	STATUS	LANDASAN HUKUM	PERAN
1945–52	Bentuk formal bank sentral belum terbentuk Yang sudah terbentuk DJB dan BNI	UUD 1945 Pasal 23: BI sebagai bank sentral UU Nasionalisasi DJB	DJB dan BNI sebagai bank sirkulasi Mata uang yang beredar: Belanda, Jepang, dan ORI
1953–67	BI sebagai bank sentral RI BI bagian dari pemerintah Kebijakan oleh Dewan Moneter	UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia (merupakan pengganti DJB Wet 1922)	Tugas: stabilitas moneter; pengedaran uang; sistem pembayaran Peran: agen pembangunan; kasir pemerintah; *bankers* bank Fungsi: bank komersial
1968–98	BI sebagai bank sentral RI BI bagian dari pemerintah Peran dan Kebijakan oleh Dewan Moneter	UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral	Tugas: stabilitas nilai rupiah; mendorong kesempatan kerja Peran: agen pembangunan; kasir pemerintah; *bankers* bank. Fungsi: bukan bank komersial

Tabel 6.1.
Status, Landasan Hukum dan Peran Bank Indonesia (Lanjutan)

TAHUN	STATUS	LANDASAN HUKUM	PERAN
1998–2013	BI sebagai bank sentral RI Kedudukan independen di luar pemerintah BI sebagai otoritas moneter	UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Tujuan: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (i) terhadap barang dan jasa tecermin dari perkembangan laju inflasi; (ii) terhadap mata uang negara lain tecermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Tugas: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank.
2014–sekarang	BI sebagai bank sentral RI Kedudukan independen di luar pemerintah BI sebagai otoritas moneter	UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Tujuan: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (i) terhadap barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi; (ii) terhadap mata uang negara lain tecermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Tugas: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan Mandat mengatur dan mengawasi bank secara individual beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 1 Januari 2014

Sumber: *Simorangkir, Iskandar* (2014: 38)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus bank komersial dicabut karena peran ganda tersebut telah mengakibatkan perkembangan moneter bagi perekonomian menjadi kurang sehat. Namun BI diberi fungsi baru sebagai

agen pembangunan dalam hal ini mandat untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 peran BI sebagai agen pembangunan dihapus. Peran ganda BI—sebagai bank sentral yang harus menjaga stabilitas nilai tukar dan sebagai agen pembangunan—bisa bertolak belakang dalam mencapai misinya. Sebagai agen pembangunan, misalnya, BI tentu memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pencapaiannya sering kali diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi, dan apabila terjadi inflasi tinggi yang tidak terkendali akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi sendiri. Akan timbul kesulitan dalam penyusunan kebijakan apabila kedua target tersebut berada di bawah satu otoritas yang sama.

Kedudukan Bank Indonesia semakin dikuatkan dengan beberapa ketentuan yang mendukung sebagai berikut.

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 23D Tahun 2002 yang berbunyi "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang." Lahirnya pasal ini merupakan penguatan terhadap kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter.
2. UU No.3 Tahun 2004, yang berisi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.
3. UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU. Adapun Perpu No.2 Tahun 2009 memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort.
4. UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan

dan pengawasan perbankan. Dalam hal ini, ruang lingkup yang dilakukan oleh OJK adalah mikroprudensial sementara Bank Indonesia adalah makroprudensial (stabilitas sistem keuangan).

Sebagai perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, sebutan Kantor Bank Indonesia mengalami perubahan beberapa kali seiring dengan penyempurnaan struktur organisasi internal Bank Indonesia. Semula, kantor perwakilan itu disebut Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Ujungpandang kemudian diubah menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Ujungpandang pada 5 September 1996, dan ditetapkan menjadi salah satu dari tujuh koordinator KBI bersama Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Banjarmasin.[455] Pada 1 Januari 2000, KBI Ujungpandang diubah menjadi Kantor Bank Indonesia Makassar[456] dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan.[457] Pada 2013, Kantor Bank Indonesia Makassar kembali diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua; sedangkan wilayah koordinasinya meliputi kantor-kantor perwakilan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara.[458] Selanjutnya, pada 2016 Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI Makassar diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.[459]

Amanat yang diberikan kepada Bank Indonesia Sulawesi Selatan dalam mengawal dinamika ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut.

---

455 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 29/8/INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia.

456 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 1/24/INTERN tanggal 20 Desember 1999 tentang Struktur Organisasi Bank Indonesia.

457 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 3/21/INTERN tanggal 10 Juli 2001 tentang Wilayah Kerja Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia.

458 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 15/62/INTERN tanggal 31 Juli 2013 tentang Organisasi Kantor Perwakian Bank Indonesia Dalam Negeri.

459 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 18/13/INTERN tanggal 30 Maret 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 15/62/INTERN Perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPWDN), yang diubah dengan SE 18/81/INTERN tanggal 30 September 2016 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Negeri Kelompok A.

1. Melaksanakan fungsi *advisory* kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
2. Mendukung pelaksanaan fungsi Regional Financial Surveillance dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Melaksanakan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah.
4. Melaksanakan fungsi Pengelolaan Uang Rupiah meliputi perencanaan, pendistribusian, dan pengolahan uang, serta layanan kas.
5. Melaksanakan fungsi sistem pembayaran.
6. Melaksanakan fungsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Keuangan Inklusif.
7. Melaksanakan fungsi komunikasi kebijakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia dan Pembangunan Sulawesi Selatan

Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sebagai sebuah wilayah administrasi, Sulawesi Selatan mendapatkan status provinsi secara resmi sejak 1964. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1964. Sebelumnya, sejak tahun 1960, Sulawesi Selatan tergabung dengan Sulawesi Tenggara dalam satu provinsi dengan sebutan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.

Pada 1971, sebutan Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan diubah menjadi Ujungpandang, dan baru pada tahun 1999 nama Makassar dikembalikan menggantikan Ujungpandang. Walaupun terjadi beberapa kali pergantian nama, namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah letak strategis geografi Makassar sejak ratusan tahun telah menjadikannya sebagai area transit bagi kegiatan perdagangan

dan perhubungan untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Keberadaan pelabuhan utama yang berperan sebagai pintu gerbang perhubungan laut dalam kegiatan ekspor/impor untuk wilayah KTI, diperkuat dengan kehadiran Bandar Udara Hasanuddin untuk memperlancar kegiatan distribusi barang dan orang.

Pada awal Orde Baru, upaya pengembangan perekonomian Makassar sudah tentu diselaraskan dengan arah pengembangan ekonomi pemerintahan Orde Baru dalam membangun Indonesia pada periode pemerintahannya. Pada masa ini, stabilisasi ekonomi dan politik merupakan prioritas utama sebagai prasyarat pembangunan. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Belajar dari pengalaman masa lalu, ketika pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal, dan sistem etatisme juga tidak mampu memperbaiki keadaan, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan sistem ekonomi campuran dalam kerangka Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila.[460]

Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan holistik yang meliputi segala bidang, yang tertuang dalam delapan jalur pemerataan yaitu (1) kebutuhan pokok, (2) pendidikan dan kesehatan, (3) pembagian pendapatan, (4) kesempatan kerja, (5) kesempatan berusaha, (6) partisipasi wanita dan generasi muda, (7) penyebaran pembangunan, dan (8) peradilan. Keseluruhan kebijakan tersebut dilakukan dalam pola umum pembangunan jangka panjang lima tahunan (25–30 tahun) yang disebut Pelita—merupakan akronim Pembangunan Lima Tahun. Puncak prestasi Pelita Orde Baru membuahkan hasil ketika pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi meningkat pesat. Pemerintah berhasil menggalakkan *preventive checks* untuk menekan jumlah kelahiran lewat Program Keluarga Berencana dan pengaturan usia minimum pernikahan.[461]

460 Basri dan Munandar (2009).

461 Basri dan Munandar (2009).

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berupaya keras membenahi ekonomi Indonesia yang saat itu terpuruk. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Soeharto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, yakni mencapai 650%. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.[462] Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Presiden Soeharto membuat kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan era Presiden Sukarno. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah dengan menertibkan pos anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara Barat untuk berinvestasi di Indonesia. Prestasi ekonomi nasional di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto sungguh mendapat apresiasi dari negara-negara dunia, bahkan Bank Dunia menjadikan Indonesia sebagai negara rujukan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk memulihkan perekonomiannya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tak terlepas dari strategi diversifikasi produksi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Pada tahun 1966 produksi, lapangan kerja dan ekspor bertumpu pada sektor pertanian dan minyak bumi. Sementara sektor manufaktur kurang dari 10% dari PDB, bahkan ekspor hasil manufaktur belum ada sama sekali. Namun akhirnya hingga tahun 1996 sektor manufaktur meningkat hingga menjadi 26% dari PDB, atau setidaknya meningkat 14 kali lipat dari US$ 4,4 milyar menjadi US$ 57,33 milyar sejak masa awal Orde Baru. Pada tahun 1993 ekspor dari sektor manufaktur, konstruksi, dan tambang mencapai 53% dari keseluruhan total ekspor nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang mantap pada masa Orde Baru dengan rata-rata di atas 7% setiap tahunnya menjadikan Indonesia surga bagi investor untuk menanam modalnya di Indonesia. Kebijakan investasi ini juga dilakukan Presiden Soeharto dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi Bangsa Indonesia, antara lain dengan kebijakan *Foreign Direct Investment*, yang berarti investor-investor asing dapat langsung menanamkan modalnya pada sektor-sektor manufaktur

462 Basri dan Munandar (2009: 23).

dengan tujuan alih teknologi sehingga dalam jangka waktu tertentu kepemilikan perusahaan itu beralih menjadi Badan Usaha Milik Negara, bukan justru privatisasi di mana usaha milik negara dijual kepada pemilik modal.

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I yang dimulai 1 April 1969, pemerintah pusat mengeluarkan banyak paket bantuan pembangunan. Terdapat tujuh jenis bantuan/subsidi yang diberikan kepada daerah, seperti; Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Subsidi Daerah Tingkat II, alokasi dana APBN melalui Daftar Isian Proyek (DIP) sektoral, Inpres Bantuan Desa, Inpres Daerah Tingkat II, Inpres Pembangunan Sekolah Dasar (Inpres SD), dan Inpres Pembangunan Jalan Kabupaten (IPJK).[463]

Kebijakan utama pengembangan ekonomi di KTI pada masa awal Orde Baru adalah menjadikan Kota Makassar sebagai pusat perekonomian kawasan dengan menggalakkan pengembangan industri skala kecil dan menengah yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di KTI. Saat memasuki Pelita I, Sulawesi Selatan termasuk daerah di luar Jawa yang memiliki kesiapan dan potensi memadai. Kekayaan alam, kedinamisan masyarakatnya, serta letaknya yang menguntungkan sebagai pintu gerbang bagi KTI memungkinkan daerah ini membangun basis ekonomi yang kuat. Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam mencapai swasembada pangan sejak Pelita I memberikan bukti bahwa wilayah ini memiliki areal pertanian yang cukup luas dan subur yang dapat berperan sebagai lumbung pangan KTI.

Pada 1990, Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Amiruddin menyatakan bahwa dalam pembangunan tidak berarti semua dapat dibangun sekaligus karena ada suatu daerah yang terus berkembang, yang lama kelamaan menyebabkan daerah lainnya yang jauh ikut berkembang. Amiruddin menyampaikan tentang kesiapan Sulawesi Selatan menjadi gerbang dan pusat pengembangan bagi KTI.[464] Kondisi geografi alam KTI yang sulit dicapai dengan transportasi darat biasa, mendorong perhubungan udara dan laut mendesak dikembangkan. Sulawesi

463 S. Sjamsuddin (1991).

464 S. Sjamsuddin, (1991:704).

Selatan, terutama Ujungpandang memiliki infrastruktur yang memadai dibandingkan daerah lainnya di KTI. Besarnya perhatian pemerintah pusat pada pembangunan KTI merupakan tantangan dan peluang bagi Sulawesi Selatan, karena harus mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin untuk pembangunan jangka panjang.

Kemajuan pembangunan di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita masyarakatnya. Pada 1971, pendapatan per kapita masyarakat hanya 23.100 rupiah/tahun berturut-turut naik menjadi 260.828 rupiah /tahun pada 1983, dan menjadi 538.132 rupiah/ tahun pada 1989 atas dasar harga berlaku.[465] Di sisi lain PDRB atas dasar harga berlaku pada periode yang sama meningkat pesat dari 119,7 miliar rupiah, menjadi 1.751,6 miliar rupiah dan meningkat lagi menjadi 3.735,7 miliar rupiah. Berarti selama periode 1971–89, PDRB Sulawesi Selatan meningkat sebesar 30 kali lipat lebih. Dari segi pertumbuhan per kapita dan PDRB selama kurun waktu tersebut, Sulawesi Selatan menjadi yang terdepan di seluruh wilayah KTI.

Tabel 6.2.
Perkembangan PDRB Kapita
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
1983–89

TAHUN	HARGA KONSTAN (MILIAR RUPIAH)	HARGA BERLAKU (MILIAN RUPIAH)
1983	260.828	260.828
1984	270.937	298.017
1985	289.546	342.087
1986	306.765	382.188
1987	315.615	418.086
1988	342.311	477.911
1989	362.632	538.132
% pertumbuhan	5,66	12,85

Sumber: BPS (1991).

Hal penting yang terjadi pada perekonomian Sulawesi Selatan pasca periode 1960-an adalah terjadi pergeseran sektor ekonomi yang

465 *Profil Provinsi Republik Indonesia: Sulawesi Selatan* (1993: 176).

sebelumnya pada masa kolonial perekonomian Makassar dan sekitarnya amat bertumpu pada sektor industri terutama kopra. Namun akibat dari hancurnya ekonomi kopra pasca Perang Dunia II dan ketidakmampuan industri ini untuk bangkit kembali, maka terjadi pergeseran ekonomi ke sektor pertanian. Pada kurun waktu 1971–89, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dimotori oleh sektor pertanian, dengan kontribusi tertinggi di atas 50 persen terjadi pada 1971 dan 1976.

Namun pada tahun-tahun berikutnya (1983–89) angka kontribusi tidak pernah mencapai kembali setinggi itu atau rata-rata hanya mencapai 44,2 persen. Meskipun secara persentase kecenderungan kontribusi sektor pertanian menurun, tetapi secara nominal kapasitasnya terus meningkat. Pada 1971, PDRB pertanian hanya mencapai 64,887 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 1.629,819 miliar rupiah pada 1989. Laju pertumbuhan sektor pertanian selama 1969–73 tercatat 5,1 persen per tahun (atas dasar harga konstan 1969) dan untuk periode 1975–82 sebesar 4,8 persen (atas dasar harga konstan 1975).[466]

Tabel 6.3.
Perkembangan Distribusi Sektor Pertanian Sulawesi Selatan dalam Pembentukan PDRB 1971, 1976 dan 1983–89

TAHUN	DISTRIBUSI (MILIAR RUPIAH)		TOTAL PDRB
	RUPIAH	PERSENTASE	
1971	64,877	54,2	119,7
1976	(*)	53,8	(*)
1983	778,703	44,4	1.751,6
1984	907,519	45,1	2.012,4
1985	1.037,074	44,6	2.322,8
1986	1.183,744	45,4	2.609,4
1987	1.226,038	42,7	2.870,3
1988	1.440,446	43,6	3.299,3
1989	1.629,819	43,6	3.735,7

Sumber: Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia, BPS (berbagai tahun terbitan); tanda (*) belum diperoleh data.

466 *Profil Provinsi Republik Indonesia: Sulawesi Selatan* (1993: 178).

Laju pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yaitu kelompok pertambangan, industri, listrik, gas, air minum, rata-rata mencapai 17,5 persen per tahun pada periode 1969–73, kemudian 13,4 persen pada 1975–82, dan 17,4 persen pada 1983–89. Sementara itu, sektor jasa mengalami laju pertumbuhan rata-rata 11,6 persen per tahun pada periode 1969–73, kemudian menurun 8,3 persen pada 1975–82, dan menanjak kembali 14 persen pada 1983–89. Kenaikan yang cukup tinggi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan di kedua sektor tersebut sudah berjalan dengan baik.

Pada dekade 1990–2000, daerah-daerah yang menjadi penyumbang PDRB terbesar adalah Kota Makassar, Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Pinrang, dan Pangkep, dengan menyumbang rata-rata 4,18 persen terhadap PDRB. Pada dekade selanjutnya, yakni 2001–11, ketujuh kabupaten/kota tersebut masih merupakan penyumbang terbesar bahkan semakin memantapkan andilnya menjadi 6,72 persen terhadap pembentukan PDRB.[467]

Sementara itu, struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada masa pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001–06 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian terhadap ekonomi masih cukup besar yakni rata-rata 33,54 persen, walaupun sedikit menurun selama 2004–05 menjadi rata-rata 31,58 persen. Tingginya peranan ini khususnya ditopang oleh subsektor tanaman bahan makanan dengan kontribusi rata-rata 14,74 persen. Selain pertanian, sektor lain yang mempunyai kontribusi besar adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa yang masing-masing menyumbang 13,72 persen; 15,15 persen; dan 11 persen terhadap pembentukan total PDRB. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai kontribusi yang paling kecil yakni hanya sekitar 1,05 persen.

Dalam bidang pertumbuhan ekonomi, walaupun secara umum pembangunan di KTI masih tertinggal dari kawasan barat Indonesia, namun data 1993 memperlihatkan rata-rata laju pertumbuhan 13 provinsi di KTI adalah 8,5 persen, di atas nasional yang 7,7 persen. Pertumbuhan

467 BPS, *Sulawesi Selatan dalam Angka 1990–2011*.

ekonomi dan nonekonomi yang paling seimbang di Indonesia pun terdapat di KTI. Salah satu contoh adalah Sulawesi Utara yang memiliki tingkat pertumbuhan mencapai 8,4 persen sehingga dengan penuh optimisme wilayah itu dianggap mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah barat Indonesia.[468]

Sesuai dengan kondisi ekonomi dan kewilayahan KTI, pengembangan industri besar seperti yang dilakukan pemerintah kolonial dengan mendorong pertumbuhan industri kopra dirasa tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya infrastruktur yang kokoh yang mampu menopang industri tersebut, sementara itu infrastruktur yang ada saat ini merupakan warisan kolonial yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Hingga kemudian dirasa industri skala kecil dan menengah dianggap paling sesuai, dan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi KTI. Untuk mempertahankan pertumbuhan itu, dalam lima hingga sepuluh tahun, pengembangan industri ini perlu mendapat prioritas. Apalagi infrastruktur penunjang transportasi laut di KTI masih kurang sehingga perlu alternatif biaya transportasi yang lebih murah. Sambil mendorong industri kecil dan menengah, infrastruktur pun perlahan-lahan dibenahi.[469]

Untuk mengembangkan ekonomi di KTI, dalam suatu pertemuan dialogis antara pemerintah, perbankan dan pelaku usaha di KTI di Makassar pada 10 September 2001 disepakati empat bidang pembangunan, yaitu infrastruktur, tenaga kerja, sumber daya alam, dan keuangan. Kesepakatan itu menjadi rencana aksi seluruh pemangku kepentingan untuk dilaksanakan dan dievaluasi realisasinya setiap tiga bulan oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dan Kamar Dagang Indonesia ataupun seluruh Kamar Dagang Daerah di KTI.

Dalam upaya ini, Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang memberikan perhatian khusus dalam pembangunan perekonomian KTI dengan menjadikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kota Makassar sebagai kantor koordinator

468 *Kompas*, 2 Agustus 1996.

469 *Kompas*, 2 Agustus 1996.

untuk Kantor-kantor Perwakilan Bank Indonesia lainnya di wilayah Indonesia Timur. Kantor koordinator ini memiliki wilayah kerja meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua; sedangkan wilayah koordinasinya meliputi kantor-kantor perwakilan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara.[470]

Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi, terutama jalan darat, diprioritaskan peningkatan kapasitasnya dari 6–8 ton menjadi sepuluh ton. Di KTI setidaknya terdapat 10.000 kilometer dari 26.000 kilometer jalan nasional yang harus ditingkatkan kapasitasnya. Berhubung dengan itu, KTI memperoleh pinjaman tahun jamak dari Bank Dunia sebesar 2,2 triliun rupiah.[471]

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Tahunan 2003, dikucurkan dana sebesar 3,3 triliun rupiah untuk seluruh sektor permukiman dan prasarana wilayah termasuk jalan. Dana yang dikucurkan tersebut sebagian untuk KTI, dan sebagian lagi untuk KBI. Bahkan pada September 2004 Bank Dunia membuka kantor penghubung lembaga keuangan internasional untuk KTI di Makassar, yakni *Support Office for Eastern Indonesia*. Kantor penghubung Bank Dunia itu diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan negara donor dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia ataupun donatur.[472]

Dalam perannya sebagai *strategic advisor* Pemerintah Daerah, Bank Indonesia selalu berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sulawesi Selatan sebagai penggerak KTI diyakini akan menjadi tumpuan ekonomi Indonesia masa depan, sebagai simpul penting penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, kesadaran akan risiko dan potensi pengembangan harus terus dibangun. Pada 22 Oktober

470 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran 15/62/INTERN tanggal 31 Juli 2013 tentang Organisasi Kantor Perwakian Bank Indonesia Dalam Negeri.

471 *Kompas*, 11 September 2002.

472 *Kompas*, 5 Agustus 2004.

2012, Bank Indonesia menggelar diskusi kelompok terfokus dengan topik 'Pengembangan Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Industri'. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anwar Nasution, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan dan KTI merupakan daerah yang sangat kaya dan memiliki hampir semua jenis hasil pertanian, perikanan dan pertambangan, tetapi belum berhasil mengolah sumber hasil alamnya untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Bila dibandingkan dengan Malaysia yang pada zaman kolonial "hanya" berupa kebun karet, lada, tambang timah dan minyak bumi, kini menjadi produsen dan eksportir komponen suku cadang alat-alat elektronik. Sumber daya alamnya sudah diolah, dan menjadi pusat pendidikan dan perawatan kesehatan bagi penduduk sekitarnya termasuk dari KTI.

Pengembangan kawasan industri di Jepang, Cina, Malaysia, Thailand dan Filipina telah menjadikan negara-negara itu bagian dari 'mata rantai pemasok' (*supply chain*) regional dan global. Apabila Sulawesi Selatan ingin berperan serupa itu tentu harus mulai berbenah secara serius. Perlu dipikirkan sejak awal agar industri yang akan tumbuh dan dikembangkan di kawasan tersebut harus dapat mendukung usaha lokal yang sudah ada. Forum bersepakat menindaklanjuti hasil diskusi dengan membentuk kelompok kerja untuk memberi masukan yang lebih konkret kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat mengenai pengembangan Sulawesi Selatan, khususnya Makassar sebagai kawasan industri, untuk diusulkan sebagai proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).[473]

Koordinasi dalam Mengawal Inflasi

Merupakan tugas bank sentral untuk mengawal inflasi karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tantangan, karena dari hasil penelitian menyatakan bahwa karakteristik inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh sisi penawaran (*supply*), antara lain berkenaan

473 Bank Indonesia (2012).

dengan gangguan produksi, distribusi ataupun kebijakan pemerintah. Padahal bank sentral hanya dapat mengelola sumber tekanan inflasi Indonesia yang berasal dari sisi permintaan (*demand*), melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi, antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dengan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, diharapkan tujuan inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di tingkat pusat (TPI) sejak 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di tingkat daerah (TPID) pada 2008. Kegiatan TPI difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dalam skala nasional, terutama dengan memfasilitasi koordinasi kebijakan yang mencakup kebijakan fiskal (subsidi, belanja infrastruktur, dan lain-lain), kebijakan moneter (antara lain manajemen likuditas untuk mengatur sisi permintaan, kebijakan stabilisasi nilai tukar), dan kebijakan sektoral.

Sementara itu, kegiatan TPID difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga kecukupan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (*supply shocks*) yang dapat menganggu pasokan dan distribusi. Kegiatan TPID juga diarahkan untuk meminimalkan dampak kebijakan *administered prices* (harga barang/jasa yang diatur pemerintah) dan kebijakan lain yang berpotensi memicu inflasi seperti kebijakan konversi energi. TPID merupakan tim yang pada umumnya beranggotakan instansi Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian dan Dinas terkait), Badan Urusan Logistik, Biro Pusat Statistik dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri. Bahkan di beberapa daerah juga menyertakan pihak kepolisian, Pertamina, dan pengelola pasar milik Pemerintah Daerah.

Sebagai Kantor Koordinator Wilayah, BI Sulawesi Selatan pada 7 Maret 2011 mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar-TPID di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), serta merumuskan solusi terhadap masalah inflasi komoditas pangan di daerah-daerah tersebut. Rapat Koordinasi dibuka oleh Deputi Gubernur BI saat itu, Ardhayadi Mitroatmodjo, dengan mengangkat tema 'Stabilisasi Harga Komoditas

Pangan Strategis Melalui Penanganan Masalah Pasokan, Distribusi, dan Struktur Pasar di Wilayah Sulampua'. Secara umum inflasi tahunan Sulampua pada 2010 tercatat 6,40 persen, lebih rendah daripada nasional sebesar 6,96 persen, yang disebabkan oleh komponen *volatile food*, sebagian besar berasal dari kenaikan harga kelompok bahan makanan antara lain beras, gula pasir, telur, dan bawang merah.[474]

Rapat Koordinasi Wilayah ini menghasilkan 'Deklarasi Kendari' berupa kesepakatan untuk pengendalian inflasi dan rekomendasi kepada pemerintah Pusat, yang terdiri dari enam langkah bersama sebagai berikut.

1. Optimalisasi pencatatan harga, pemantauan persediaan dan pasokan melalui koordinasi perdagangan antardaerah;
2. Penerapan Sistem Resi Gudang;
3. Gerakan bersama optimalisasi pemanfaatan lahan;
4. Gerakan dan sosialisasi diversifikasi pangan nonberas;
5. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dan mengambil keuntungan secara tidak wajar; dan
6. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pengaruh konsumsi berlebihan terhadap peningkatan inflasi.

Selain itu dihasilkan tiga rekomendasi yang disampaikan kepada Rapat Koordinasi Nasional TPID yang diadakan pada 16–17 Maret 2011. Ketiga rekomendasi itu adalah (1) Optimalisasi distribusi benih dan pupuk untuk petani; (2) Menata kembali tata niaga gula, dan (3) Percepatan pengaturan jalur pelayaran, bongkar muat di pelabuhan, dan penerbangan guna memperlancar distribusi.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013, membawa implikasi pada pembentukan TPID Kabupaten/Kota yang semakin masif di seluruh daerah. Di provinsi Sulawesi Selatan, hingga akhir triwulan II 2014 telah terbentuk 22 TPID Kabupaten/Kota dari total 24 kabupaten/kota seluruh Sulawesi Selatan. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bank

474 Website internal BLINK, artikel "Deklarasi Kendari : Kesepakatan TPID Se-Sulampua dalam Pengendalian Inflasi", 10 Maret 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Indonesia berinisiatif membagi TPID Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Selatan menjadi lima zona atas dasar kota inflasi, lokasi antar-TPID, dan keseimbangan sebaran wilayah administratif. Kelima zona tersebut adalah Makassar, Parepare, Palopo, Watampone, dan Bulukumba.

Pada 14 April 2014 dilakukan Rapat Koordinasi Wilayah TPID Sulampua I. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan TPID Sulampua tampak dari inflasi Sulampua 6,64 persen (yoy) yang lebih rendah daripada inflasi nasional 7,32 persen (yoy) per Maret 2014. Tantangan jangka pendek yang dihadapi TPID adalah kenaikan harga yang diatur pemerintah dan anomali iklim *El Nino* yang berpotensi menurunkan produksi padi dan meningkatkan harga beras. Sedangkan tantangan jangka panjang salah satunya adalah ketergantungan pasokan beberapa produk pangan dari daerah lain, luas wilayah dan geografis kepulauan Sulampua yang belum didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai, serta distribusi bahan pangan yang masih dikuasai oleh segelintir pedagang besar. Pada pertemuan itu juga sekaligus diluncurkan *tagline* 'Meningkatkan Sinergi Menekan Inflasi' sebagai upaya internalisasi kegiatan TPID Sulampua.[475]

Hambatan di bidang logistik merupakan salah satu penyebab tekanan inflasi terbesar di wilayah Indonesia Timur. Permasalahan logistik telah mengakibatkan harga barang menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat, dan hal itu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang menjadi jauh di bawah rata-rata Indonesia. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi isu sentral pada Rapat Koordinasi Wilayah TPID Sulampua II yang diselenggarakan di Palu, 14 Mei 2014. Dalam rapat itu turut hadir Kementrian Perhubungan dan PT Pelindo IV sebagai operator utama pelabuhan di wilayah Sulampua.[476]

Kondisi logistik kelautan di wilayah Sulampua yang terdiri atas pulau-pulau memiliki masalah ketidakseimbangan muatan, dimana muatan dari wilayah timur ke wilayah barat relatif rendah dibandingkan arah sebaliknya. Kapal yang digunakan pada umumnya berkapasitas kecil sehingga nilai ekonomisnya berkurang, biaya investasi pembangunan infrastruktur yang

475 Website internal BLINK, artikel "*Kick Off Tagline* TPID Sulampua : Meningkatkan Sinergi Menekan Inflasi", 14 April 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

476 Website internal BLINK, artikel "Mengurai Permasalahan Logistik: Isu Mendasar Wilayah Indonesia Timur", 13 Mei 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

tinggi, profit yang relatif kecil sehingga kurang menarik bagi investor, serta waktu tunggu kapal di pelabuhan yang lama. Selain itu, di kawasan timur, terdapat banyak angkutan peti kemas yang membutuhkan *trailer* panjang sehingga muatan harus dibongkar terlebih dulu di dalam pelabuhan dalam wujud kargo. Pelindo IV menyampaikan rencana pengembangan dalam *transshipment service*, yakni mengurangi jumlah muatan yang transit di Jakarta dan Surabaya dengan mengalihkan ke pelabuhan di Makassar, Bitung dan Ambon, dan meningkatkan fasilitas pelayanan bagi lebih banyak kapal, dan menambah kapasitas dermaga. Sebagai berita baik adalah terselenggaranya pelayaran langsung dari Bitung ke Malaysia. Sementara Kementerian Perhubungan akan mendorong pengangkutan sapi antarpulau.

Beberapa pemetaan masalah hasil Rapat Koordinasi Wilayah TPID tersebut adalah (1) pengiriman barang dari Makassar ke Singapura dilakukan secara langsung; (2) pengkajian pembangunan pelabuhan dan transportasi angkutan laut di Sulampua sebaiknya dilihat dari sisi ekonomi, dan pertimbangan keuntungan jangan menjadi prioritas; (3) meminta perhatian Pelindo untuk melakukan investasi di KTI; (4) dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, peran Balai Karantina perlu ditingkatkan untuk menghindari pemberlakuan hambatan nontarif (*technical barriers*) dari negara lain sehingga produk Indonesia dapat diterima; (5) mendorong agar tidak ada monopoli dalam biaya TKBM sebagai salah satu sumber biaya tinggi di pelabuhan; serta (6) meminta dukungan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur KTI, diharapkan mendorong terciptanya jalur kereta api di Sulawesi untuk mengurangi ketergantungan terhadap angkutan laut, serta integrasi moda transportasi yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, sejak terbentuk TPID, koordinasi yang lebih intensif selalu digelar. Sebagai contoh, untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menghadapi puasa, lebaran, dan pemilihan presiden (2014). Gubernur Sulawesi Selatan mengarahkan agar dilakukan koordinasi pelaku usaha/asosiasi; aktif melakukan kunjungan ke pasar tradisional/gudang pengecer/ sentra distribusi; mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga kebutuhan pokok; menyiapkan jalur distribusi alternatif apabila ada hambatan transportasi, menyelenggarakan

pasar murah minimal 2-3 kali, dan mengintensifkan posko kebutuhan pokok dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat.[477]

Dalam implementasi pengendalian inflasi, stigma Bank Sentral sebagai lembaga yang berdiri di "menara gading" secara perlahan mulai terkikis. Inflasi tidak hanya dipaparkan sebagai teori di kalangan akademis, namun telah digantikan dengan langkah praktis dan dinamis atau dikenal dengan *policy implementation*. Inflasi juga diperkenalkan dengan cara *blusukan* atau "turun ke bawah" sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia menjelang hari besar keagamaan dengan mengadakan inspeksi mendadak. Bank Indonesia berkepentingan untuk mengetahui secara langsung terjaminnya pasokan barang dalam rangka tugas pengendalian dari sisi permintaan (moneter), misalnya dalam hal perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan dan penukaran uang. Koordinasi pengendalian inflasi terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan merupakan sebuah langkah penting, karena sesuai polanya tekanan inflasi akan meningkat pada bulan-bulan tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain mengarahkan ekspektasi masyarakat melalui siaran pers, kerja sama dengan pemuka agama, dan kerja sama antardaerah surplus dan defisit, serta pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan perkembangan harga. Hanya dengan kesepahaman bersama maka inflasi yang rendah dan stabil dapat dicapai.[478]

Langkah-langkah preventif TPID dalam mengendalikan inflasi pada akhirnya memberi hasil positif. Sebagai contoh, inflasi pada Juli 2014 (termasuk Idul Fitri) hanya berkisar 1,17 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Ramadhan tiga tahun terakhir. Dalam diskusi pada *High Level Meeting* TPID se-Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 2014 di Makassar, mengemuka beberapa langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga selama Ramadhan/Idul Fitri. Antara lain: (1) pasokan ayam yang minim di Kota Palopo dikendalikan dengan cara "gerakan seribu ayam" atau menyediakan stok untuk mengimbangi permintaan masyarakat; (2) Dinas Pertanian Provinsi Sulsel mendorong kelompok tani agar menanam komoditas penyumbang inflasi yang tinggi, setidaknya

477 Bank Indonesia (2014: 38).

478 Website internal BLINK, artikel "Blusukan Ala Bank Sentral", 16 Juli 2013, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

tiga bulan sebelum Ramadhan; (3) TPID, perbankan, dan BUMN/BUMD melakukan kegiatan Pasar Murah di beberapa daerah di Sulawesi Selatan; (4) KPPU yang baru terlibat dalam TPID Sulawesi Selatan ikut serta mengawasi pergerakan harga-harga pupuk, daging sapi dan ayam, dan bahan bangunan. Perusahaan besar yang terlibat dalam upaya-upaya kartel langsung dikenai teguran dan tindakan hukum; dan (5) perlu koordinasi dan kesadaran yang lebih intensif lintas instansi melalui Sistem Informasi Harga Pangan.[479]

Untuk menjaga semangat kebersamaan dalam mengawal inflasi, TPID Sulawesi Selatan menciptakan *tagline* yang dikenal dengan akronim 'Sop Konro'—diambil dari nama salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Akronim itu mengandung arti: (1) Stok pangan yang selalu tersedia sesuai kebutuhan; (2) Operasi pasar dan inspeksi mendadak pasar; (3) Pemantauan harga dan pasokan secara rutin; (4) Koordinasi, komunikasi dan kerja sama antardaerah; (5) Realisasi anggaran APBD yang mendukung program ketahanan pangan; dan (6) Optimalisasi peran TPID dalam pengendalian inflasi.[480]

Koordinasi erat antar-TPID sangat diperlukan dalam hal manajemen pasokan komoditas karena harga komoditas di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh harga komoditas atau persoalan lain yang terjadi di wilayah sekitarnya. Kondisi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah sentra penghasil pertanian—tanaman bahan makanan, perikanan, dan peternakan—justru sering mengalami inflasi yang dipicu oleh komoditas sektor pertanian tersebut. Hal itu antara lain disebabkan oleh banyaknya komoditas pertanian Sulawesi Selatan yang dikirim keluar daerah. Sentra pertanian di wilayah itu juga menyebar ke berbagai kabupaten/kota sehingga tidak ada daerah yang secara mandiri dapat mencukupi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang perlu peningkatan dan penguatan kerja sama antar-TPID ataupun antardaerah (kabupaten/kota) di Sulawesi Selatan sebagai wujud konsistensi dalam menjaga kelancaran distribusi dan diversifikasi pangan. Sebagai contoh

479 Website internal BLINK, artikel "Lawan Kartel Komoditi Penyebab Inflasi bersama KPPU – Era Baru TPID Sulsel", 14 Agustus 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

480 Website internal BLINK, artikel "Bambang Kusmiarso Resmi Gantikan Wiwiek SW sebagai Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan", 8 Juni 2017, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

Kabupaten Bulukumba sebagai penghasil beras dan perikanan ternyata masih tergantung terhadap daerah lain dalam beberapa komoditas seperti telur dan sayur.

Di Sulawesi Selatan, komoditas penyumbang inflasi yang termasuk dalam kelompok *volatile food* selama empat tahun terakhir (2011–15) antara lain beras, ikan bandeng, daging sapi, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, ikan cakalang, ikan layang, telur ayam ras dan wortel. Sebagai upaya peningkatan produktivitas pangan, Bank Indonesia Sulawesi Selatan berupaya mengembangkan beberapa program dalam bentuk klaster ketahanan pangan, yang sekaligus dikaitkan dengan pemberdayaan UMKM.

Bank Indonesia Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Klaster Cabai di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, pada 2011. Berdasar nota kesepahaman pengembangan klaster cabai dengan Bupati Maros, dan bekerja sama dengan instansi terkait, dilakukan pelatihan *Good Agribusiness Practices* (GAP) Budidaya Cabai terhadap calon pemandu lapangan yang akan menjadi agen perubahan untuk membina kelompok petani cabai. BI Sulawesi Selatan juga membuka Sekolah Lapang bagi para petani cabai yang berlangsung sekitar tiga bulan di 15 lokasi dengan total peserta 214 petani. Penerapan metode GAP dirasa penting sejalan dengan tuntutan pasar, baik lokal maupun internasional akan produk yang bermutu baik, aman, dan ramah lingkungan.[481]

Perhatian terhadap pengembangan ketahanan pangan juga dilakukan terhadap klaster peternakan sapi. Pada 10 September 2012, Bank Indonesia Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman pengembangan klaster sapi bersama Bupati Barru. Selain mempersiapkan pelaku usaha dan UMKM agar lebih mudah memperoleh akses ke perbankan, pengembangan klaster sapi mendorong Kabupaten Barru menjadi penghasil sapi Bali untuk menunjang swasembada daging sapi yang berkualitas tinggi baik secara regional maupun nasional. Sebagai langkah awal program, kepada petani yang tergabung dalam kelompok

481 Website internal BLINK, artikel "TOT Gap Budidaya Cabai, Langkah Awal Pengembangan Klaster Cabai di Kab. Maros, Sulsel", 6 Juli 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

tani Sipurennue Kabupaten Barru diberikan pelatihan dan kunjungan belajar ke binaan Dinas Peternakan Kabupaten Pinrang yang telah mengembangkan peternakan dengan konsep "pengelolaan usaha ternak tanpa limbah" atau *zero waste* yang telah menerima penghargaan nasional.[482]

Pengendalian inflasi di setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, dan menjadi tugas TPID untuk melakukan identifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya. Sebagai contoh TPID Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dan monitoring ke TPID Zona Bulukumba yang terdiri dari TPID Kabupaten Bulukumba, TPID Kabupaten Bantaeng, TPID Kabupaten Jeneponto, dan TPID Kabupaten Selayar. Zona Bulukumba dipilih karena Bulukumba sebagai kota inflasi yang baru terbentuk pada 2014 mengalami inflasi tinggi yang mencapai 14,5 persen (yoy) hingga Mei 2014. Koordinasi seluruh Zona Bulukumba (12 Juni 2014), dipimpin langsung oleh Bupati Bulukumba, H. Zainuddin Hasan dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Causa Iman Karana, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai yang telah meraih penghargaan sebagai TPID Berprestasi Tahun 2013 yang dikukuhkan pada Rapat Koordinasi V TPI 2014 di Jakarta.[483]

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Bulukumba terkendala oleh faktor-faktor nonstruktural yang berlangsung secara persisten. Komoditas perikanan tergantung pada penentuan harga jual dan lokasi penjualan oleh nelayan pemilik kapal atau punggawa. Kuatnya jaringan punggawa mendorong pengentasan masalah kemiskinan nelayan penggarap mengalami kendala. Punggawa lebih *bankable* sehingga kredit perbankan justru disalurkan kepada punggawa, bukan nelayan penggarap. Secara paralel pada waktu yang bersamaan diselenggarakan Edukasi Keuangan dan Gerakan Indonesia Menabung kepada petugas penyuluh lapangan dan kelompok tani/nelayan Kabupaten Bulukumba.

---

482 Website internal BLINK, artikel "Bersinergi Mendorong Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Klaster Sapi Bali di Barru", 04 Oktober 2012, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

483 Website internal BLINK, artikel "TPID se-Sulsel : Koordinasi dan Koordinasi", 18 Juni 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Dalam perkembangan selanjutnya, berkat koordinasi tindak lanjut dalam langkah-langkah pengendalian inflasi dan dikawal dengan ketat capaiannya, Zona Bulukumba menunjukkan prestasi dengan tren penurunan inflasi bahkan pernah tercatat menjadi kedua yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2016.

Tabel 6.4.
Inflasi Tingkat Provinsi dan Kota di Sulawesi Selatan 2011–16
(dalam persen)

WILAYAH INFLASI	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bulukumba	-	-	-	9.45	2.17	1.49
Watampone	3.94	3.65	6.86	8.22	0.97	1.48
Kota Makassar	2.87	4.57	6.24	8.51	5.18	3.15
Kota Pare-pare	1.6	3.49	6.31	9.38	1.58	2.13
Kota Palopo	3.35	4.11	5.25	8.95	3.38	2.91
Sulawesi Selatan	-	-	6.11	8.32	4.41	3.32

Sumber : Diolah dari BPS (2011–16).

Dengan inflasi yang terkendali maka daya beli masyarakat akan terjaga sehingga tingkat kemiskinan akan menurun, hal itulah sebagai tujuan akhir yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pada 2014, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 9,54 persen atau berada di bawah nasional yang 10,96 persen (September 2014). Konsistensi penurunan angka kemiskinan telah terjadi sejak tahun 2008 meski sempat naik di 2013 sebelum kembali turun di tahun berikutnya.

Tabel 6.5.
Tingkat Kemiskinan Per Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2008-14

NO.	TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kep. Selayar	18.49	16.41	15.00	13.49	12.87	14.23	13.13
2	Bulukumba	12.26	10.50	9.02	8.12	7.82	9.04	8.37
3	Bantaeng	10.94	9.96	10.25	9.21	8.89	10.45	9.68
4	Jeneponto	22.48	20.58	19.10	17.16	16.58	16.52	15.31
5	Takalar	12.68	11.06	11.16	10.04	9.59	10.42	9.62
6	Gowa	12.79	10.93	9.49	8.55	8.05	8.73	8.00
7	Sinjai	12.73	11.37	10.68	9.63	9.28	10.32	9.56
8	Maros	18.55	16.35	14.62	13.14	12.55	12.94	11.93
9	Pangkep	21.36	19.35	19.26	17.36	16.62	17.75	16.38
10	Barru	13.49	11.43	10.69	9.59	9.28	10.32	9.74
11	Bone	17.35	15.19	14.08	12.67	12.25	11.92	10.88
12	Soppeng	11.22	9.95	10.42	9.36	9.12	9.43	8.76
13	Wajo	10.16	8.93	8.96	8.06	7.83	8.17	7.74
14	Sidrap	7.64	6.73	7.00	6.29	6.00	6.30	5.82
15	Pinrang	9.65	8.70	9.01	8.12	7.82	8.86	8.20
16	Enrekang	20.51	18.10	16.86	15.18	14.44	15.11	13.90
17	Luwu	19.44	16.96	15.44	13.93	13.33	15.10	13.95
18	Tana Toraja	18.57	16.14	14.62	13.22	12.72	13.81	12.77
19	Luwu Utara	18.38	16.40	16.25	14.64	14.02	15.52	14.31
20	Luwu Timur	10.98	8.91	9.18	8.29	7.71	8.38	7.67
21	Toraja Utara	-	-	19.08	17.06	16.27	16.53	15.10
22	Makassar	5.36	5.52	5.86	5.29	5.02	4.70	4.48
23	Pare-pare	7.10	6.52	6.53	5.91	5.58	6.38	5.88
24	Palopo	12.83	11.85	11.28	10.22	9.46	9.57	8.80
	Sulawesi Selatan	13.41	11.93	11.40	10.27	9.82	10.32	9.54

Sumber: Kajian (Februari 2017: 93)

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menjadi perhatian Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia, Benedict Bingham, dalam Forum Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Bank Indonesia (9 April 2015). Dia menyatakan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar dan luas yang dapat digali dan dikembangkan

untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sulawesi Selatan bagaikan *big tanker* yang besar dan kuat dalam mendorong serta menopang perekonomian Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Beberapa hal yang perlu dibangun untuk mewujudkannya adalah membangun konektivitas, meningkatkan porsi anggaran, khususnya infrastruktur, menarik investor yang potensial, mempromosikan potensi Sulawesi Selatan ke luar negeri, meningkatkan iklim investasi serta mengkombinasikan kebijakan infrastruktur dengan minimalisasi ketidakpastian dalam perekonomian.[484]

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan telah berhasil mendorong perekonomian secara atraktif di wilayah itu. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan yang disertai dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali sehingga tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional.

Keberpihakan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM telah terbukti sebagai sektor ekonomi yang paling tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, namun dalam perkembangannya sektor ini perlu terus dilindungi dan didukung oleh pemerintah. Sejak masa De Javasche Bank, Bank Indonesia telah menunjukkan keberpihakan kepada UMKM melalui berbagai kebijakannya. Ketika masa awal pendirian Bank Indonesia, fungsi penyaluran kredit tetap berjalan melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Melalui bank-bank komersial, Bank Indonesia memberikan dukungan dalam penyediaan kredit untuk petani peserta Bimas dan Inmas Sulawesi Selatan yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan suku bunga pinjaman relatif ringan. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga memberikan sarana dan prasarana seperti penyediaan bibit unggul, dan

484 Website internal BLINK, artikel "Kinerja Ekonomi Sulawesi Selatan Atraktif, IMF Berkunjung ke Makassar", 11 April 2015, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

layanan lainnya melalui kerja sama dengan swasta. Kredit modal kerja dalam program Bimas diberikan kepada petani dengan suku bunga 12 persen setahun, dan memperoleh KLBI sebesar 100 persen dengan suku bunga 3 persen per tahun. Kredit Bimas padi yang dikeluarkan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang sejak musim tanam 1977 hingga musim tanam 1984 berjumlah 21,95 miliar rupiah. Namun, dari angka tersebut terdapat tunggakan kredit yang belum dibayarkan oleh debitur. Pengembalian hingga akhir Juni 1984 berjumlah 13,50 miliar rupiah, dengan tunggakan sebesar 8,4 miliar rupiah dari debitur petani sebanyak 323.272 orang.[485]

Sementara itu, untuk perkembangan usaha berskala kecil sebagian besar fasilitas kredit dari bank diberikan dengan menggunakan skema Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Pemberian kredit ini diberikan kepada usaha cengkih, tembakau, dan karet sebagai rehabilitasi tanaman, pengumpulan dan perdagangan, serta tebu rakyat intensifikasi. Bank Indonesia mendukung pengembangan program KIK/KMKP dengan memberikan KLBI. Program KIK/KMKP memperoleh KLBI sebesar 90 persen dengan suku bunga 3 persen per tahun, dan suku bunga kredit bank kepada nasabah sebesar 12 persen per tahun.[486]

Pada 1985, Kredit Bimas digantikan dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai bentuk penyempurnaannya, yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Meskipun KUT merupakan bentuk penyempurnaan dari Bimas dan Imas, tetapi orientasi keduanya berbeda. Kredit Bimas dan Inmas lebih berfokus kepada adaptasi dengan teknologi, sedangkan KUT lebih condong ke arah pemberian modal kepada para petani. Awalnya, kredit sektor pertanian itu ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi padi. Namun, saat Bimas berubah menjadi KUT cakupan komoditasnya menjadi lebih luas hingga merambah ke padi, palawijaya, dan hortikultura. KUT sebagai program kredit memperoleh KLBI 100 persen dengan jaminan dari pemerintah. Bunga kredit KUT dari Bank Indonesia ke BRI sebesar 3 persen, sedangkan bunga kredit dari BRI ke KUD sebesar 6 persen. Karena bunga KUT yang harus dibayar petani 12

485 Tim Penulis Bank Indonesia (2001).

486 Tim Penulis Bank Indonesia (2001).

persen, maka *fee* bagi KUD adalah 3 persen. Sejak musim tanam 1989/90 bunga KUT yang harus dibayar petani meningkat menjadi 16 persen dan bunga yang harus dibayar KUD ke BRI 9 persen sehingga *fee* bagi KUD adalah 7 persen. Pada saat itu bunga pinjaman dipasar umum berkisar antara 18–20 persen.

Pada perkembangannya program KUT tidak semulus yang diharapkan. Terdapat beberapa masalah, terutama banyak petani yang tergabung dalam KUD tidak mendapatkan KUT padahal memiliki kemampuan yang baik untuk mengembalikan kredit. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KUT menghadapi kendala mendasar akibat macetnya pengembalian kredit program dalam jangka panjang dapat mengancam kelanjutan kredit program itu sendiri.

Sementara itu, Bank Indonesia terus mendorong penyelenggaraan program kredit perbankan di Sulawesi Selatan agar mampu menstimulus perkembangan UMKM. Kebijakan Bank Indonesia membantu pengusaha golongan ekonomi lemah berupa peningkatan pemberian pinjaman dan kemudahan persyaratan pinjaman bagi pengusaha kecil itu. Namun dalam penerapannya, kredit tersebut masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan. Seperti diungkapkan oleh Syamsul Bahri Syamsuddin, wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan, hanya sekitar 2 persen dari total pengusaha di Sulawesi Selatan yang mendapatkan kredit perbankan. Padahal, menurutnya, secara historis masyarakat Sulawesi Selatan memiliki orientasi yang kuat sebagai wirausaha dan sekitar 80 persen perekonomian daerah ditangani oleh pengusaha kecil.

Sejak 1999/2000 seluruh program kredit yang bersumber dari KLBI dihapus seiring penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tanggal 16 November 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasar UU itu Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan kredit likuiditasnya (KLBI) untuk kredit program. Sejak saat itu, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Pendekatan kepada UMKM khususnya peranan bank sentral telah bergeser dari *developmental role* kepada *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada bentuk aktivitas tidak

langsung seperti pelatihan dan penyediaan informasi termasuk penelitian, survei, riset dan advokasi.[487]

Upaya pengembangan UMKM sendiri memiliki berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah, serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan khususnya perbankan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki perhatian besar besar kepada UMKM antara lain dengan mengadakan kegiatan tahuan bertajuk '*Smart* Anging Mammiri' berupa kegiatan *expo* bagi UMKM yang diperluas mencakup beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Gambar 6.1. UMKM Peserta Smart Anging Mammiri 2015



Sumber : http://nasional.republika.co.id/

Bank Indonesia memberikan perhatian kepada tingginya minat UMKM terhadap akses permodalan dari perbankan yang sering kali

487 Tim Penulis Bank Indonesia (2001).

terhambat akibat ada anggapan bahwa mengakses kredit melalui perbankan merupakan hal yang sulit. Padahal, ternyata masih cukup banyak UMKM yang belum pernah mencoba secara langsung mengakses kredit perbankan, atau dengan kata lain "persepsi" tersebut cenderung menjadi "stigma" di kalangan masyarakat. Selain itu, beberapa kalangan masyarakat enggan mengakses kredit dari perbankan konvensional karena pertimbangan agamis.

Beberapa upaya dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka intermediasi antara pelaku usaha dengan perbankan. Antara lain, BI bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sulawesi Selatan (LPUMKM) pada 18 Agustus 2011 mengadakan seminar tentang pola pembiayaan syariah bagi UMKM. Sekitar 140 pelaku usaha dari berbagai kota dikenalkan dengan pola pembiayaan dari perbankan syariah. Pengembangan pembiayaan syariah dianggap penting mengingat kultur dan budaya masyarakat daerah yang dikenal religius dan cenderung berinvestasi melalui pembiayaan yang bersifat syariah.[488] Kegiatan lain adalah dalam bentuk pelatihan kepada pelaku usaha wanita mikro dan kecil anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Makassar, pada 21–22 Desember 2011. Peserta diberikan pengetahuan untuk mengelola bisnis dengan sistem pembukuan yang baik, karena sumber informasi *cash-flow* usaha yang baik akan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan pengembangan usaha dari bank.[489]

Masih dalam upaya mendekatkan dunia perbankan dengan UMKM, pada 27 April 2012 dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai produk kredit perbankan bagi pengusaha mikro kecil. Pihak perbankan sendiri telah memberikan keringanan terhadap pembiayaan bagi pengusaha mikro seperti bebas provisi dan suku bunga rendah khususnya kredit program pemerintah ataupun program penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). "*Perbaiki usaha dan pembukuan ta', kalau mau ki' dapat*

488 Website internal BLINK, artikel "Bank Indonesia Makassar Fasilitasi Seminar Sehari Pembiayaan Syariah bagi UMKM", 14 September 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

489 Website internal BLINK, artikel "Pelatihan Pembukuan Untuk Pelaku UMKM Wanita", 9 Januari 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...Wanita.aspx

kredit dari bank. Kalau bagus pembukuan usaha ta' tidak perlu ki' ragu, bank yang akan datangi ki'," demikian pesan motivasi yang disampaikan kepada peserta.[490]

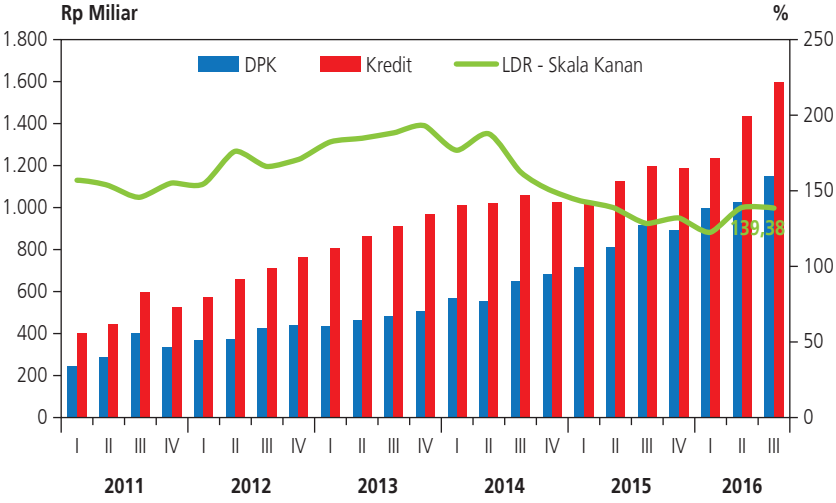
Sementara itu, untuk menyiapkan dari sisi perbankan, Bank Indonesia Sulawesi Selatan juga memberikan perhatian khusus kepada *capacity building* Bank Prekreditan Rakyat (BPR). Revitalisasi BPR dipandang penting untuk dilakukan karena secara operasional dan psikologis memiliki kedekatan dengan UMKM. Pada umumnya BPR memiliki lokasi yang dekat dengan lokasi UMKM, ditambah lagi dengan prosedur dalam peminjaman kredit di BPR yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur peminjaman kredit di bank umum. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan bekerja sama dengan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia), adalah 'Pelatihan Penanganan Kredit UMKM Bermasalah' pada 20–22 Juni 2012. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR menjadi langkah strategis untuk mengelola perkreditannya secara baik dan menekan timbulnya kredit bermasalah.[491] Dalam kurun 2011–16, perkembangan intermediasi BPR cenderung terus meningkat yang menunjukkan bahwa BPR telah berhasil menjadi mesin pendorong berkembangnya UMKM.

Dalam hal realisasi kredit apabila dilihat dari total realisasi KUR secara nasional belum terjadi pemerataan dalam penyalurannya. Hingga 2013, realisasi penyaluran KUR didominasi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabalnustra) dan Sumatera, dengan sebaran penyaluran sebesar 56,34 persen dan 22,01 persen, sementara untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua masih relatif kecil yaitu hanya 9,01 persen 9,92 persen dan 2,70 persen Hal itu mendorong Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Perekonomian menyelenggarakan kegiatan 'Sosialisasi Perluasan KUR di Koridor Sulawesi' pada 12 Juni 2013 di Kendari. Provinsi di Koridor Sulawesi yang mencatat penyaluran KUR relatif besar adalah Sulawesi Selatan sebesar 6,46 triliun rupiah atau sekitar 5,78 persen

490 Website internal BLINK, artikel "Sosialisasi Produk Kredit Perbankan Bagi Pengusaha Mikro Kecil", 28 May 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

491 Website internal BLINK, artikel "pelatihan Penanganan Kredit UMKM Bermasalah", 16 Juli 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...Bermasalah.aspx

Grafik 6.1. Perkembangan Intermediasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2011-2016



Sumber: Kajian (Februari 2017: 75).

dari total realisasi nasional. Selanjutnya, berdasarkan sektor ekonomi penyaluran KUR nasional masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar 64,07 triliun rupiah (57,28 persen), sedangkan penyaluran KUR pada sektor pertanian hanya sebesar 18,84 triliun rupiah (16,84 persen). Untuk itu, perlu didorong peningkatan penyaluran KUR di sektor pertanian mengingat wilayah Sulawesi masih ditopang terutama oleh sektor pertanian sesuai dengan *masterplan* MP3EI yang mengarahkan Koridor Sulawesi menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.[492]

Terkait dengan produksi perikanan di Sulawesi Selatan, berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan porsi sebesar 16 persen. Kabupaten tersebut merupakan

492 Website internal BLINK, artikel "Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat", 7 September 2013,http://internal.corp.bi.go.id/Berita/....(KUR).aspx

salah satu bagian dari wilayah kerja Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang paling selatan, yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari jazirah Sulawesi dengan 87 persen wilayahnya berupa perairan. Tidak heran jika jumlah produksi perikanan laut di Kepulauan Selayar menduduki urutan ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone. Pada 23–25 Agustus 2016, Bank Indonesia Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen mengembangkan potensi daerah dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pemberdayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan. Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan terkait penguatan manajemen dan kelembagaan kelompok pengolahan ikan, disamping kompetensi teknis produksi yang baik dan benar. Dengan kompetensi masyarakat yang semakin baik, maka diharapkan akan meningkatkan produksi perikanan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepuluan Selayar yang pada saat itu memiliki kontribusi PDRB terkecil (1,15 persen) di antara 24 kabupaten/kota lainnya.[493]

Gambar 6.2. Kepulauan Selayar



Sumber : https://manadopostonline.com

493 Website internal BLINK, artikel "Program Bank Indonesia Sulsel Sentuh Pulau Terluar Sulsel", 27 September 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/Pages/KegiatanSelayar.aspx

Kota Makassar yang memiliki slogan "*Makassar Sombere*" atau "Makassar Kota yang Ramah" terpilih menjadi tuan rumah kegiatan *3rd Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA), Small and Medium Enterprises Development (SMED), dan Working Group Meeting and Related Activities (Business Matching and BIMP-EAGA Creative Expo)* pada 9–11 September 2015. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia Sulawesi Selatan berkesempatan menjadi narasumber dalam *working group meeting* dan mengikuti *business matching* dan *creative expo*. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengharapkan UMKM dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas jejaring dan kemitraan dengan negara-negara ASEAN ataupun Indonesia Timur khususnya dalam pengembangan UMKM yang berorientasi ekspor. Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, negara-negara anggota ASEAN diharapkan menciptakan sinergi pasar melalui persaingan positif dan peningkatan daya saing dengan semangat kebersamaan. Narasumber dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, menyampaikan topik '*The Best Practice on SME Development: Challenges and Constraints of SMEs in Indonesia*' dalam *working group meeting*. Kerja sama BIMP-EAGA tersebut telah dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri pertama di Davao City, Filipina (26 Maret 1994) untuk memperkecil kesenjangan di antara negara-negara subkawasan tersebut.[494]

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk peluncuran Kartu Izin Usaha Mikro dan penyaluran kredit kepada 100.000 UMKM serta menyerahkan sertifikat hak cipta kepada UKM. Pembenahan mendasar atas program pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga terus berlangsung, antara lain sebagai berikut.

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil;
2. Kemudahan pengurusan Akta Pendirian Koperasi;

494 Website internal BLINK, artikel "Bank Indonesia Aktif dalam Forum Internasional (BIMP-EAGA) di Makassar", 21 September 2015, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

3. Menerbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai salah satu upaya untuk menertibkan administrasi perkoperasian di Indonesia.
4. Pembangunan pasar tradisional; pengembangan kewirausahaan baru atau wirausaha pemula; program bantuan usaha energi alternatif (biogas/ biomassa); penyerahan bantuan rumput laut, penyerahan usaha perbengkelan; penurunan bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen, dan program dana bergulir dari 6 persen menjadi 5 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia tersebut di atas adalah hanya sebagian cerita tentang bagaimana kontribusi Bank Indonesia dalam mewujudkan komitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Sulampua dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

Mengawal Stabilitas Keuangan dan Sistem Pembayaran

Kegiatan dan perkembangan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan makin dinamis sehingga kehadiran lembaga perbankan sangat dibutuhkan terutama dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan peranannya, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada Oktober 1988. Kebijakan tersebut makin meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor nonmigas, efisiensi lembaga keuangan dan bahkan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter dan iklim pengembangan modal.

Pada pertengahan 1980-an deregulasi perekonomian dilakukan secara bertahap, dan deregulasi perbankan sebagai bagian dari deregulasi perekonomian juga digulirkan secara bertahap. Gubernur Bank Indonesia (1988–93), Adrianus Mooy, mengatakan bahwa istilah "deregulasi" lebih disukai dalam artian mengurangi regulasi yang berlebihan dari Pemerintah, dibandingkan istilah "liberalisasi" yang dapat berkonotasi politik yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Deregulasi perbankan sendiri dimulai

dengan deregulasi perizinan untuk mendirikan bank baru pada Oktober 1988 yang populer dikenal dengan Pakto 88 atau Paket Oktober 1988.

Sebelumnya, kebanyakan bank di kota-kota besar memiliki jangkauan yang terbatas karena tidak mempunyai cabang di daerah. Izin baru tidak dikeluarkan Bank Indonesia sehingga tidak menimbulkan kompetisi yang sehat. Pakto 88 memberi kesempatan untuk mendirikan bank baru dengan modal awal Rp10 miliar. Di perdesaan dan pinggiran kota besar diberikan kesempatan untuk membuka BPR dengan syarat modal yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar usaha kecil dan menengah di perdesaan dapat segera dijangkau oleh bank dan tidak menunggu sampai bank-bank besar membuka cabang di perdesaan. Ini juga untuk melengkapi BRI yang sudah memiliki unit-unit di perdesaan.

Deregulasi perbankan tahap berikutnya dilakukan pada Maret 1989, meliputi pengerahan dana tabungan dan deposito, perkreditan dan sektor luar negeri khususnya kebijaksanaan kurs. Pada 1991, dikeluarkan ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) serta UU Perbankan yang baru (1992). Dalam hal pengerahan dana, bank-bank diberi kebebasan untuk mengerahkan dana tanpa bantuan BI dengan mengeluarkan produk-produk yang menarik seperti Taska atau Tabungan Asuransi Kesehatan. Untuk perkreditan bank diharuskan menyisihkan 20 persen kreditnya dalam bentuk Kredit Usaha Kecil. BPR dapat bekerja sama dengan bank-bank besar dalam menyalurkan dana ke usaha-usaha kecil di mana bank besar dapat juga menyalurkan dananya ke BPR, dan BPR menyalurkannya sebagai kredit kepada usaha-usaha kecil di perdesaan.[495]

Perkembangan usaha perbankan yang meningkat cukup pesat setelah Pakto 27[496] tersebut juga sebagai akibat bertambahnya bank-bank baru serta semakin bertambah banyak kantor bank yang didirikan. Dalam kurun waktu satu tahun setelah Pakto 27 telah berdiri 82 bank baru, meliputi 19 bank umum swasta, 10 bank campuran, dan 53 BPR. Selain, itu tercatat 11 BPR yang telah meningkat statusnya menjadi bank umum, dan 8 bank umum swasta nasional bukan bank devisa yang telah ditingkatkan

495 Mooy (2016: 206–07).

496 Terdapat dua penyebutan Paket Oktober 1988 yaitu Pakto 88 atau Pakto 27; sebutan yang terakhir mengacu pada tanggal penetapan, 27 Oktober 1988.

menjadi bank devisa. Dengan pertambahan bank baru tersebut, maka pada akhir Desember 1989 jumlah bank umum swasta nasional menjadi 91 bank, cabang bank asing 10 bank, bank campuran 11 bank, dan BPR 7.747 bank. Peningkatan yang sangat luar biasa justru terjadi pada jumlah kantor bank (termasuk kantor kas), yang dalam kurun waktu satu tahun setelah Pakto 27 bertambah 1.127 kantor. Jauh melampaui jumlah kantor dalam waktu dua tahun sebelum Pakto 27 yang hanya bertambah 139 kantor, belum termasuk pertambahan sembilan kantor cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).[497]

Pakto 27 berdampak terhadap peningkatan jumlah kantor bank di wilayah kerja Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Pada Desember 1986, jumlah kantor wilayah bank di sana sebanyak 79, dan setelah deregulasi jumlah kantor itu meningkat menjadi 82 pada akhir Desember 1988, kemudian bertambah lagi menjadi 102 kantor pada Desember 1989 (Tabel 6.6).

Tabel 6.6.
Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Daerah Tingkat II pada Wilayah Kerja Bank Indonesia Sulawesi Selatan 1986–89

DAERAH TINGKAT II DAN WILAYAH KERJA BANK INDONESIA	DESEMBER 1986					OKTOBER 1988					OKTOBER 1989				
	KP	KC	KCP	KK	JML	KP	KC	KCP	KK	JML	KP	KC	KCP	KK	JML
BI Ujung Pandang	1	68	3	7	**79**	1	70	2	9	**82**	1	74	16	11	**102**
Kodya Ujung Pandang	1	24	2	4	**31**	1	25	1	5	**32**	1	30	10	7	**48**
Kodya Parepare	0	5	0	0	**5**	0	5	0	0	**5**	0	5	3	0	**8**
Kab. Bone	0	3	0	0	**3**	0	3	0	0	**3**	0	3	1	0	**4**
Kab. Luwu	0	4	0	1	**5**	0	5	0	1	**6**	0	5	0	1	**6**
Kab. Poliwali Mamasa	0	3	0	1	**4**	0	3	0	2	**5**	0	3	0	2	**5**
Kab. Wajo	0	3	0	0	**3**	0	3	0	0	**3**	0	3	0	0	**3**
Kab. Soppeng	0	2	1	0	**3**	0	2	1	0	**3**	0	2	1	0	**3**

497 Siswowidagdo (1990: 48–9).

Tabel 6.6.
Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Daerah Tingkat II pada Wilayah Kerja Bank Indonesia Sulawesi Selatan 1986–89 (Lanjutan)

DAERAH TINGKAT II DAN WILAYAH KERJA BANK INDONESIA	DESEMBER 1986					OKTOBER 1988					OKTOBER 1989				
	KP	KC	KCP	KK	JML	KP	KC	KCP	KK	JML	KP	KC	KCP	KK	JML
Kab. Bantaeng	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Barru	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Selayar	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Bulukumba	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**
Kab. Enrekang	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Jeneponto	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**
Kab. Majene	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Maros	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	1	0	**3**
Kab. Mamuju	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Tana Toraja	0	2	0	1	**3**	0	2	0	1	**3**	0	2	0	1	**3**
Kab. Pangkajene Kepulauan	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**
Kab. Pinrang	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**
Kab. Sidenreng	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**
Kab. Gowa	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	1	0	0	**1**
Kab. Sinjai	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**	0	2	0	0	**2**
Kab. Takalar	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**	0	1	0	0	**1**

Keterangan: KP: Kantor Pusat; KC: Kantor Cabang; KCP: Kantor Cabang Pembantu; KK: Kantor Kas; PW: Kantor Perwakilan

Sumber: Bank Indonesia (1990).

Pada 30 Januari 2006, Bank Indonesia secara resmi menerbitkan Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 yang berisi lima Peraturan Bank Indonesia dan dua Surat Edaran; enam di antaranya merupakan ketentuan yang mengatur bank umum dan satu ketentuan yang mengatur bank syariah. Gubernur Bank Indonesia menggariskan sembilan langkah kebijakan di bidang perbankan yang terdiri dari empat langkah jangka pendek dan lima langkah jangka menengah panjang. Salah satu langkah

yang ditetapkan adalah bahwa Bank Indonesia akan memperluas jaringan pelayanan perbankan, khususnya bagi sektor UMKM, agar dapat lebih merata menjangkau seluruh pelosok daerah. Selain itu, BI berencana melakukan penyesuaian besarnya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi *retail* tertentu termasuk ATMR pembiayaan kepada sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut diharapkan perbankan akan semakin leluasa dan bergairah dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada berbagai bentuk kegiatan.[498]

Langkah lain yang ditetapkan adalah Bank Indonesia terus meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah dengan memperbolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk juga melayani transaksi syariah (*office channelling*) sehingga bank tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat untuk memberikan pelayanan perbankan syariah. Dalam perkembangan, jumlah bank di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh bank konvensional.

Tabel 6.7.
Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 2013-16

RINCIAN	2013	2014	2015	2016
Bank Umum (Konvensional; Syariah)	46	48	50	51
Konvensional	40	41	43	43
Unit Usaha Syariah	5	7	7	8
Syariah	6	7	7	8
Jumlah Kantor	971	972	983	954
Bank Perkreditan Rakyat	29	29	29	29

Sumber: Kajian (Februari 2017: 73).

Dilihat dari lokasinya, pada triwulan IV/ 2016, perkembangan perbankan di Kota Makassar memiliki aset paling besar dengan kepemilikan aset mencapai 87,14 triliun rupiah atau 69,18 persen dari total aset perbankan di Sulawesi Selatan. Dapat dikatakan perbankan di Kota Makassar tetap menjadi pendorong utama perekonomian di

498 Kebijakan Perbankan Tahun 2006; Arsip Koleksi Bank Indonesia.

Sulawesi Selatan. Sementara itu, aset perbankan di 23 kabupaten/kota lainnya tergolong relatif kecil, rata-rata kurang dari 5 persen dari total di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan aset perbankan tertinggi pada lima daerah berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Luwu (33,42 persen; yoy), Bantaeng (30,46 persen; yoy), Maros (28,80 persen; yoy), Jeneponto (28,70 persen; yoy),dan Luwu Utara (26,62 persen; yoy).

Sementara itu, dalam hal pertumbuhan kredit, Kabupaten Luwu menempati peringkat pertama dengan tumbuh 36,86 persen (yoy). Namun, bila dilihat dari sisi pangsa kredit, jumlah terbesar masih berada di Kota Makassar dengan total portfolio 68,37 triliun rupiah atau 65,81 persen dari total kredit di Sulawesi Selatan. Demikian pula dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Kabupaten Luwu Timur merupakan tertinggi dengan tumbuh 27,09 persen (yoy). Namun, bila dilihat dari sisi pangsa, DPK terbesar masih berada di Kota Makassar dengan total portfolio 55,09 triliun rupiah atau 66,86 persen dari total DPK di Sulawesi Selatan. Hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih berada di Kota Makassar, meski secara persentase pertumbuhan baik kredit maupun DPK sangat kecil. Melihat potensi perekonomian yang dimiliki beberapa kabupaten, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan upaya penghimpunan DPK di luar Kota Makassar melalui inovasi produk dan pengembangan *branchless banking*.

Adapun kualitas kredit di seluruh kabupaten/kota relatif terjaga yang tecermin dari tingkat NPL (*non-performing loan*) di seluruh kabupaten/kota masih dalam level aman atau di bawah angka psikologis (5 persen). Sementara dari sisi intermediasi perbankan, terdapat 19 kabupaten/kota yang memiliki LDR (*loan to deposit ratio*) di atas 100 persen yaitu Takalar, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Luwu Utara, Sinjai, Maros, Sidrap, Pinrang, Gowa, Makassar, Bulukumba, Pangkep, Palopo, Wajo, Bone, Barru, dan Luwu Timur. Perbankan yang berlokasi di 19 kabupaten/kota tersebut berarti masih memiliki potensi untuk penghimpunan DPK, terutama yang berupa dana murah atau tabungan. Sementara daerah lainnya dengan LDR kurang dari 100 persen memiliki potensi yang besar untuk mendorong kredit/pembiayaan.

Sejak 1 Januari 2014, terjadi pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank yang semula berada pada Bank Indonesia dialihkan ke

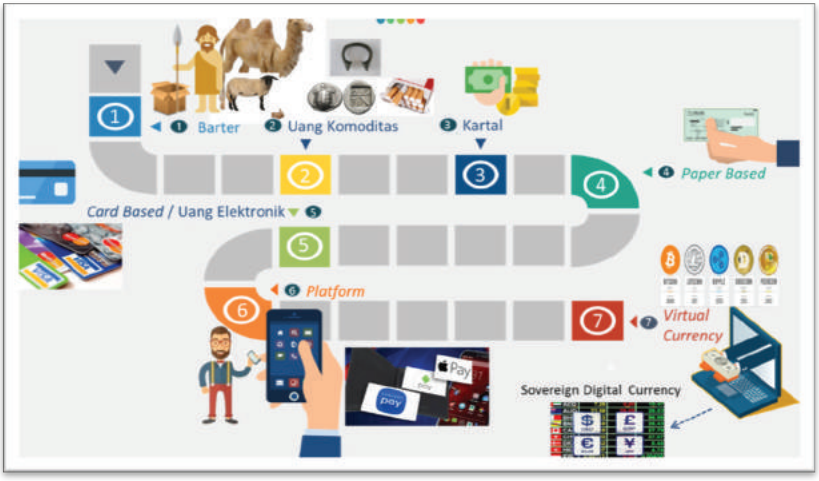
Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak itu, tugas Bank Indonesia yang sebelumnya bersifat mikroprudensial atau mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan berubah menjadi bersifat makroprudensial atau lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Kewenangan BI di bidang makroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan makroprudensial, dengan tujuan mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan meningkatkan akses keuangan.

Dikaitkan dengan perkembangan di daerah, pengamatan terhadap kondisi finansial wilayah dilakukan melalui RFS (*regional financial surveillance*) yaitu kegiatan mengidentifikasi potensi kerentanan yang mungkin muncul dari masing-masing daerah, termasuk yang bersumber dari korporasi. Dalam hal ini perlu diketahui sumber kerentanan yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan daerah. Misalnya di suatu daerah terdapat sebuah korporasi yang cukup strategis, sehingga apabila kondisinya mengalami 'batuk' akan bisa menyebabkan risiko sistemik pada sosial dan ekonomi masyarakat daerah tersebut.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki tugas melaksanakan sistem pembayaran. Sistem pembayaran didefinisikan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus selalu mengikuti perkembangan sistem pembayaran yang saat ini berlangsung sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terutama dengan munculnya transaksi non-tunai dalam kegiatan ekonomi.

Saat ini Bank Indonesia giat mendorong transaksi nontunai di masyarakat melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang merupakan kampanye dalam rangka mendukung terciptanya *less cash society* melalui penggunaan instrumen nontunai. Gerakan ini resmi dicanangkan pada 14 Agustus 2014 di Jakarta, sosialisasi GNNT dilakukan secara serentak di seluruh penjuru Nusantara termasuk di Makassar. *Kick off* GNNT

Gambar 6.3. Evolusi Sistem Pembayaran



Sumber: Materi Kebanksentralan; Bank Indonesia Institute.

dilakukan pada 9 September 2014 di Universitas Negeri Makassar, bekerja sama dengan pihak perbankan. Selain kegiatan sosialisasi juga dilakukan pelatihan penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Capturer*) kepada para kasir. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus diharapkan dapat memotivasi mahasiswa menjadi motor penggerak penggunaan instrumen nontunai. Kesadaran terhadap penciptaan kawasan nontunai juga meluas melalui *studium generale* di Universitas Islam Negeri Alauddin, di Gowa, yang mengangkat topik 'Sukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai di Indonesia' pada 23 Oktober 2014.[499]

Sosialisasi juga dikemas dalam kegiatan lainnya yang menarik massa, seperti pada Makassar Jazz Festival 2014 yang diselenggarakan sebagai bagian peringatan HUT Kota Makassar yang ke-407, pada 1–2 November 2014, di Benteng Rotterdam. Transaksi keuangan yang terjadi selama *event* tersebut menggunakan instrumen pembayaran nontunai. Selain itu, diselenggarakan acara kegiatan lain dengan konsep komunitas nontunai

499 Website internal BLINK, artikel "Transaksi dengan E-money Mudah Ki!", 19 November 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/

seperti BNI Fashion & Art Festival Makassar pada 23–26 Oktober 2014. Masih dalam rangka sosialisasi GNNT, dilakukan program penerbitan *smart card* untuk semua guru Pegawai Negeri Sipil pada sekolah negeri di kota Makassar.[500]

Gambar 6.4. Makassar Smart Card



Sumber : Website internal BLINK

Melalui sosialisasi GNNT yang dilakukan secara masif, masyarakat, pemerintah, dan Bank Indonesia, akan mendapatkan manfaat secara langsung yaitu (1) praktis karena tidak perlu lagi membawa uang tunai; (2) akses masyarakat yang lebih luas dalam sistem pembayaran; (3) transparasi transaksi yang bisa menjadi usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan; (4) efisiensi rupiah dengan menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan *cash handling*; (5) meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian; dan (6) bisa merencanakan ekonomi dengan lebih akurat karena pencatatan transaksi yang otomatis dan akurat akan memudahkan untuk menghitung aktivitas ekonomi.

500 Ibid

Tugas lain Bank Indonesia selaku bank sentral adalah melakukan pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia mengemban amanat untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan jenis pecahan yang sesuai kebutuhan, dan dalam kualitas baik serta kondisi layak edar (*clean money policy*). Dalam menjalankan amanat tersebut, BI melakukan kegiatan layanan kas, baik di dalam maupun di luar kantor dalam bentuk kegiatan kas keliling dan kas titipan. Penyelenggaraan kas titipan dilakukan oleh BI bekerja sama dengan perbankan lokal untuk menyelenggarakan layanan kas di daerah tersebut.

Melalui kegiatan kas keliling atau kas titipan, serta kegiatan sosialisasi terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah yang rutin dilakukan diharapkan dapat menekan peredaran uang palsu dan mengurangi peredaran uang yang tidak layak edar di wilayah Sulawesi Selatan. Termasuk menjadi tugas Bank Indonesia Sulawesi Selatan adalah penyediaan uang layak edar (ULE) hingga ke seluruh pelosok wilayah kerjanya. Seperti misalnya kegiatan kas keliling di pulau paling selatan Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada 23–25 Agustus 2016. Sebagai daerah kepulauan, tingkat kelusuhan uang di Selayar tergolong cukup tinggi. Dengan hadirnya kas keliling, masyarakat yang selama ini terbiasa memegang uang lusuh akhirnya berkesempatan menikmati uang layak edar, layaknya daerah-daerah lain yang dekat dengan akses perbankan.[501]

Bank Indonesia Sulawesi Selatan juga mengadakan penukaran uang pecahan kecil (UPK), biasanya dengan memanfaatkan kegiatan yang menjaring massa seperti misalnya momen *car free day* untuk berolah raga; kegiatan diselenggarakan dengan menggandeng perbankan. Selain memberikan layanan penukaran UPK kepada masyarakat, perbankan juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mempromosikan produk nontunai, seperti *e-money*, kartu kredit, dan sebagainya. Dalam kegiatan penukaran UPK, Bank Indonesia dan perbankan melayani masyarakat dalam penukaran ULE pecahan kecil 2.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Dalam upaya menyerap uang koin agar optimal peredarannya, Bank Indonesia Sulawesi

501 Website internal BLINK, artikel "Program Bank Indonesia Sulsel Sentuh Pulau Terluar Sulawesi", 19 September 2016, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/.

Selatan melakukan pencanangan Gerakan Peduli Koin Nasional Losari pada 4 September 2016, bertempat di Anjungan Makassar Pantai. Kegiatan ini berhasil menyerap total jumlah koin senilai 52.200.000 rupiah dengan lebih dari 400 orang yang menukarkan uang logam yang mereka miliki.[502]

Gambar 6.5. Gerakan Peduli Koin Nasional



Sumber: Website internal BLINK

Sebagai implementasi kebijakan *clean money policy*, salah satu program yang dilakukan adalah kas titipan. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kas Titipan antara Bank Indonesia Sulawesi Selatan dengan Bank Sulselbar Cabang Bulukumba pada 16 November 2016, merupakan salah satunya. Layanan Kas Titipan BI di Bulukumba melayani kebutuhan uang tidak hanya di Kabupaten Bulukumba melainkan juga daerah

502 Website internal BLINK, artikel "Gerakan Peduli Koin Nasional", 23 Oktober 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/....

tetangga seperti Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten yang berlokasi di ujung selatan daratan Sulawesi dan berjarak sekitar 165 kilometer dari Kota Makassar ini merupakan lokasi Kas Titipan BI Sulawesi Selatan yang ketiga. Sebelumnya, BI Sulawesi Selatan telah memiliki kas titipan di Kota Palopo (wilayah utara, 388 kilometer dari Makassar) sejak 2010, dan Kota Parepare (wilayah barat, 154 kilometer dari Makassar) sejak 2015 dengan masing-masing bank penyelenggara adalah Bank Sulselbar.[503]

Pertimbangan Bank Indonesia membuka kas titipan di suatu daerah antara lain bila terdapat kantor pusat/kantor cabang bank umum sekurang-kurangnya sebanyak tiga buah, kebutuhan masyarakat akan uang tunai tidak dapat dipenuhi oleh bank-bank setempat, dan prospek perekonomian daerah setempat cenderung meningkat. Jika dilihat profilnya, perekonomian Kabupaten Bulukumba dari tahun 2011 hingga 2014 menunjukkan perkembangan yang positif mencapai 64 persen, hal yang sama juga terjadi di wilayah sekitarnya, yakni di Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto, masing-masing pertumbuhannya antara 61–67 persen.[504]

Untuk mewujudkan semangat cinta rupiah kepada masyarakat Sulawesi Selatan, Bank Indonesia Sulawesi Selatan juga melakukan sosialisasi "Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah" terutama pada saat terbitnya uang rupiah baru tahun emisi 2016. Sejak diluncurkan pada 19 Desember 2016, terdapat berbagai isu negatif yang santer beredar di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Bank Indonesia Sulawesi Selatan dalam berbagai kesempatan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk memanfaatkan media massa di Makassar untuk meluruskan berbagai isu negatif tersebut. Dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat semua kanal komunikasi digunakan, termasuk melalui *talkshow* di radio lokal seperti Radio Gamasi FM dan Smart FM, untuk menjawab secara langsung pertanyaan dari masyarakat. Berbagai

503 Website internal BLINK, artikel "BI Sulsel Resmikan Kas Titipan di Bulukumba, 21 November 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

504 Ibid

Gambar 6.6. Peresmian Kas Titipan di bulukumba



Sumber : Website internal BLINK

pertanyaan bermunculan dari pendengar radio, mulai dari ciri-ciri keaslian uang rupiah baru hingga proses pencetakan hingga pengedaran uang sampai ke daerah-daerah. Tidak berhenti sampai di situ, kegiatan edukasi juga dilakukan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan TNI serta akademisi dan pimpinan redaksi media massa.

BAB VII
‘HERITAGE’ KANTOR EKS-DE JAVASCHE BANK MAKASSAR

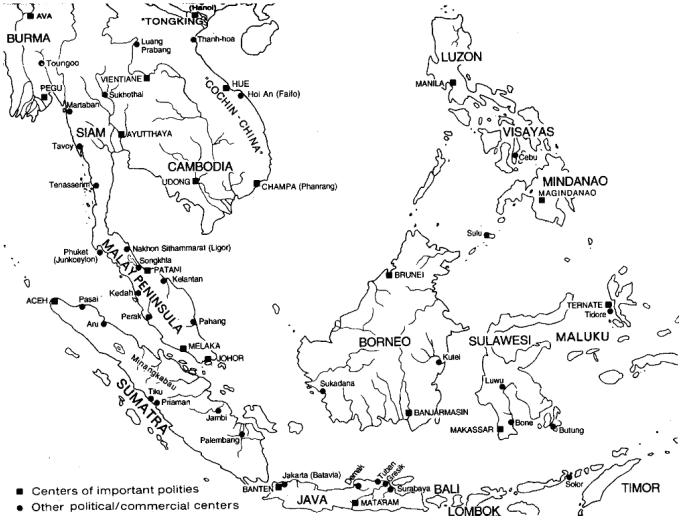
Setelah membahas secara rinci dan mendalam mengenai sejarah perkembangan DJB hingga Bank Indonesia, terutama peranannya dalam pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan, maka perlu pula terdapat pembahasan dalam perspektif lain yakni pada aspek *heritage* sebagai warisan budaya. Sebagai warisan budaya, DJB meninggalkan *heritage tangible* berupa gedung eks-De Javasche Bank (DJB) Makassar yang amat indah sebagai bagian penting dari memori perkembangan Kota Makassar. Akibat dari perkembangan zaman, amat disayangkan gedung eks-DJB tersebut harus dihancurkan demi kepentingan lebih besar, yakni untuk perluasan Pelabuhan Makassar.

Pada bab ini akan dibahas mengenai arsitektur gedung eks-DJB Makassar yang pernah berdiri di Jalan Nusantara, Kota Makassar. Walaupun gedung ini sudah tidak ada, namun memori mengenai gedung ini masih dapat dipertahankan melalui penulisan pada bagian ini. Bagaimana pembangunan gedung ini hingga makna arsitekturalnya akan dibahas pula sebagai upaya memahami lebih lanjut kehadiran gedung ini pada masa lalu. Selain mengenai gedung eks-DJB, akan dibahas pula mengenai evolusi fisik Kota Makassar hingga bangunan-bangunan berarsitektur kolonial apa saja yang ada kota ini sebagai bagian dari sumbangan upaya perekaman memori mengenai sejarah bangunan-bangunan berarsitektur kolonial di Kota Makassar.

Sebelum Kedatangan Belanda

Di Asia Tenggara sejak lama terbentuk banyak pusat pemerintahan tradisional, selain sebagai pusat pemerintahan juga berperan sebagai pusat perdagangan. Salah satu di antaranya Makassar. Sebelum kedatangan bangsa Barat, bagian selatan Sulawesi terbagi menjadi berbagai wilayah, masing-masing berupa kerajaan. Dua kerajaan terbesar Gowa dan Tallo, sepakat untuk menyatukan diri. Penyatuan keduanya yang berlatar agrasis (pertanian) dan maritim, didukung oleh letak di tengah kepulauan Nusantara, menjadikannya pusat perdagangan yang kuat. Kerajaan Gowa-Tallo, dan kemudian Makassar, mendominasi semenanjung barat daya Sulawesi dengan armada yang bersaing dengan Ternate.[505]

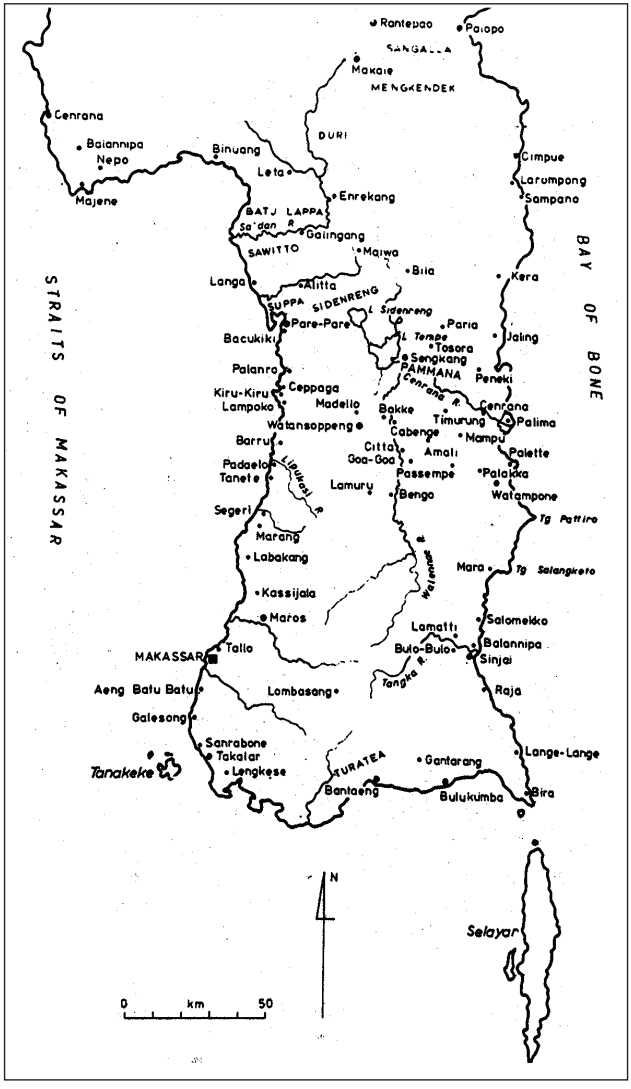
Gambar 7.1. Sebaran kerajaan di wilayah Asia Tenggara.



Sumber: Reid 2004

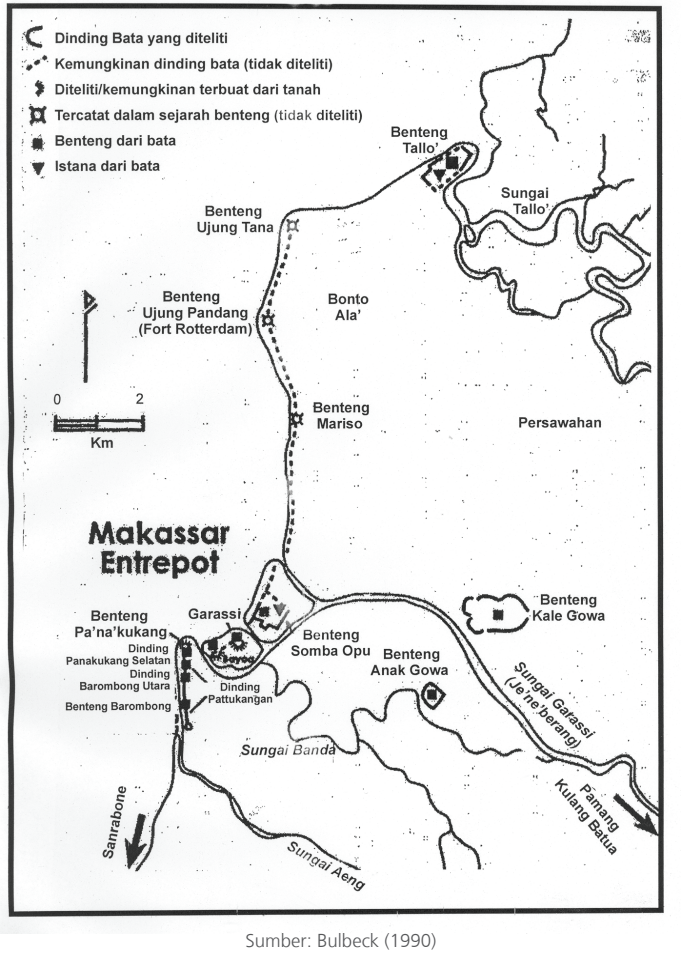
505 Lapian (2010: 7).

Gambar 7.2. Lokasi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum Kedatangan Belanda



Sumber: Diolah dari Reid (2004)

Gambar 7.3. Peta rangkaian benteng Makassar 1667-1668 di pesisir pantai Selat Makassar, 3 di antaranya tidak terletak di pantai, yaitu Bonto Ala', Kale Gowa dan Anak Gowa.

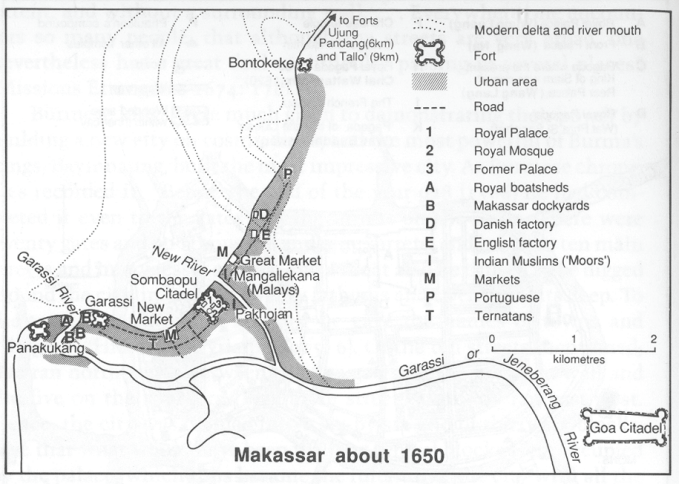


Sumber: Bulbeck (1990)

Rempah-rempah menarik orang Eropa datang ke Asia, tepatnya di wilayah Maluku. Sebagian besar waktu pada abad ke-16, dimanfaatkan orang Portugis berniaga di Ambon dan Banda, kemudian pada 1574

sampai ke Temate.[506] Dengan menaklukkan Malaka pada 1511, Portugis membuat penyebaran perdagangan menjadi luas, antara lain di Patani (Thailand), Johor, Pahang, Aceh, Banten; dan banyak pusat pemerintahan bangkit pada abad ke-17, antara lain Pegu (selatan Burma), Laos, Aceh, Banten, dan Makassar.[507]

Gambar 7.4. Peta Pantai Makassar bagian selatan, pada tahun 1650.



Sumber: diolah dari Reid (1993)

Legenda: Di dalam Benteng Makassar : 1 .Istana kerajaan. 2.Mesjid kerajaan. 3.Istana sudah ada sebelumnya. A. Tempat kapal-kapal kerajaan. B. Tempat kappal-kapal Makassar. D. Pabrik milik orang-orang Denmark. E. Pabrik orang-orang Inggris. I. Permukiman Muslim India. M. Pasar. P. Permukiman Portugis. T. Permukiman orang-orang Ternate.

Secara alami Pelabuhan Makassar merupakan pelabuhan alam yang baik, teduh, dan aman karena terlindungi oleh pulau-pulau yang berada di bagian barat yang menjadi penghalang gelombang laut dan badai muson barat. Wilayah Makassar dan sekitarnya mencakup wilayah

506 Lapian (2010: 8).

507 Lapian (2010: 8).

Sulawesi selatan (bawah kiri). Makassar pada 1667–68 memiliki lebih dari delapan benteng berderet sepanjang pantai Selat Makassar. Tiga di antaranya tidak di kawasan pantai yaitu Bonto Ala', Kale Gowa dan Anak Gowa (peta Gambar 7.3).

Pertumbuhan Kerajaan Makassar sebagai bandar niaga ditandai dengan berdirinya pusat kerajaan di Sombaopu yang dikelilingi perkampungan yang disebut *Mangalekanna,* dan di sekitar benteng ini pula berdiri kantor-kantor dagang sekaligus menjadi tempat tinggal yang disebut *Bontoala.*[508]Seiring pertumbuhan Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim maka tumbuh pula pelabuhan yang menjadi pusat pedagang-pedagang Nusantara, Arab, Cina dan Eropa. Pedagang Melayu menjadikan wilayah ini sebagai pusat perdagangan pada pertengahan abad ke-16, dan sejak awal abad ke-17 Makassar menjadi titik komersial.[509]

Dukungan penuh yang diberikan oleh komunitas Melayu ditandai dengan perpindahan pusat perdagangan dari Siang (terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan serta bagian utara Makassar) sejak 1550, dukungan serupa juga datang dari bangsa Portugis yang mulai menetap di Makassar pada tahun 1580.[510] Kemudian diikuti oleh Spanyol yang mengunjungi kota itu sejak awal abad ke-17, bahkan para pedagang Eropa menempatkan wakil dagang, di antaranya Inggris pada 1613, dan Denmark pada 1618. Sementara itu, pedagang Perancis tiba pada 1622, pedagang Cina pada 1619, dan Kerajaan Golconda (India Selatan) menempatkan wakil dagang pada 1650. Selain perdagangan utama menyediakan rempah kepada pembeli Eropa, India dan Cina, Makassar menjadi salah satu pintu masuk Asia Tenggara di mana barang-barang Cina dan Perak Meksiko bisa dipertukarkan dengan barang-barang dari India berupa kain.[511]

Orang-orang Makassar mendiami jazirah selatan Pulau Sulawesi bersama orang Bugis. Keduanya termasuk rumpun bangsa Melayu,

508 Mattulada, (1998: 32)

509 Reid (2004: 75).

510 Pelras (2006: 157)

511 Pelras (2006: 75–6).

mendiami terutama bagian pantai barat Parepare hingga Bantaeng. Di antara orang-orang Makassar tersebut, sebagian mendiami pesisir sepanjang muara Sungai Jeneberang dan Tallo. Pusat pemerintahan dan perdagangan Makassar tumbuh dan berkembang didukung oleh letaknya yang sangat strategis dari segi geopolitik, diapit oleh Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang, di sebelah timur oleh lembah pegunungan luas dan subur Bawakaraeng, sebelah barat oleh lautan dengan banyak kepulauan.

Kawasan urban atau kawasan berpenduduk lebih padat dan sibuk tempat pusat pelayanan jasa dan perdagangan berada di bagian selatan dari deretan benteng-benteng tersebut.[512] Istana, masjid dan istana lama berada di dalam Benteng Sombaopu jelas juga tergambar di dalam Peta 7.4. Dalam peta tersebut, digambarkan bahwa pantai zaman modern saat ini berada pada sekitar 500 meter hingga lebih dari 2 kilometer dari pantai Makassar pada 1650. Kawasan urban Makassar memanjang dari selatan-barat berujung pada Benteng Panakukang dan di utara-timur berujung Benteng Bontokeke yang berada 6 kilometer dari Benteng Ujung Pandang dan 9 kilometer dari Tallo.[513] Tempat menyimpan kapal-kapal kerajaan berada agak jauh di selatan sekitar 1.500 meter di sisi selatan-barat dari muara cabang Sungai Jeneberang sebelah selatan. Berseberangan di sebelah timur dengannya juga di muara sungai yang sama terdapat tempat perawatan dan pembuatan kapal dari orang-orang Makassar. Di sebelah timur terdapat perkampungan disebut Pakhojan.[514] Orang-orang Muslim-*Moor* bermukim di dekat Benteng Sombaopu, di sebelah selatan-timur dan di seberang muara cabang utara Sungai Jeneberang. Pasar besar berada tidak jauh di sebelah utara permukiman Muslim-*Moor*. Di sebelah selatan-barat sekitar 500 meter dari Benteng Sombaopu terdapat lagi sebuah pasar yang berdiri setelah yang disebut pertama.

512 Reid (1993).

513 Reid (1993).

514 Pakhojan, sering ditulis Pakojan, terdapat di berbagai kota pesisir di Jawa terutama di kota-kota penting pada zaman itu seperti Jakarta (Batavia), Semarang, dan lain-lain. Nama perkampungan itu berasal dari kata *koja*, tidak jelas berasal dari mana, namun diduga yang di Semarang dan mungkin juga di Makassar, berasal dari Khojah di Gujarat, India. Lihat Lapian (2010: 386).

Zaman 'Intra-Muros'

Seiring dengan tumbuhnya Makassar sebagai bandar niaga yang menghubungkan wilayah timur Nusantara sebagai pusat komoditas rempah-rempah dengan wilayah barat, peran itu kemudian menarik konflik kepentingan antara pihak asing (Portugis, Belanda, dan Inggris) dengan penguasa setempat.[515] Konflik kepentingan mencapai puncaknya pada awal abad ke-17 antara Belanda (VOC) versus penguasa setempat.

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, setelah perlawanan gigih dengan berbagai pertempuran, pasukan Sultan Hasanuddin dapat dikalahkan dan dipaksa mangadakan perundingan pada 13 November 1667 di Bungaya, desa kecil dekat Makassar. Hasil perjanjian sangat merugikan Kerajaan Makassar, antara lain, pertama, seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar yaitu Barombong, Pa'nakkukang, Garassi, Mariso, Boro'boso harus dihancurkan; hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja. Kedua, Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan baik, bersama desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.[516]

Setelah mengerahkan segala kekuatan militernya, pada 24 Juni 1669 Speelman memenangkan peperangan.[517] Speelman menjadikan wilayah Benteng Ujung Pandang dan sekitarnya sebagai kota baru, yang terdiri dari benteng pertahanan, kota dagang, dan perkampungan. Untuk menasbihkan kemenangan Belanda, nama Benteng Ujung Pandang diganti menjadi Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam, yang merupakan nama kota kelahiran Speelman di Belanda. Benteng tersebut dijadikan sebagai markas tentara, dan kantor perwakilan dan fasilitas lain seperti gereja, pergudangan tempat tinggal gubernur dan pejabat VOC lain. Perombakan tidak mengubah bentuk aslinya seperti penyu dengan empat kaki di keempat sudut, menjadi bastion untuk meletakkan meriam. Penduduk setempat menyebutnya "Benteng Penyu" karena menyerupai

515 Reid (2004: 78).

516 Lapian (2010: 386).

517 Andaya (2006: 165).

penyu. Di posisi kepala dan ekor terdapat bastion sebagai menara penjaga apabila terjadi serangan. Bastion juga terdapat pada dua "kaki" belakang untuk pertahanan serangan dari timur-utara dan bastion posisi "ekor" untuk pertahanan serangan dari timur atau dari darat. Tiga bastion di depan (barat) dalam posisi kaki di utara dan selatan dan tengah untuk melawan serangan dari arah laut. Penamaan tiap bastion di benteng tersebut diambil dari nama-nama pulau di Maluku seperti (Gambar 7.5). Seperti misalnya gerbang di sisi selatan bastion disebut "Bastion Bone" yang berada di tengah-depan (posisi kepala).[518]

Perombakan benteng yang dilakukan oleh Speelman bertujuan untuk membuat kota baru sesuai dengan kepentingan Belanda, berpusat di Fort Rotterdam selain menjadi pusat pertahanan juga pusat dagang.[519] Saat itu merupakan awal kehidupan *intra-muros* atau kehidupan di dalam benteng. Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan di atau dari dalam benteng. Benteng menjadi elemen utama, dominan, masif dan berciri kuat abad ke-17. Benteng menjadi lingkungan tertutup atau eksklusif yang di dalamnya terdiri atas rumah tinggal, gudang, gereja, perkantoran. Kompleks benteng memiliki fungsi majemuk; selain sebagai hunian dan tempat kerja pejabat-pejabat VOC juga berfungsi sebagai tangsi militer dan gudang rempah-rempah, yang kemudian menjadi elemen utama cikal-bakal kota Makassar. Elemen kedua tumbuh dan berkembang di sebelah utara-timur Fort Rotterdam. Speelman menyebutnya "perkampungan pedagang" dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang yang dikenal sebagai "*Negory Vlaardingen*." Penghuni bagian ini terdiri dari campuran berbagai etnis mulai peranakan Cina dan orang asli beragama Kristen.[520] Unsur ketiga pembentuk struktur permukiman di sekitar Fort Rotterdam adalah kampung penduduk asli di bagian utara *Vlaardingen* disebut Kampung Melayu.

Hingga akhir abad ke-17 kehidupan *intra-muros* terus berlangsung, berpusat di Fort Rotterdam. Wilayah utara benteng dijadikan pusat dagang, dikenal dengan nama *Vlaardingen* yang di dalamnya terdapat

518 Sutherland dalam Broeze (ed.) (1989).

519 Sutherland dalam Broze (ed.) (1989).

520 Sutherland dalam Broze (ed.) (1989).

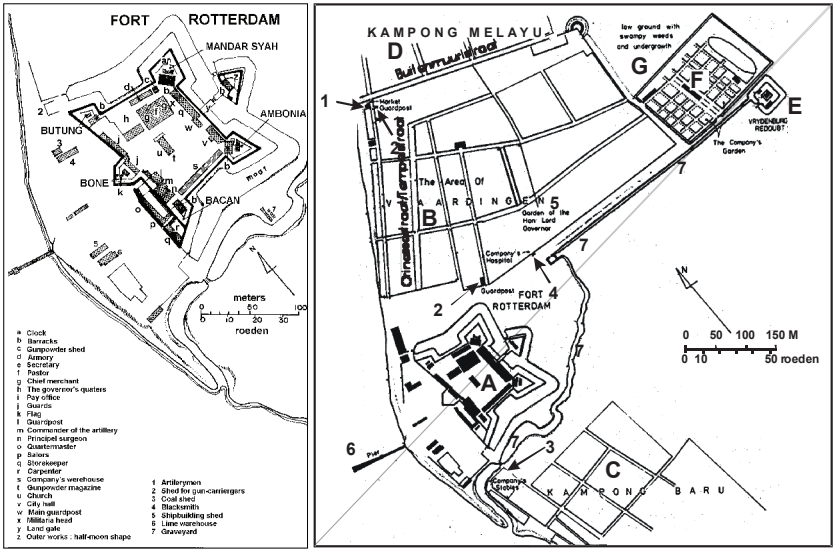
pula perkampungan pribumi. Kampung ditata menurut kelompok pendatang berdasar kepentingan Belanda. Salah seorang dari masing-masing kelompok "yang bisa bekerja sama dengan Belanda" diangkat menjadi pemimpin seperti di Kampung Melayu di bagian utara. Setiap wilayah ditentukan batas dengan jelas bertembok batu lengkap dengan kubu, dan pintu gerbang. *Vlaardingen* dan kampung tempat tinggal banyak penduduk, berpagar dan halaman tertutup terdiri dari beberapa rumah.[521] Di ujung timur-utara, Belanda membangun benteng kecil (*redaubt*) dinamakan Vredenburg, dihubungkan kanal dengan Fort Rotterdam. Kanal atau parit di sisi timur menyambung langsung dengan kanal pertahanan keliling dari Fort Rotterdam. Pada masa Gubernur Han Lord dibuat kebun sayur untuk memasok penghuni benteng di timur utara-timur berhadapan di utara Redaubt Vredenburg di sekitar Pasar Sentral.

Salah satu kriteria pembagian pada masa itu ialah suku dan status. Secara garis besar penduduk terbagi menjadi dua yaitu pelayan Kompeni yang disebut *burghers* (budak yang dibebaskan karena menjadi Kristen), dan orang-orang Makassar, Bugis, Cina, Ambon, Banda, Moor, peranakan, dan budak-budak lain.[522]

521 Lapian (2010: 405).

522 Kantor BI yang dibicarakan di sini terletak di kawasan sisi utara benteng Kampung Melayu dan Wajo sejak zaman Belanda manjadi pusat perdagangan. Sekarang (2018), menjadi kawasan Pelabuhan Sukarno-Hatta, pergudangan dan perdagangan.

Gambar 7.5. Fort Rotterdam abad ke-17 (kiri) dan wilayah sekitar Fort Rotterdam (kanan)



Sumber: Andaya, 2006.

Legenda (gambar kiri): a. Jam; b. Barak tentara; c. Penyimpanan mesiu; e. Kantor sekretaris; f. Kediaman imam; g. Kepala bagian perdagangan; h. Kediaman Gubernur Jendera.; i. Tempat penjaga; m. Komandan altileri; p. Tempat para pelaut; r. Kediaman tukang bangunan; s. Gudang Kompeni; u. Gereja Protestan; v. Balai kota; w. Pos gardu utama.

Legenda (gambar kanan): a. Fort Rotterdam; b. *Vlaardingan*; c. Kampung Baru; d. Kampung Melayu; e. Vrydenburg Redaubt/benteng kecil (untuk mengantisipasi serangan penduduk dari arah daratan timur); f. Kebun sayur Kompeni (untuk *supply* penghuni Benteng); g. Rawa-rawa; 1. Pasar; 2. Gardu jaga; 3. Kandang Kuda Kompeni; 4. Rumah sakit Kompeni; 5. Kebun (taman) zaman Gubernur Han Lord; 6. Dermaga; 7. Kanal menghubungkan laut, Fort Rotterdam, dan Vredenburg.

Periode Kehidupan 'Extra-Muros'

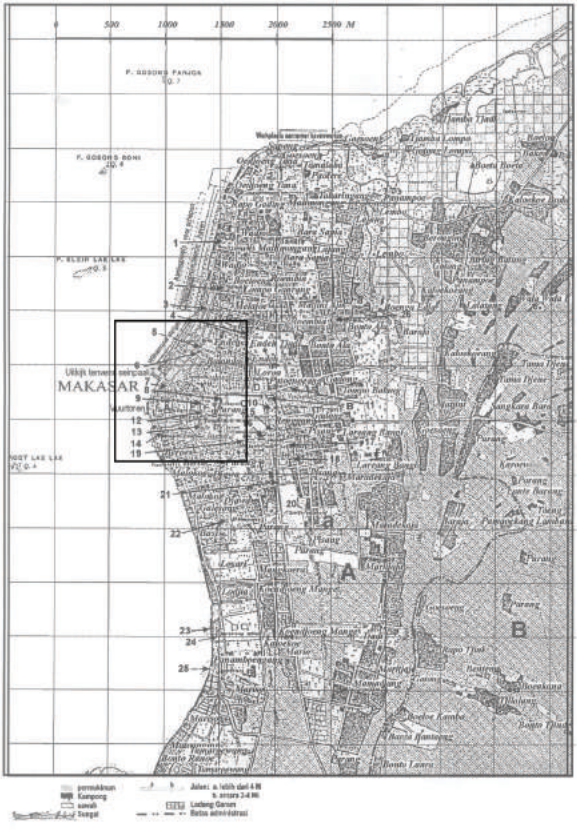
Setelah VOC mengalami kemunduran hingga kebangkrutan pada 1799, wilayah kekuasaannya diambil alih pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu Sulawesi Selatan berada langsung di bawah Pemerintah Kolonial. Setelah keadaan politik aman bagi Belanda, mereka memulai kehidupan di luar benteng atau *extra-muros*. Fasilitas publik dibangun di luar sekitar

benteng. Antara lain gereja, kediaman gubernur, *societeit* (perkumpulan eksklusif Belanda), kantor-kantor pemerintah, taman, dan lain-lain.

Pada 1904, Makassar dijadikan pemerintahan kota (g*emeente*). Menyusul keputusan tersebut, di sekitar Fort Rotterdam dan Hoogepad dijadikan kawasan pusat pemerintahan. Selain itu rumah dan bangunan berkonstruksi batu mulai berkembang ke bagian Selatan *Koningsplein* (Karebosi sekarang). Mulai 1846 perdagangan bebas di Makassar dihidupkan dan sejak 1906 Sulawesi Selatan berada langsung di bawah Pemerintah Kolonial. Kota Makassar berkembang menjadi pelabuhan transito di kawasan timur Hindia Belanda, disebut *Groote Oost*. Lapangan luas di sebelah selatan pada masa sebelumnya untuk latihan tembak, sebagian telah menjadi permukiman. Beberapa jalur jalan melintang timur-barat dibangun untuk menghubungkan Hospitaalweg (Jalan Sudirman sekarang) dengan *Komedielaan* (Jalan. Kajaolalido), dan *Prinsenlaan* (Jalan Botolempangan).

Di luar bagian-bagian tersebut, wilayah kota lainnya tetap berupa kampung dengan rumah-rumah bambu, sawah, tegal dan rawa-rawa. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 *Vlaardingen* tempat De Javasche Bank Agentschap Makassar pernah berdiri, menjadi pusat perdagangan dengan sebagian besar penghuninya terdiri etnis Cina. Sekitar Fort Rotterdam dan *Hoogepad* (Jalan A. Yani) menjadi pusat pemerintahan, termasuk kediaman Gubernur (sekarang untuk Kantor Polisi dan Keresidenan) (lihat Peta 7.6 dan 7.7).

Gambar 7.6. Peta Makassar pada tahun 1922



Sumber: Rijksmuseum, Amsterdam

Legenda: A**.** Afdeeling Makassar**;** a. Onderafdeeling Makassar**;** B. Soenggoe Afdeeling Minasa dan Onderafdeeling Gowa.

Bangunan-bangunan penting: 1. Pesanggrahan untuk para aristokrat pribumi (*inlander vorsten*); 2. Sekolah pribumi (*inlander School*); 3. Pasar ikan (*vismarkt*); 4.Sekolah Cina; 5. De Javasche Bank; 6. NHM (Nederlands Handel Maatschappij); 7. Juliana park; 8. Sekolah dasar untuk orang-orang Eropa (Eerste Europesche Lager School); 9. Kantor pos dan telegram; 10. Kantor; 11. Pabrik es (*ijsfabriek*); 12. Kantor polisi (*Politiekantoor*); 13. Kantor Pekerjaan Umum (*Kantoor BOW*); 14. Rumah potong hewan pemerintah kota (*gemeente slahthuis*); 15. Rumah pejabat pemerintah (*officier woning*); 16. Gedung Pengadilan (*Raad van Justitie/Landraad*); 17. Perumahan personel sumah sakit; 18. Rumah sakit tentara; 19. Komplek perumahan perwira; 20. Lapangan tembak (*schiftsoheitterrein*); 21. Kompleks penderita kusta; 22. Rumah pemadam kebakaran (*Brandspuithuis*); 23. Gudang mesiu (*kruitmagazijne*); 24. Stasion karantina (*quaran- taine station*); 25. Gardu listrik (*kabelhuis*) dan transformator (*lichtopstand*).

Gambar 7.7. Peta Makassar pada tahun 1916



Sumber: Perpustakaan Rijksmuseum, Amsterdam, dikeluarkan oleh Topographische Inrichting, Batavia

Meskipun Fort Rotterdam pada 1920-an sudah tidak berfungsi sebagai pusat militer, pemerintahan dan perdagangan, tetapi kawasan di sekitarnya tetap menjadi pusat kota yang penting. Selain dibangun taman, sekolah-sekolah, terdapat tempat rekreasi modern seperti bioskop, gedung komedi (sandiwara), dan lain-lain. Beberapa gambar lama memperlihatkan suasana dan lingkungan benteng dan sekitarnya masih terpelihara dengan penghijauan yang cukup memadai.

Gambar 7.8. Fort Rotterdam (c. 1920) dipandang timur-utara; memperlihatkan suasana dan lingkungan benteng yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai elemen pertahanan



Sumber: KITLV.

Gambar 7.9. Monumen J. A. Bakkers, salah seorang gubernur Sulawesi di taman lebih kecil di sebelah timur Juliana Park



Sumber: KITLV

Gambar 7.10. *Muziekkoepel*, gardu musik



Sumber: KITLV

Bangunan Bergaya Arsitektur Kolonial di Kota Makassar

Gedung Societeit de Harmoni Makassar. Gedung Societeit Harmonie dibangun di sisi Barat, berseberangan dengan Fort Rotterdam dekat dengan permukiman orang-orang Belanda (Hoogepad, 'Kampong Belanda', sekitar *Koningsplein* atau Lapangan Karebosi sekarang). Fungsinya untuk berkumpul orang-orang Eropa kelas menengah ke atas. Pada abad ke-17, orang-orang Eropa yang sebelumnya bermukim di dalam kawasan *Vlaardingen* mulai tinggal di luar benteng setelah keadaan politik lebih mantap dan aman. Meski tidak berhalaman depan, di seberang utara menyatu dengan Taman Juliana (Juliana Park), sebuah taman dengan *kioskmuzik*. Perkumpulan eksklusif Belanda di Makassar menggunakan nama sama dengan di Batavia, Pasoeroean, dan Semarang, yaitu Societeit de Harmonie.

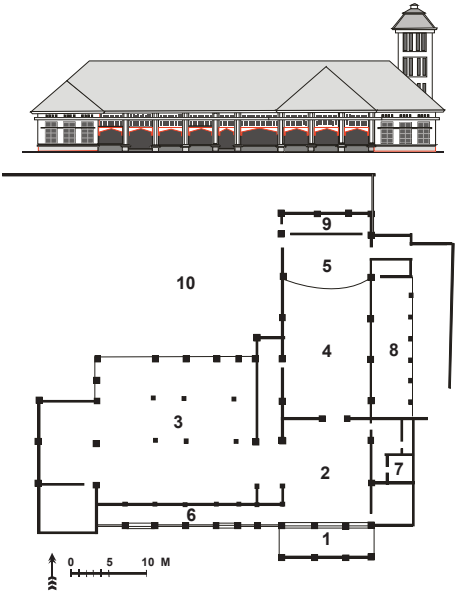
Gambar 7.11. Societeit de Harmoni sebelum dirombak pada 1890-an



Sumber: KITLV.

Societeit de Harmonie direnovasi dengan arsitektur modern sekitar 1910-an. Bentuk denahnya seperti huruf L (Gambar 7.12), membuat ruang terbuka di antara kaki dan alasnya untuk halaman dalam. Setelah selesai direnovasi tidak ada gedung lain yang lebih besar dan megah di Makassar. Unitnya tunggal berbentuk L dengan sisi utama di Prins Hendrik Pad dan Midden Straat (Jalan Bonerate).

Gambar 7.12. Denah dan bentuk Societeit de Harmonie setelah direnovasi



Sumber: Diolah penulis dari KITLV.

Legenda: 1. Kanopi; 2. *Hall;* 3. Ruang pertemuan; 4. Teater; 5. Panggung; 6. Teras depan[523]; 7. Menara; 8. Parkir; 9. Ruang persiapan; 10. Halaman dalam.

Kemegahan gedung itu antara lain memiliki menara tinggi yang juga berfungsi sebagai *landmark* karena terlihat dari mana-mana. Pintu masuk utama di kanan (timur) melalui sebuah teras sebelum masuk ke ruang utama dahulu juga digunakan untuk ruang dansa. Di bagian bawah konstruksi teras tersebut menjorok ke depan. Di sebelah kiri (barat) lobi, terdapat ruang terbuka menyatu dengan taman di belakang untuk duduk-duduk, makan, kafetaria, bilyar, dan lain-lain. Ruang utama auditorium untuk pertunjukan lengkap dengan panggung, ruang ganti

523 Teras semacam ini berfungsi majemuk, selain sebagai penghubung ruang-ruang di dalam, ruang peralihan antara luar dan dalam, juga berfungsi sebagai isolasi panas, agar angin yang masuk ke dalam segar. Namun anehnya hampir semua bagian bangunan yang sangat cocok untuk iklim tropis dan menjadi salah satu ciri arsitektur kolonial di mana-mana, pada zaman kemerdekaan ditutup dengan jendela, untuk ruang berbagai kebutuhan.

pakaian dan lain-lain, berbentuk empat persegi panjang. Di sisi timur auditorium disediakan tempat parkir di bawah atap. Dari denah bangunan yang sebagian besar terbuka menyatu dengan Juliana Park di luar dan taman di dalam, dapat diketahui bahwa orang-orang Belanda sangat senang menikmati udara tropis, terutama dalam berekreasi. Kolom-kolom berderet pada bagian kepala badan dan kaki dihias juga dengan alur-alur vertikal dan horizontal dari ventilasi, tritisan dan lain-lain corak dekorasi disebut *art deco* (corak modern di Eropa). Atap menara berbentuk kubah mirip dengan atap menara kantor KPM yang runcing patah di tengah.

Gambar 7.13. Gedung Societeit de Harmonie setelah dirombak dengan dekorasi *Art-Deco*. Pandangan dari arah selatan (arah Fort Rotterdam), pada 1920-an dengan latar depan Juliana Park



Sumber: KITLV.

Ketika masa Pendudukan Jepang 1942 hingga tahun 1953 Societeit de Harmonie berubah fungsi menjadi Balai Pertemuan Masyarakat. Namun, antara 1953–55 digunakan kembali untuk perkumpulan kaum menengah atas keturunan Belanda, Cina dan golongan pribumi. Antara 1960–78

bekas gedung Societeit de Harmonie digunakan untuk kegiatan yang sangat berbeda yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Kantor DPRD menempati gedung baru, gedung peninggalan Belanda ini digunakan oleh dua badan yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (di sebelah timur) dan Dinas Pendapatan Daerah (barat). Kemudian, sejak 1980 hingga sekarang digunakan oleh Dewan Kesenian Makassar. Pada 1980-an, sebagian besar masih dalam bentuk asli, penambahan dinding dan ruang-ruang di dalamnya dilakukan namun tidak mengubah konstruksi.

Gambar 7.14. Gedung Societeit de Harmonie (1990) setelah tidak digunakan sebagai tempat hiburan orang-orang Belanda



Sumber: KITLV.

Gambar 7.15. Societeit de Harmonie Makassar, pandangan depan (selatan) dan detail hiasan Art-Deco (1999) ketika digunakan sebagai Gedung DPRD. Gang di depan yang berfungsi sebagai isolasi panas matahari dan air hujan ditutup dengan jendela.



Sumber: Koleksi penulis.

Balai Kota (Raadhuis[524]/Gemeentehuis). Tidak sedikit atau bahkan hampir semua bangunan yang menampung berbagai kegiatan pemerintahan di dalam benteng, kemudian ke luar sejalan dengan kehidupan baru di luar tembok (*extra-muros*). Salah satu gedung yang kemudian dipindah ke luar benteng adalah Balai Kota yang berlokasi di Gouverneurs Laan (Jalan Balai Kota). Selain berfungsi sebagai tempat para pimpinan eksekutif menjalankan kegiatannya, secara fisik merupakan lambang dari keberadaan pemerintahan kota. Gedung dibangun pada sekitar 1916 sejalan dengan Makassar dinyatakan sebagai *staadsgemente*. Lokasinya dipilih sesuai dengan pola dan fungsi bagian kota yang pada waktu itu berpindah ke kawasan pusat kota baru, hanya beberapa ratus meter dari Fort Rotterdam dan Societeit de Harmoni. Selain itu, penentuan lokasi tersebut juga tepat bila dilihat dari segi pencapaian para pegawainya yang kebanyakan tinggal di sekitar *Vlaardingen, Hoogepad, Koningsplein, Heerenweg*, dan lain-lain.

524 Kantor Balai Kota dan Dewan Kota menjadi satu.

Balai Kota termasuk bangunan awal yang dibangun di Makassar berlantai dua di luar benteng, dikelilingi oleh halaman depan, samping dan belakang, merupakan penerapan konsepsi *Garden City*, suatu gaya arsitektur yang berkembang pada awal abad ke-20 di Barat. Pintu, jendela, dan ventilasi lebar memenuhi permukaan keempat sisinya untuk penghawaan dan pencahayaan, merupakan ciri bangunan tropis yang menjadi perhatian utama dalam perancangan gedung. Selain itu, ciri bangunan pada wilayah yang hanya memiliki dua musim dan lembab terlihat pada atapnya yang berbentuk limasan (atap dengan empat sisi miring) dengan kemiringan tajam. Di luar kedua hal tersebut, arsitek gedung ini tidak mengambil bentuk atau elemen arsitektur lokal. Gedung yang menghadap ke barat berorientasi ke benteng dan laut, bergaya Neoklasik campuran Renaisans dan Gotik.

Gambar 7.16. Gedung Balai Kota Makassar dengan arsitektur bergaya Neoklasik campuran Renaisans dan Gotik

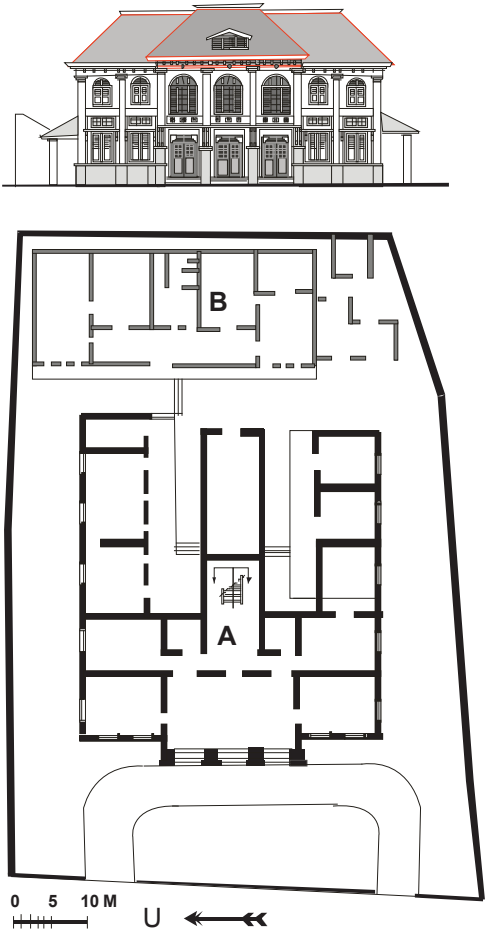


Sumber: KITLV.

Pengambilan gaya-gaya tersebut terlihat pada irama monoton yang melebar ke kiri dan ke kanan, dibentuk oleh dinding-dinding yang dibatasi dalam jarak sama oleh pilaster (kolom yang menyatu dengan dinding,

menonjol ke luar). Demikian pula pada jendela-jendela yang melengkung di bagian atas dan hiasan pada kepala dan kaki pilaster berupa *molding*. Ciri-ciri tersebut banyak dipakai pada bangunan klasik Renaisans. Elemen-elemen *gothic* meskipun tidak terlalu menonjol, terlihat pada konsol-konsol tritisan dan hiasan lainnya.

Gambar 7.17. Denah Gedung Balai Kota Makassar



Sumber: Diolah penulis dari KITLV. Legenda: A. Unit Utama; B. Unit Pendukung.

Gambar 7.18. Interior Gedung Balai Kota Makassar. Pandangan dari depan (barat) Balai Kota Makassar pada 1930-an dan tangga menuju ruang rapat di lantai dua (atas). Ruang rapat di lantai dua dengan lampu gantung antik sama dengan yang di *hall* (bawah)

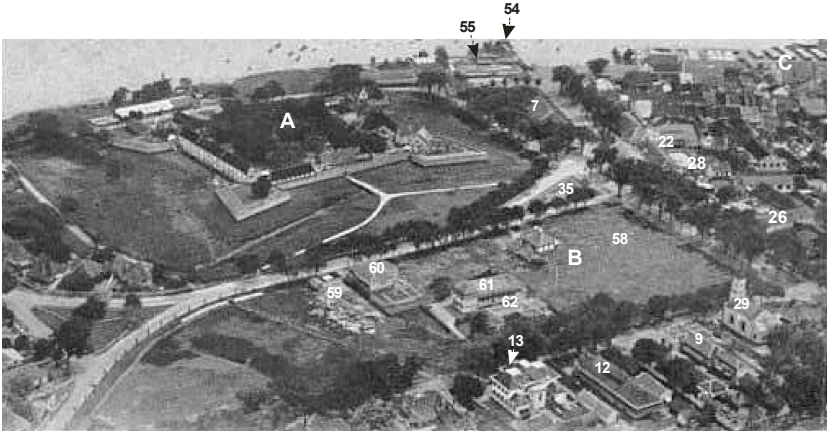


Sumber: KITLV.

Hall dahulu terbuka langsung di kiri-kanan terdapat ruang staf dan di depannya terdapat tangga. Konsekuen dengan bentuk simetris tangga utama ke lantai atas terdapat di tengah yang setelah melalui *bordes* terpisah ke kiri dan kanan. Pada lantai dua dari tangga langsung terdapat pintu masuk ruang sidang Sekarang bekas *Gemeentehuis* yang kemudian untuk Balai Kota dan selanjutnya untuk kantor Badan Perancang dan Pembangunan Daerah, digunakan sebagai Museum Kota Makassar.

Gedung Pengadilan (Raad van Justitie/Landraad). Banyak bangunan pemerintahan dan pelayanan publik dibangun di luar Fort Rotterdam dan sekitar, antara lain Kantor Pos, Telepon dan Telegram, Kantor Gubernur (kemudian Kantor Wali Kota Makassar), Kantor Inspeksi Pajak (*Landrente*), dan beberapa kantor bank.

Gambar 7.19. Foto udara Fort Rotterdam dan kawasannya. Memperlihatkan bangunan-bangunan penting di sekitarnya setelah kehidupan di luar benteng pada 1930-an



Sumber: KITLV.

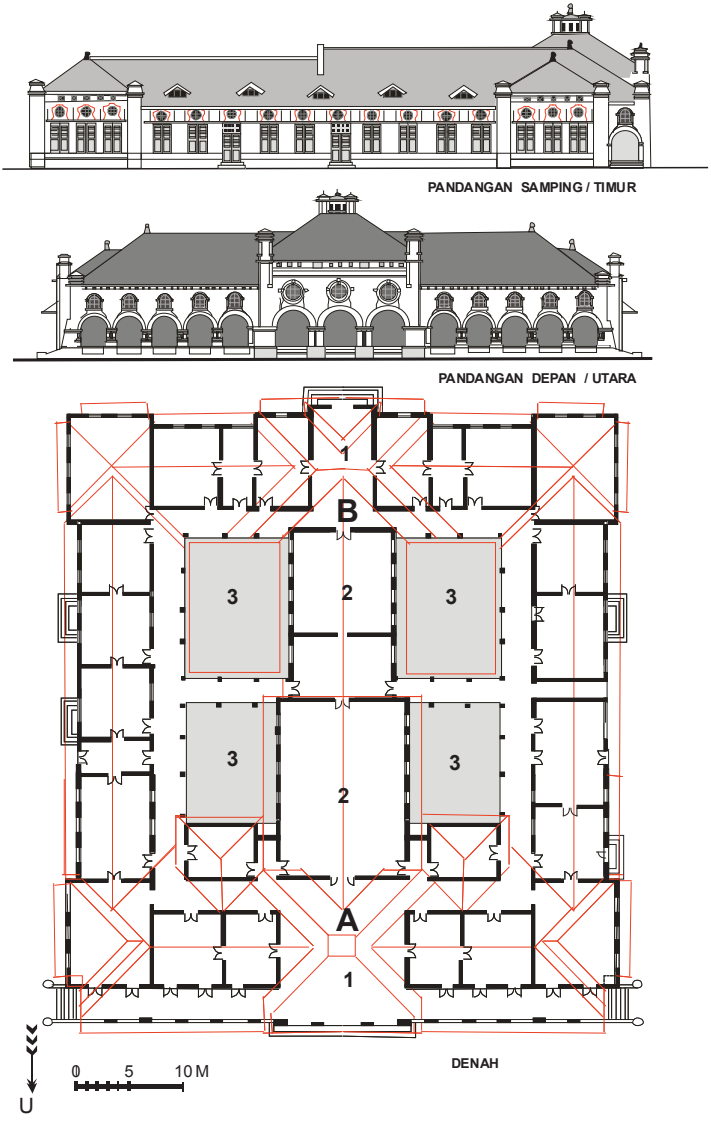
Legenda: A. Fort Rotterdam; B. Kerkplein; C. Wilhelminakade; 7. Juliana Park dengan Celebes Monumen; 9. Kantor Pos, Telepon dan Telegram; 12. Kantor Polisi; 13. Balai Kota; 22. Societiet de Harmonie ; 26. Kediaman Gubernur. ; 28. Kantor Gupernur; 29. Gereja Protestan; 35. Bakkersmonument; 39. Sekolah untuk perempuan.

Di kawasan *Vlaardingen*, sebelah utara benteng, terdapat gedung pemerintahan penting dalam asitektur yang unik dan menarik yaitu Gedung Pengadilan (Raad van Justitie/Landraad). Raad van Justitie sedikit agak jauh sekitar 200 meter dari benteng. Gedung tersebut pada masa kemerdekaan digunakan sebagai Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan berbagai penambahan unit dan renovasi. Pada masanya, gedung itu tergolong megah, berwibawa dan berlokasi sangat strategis karena terletak di seberang barat Lapangan Karebosi saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian orang Belanda yang besar terhadap pengadilan terutama sejak Makassar dinyatakan sebagai *gemeente* pada 1906, dalam rangka pelaksanaan politik desentralisasi. Gedung itu juga menunjukkan bahwa desentralisasi yang dijalankan pada waktu itu tidak hanya dalam pemerintahan atau eksekutif, tetapi juga dalam hal yudikatif atau pengadilan.

Kantor Pengadilan terdiri dari unit-unit segi empat panjang yang satu sama lain berhubungan membentuk bujur sangkar. Kompleks dikelilingi oleh halaman cukup luas memisahkan gedung dengan tiga jalan yang mengelilinginya yaitu di utara Julianaweg (Jalan Kartini), di timur Hospitaalweg (Jalan Jenderal Sudirman) dan di selatan nama jalannya diambil dari fungsi gedungnya yaitu Justitie laan (Jalan Amannagappa). Pada masa lalu, bangunan itu berfungsi ganda yaitu Raad van Justitie menempati separuh bagian utara masuk utama dicapai dari Julianaweg dan Landraad menempati separuh lainnya masuk dari Justitielaan. Raad van Justitie digunakan untuk proses pengadilan orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan, sementara Landraad digunakan untuk orang pribumi.

Arsitektur gedung mengambil gaya Neoklasik Eropa yang berupa campuran Renaisans dan Romawi. Ciri yang pertama terlihat dari wajah sisi-sisinya yang simetris, melebar-horisontal, dan monoton dibentuk oleh elemen-elemen bangunan (deretan jendela, pintu, ventilasi, hiasan, dan lain-lain). Bentuk simetris tersebut menampilkan kesan formal, berwibawa dan terutama melambangkan keadilan.

Gambar 7.20. Denah Gedung Raad van Justitie/Landraad



Sumber: Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin)

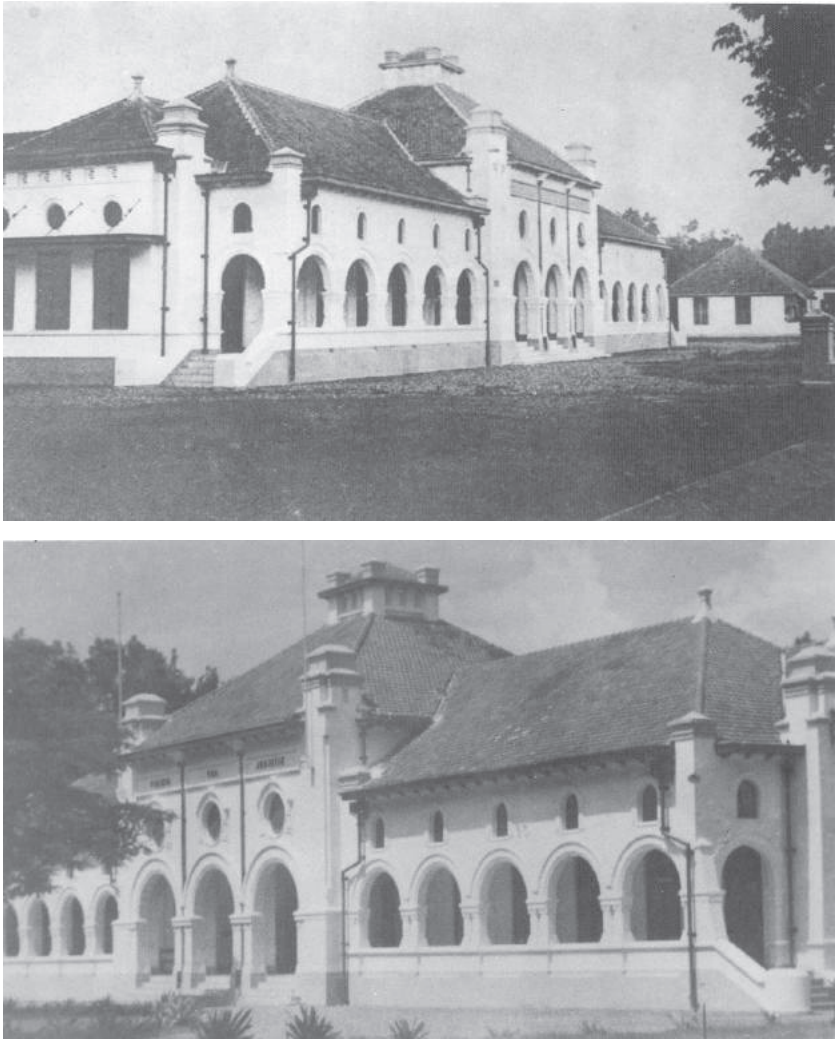
Legenda: A. Raad van Justitie; B. Landraad; 1. Hall. 2. Ruang sidang. 3. Halaman dalam.

Pada bagian wajah utara dan selatan lebih dipertegas oleh adanya unit menonjol di tengah di mana terdapat pintu masuk utama. Selain menonjol ke depan, atap bagian tengah yang berbentuk limasan juga lebih tinggi daripada atap bagian lainnya. Pada titik puncaknya dihias dengan *lantern* elemen dekoratif yang banyak dipakai pada arsitektur Renaisans, juga berfungsi untuk mengalirkan udara di antara atap dan plafon. Ujung kiri-kanan unit menonjol ini terdapat pilaster, keduanya pada pucuk yang dihiasi *amortizement*, hiasan klasik Eropa, sehingga menambah daya tarik pintu masuk utama tersebut.

Gambar 7.21. Foto-foto Gedung Pengadilan (Raad van Justitie/ Landraad)



Gambar 7.21. Foto-foto Gedung Pengadilan (Raad van Justitie/ Landraad) (Lanjutan)



Sumber: KITLV.

Keterangan: Pandangan dari atas gedung hotel pada 1995 (atas); dari arah barat-utara (tengah dan bawah) pada 1920-an.

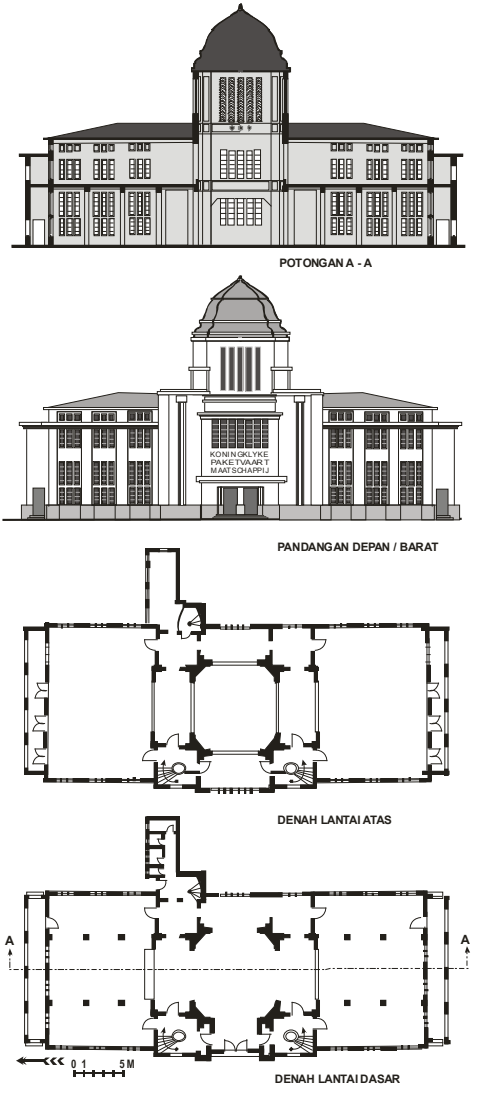
Gedung Koninklijke Paketvaart Maatschappij/Pelni. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) merupakan gedung penting di kawasan perdagangan pada masa kolonial Hindia Belanda. Gedung ini terletak di kawasan bagian utara *Vlaardingen*. Pada masa awal kemerdakaan (1950 hingga 1990-an) gedung ini digunakan sebagai kantor Pelni (Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia). Namun, saat ini gedung KPM tersebut tidak berbekas karena diratakan dengan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Sukarno-Hatta.

Gedung KPM dibangun pada 1925 berdasar rancangan Ir. F. J. L. Ghijsels, seorang arsitek Belanda terkemuka. Pembangunan gedung tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan armada angkutan laut wilayah timur Indonesia. Gedung KPM berdiri di Wilhelminakade (Pelabuhan Makassar) di Wilhelminastraat yang sejajar dengan Passerstraat. Sebelum pembangunan Pelabuhan Sukarno-Hatta, Wilhelminastraat diubah menjadi Jalan Laksamana R. E. Martadinata. Kemudian setelah dilakukan pembangunan pelabuhan, kedua jalan itu menyatu menjadi Jalan Nusantara.[525]

Gedung KPM berupa unit tunggal, sisi terpanjang di tepian jalan langsung tanpa halaman depan. Pada sisi kiri-kanan (selatan-utara), bagian belakang berdempetan dengan bangunan lain. Di belakang (timur) terdapat halaman langsung, dapat dicapai dari jalan sejajar dengan Wilhelminastraat, yaitu Passerstraat (Jalan Nusantara). Perletakan bangunan tipikal bangunan-bangunan di pusat kota lama Eropa pada Abad Pertengahan. Wajah depan gedung simetris, diperjelas dengan menara pada sumbu tengahnya. Seperti lazimnya bangunan simetris, pintu masuk utama di tengah, setelah melalui ruang antara langsung di *lobby* yang luas, berdenah segi empat sama sisi bujur di sudut-sudutnya terdapat pilaster, tinggi menerus sampai bagian atas menara kosong/ *vide/mezzanine*. Jarak lantai bagian tengah ke plafon, cukup tinggi (8 meter) dan banyak jendela, ventilasi memenuhi permukaan dinding luar, keterbukaan pada *vide*, menjadi sistem penghawaan dan pencahayaan alami baik sekali.

525 Tentang riwayat Ghijsels, lihat Akihary (1996). Ir. F. J. L. Ghijsels, salah seorang arsitek Belanda yang cukup banyak berkarya; merancang semua kantor KPM di kota-kota besar, antara lain di Jakarta dan Semarang,

Gambar 7.22. Gambar dan denah Gedung KPM



Sumber: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

Keterangan: Potongan membujur (atas), pandangan dari depan atau arah barat (tengah), denah lantai dasar dan lantai atas (bawah).

Gedung KPM dirancang dan dibangun ketika dunia arsitektur dunia sedang dilanda modernisme. Walaupun demikian masih terdapat unsur klasik yang terlihat cukup dominan pada menara Gedung KPM. Atap kubah model Byzantium meruncing di atas menambah kesan monumental. Bentuknya segi delapan dan patah di bagian tengah mirip pada menara-menara gereja zaman *Romanesque* Abad Pertengahan, yang identik dengan menara Societeit de Harmonie.

Gambar 7.23. Pandangan Gedung KPM dari arah barat-selatan dan ruang dalam bagian di atas *hall,* di bawah kubah gedung



Gambar 7.23. Pandangan Gedung KPM dari arah barat-selatan dan ruang dalam bagian di atas *hall,* di bawah kubah gedung (Lanjutan)



Sumber: Akihary 1996.

Besar dan tingginya menara, membuat gedung ini dapat terlihat dari jauh bahkan dari laut sehingga menjadi tanda yang cukup mengesankan ketika kapal akan tiba di Kota Makassar. Pada wajah depan dan sisi-sisi terdapat dekorasi geometris, terdiri dari blok-blok dan garis-garis horisontal, demikian pada ruang dalam. Dekorasi semacam ini mendapat inspirasi dari *Art-Deco*, gaya hiasan cukup banyak dipakai pada bangunan modern pada 1920-an. Jendela dan ventilasi mengikuti ketinggian ruang sehingga bangunan ini kelihatan meninggi dan menambah kesan monumental. Kubah berciri klasik tersebut dipadukan secara selaras dengan ciri-ciri modern. Disesalkan bahwa bangunan indah, megah dan bersejarah ini sekarang sudah tidak ada lagi.

Gambar 7.24. Gedung KPM dan pandangan kubahnya dari arah laut sangat jelas menjadi *landmark*, terutama bagi kapal-kapal yang akan mendarat di Wilhelminakade yang menjadi latar depannya



Sumber: KITLV.

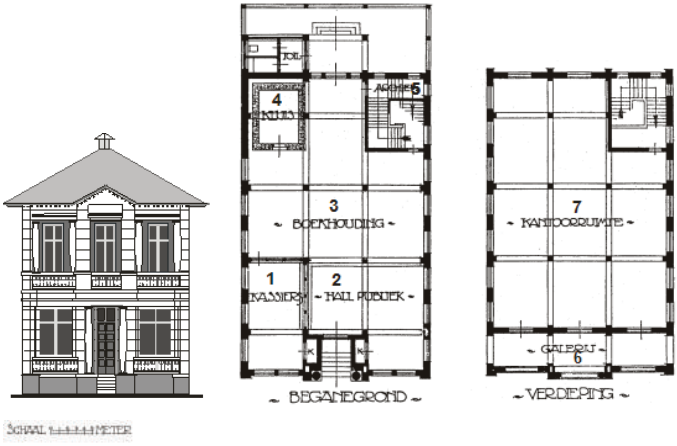
Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij. Bangunan lain yang musnah akibat pembongkaran untuk pembangunan Pelabuhan Sukarno-Hatta adalah gedung Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), perusahaan dagang terbesar di Hindia Belanda. Gedung itu memiliki lokasi yang bersebelahan pagar di belakang (timur) dengan bekas Kantor KPM. Seperti semua bangunan di kawasan ini, berdiri langsung di tepian jalan raya tanpa halaman depan ataupun samping. Selain berdampingan dengan KPM, Gedung NHM juga berdampingan dengan gedung De Javasche Bank Makassar. Seperti di kota-kota besar zaman Hindia Belanda, Gedung NHM dan DJB biasanya berlokasi berdampingan yang menunjukkan kaitan antara perusahaan dagang dan kepentingan keuangannya.

Gedung NHM didirikan pada 1912, terdiri dari dua lantai. Perancang gedung adalah Ed Cuypers & Hulswit, perusahaan perancangan arsitektur terkemuka di Hindia Belanda. Lantai satu di atas pondasi lebih tinggi

daripada jalan sehingga untuk memasukinya harus melalui tangga langsung ke *hall*. Pintu masuk utama dari tengah memperkuat bentuk simetris. Pintu diletakkan di antara dua kolom besar dalam hal ini dari '*Order Doric*'. Ornamen luar juga tidak berbeda dengan bangunan pada zamannya antara lain berupa *molding*, *balustrade* dan alur-alur horisontal pada dindingnya seperti pada banyak ditemukan pada bangunan Renaisans.

Di sebelah kiri *hall* ada ruang kasir dengan *counter* dan panel dari rangka kayu dan kaca, dengan ruang bendahara di depannya yang dipisahkan oleh *counter*. Pembagian ruang dalam yang digunakan selain *counter* juga dengan panel dengan lokasi di belakang ruang bendahara (pemegang buku). Di sebelah kiri belakang ada tempat penyimpanan barang-barang berharga (almari besi/*safe deposit*), sebelah kanan terdapat tangga untuk menuju lantai atas. Dari tengah langsung ke halaman belakang dan toilet yang berada di balik *safe deposit*. Lantai dua terbuka tanpa partisi, mempunyai balkon di depan dengan *balustrade* model Renaisans. Plafon berjarak tinggi cukup baik untuk penghawaan (sirkulasi udara), seperti pada kebanyakan bangunan didirikan pada masa itu. Dekorasi berupa garis terbentuk oleh *molding* seperti pada arsitektur berdekorasi *Art-Deco*. Selain itu pada dinding terdapat *ruticate,* yaitu garis-garis horisontal pada arsitektur klasik yang terbentuk oleh spasi antara batu.

Gambar 7.25. Pandangan depan gedung dan denah Gedung NHM Makassar



Sumber: Ed Cuypers & Hulswit, 1930.

Legenda: 1. Kasir; 2. *Hall*; 3. Pembukuan; 4. Almari atau ruang besi (*kluis*); 5. Arsip; 6. Teras atas; 7. Kantor.

Gambar 7.26. Kantor NHM Makassar (1930-an). Pandangan dari arah barat



Sumber: Ed Cuypers & Hulswit, 1930.

Gedung eks-De Javasche Bank Makassar

Rencana mendirikan gedung kantor cabang di Makassar sudah lama digagas yakni sejak De Javashe Bank Agenstchap Makassar berdiri pada 1864. Namun, hal itu belum terwujud akibat dari belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk pembangunan gedung kantor DJB. Direksi DJB Makassar kemudian memutuskan menyewa ruang kantor sambil menunggu keputusan untuk membangun gedung sendiri. Kantor cabang DJB Makassar bermula menggunakan ruang "darurat" di gedung Factorij van de Nederlandsche Maatschappij cabang Makassar. Baru sejak Juni 1866 memiliki gedung sendiri di Jalan Jampea. Gedung itu dibangun dengan biaya sebesar 36.000 gulden.[526]

Kemudian pada 1912, bersamaan dengan pembangunan gedung DJB di Batavia, dewan direksi DJB memutuskan membangun pula dua gedung DJB di wilayah Medan dan Makassar. Bangunan tersebut dirancang oleh arsitek perancang Ed Cuypers & Hulswit. Biro arsitek ini merancang pula gedung NHM Makassar, dan terlebih lagi dipercaya untuk membangun semua Kantor De Javasche Bank di seluruh Hindia Belanda.[527]

Gedung De Javasche Bank Makassar untuk ukuran waktu itu cukup besar, arsitekturnya sangat indah, yang merupakan campuran (*eclectic*) gaya klasik Eropa, Romawi, Yunani dan Renaissans. Gedung DJB Makassar terdiri dari dua lantai. Denah gedung DJB memiliki bentuk segi empat bujur sangkar, pada lantai di atas terbagi dalam sembilan petak segi empat sama sisi (bujur sangkar). Lantai dasar setengah di bawah tanah (*semi-basement*), menyembul ke atas dan lantai di atasnya langsung dicapai dari luar melalui tangga cukup tinggi. Di tengah-atasnya terdapat bagian yang berdinding tinggi dan atapnya berbentuk kubah. Di dinding keliling penyangga kubah yang penampangnya juga bujur sangkat tersebut terdapat jendela-jendela sehingga pada siang hari, ruang-ruang di bawahnya cukup terang oleh sinar alami. Pada bagian bawah berupa *semi-basement*, yang digunakan untuk arsip dan lemari besi (*kluis*).

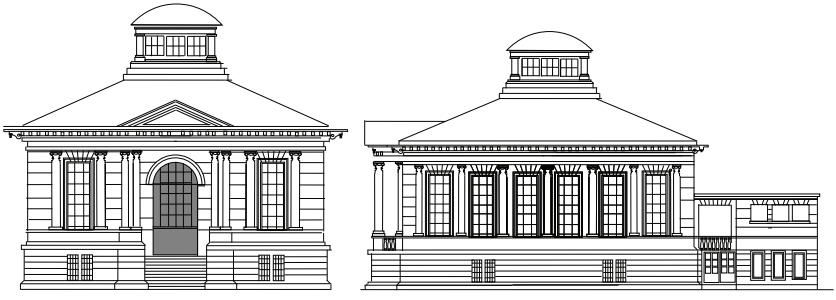
526 Arsip Bank Indonesia (t.t.: 5).

527 Arsip Bank Indonesia (t.t.: 5).

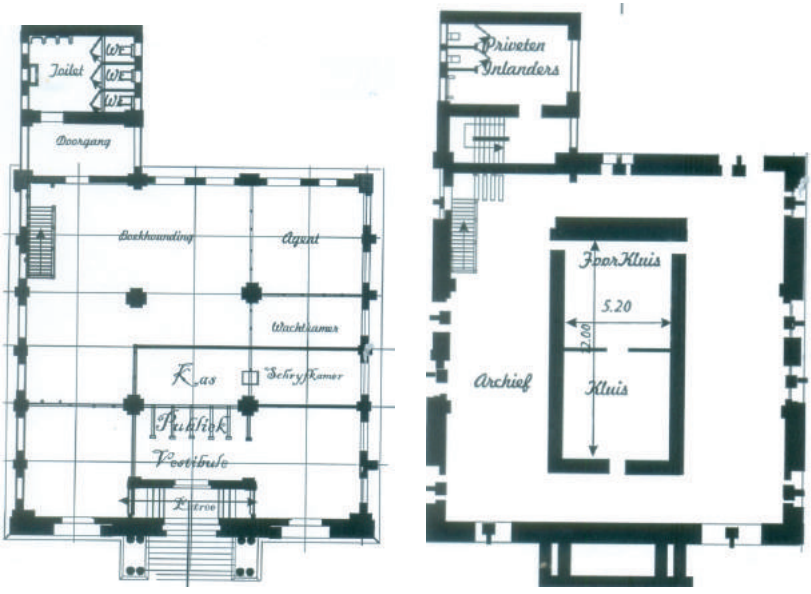
Diskriminasi antara orang pribumi dan orang Belanda terlihat pada toilet yang terpisah di lantai utama, dan di bawah yang khusus untuk pribumi (*inlander*).

Wajah depan (*fasade*) didominasi unsur klasik Eropa berupa kolom silindris model *corintien*; demikian pula *pediment* (konstruksi segi tiga disangga kolom-kolom). Kubah di atas-tengah atap juga merupakan unsur bangunan klasik yaitu model Byzantium. Dalam hal arsitektur, kolom gedung ini di kiri kanannya terdapat empat buah, masing-masing dua berpasangan. Terlihat bahwa kolom sebanyak dan sebesar itu bukan hanya merupakan unsur konstruksi melainkan juga sebagai hiasan. Kolom-kolom di kiri-kanan mengapit jendela berambang lengkung, berdiri di atas tumpuan juga merupakan unsur klasik Renaissans. Garis-garis horizontal di dinding lantai bawah juga merupakan ciri khas arsitektur Renaissans. Hal yang paling jelas dalam aspek Renaissans lainnya dalam bangunan ini adalah pola bangunan berkesan di lantai atas yang "menumpuk" pada lantai bawah dengan antara lain adanya kolom-kolom berdiri di atas garis-garis *molding* yang menjadi batas antara lantai di bawah dan di atasnya.

Gambar 7.27. Gambar prarencana Gedung De Javasche Bank Makassar beserta denah gedung. Pandangan depan (atas-kiri), pandangan samping (atas-kanan) denah lantai utama (bawah-kiri) dan denah lantai bawah (setengah di bawah tanah/*semi-basement*) Kantor De Javasche Bank



Gambar 7.27. Gambar prarencana Gedung De Javasche Bank Makassar beserta denah gedung. Pandangan depan (atas-kiri), pandangan samping (atas-kanan) denah lantai utama (bawah-kiri) dan denah lantai bawah (setengah di bawah tanah/*semi-basement*) Kantor De Javasche Bank (Lanjutan)

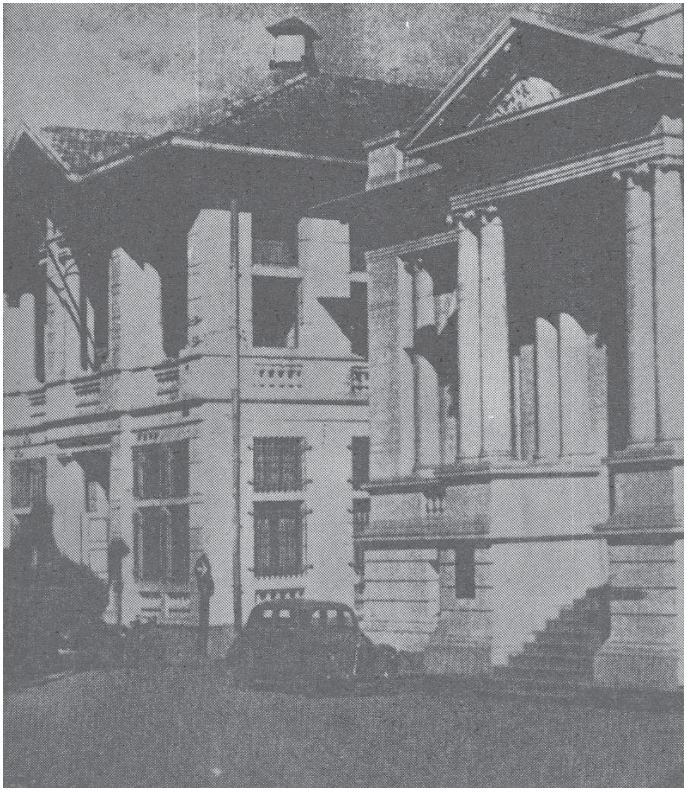


Sumber: Digambar ulang dari cetak biru (*blue print*) gambar asli; Arsip Bank Indonesia.

Meskipun elemen-elemen tersebut merupakan bagian dari model klasik Yunani-Eropa, namun seperti pada kantor De Javasche Bank lainnya di Hindia Belanda, perancang Ed Cuypers & Hulswit selalu memasukkan unsur Nusantara. Dalam hal ini pada Gedung DJB terdapat ornamaen berupa relief model Jawa pada *tympanum* (bidang segi-tiga pada *pediment*). Selain itu, empat kolom di ruang dalam, penyangga kubah dengan jendela atas cukup luas menerangi ruang di bawahnya, tidak berbeda dengan konsep *sakaguru* dalam konstruksi joglo Jawa (Gambar 7.25). Di ruang setengah dalam tanah diletakkan ruang penyimpanan

barang-barang berharga berdinding besi, bagian atasnya menjadi dasar dari lantai dua. Untuk memasuki lantai utama dari luar, melalui tangga di tengah kolom-kolom tersebut, identik dengan yang ada di Gedung NHM di sebelahnya.

Gambar 7.28. Gedung DJB yang berdampingan dengan Kantor NHM Makassar



Sumber: KITLV.

Gambar 7.29. Gedung DJB Makassar sekitar 1920-an yang berlokasi di Passerstraat atau Jalan Nusantara sekarang



Sumber: KITLV.

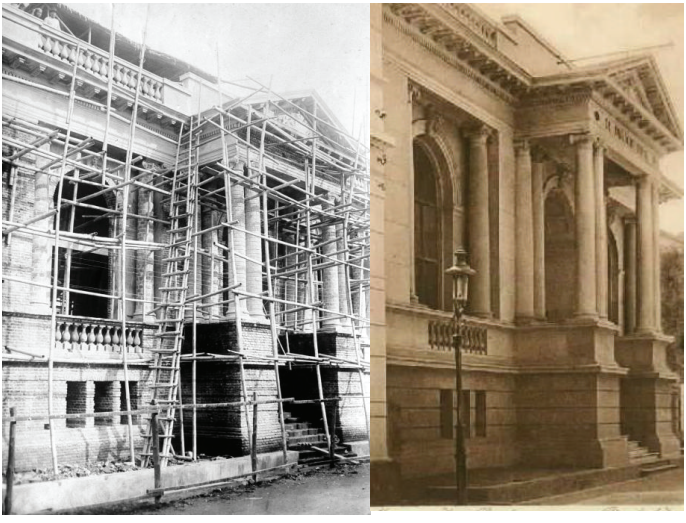
Walaupun pada bagian tampak depan bercirikan aliran klasik seperti pada kuil Yunani-Romawi, namun empat tiang di tengah pada denah lantai utama tidak diragukan merupakan inspirasi dari *sakaguru* dalam konstruksi joglo Jawa. Unsur lokal semacam itu selalu dimasukkan dalam perancangan biro arsitek ini.

Gambar 7.30. Interior Gedung DJB Makassar



Sumber: KITLV.

Gambar 7.31. Pembangunan De Javasche Bank Makassar di Passarstraat (1910-an) dan foto setelah selesai



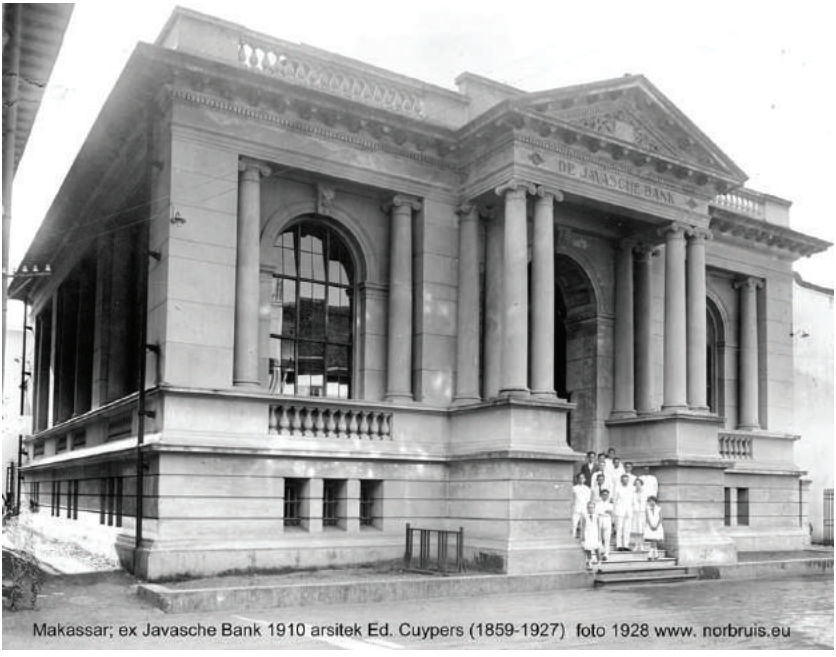
Sumber: Arsip Bank Indonesia.

Gambar 7.32. Gedung De Javasche Bank Makassar tampak depan setelah selesai pembangunan. Bergaya Neo-Renaissans; hiasan pada *thympanum* (bidang segi tiga di atas) bercorak *floral* model Jawa. Foto diambil sekitar 1920-an



Sumber: KITLV.

Gambar 7.33. Pegawai De Javasche Bank Makassar berfoto di depan kantornya tahun 1928



Sumber: www.norbruis.eu.

Perluasan Pelabuhan dan Penghancuran Gedung DJB Makassar

Gedung DJB Makassar terletak di kawasan pusat perekonomian pada zaman kolonial, yakni di Passerstrat yang kemudian menjadi Jalan Nusantara setelah masa kemerdekaan. Selain gedung DJB, pada kawasan itu juga terdapat gedung perkantoran dan pusat komersial lain seperti Gedung NHM, Gedung KPM, dan pertokoan baik milik pengusaha Cina maupun Eropa. Gedung-gedung tersebut tetap berdiri sampai hingga 1990-an ketika pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan perluasan Pelabuhan Soekarno-Hatta.

Perluasan pelabuhan tersebut sesuai dengan agenda pemerintah yang menjadikan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai pusat pengiriman barang menuju Kawasan Timur Indonesia. Makassar juga dicanangkan sebagai pusat ekonomi untuk wilayah tersebut. Perluasan pelabuhan dilakukan untuk menambah jumlah kapasitas bongkar muat serta kapasitas penyimpanan peti kemas yang digunakan untuk mengirimkan barang ke wilayah lain. Pelabuhan Makassar dikembangkan bukan hanya karena perannya yang penting dalam pembangunan KTI, tetapi juga globalisasi perdagangan dunia internasional di kawasan Pasifik.

Pengembangan Pelabuhan Makassar mendapat pinjaman lunak dari Jepang sebesar 6.658 miliar yen atau setara dengan 146 miliar rupiah. Pinjaman itu digunakan untuk perluasan Dermaga Hatta dan keperluan kontainerisasi serta pembuatan dermaga khusus penumpang sepanjang 670 meter. Pembangunan perluasan fasilitas Pelabuhan Makassar, khususnya Dermaga Hatta, menurut Pimpinan Proyek, Wasis Subyanto, merupakan antisipasi kebutuhan sarana pelabuhan yang bisa melayani kegiatan ekspor Sulawesi Selatan kurun 2000-an dan daerah-daerah di KTI lainnya.[528]

Pengembangan pelabuhan tersebut juga dibutuhkan berkaitan dengan pengalihan jalur pelayaran perdagangan internasional lewat jalur konvensional Selat Malaka. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Soentoro, Selat Malaka yang saat ini teramai kedua setelah Selat Dover di Inggris suatu saat akan jenuh dilihat dari segi keselamatan pelayaran.[529]

Penggusuran akibat perluasan pelabuhan tersebut terjadi pada 1994. Sementara upaya perluasan telah dilakukan sejak 1992. Konsekuensi dari pembangunan tersebut adalah penggusuran beberapa kawasan yang langsung berdempetan dengan pelabuhan. Akibat penggusuran tersebut, tiga kantor penting zaman Belanda yaitu bekas Gedung KPM (yang kemudian menjadi Gedung Pelni), NHM, dan De Javasche Bank, di dekat Wilhelminakade di Jalan Nusantara harus diratakan dengan tanah.

528 *Kompas*, 24 Februari 1994.

529 *Kompas*, 8 Agustus 1994.

Gambar 7.34. Foto udara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; pembangunan sepanjang pantai di bagian utara Kota Makassar hingga Pelabuhan Paotere untuk pelabuhan kapal Pinisi



Sumber: Diolah dari Google Maps; maps. google.com

Legenda: A. Benteng Ujung Pandang; B. Lokasi Wilhelmina Steiger (Pelabuhan Wilhelmina); C. Lokasi Jalan Nusantara, lokasi Gedung De Javasche Bank.

Sebelum diratakan dengan tanah, bekas Gedung DJB Makassar, atau Ujung Pandang pada saat itu, merupakan kantor Bank Indonesia yang digunakan sejak 1953 hingga 1978. Kemudian, sejak 1978 BI Ujung Pandang menempati gedung baru yang lebih besar di Jalan Sudirman. Keputusan membangun gedung BI Ujung Pandang yang baru itu dilakukan untuk memfasilitasi jumlah pegawai yang makin besar dan juga tugas yang makin banyak. Pada 4 Maret 1978, dilakukan peresmian gedung baru Bank Indonesia Ujung Pandang oleh Gubernur Bank Indonesia Rahmat Saleh.

Gambar 7.35. Gedung Bank Indonesia Ujung Pandang di Jalan Sudirman, menggantikan gedung BI lama di Jalan Nusantara. Gedung ini diresmikan oleh Gubernur BI Rahmat Saleh pada 1978







Sumber: Arsip Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, gedung eks-DJB Ujung Pandang atau kantor BI lama di Jalan Sudirman setelah pembangunan gedung BI baru masih tetap digunakan untuk kegiatan perkantoran.[530] Secara berangsur-angsur segala kegiatan BI Ujung Pandang dialihkan ke gedung baru.

530 Wawancara dengan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia Makassar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, 14 Agustus 2018).

Setelah semua kegiatan dipindahkan ke gedung baru, BI Ujung Pandang mengambil keputusan untuk meminjamkan gedung tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan. Namun sangat disayangkan tidak ditemukan arsip atau dokumen yang menyatakan sejak kapan peminjaman tersebut dilakukan. Hal yang dapat dipastikan adalah BPD Sulawesi Selatan (saat ini bernama Bank Sulselbar) menempati gedung tersebut hingga terjadi penggusuran perluasan pelabuhan pada 1994.[531]

Menurut beberapa pegawai BPD Sulawesi Selatan, saat itu gedung eks-DJB Makassar dikenal dengan sebutan "Gedung Putih" karena keindahan gedung tersebut yang seluruhnya dicat putih bersih. Menurut mereka, gedung tersebut dikenal sebagai gedung yang sangat megah dan cantik dibandingkan dengan gedung-gedung lain di sepanjang Jalan

Gambar 7.36. Gedung eks-DJB ketika dipinjam dan digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (1990-an), dipandang dari arah barat-selatan



Sumber: Arsip Bank Indonesia.

531 Wawancara dengan Romy Thohar, Abdul Rahman, Muhammad Rakib, dan Sukiman (pegawai Bank Sulselbar), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, 12 November 2018).

Nusantara. Mereka juga sangat menyayangkan bahwa Gedung Putih itu harus digusur rata dengan tanah.[532]

Diperoleh informasi bahwa kebijakan perluasan Pelabuhan Makassar dilakukan oleh sebuah tim pelaksana dari Pelindo. Pimpinan Proyek diketuai oleh Ir. Wasis Subianto; Ir. Kusuma Hadi sebagai pelaksana proyek, Riman S. Duyo sebagai pengacara Pelindo, dan Hasan Dobdang sebagai pelaksana teknis. Pimpinan Proyek telah dibentuk sejak 1991 dan memiliki tugas utama melakukan pembebasan lahan terutama mengenai lahan-lahan yang masih sengketa akibat sang pemilik enggan menjual lahannya kepada Pelindo.[533]

Penggusuran yang dilakukan untuk perluasan pelabuhan tidak berjalan mulus. Baru pada 1994 penggusuran bangunan di sepanjang Jalan Nusantara dan Jalan R. E. Martadinata atau di sisi yang berdempetan langsung dengan pelabuhan dapat diselesaikan. Banyak terjadi penolakan atau sengketa yang berujung pada pengadilan dalam upaya penggusuran tersebut. Beberapa pihak menentang penggusuran terutama pemilik pertokoan yang berada di sepanjang Jalan Nusantara karena merasa kehilangan mata pencarian mereka. Akan tetapi pihak Pimpinan Proyek mengatakan telah melakukan upaya persuasi dengan ganti rugi yang sesuai dan adil. Dalam penggusuran tersebut, menurut kesaksian Hasan Dobdang, Pelindo mengeluarkan dana total sebesar 4 miliar rupiah sebagai ganti rugi bagi pihak yang menolak penggusuran tersebut dengan menitipkan uang itu ke pengadilan. Namun berapa total keseluruhan dana yang dikeluarkan sebagai ganti rugi penggusuran tidak dapat diingat, terlebih lagi karena data dan dokumen penggusuran tidak dapat lagi dilacak keberadaannya.[534]

Proses penggusuran gedung eks-DJB Makassar yang berada di Jalan Nusantara 53, menurut kesaksian Hasan Dobdang, dilakukan paling akhir berhubung kokohnya material gedung. Gedung itu digusur pada 1994 setelah dilakukan proses ganti rugi kepada Bank Indonesia Ujung Pandang.

532 Wawancara, s.d.a.

533 Wawancara dengan Hassan Dobdang, Pelaksana Teknis Pimpinan Proyek Pelindo, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, 13 November 2018).

534 Wawancara, s.d.a.

Hasan Dobdang sebagai kepala teknis proyek bersama bendahara proyek yang mengantarkan uang tersebut ke Bank Indonesia dan diterima langsung oleh Kepala Cabang Bank Indonesia Ujung Pandang. Namun sangat disayangkan jumlah besaran uang yang diterima tidak diingat lagi.[535]

Penggusuran gedung eks-DJB Makassar pada 1994 menimbulkan polemik, terutama dari berbagai pihak yang tidak setuju gedung bersejarah tersebut harus digusur. Pihak yang paling vokal menyuarakan penolakan adalah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menolak dengan pertimbangan bahwa gedung tersebut telah ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketetapan Wali Kota Ujung Pandang pada 1987. Ketika dilakukan penggusuran, pihak BP3 Sulawesi Selatan mendatangi Pimpinan Proyek dan mengutarakan ketidaksetujuannya karena bangunan tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 1992. Akan tetapi pihak BP3 Sulawesi Selatan juga tidak mampu berbuat banyak karena penggusuran tersebut terus dilakukan dengan alasan bahwa perluasan pelabuhan Ujung Pandang merupakan proyek strategis nasional dari pemerintah pusat.[536]

Sementara itu, dari pihak Bank Indonesia, upaya untuk menyelamatkan gedung tersebut juga gagal dilakukan. Tarik-ulur penggusuran tersebut terus dilakukan, terbukti bahwa gedung eks-DJB Makassar merupakan yang terakhir dirobohkan di sepanjang Jalan Nusantara. Walaupun demikian akhirnya tetap saja berujung kepada keputusan pelaksanaan penggusuran.[537]Amat disayangkan berkas atau dokumen penggusuran tersebut tidak dapat ditemukan baik di Pelindo maupun di Bank Indonesia. Untuk itu, masih sangat terbuka penelitian lebih lanjut mengenai proses penghancuran salah satu gedung *heritage* penting di Kota Makassar sebagai sebuah pembelajaran dan upaya untuk merawat memori kolektif masyarakat Kota Makassar akan keberadaan bangunan-bangunan warisan kolonial Belanda di Makassar.

---

535 Wawancara, s.d.a.

536 Wawancara dengan M. Natsir, Nusriat, dan Alimudin (pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan) di Kompleks Benteng Rotterdam (Makassar, 12 November 2018).

537 Wawancara dengan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia Makassar (Makassar, 14 Agustus 2018).

Saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tetap menggunakan gedung kantor di Jalan Sudirman yang telah ditempati sejak tahun 1978. Gedung ini berlokasi amat strategis karena berada di pusat Kota Makassar yang dekat dengan kantor pemerintahan lain sebagai *stake holders* dari Bank Indonesia. Walaupun telah mengalami beberapa kali renovasi, gedung kantor BI ini tetap mempertahankan bentuk seperti ketika pendirian awal.

Bentuk dan gaya arsitektur gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mengadopsi gaya arsitektur tropis modern dengan adanya perpaduan unsur arsitektur lokal dan modern pada marmer dan batu alam serta kaca-kaca transparan. Bangunan ini berdiri kokoh sebagai salah satu *land mark* kota yang juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Makassar.

Gambar 7.37. Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang masih digunakan sampai saat ini.



Gambar 7.37. Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang masih digunakan sampai saat ini.



Sumber: Arsip Bank Indonesia

BAB VIII
EPILOG

Kemunculan Makassar sebagai bandar maritim sejak awal pertumbuhannya tidaklah mengejutkan. Telah berabad lalu Makassar tampil menjadi bandar niaga penting dalam jaringan perdagangan di Asia Pasifik. Apa yang menjadikan Makassar begitu berperan dalam jaringan perdagangan maritim Nusantara? Makassar memiliki segala potensi untuk menjadi bandar maritim dengan jaringan perdagangan yang luas. Bandar ini memiliki beberapa aspek strategis yang menjadi keunggulannya, yang di antaranya adalah: letak geografis, tanah yang subur, dan sumber daya manusia yang terampil.

Makassar memiliki letak geografis yang strategis dan menguntungkan hingga dapat dikatakan sebagai pintu depan perdagangan di Asia Pasifik. Bandar ini berada pada jalur perdagangan maritim sebagai *hub* yang menghubungkan antara dunia niaga timur Asia dan Eropa. Ia juga berperan sebagai titik simpul pertemuan dunia niaga di belahan timur (Maluku dan Papua) dan barat (Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, Asia Selatan dan juga Eropa), serta dunia niaga di belahan utara (Cina, Jepang, dan Filipina) dan selatan (Nusa tenggara dan Australia). Sistem perdagangan Makassar juga tidak lepas dari rute lalu-lintas yang melalui Laut Tengah, Samudra Hindia dan laut Cina Selatan meramaikan jalur pelayaran Selat Malaka.

Secara alami pelabuhan Makassar merupakan pelabuhan alam yang amat baik, teduh, dan aman karena terlindungi oleh pulau-pulau yang berada di bagian barat yang menjadi penghalang gelombang laut dan badai muson barat. Hal ini menyebabkan pelabuhan Makassar banyak disinggahi dan dikunjungi oleh para pedagang lokal maupun asing

untuk berdagang. Setelah Malaka jatuh ke tangan VOC, para pedagang Melayu mulai mengalihkan perhatiannya ke Makassar. Pengalihan tersebut menjadikan Makassar semakin ramai karena menjadi tempat persinggahan dan penimbunan rempah-rempah dari Maluku. Pedagang-pedagang Makassar membawa beras ke Maluku dan sekembalinya mereka membawa rempah-rempah ke Makassar yang selanjutnya kemudian dijual kepada para pedagang Portugis, Belanda, Inggris, India, Cina dan Arab.

Sebagai sebuah wilayah, Makassar dan sekitarnya dianugerahi bumi yang subur tempat tumbuhnya berbagai macam komoditas yang menguntungkan untuk dijual. Sebelum kedatangan bangsa Barat yang memperkenalkan komoditas dan cara bercocok tanam modern, Makassar dikenal sebagai wilayah penghasil beras terbesar di kawasan timur Nusantara, bahkan dapat dikatakan situasi ini tetap sama hingga saat ini. Lalu setelah Makassar berada pada kekuasaan kolonial Belanda, pemerintah kolonial kemudian menjadikan Makassar sebagai wilayah perkebunan berbagai komoditas ekspor yang menguntungkan seperti kopra, kopi, dan coklat.

Selama masa kolonial Hindia Belanda, Makassar dikenal sebagai daerah penghasil kopra terbesar di Indonesia. Kajian Rasyid Asba mengenai kopra Makassar menjelaskan dengan rinci seberapa berpengaruh kopra pada perekonomian Makassar dan Hindia Belanda pada umumnya. Dibandingkan dengan wilayah lain di Hindia Belanda, ekonomi Makassar amat bertumpu pada kopra. Pada akhir abad ke-19, sekitar 60% nilai ekspor Makassar berasal dari kopra. Dari jumlah total ekspor kopra di kawasan *Groote Oost* (Kawasan Indonesai Timur saat ini), 80% hasil ekspor dikirimkan dari Pelabuhan Makassar.

Perdagangan kopra membawa Makassar menjadi salah satu kota penting yang terikat dalam jaringan pasar global. Kopra Makassar banyak dimanfaatkan dalam industri pembuatan sabun dan alat kecantikan yang berada di Eropa dan Amerika. Selain itu kopra juga dapat berguna sebagai gemuk pada industri otomotif atau industri perang yang amat dibutuhkan bagi negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini membuat pasar-pasar di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika, dan Asia Timur bertumpu pada ketersediaan kopra dari Makassar.

Sementara itu, kebesaran Makassar pada konteks jaringan pelayaran dan perdagangan di Nusantara juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terampil di wilayah tersebut. Tidak perlu diragukan lagi, bagaimana kehandalan orang-orang Bugis dan Makassar dalam mengarungi dan menaklukkan lautan, baik untuk kepentingan pelayaran maupun perdagangan. Hal ini juga dikuatkan dengan tulisan dari Christian Pelras tentang Manusia Bugis yang pada salah satu bagian memaparkan banyaknya orang Bugis yang berdiaspora menyebar ke berbagai wilayah di nusantara. Hingga kemudian mereka dikenal sebagai bangsa pelaut dan saudagar. Dalam catatannya, Tome Pires juga menulis mengenai orang Bugis yang ditemuinya di Malaka. Menurut Pires orang Bugis merupakan pelaut ulung dan kuat yang memiliki banyak perahu. Catatan Pires ini mengungkapkan betapa luasnya jangkauan pelayaran orang Bugis di Asia Tenggara. Hal Ini kemudian menandakan bahwa sejak permulaan abad ke-16 orang Bugis memegang peranan penting dalam konteks perkembangan pelayaran dan jangkauan armada laut Indonesia (*native shipping*). Begitupun andilnya dalam dunia niaga, ketika pelaut dan pedagang Bugis menjadi bagian dari mata rantai dagang pada abad-abad niaga dan hubungan kemaritiman di wilayah Asia Tenggara.

Kemajuan ekonomi akibat peningkatan lalu lintas perdagangan di Makassar membuat kehadiran lembaga perbankan menjadi suatu kebutuhan yang nyata. Di Hindia Belanda sendiri lembaga perbankan baru hadir pada dekade kedua abad ke-19 dengan nama De Javasche Bank (DJB) yang terbentuk pada tahun 1828 di Batavia. Bank ini berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus komersial dengan tugas adalah mencetak dan mengedarkan uang serta melakukan pemberian kredit usaha. Sejak awal pembentukannya hingga tiga dasawarsa kemudian, DJB menjadi lembaga perbankan tunggal di Hindia Belanda. Kondisi tanpa saingan itu, menyebabkan DJB pada tahun-tahun pertama operasionalnya mampu meraih keuntungan besar,

Pada pertengahan abad ke-19, DJB mulai tertarik untuk melakukan ekspansi dengan mendirikan kantor-kantor cabang di luar Jawa. Ide pembukaan kantor cabang DJB di Kota Makassar dimulai dengan ketertarikan DJB untuk membuka kantor cabang di kota dengan

pelabuhan yang ramai aktivitas perdagangan. Hal ini terlihat bahwa kantor-kantor cabang DJB sebagian besar berada di kota-kota pelabuhan yang menjadi pintu masuk perdagangan ekspor-impor yang memerlukan dukungan dana besar. Keberadaan DJB di kota-kota pelabuhan termasuk Makassar mengakibatkan kelancaran serta ketersediaan peredaran uang dengan jumlah besar yang secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan juga pembangunan infrastruktur kota, seperti pelabuhan, jembatan, jalur kereta api, dan jalan raya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pembentukan DJB Agentschap Makassar muncul dari desakan pihak swasta. Melihat perdagangan yang semakin masif, para pengusaha yang tergabung dalam Kamer van Koophandel en Nijverheid (Kamar Dagang dan Industri) Makassar merasa kehadiran DJB amat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan uang dan permodalan bisnis mereka. Pada 24 Maret 1864, Kamer van Koophandel mengirimkan surat kepada direksi DJB yang berisi desakan agar DJB segera membuka kantor cabang di Padang dan Makassar. Akhirnya setelah melalui serangkaian proses DJB Agentschap Makassar dibentuk pada 21 Desember 1864 sebagai kantor cabang DJB yang kedua di luar Pulau Jawa dan sebagai kantor cabang keempat di Hindia Belanda.

Kehadiran DJB di Makassar dapat dilihat dalam beberapa perspektif, yang di antaranya adalah: *pertama*, kehadiran DJB dapat menjamin kelancaran bisnis dengan terjaminnya ketersediaan peredaran uang di Makassar yang dipasok oleh DJB. Hal ini mampu merangsang kegiatan perdagangan dalam skala besar maupun skala kecil, seperti misalnya transaksi jual beli di pasar.

Kedua, DJB mampu memfasilitasi kebutuhan dan perkembangan perdagangan di Makassar dengan penyediaan kredit modal yang dapat dipinjam untuk membiayai kegiatan atau ekspansi bisnis dari para pengusaha. Selain itu DJB juga memberikan kemudahan transaksi perbankan dalam kegiatan bisnis. Dalam kata lain, kehadiran DJB mampu melancarkan keberlanjutan bisnis yang mampu menstimulus perkembangan ekonomi.

Ketiga, tidak hanya memberikan kredit kepada para pengusaha, DJB juga memberikan kredit kepada pemerintah kota (*gemeente*) Makassar. Dana dari DJB tersebut kemudian digunakan oleh *Gemeente* Makassar untuk melakukan pembangunan infrastruktur kota, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Dalam hal ini DJB juga memiliki peran sebagai agen pembangunan.

Berbagai peranan yang dimiliki DJB tersebut pada perkembangannya mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang terbukti berhasil membawa Makassar menjadi salah satu kota yang terikat dalam jaringan perdagangan global setara dengan Amsterdam, New York, atau Paris lewat perdagangan komoditas ekspor yang terjadi. Di dalam negeri, Makassar tumbuh menjadi pelabuhan terpenting di wilayah Timur Besar (*Groote Oost*) dengan bertumpu pada perdagangan dan jaringan maritim yang sudah terjalin mapan.

Kebesaran ekonomi maritim di Sulawesi Selatan di masa lalu menjadi pemicu untuk terus melakukan pengembangan ekonomi maritim di wilayah ini. Saat ini bahkan upaya tersebut sejalan dengan usaha pemerintah pusat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sejalan dengan program Nawacita terutama pada aspek memperkuat jatidiri sebagai negara maritim. Poros Maritim Dunia memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia, pemerintah mengupayakan pelaksanaan program-program utama yang akan meliputi pembangunan proses maritim pada aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Selain itu, dilakukan pula penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia terus berupaya hadir dalam mengawal dan mengembangkan ekonomi Indonesia terutama dalam hal ini adalah wilayah Sulawesi Selatan. Melalui program-program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, terutama program pengembangan UMKM pada bidang kelautan, Bank Indonesia berkeinginan untuk dapat memperkuat perekonomian sektor maritim di Sulawesi Selatan.

Bank Indonesia menyadari potensi ekonomi yang dapat dihasilkan wilayah Sulawesi Selatan serta posisi strategisnya dalam perekonomian Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia menempatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator wilayah Indonesia Timur yang membawahi kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah-wilayah Indonesia Timur (KPwBI Prov. Sulawesi Utara, KPwBI Prov. Gorontalo, KpwBI Prov. Sulawesi Barat, KpwBI Prov. Sulawesi Tengah, KpwBI Prov. Sulawesi Tenggara, KpwBI Prov. Maluku Utara, KpwBI Prov. Maluku, KpwBI Prov. Papua, dan KPwBI Prov. Papua Barat).

Posisi strategis Sulawesi Selatan pada perekonomian Indonesia menjadi bekal luar biasa dalam pengembangan ekonomi pada masa depan. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar bahkan dengan tangan terbuka mengundang para investor untuk datang dan menanamkan modalnya pada wilayah ini untuk membuka atau mengembangkan bisnis. Walikota Makassar tahun 2004, Ilham Arief Siradjuddin, membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Kota Makassar. Ia berkeinginan menjadikan Makassar sebagai "ruang keluarga" (*living room*) bagi bisnis dan investasi yang bukan hanya sekedar pintu gerbang bagi orang yang berlalu lalang tetapi kemudian menetap dan merasakan kenyamanan seperti layaknya berada di sebuah ruang keluarga yang penuh dengan kehangatan penduduk Makassar yang ramah.

DAFTAR ACUAN

Arsip

ANRI, Arsip Financiën, No. 738.

Gouvernements besluit Resident Celebes en Onderhoorigheden, No. 166, 8 Maret 1906.

Memorie van Overgave, Celebes en Onderhoorigheden, No. 24/21, 1940.

Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Wajo, No. 123.

Nationaal Archief, Den Haag, KPM, No. 2.20.58.01, Reg. 57–89, 144.

Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Copra en *Coprafonds* in Oost-Indonesië, Dominerende positie van copra in Oost-Indonesië, No. Inv. 02024.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Nedelands-Indische Handelsbank 1836–1965 (Den Haag, 1972).

NHM, No. Inv. 5111–5114.

R. W. Kofman, Laporan NEFIS Makassar, 5 Ferbruari 1947.

Arsip/Dokumen Koleksi Bank Indonesia

Bank Indonesia, Prosiding Seminar Peranan Bank Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Perbankan yang Sehat, 26–27 Februari 1990, materi Sujitno Siswowidagdo, "Peningkatan Pembi-naan dan Pengawasan Bank dalam Mendorong Perkembangan Perbankan yang Sehat."

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan, 2012, 2014, 2016.

Catatan No. C-25/002/UKP, 19 Juni 1992.

Data Internal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015.

Kebijakan Perbankan Tahun 2006.

Laporan Pimpinan Tjabang Makassar pada Konferensi Pemimpin Cabang Bank Indonesia (Jakarta, 14 Februari 1961).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955.

Pidato Gubernur Bank Indonesia Mr. Soemarmo pada Konferensi Pemimpin Cabang Bank Indonesia (Jakarta, 14 Februari 1961).

Sekilas Sejarah Pendirian Kantor Cabang Ujung Pandang (t.t.).

Surat Edaran, No. 29/8/INTERN, 5 Juni 1996, tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia.

Surat Edaran, No. 1/24/INTERN, 20 Desember 1999, tentang Struktur Organisasi Bank Indonesia.

Surat Edaran, No. 3/21/INTERN, 10 Juli 2001, tentang Wilayah Kerja Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia.

Surat Edaran, No. 15/62/INTERN, 31 Juli 2013, tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

Surat Edaran, No. 18/13/INTERN, 30 Maret 2016, tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran No. 15/62/INTERN, perihal Organisasi Perwakilan Dalam Negeri yang diubah dengan Surat Edaran No. 18/81/INTERN, 30 September 2016, tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelas A.

Verslag van De Javasche Bank 1941/1947.

Vertrouwelijk brieven van De Javasche Bank Makassar:

27 Agustus 1908

14 Oktober 1908

7 Januari 1909

30 Januari 1909

12 September 1937

5 Februari 1940

20 Mei 1940

4 Juni 1940

13 Januari 1941

16 Januari 1941

20 Oktober 1941

26 Januari 1942

20 September 1945.

Dokumen

BPS, *Sulawesi Selatan dalam Angka 1990–2011*.

BPS (1991), *Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Department of Economic Affairs, *The Economic Review on Indonesia.*

Kolonial Verslag, 1875, 1883.

Jaarverslag (1905–1940a), Jaarverslag van de Handelsvereeniging Makassar Exporteurs, 1905–1940.

Jaarverslag (1905–1940b), Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar, 1905–1940.

Jaarverslag (1921–1936), *Jaarverslag der Haven van Makassar*. Weltevreden: Landsdrukkerij.

Surat Kabar/Majalah/Buletin

Algemeen Handelsblad, 1946, 1950

Algemeen Indisch Dagblad, 1947, 1951, 1953, 1957

Antara, 1949

Het Dagblad, 1945, 1946, 1947

Het Financieele Dagblad, 1945

De Gooi en Eemlander, 1947, 1950

De Heerenveensche koerir, 1945

De Java Bode, 1950, 1951, 1952, 1953, 1957

Indische Gids, 1879.
Javasche Courant, 1847
Kompas, 1994, 1996, 2002, 2004
Leeuwarder Courant, 1947
Leeuwarder koerir, 1945
De Locomotief, 1950, 1953
Negara Baroe, 1947
De Nieuwe Courant, 1951
De Nieuwe Nederlander, 1945
Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1950, 1951, 1952, 1957
De Nieuwsgier, 1951, 1952, 1953
Pemberitaan Makassar, 1939
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1945
Sin Po, 1914
De Tijd, 1945, 1947
Twentsch Dagblad, 1947
De Vrije Pers, 1951, 1952
Het Vrije Volk, 1947
De Waarheid, 1945.

Disertasi/Makalah/Laporan

Pawiloy, Sarita (1982), "Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajah Asing," Laporan Hasil Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajah Asing, Tanggal 8–11 Desember 1982. Makassar: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Poelinggomang, Edward L. (1991), "Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian tentang Perdagangan Makassar pada Abad Ke-19," Disertasi, Vrije Universiteit Amsterdam.

Stapel, F. W. (1922), "Het Bongaais verdrag," Disertasi, Rijksuniversiteit Leiden.

Sanusi, Ahmad (1963), "The Dynamics of the Nationalization of Dutch-Own Enterprises in Indonesia," Disertasi, University of Indiana.

Sulistiyono, Singgih Tri (2003), "Globalisasi, Respon Lokal, dan Kejahatan Lintas Batas Laut: Perompakan di Indonesia dalam Perspektif Sejarah," Makalah, Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah. Semarang: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Direktorat Sejarah; dan Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.

(2008), "Dominasi Kolonial dan Diaspora Perdagangan: Pasang-Surut Jaringan Makassar Hingga Masa Akhir Penjajahan Belanda," Makalah Seminar, Universitas Hasanuddin.

Tschoegl, Adrian E. (2001), "The International Expansion of Singapore's Largest Banks," Working Paper, The Wharton Financial Institutions. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

Artikel

Bulbeck, F. David (1990), "The Landscape Of The Makassar War", Canberra Anthropology, Vol. 13: No. 1.

Erkelens, B. (1897), "Geschiedenis van het Rijk Gowa," *VBG*, No. 50.

Hill-Gibson, C. A. (1952), "The Orang Laut of the Singapore River and the Sampan Panjang," *JMBRAS*, No. 25.

Houck, W. C. (1917/18), "Singapore als concurrent van doorvoerhavens Macassar en Tadjong Priok in verband met eventueele verhooging van havengelden in laatsgenoemde havens," *Koloniale Studiën*.

Reid, Anthony (1981), "Great Seventeenth Century Indonesia Familiy: Matoaya and Patingalloang of Makassar," *Majalah Ilmu-ilmu Sosial*, No. 8.

(1983), "The Rise of Makassar," *RIMA*, XVII.

(1993), "The Unthreating Alternative: Chinese Shipping in Southeast Asia 1567–1842," *RIMA*, No. 27.

(2000), "Pluralism and Progress in Seventeenth Century Makassar," *BKI*, 156 (3).

Sutherland, Heather (1995), "Believing in Seeing: Perspektive on Political Power and Economic Activities in the Malay World 1700–1940," *Journal of Southeast Asian Studies*, 26 (1).

(2000), "Trepang and Wangkang: The China Trade of Eighteenth Century Makassar, c. 1729–1840," *BKI*, 156 (3).

Warren, J. F. (1996), "Looking Back on the Sulu Zone State Formation: Slave Raiding and Ethnic Diversity in Southeast Asia," *JMBRAS*, 69 (1).

(1998), "The Sulu Zone: The World Capitalist Economy and the Historical Imagination," *Comparative and Asian Studies*, No. 20.

Yoshimasa, Shibata (1996), "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration," *BKI*, 152 (4).

Buku/Bagian Buku

Akihary, H. (1996), *Ir. F. J. L. Ghijsels, Architect in Indonesia 1910–1929*. Utrecht: Seram Press.

Altes, W. L. Korthals (2004), *Tussen cultures en kredieten: Een institutionele van de Nederlandsch-Indië Handelsbank en Nationale Handelsbank 1863–1964*. Amsterdam: NIBESVV.

Andaya, Leonard Y. (2006), *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17* (terj.). Makassar: Ininnawa.

Anderson, J. L. (1997), "Piracy in the Eastern Seas 1870–1950," dalam D. J. Starkey, E. S. van Eyck van Heslinga, J. A. de Moor (ed.), *Pirate and Privateers: New Perspectives on the War on Trade in the Eighteenth Century*. Exeter, Devon: University of Exeter Press.

Arndt, H. W. (1984), *The Indonesian Economy: Collected Papers*. Singapura: Stamford Press.

Asba, A. Rasyid (2007), *Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah, Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

(2007), *Katalog Sejarah Lisan Jepang di Sulawesi Selatan*. Tokyo: C-DTAS.

Bank Indonesia (2005), *Sejarah Bank Indonesia Periode I 1945–1959: Bank Indonesia pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

(2015), *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Basri, Faisal dan Haris Munandar (2009), *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Boland, B. J. (1982), *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: KITLV.

Booth, Anne (1998), *The Indonesian Economy in the Nineteenth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Palgrave Macmillan Press.

Braudel, F. (1966), *The Mediterranean and the Mediterranean Worls in the Age of Philip II*, Volume 1. New York: Harper Colophon.

Brown, Iem (2001), *Territories of Indonesia*. London: Routledge.

Broze, Frank (ed.) (1989), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th–20th Century*. Kensington: New South Wales University Press.

Chauduri, K. N. (1989), *Trade and Civilization in Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge: Cambridge University Press.

Claver, Alexander (2014), *Dutch Commerce and Chinese Merchant in Java: Colonial Relationship in Trade and Finance 1800–1942*. Leiden: Brill.

Cortesao, Armando (1944), *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account the East from the Red Sea to Japan, Written (at Malacca) 1512 to 1515*. London: Hakluyt Society.

Creutzberg, Pieter dan J. T. N. van Laanen (1987), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Curtain, Philip D. (1988), *Cross-cultural Trade in World History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Darsono, dkk. (2016), *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

(2017), *Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*. Jakarta: Bank Indonesia.

Dick, Howard (2002), *The Emergence of a National Economy: An EconomicHistory of Indonesia 1800-2000*. Hawaii: University of Hawaii Press.

Djojohadikoesoemo, Margono (1962), *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis*. Jakarta: Indira.

Djojohadikusumo, Sumitro (1953), *Persoalan Ekonomi*. Jakarta.

(1989), *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (terj.). Jakarta: LP3ES.

Djumhana, Muhammad (1996), *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Feith, Herbert (2009), *The Cabinet Wilopo 1952–1953: A Turning Point in Post Revolutionary Indonesia*. Singapura: Equinox.

Foray, Jennifer L. (2012), *Visions of Empire in the Nazi-Occupied Netherlands*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, Kenneth R. (1985), *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Hartono, Noek (1976), *Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya*. Jakarta: Bank Indonesia.

Heering, Christiaan G. (1995), *The Green Gold of Selayar: a Socio-economic History of an Indonesian Coconut Island c. 1600-1950s: Perspectives from a Periphery*. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Hering, Bob (2003), *Soekarno: Founding Father of Indonesia, a Biography 1901–1945*. Jakarta: Hasta Mitra.

Ijzereef, Willem (1984), *De Zuid-Celebes Affaire*. Dieren: De Battafsche Leeuw.

Ismail, Maqdir (2009), *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Navila Idea.

Gde Agung, Ide Anak Agung (1996), *From the Formation of the State of East Indonesia toward the Establishment of the United States of Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Giplin, Robert (1987), *The Political Economic of International Relations*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Kadir, Harun, dkk. (1984), *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945–1950*. Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin dan Badan Perancang dan Pemba-ngunan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan.

Kahin, Audrey R. (2012), *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*. Singapura: National University Press.

Kahin, George McTurnan (2003), *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Kelder, A. R. (2006), "De goudverschepingen van De Javasche Bank in World Oorlog II," *De Blauw Wimpel*, 19 Oktober.

Kementerian BUMN (2014), *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN*. Jakarta: Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Kementerian Penerangan (1953), *Provinsi Sulawesi*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

van Klinken, Gerry (2003), *Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christian in Indonesia, a Biographical Approach*. Leiden: KITLV Press.

Kusnodiprodjo (1951), *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945*. Jakarta: SK Seno.

Kusuma, Erwin (2014), *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Kuyper, P. J. dan P. J. G. Kapteyn (1980), "A Colonial Power as Champion of Self Determinations: Netherlands State Practice in the Period 1945–1975," dalam H. F. Van Panhuys (ed.), *Internation-al Law in the Netherlands*, Volume III. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Nordhoff.

van Laanen, Jan T. M. (1988), "Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial," dalam Anne Booth, dkk. (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (terj.). Jakarta: LP3ES.

Lapian, Adrian B. (2010), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi pada Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Lindblad, J. Thomas (2008), *Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia*. Singapore: NUS Press.

van Leur, J. C. (1983), *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. Dordrecht: Foris Publications.

Lombard, Dennys (2005), *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid II: Jaringan Asia (terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Martin, Elizabeth (2005), *The Woman's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London: Routledge.

Mattulada, H. A. (1998), *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujungpandang: Hasanuddin University Press.

Mas'oed, Mochtar (1989), *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966–1971*. Jakarta: LP3ES.

Meilink-Roelofsz, M. A. P. (1962), *Asian Trade and Europe Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Melamba, Basrin (2013), *Tolaki: Sejarah, Identitas, dan Kebudayaan*. Makassar: Lukita.

Ministry of Foreign Affairs (1958), *Subversives Activities in Indonesia: The Jungschlager and Schmidt Affair*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Mooy, Adrianus (2016), *Adrianus Mooy from the Islands of Rote Telling His Story: Autobio-graphy*. Jakarta: Dian Rakyat.

Netherlands Information Bureau (1944), *Ten Years of Japanese Burrowing in the Netherlands East-Indies*. New York.

Noorduyn, J. (1981), *De Handelsrelaties van het Makassarse Rijk volgens de notitie van Cornelis Speelman uit 1670: Nederlandse Historische Bronen III*. Amsterdam: Verloren.

Notodidjojo, Soebagijo Ilham (1980), *Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta: Gunung Agung.

Notosusanto, Nugroho (1980), *The National Struggle and the Armed Forces in Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Oey, Beng To (1991), *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia*, Volume 1. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Onghokham (1989), *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.

Ooi, Keat Gin (2011), *The Japanese Occupation of Borneo 1941–1945*. New York: Routledge.

(2013), *Post War Borneo 1945–1950: Nationalism, Empire and State Building*. Oxon: Routledge.

Patang, Lahadji (1967), *Sulawesi dan Pahlawan-pahlawannya: Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Makassar: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia.

Pelras, C. (2006), *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar,

Perbanas (1973), *Perkembangan Situasi dan Masalah-masalah Perbankan Nasional Swasta di Indonesia 1973/1974*. Jakarta.

Pluvier, Jan (1974), *South-East Asia from Colonialism to Indpendence*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Poelinggomang, Edward L. (2016), *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Poelinggomang, Edward L., dkk. (2005), *Sejarah Sulawesi Selatan*, Jilid 2. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan.

Post, Peter dan Elly Touwen-Bouwsma (ed.) (1997), *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities*. Leiden: KITLV Press.

Prawiro, Radius (1998a), *Radius Prawiro: Kiprah, Peran, dan Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Grafiti.

(1998b), *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Prawirohardjo, Priasmoro (1987), "Perbankan Indonesia 40 Tahun," dalam Hendra Esmara (ed.), *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati 70 Tahun Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Gramedia.

Preston, Paul dan Anthony Best (2001), *British Documents on Foreign Affairs: Report and Papers from the Foreign Office from 1946 Through 1950*, Volume 4. Firm: University of Publications of America.

Profil Provinsi Republik Indonesia: Sulawesi Selatan (1993). Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Rahardjo, Dawam, dkk. (1995), *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

Ramadhan, K.H. (1988), *A. E. Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih*. Jakarta: Sinar Harapan.

Reid, Anthony (1974), *The Indonesian National Revolution 1945–1950*. London: Longman.

(1992), *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid 1: Tanah di Bawah Angin (terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

(1993), *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. New Haven: Yale University Press.

(1999), *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Global Asia Tenggara 1450–1680* (terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

(2004), *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (terj.). Jakarta: LP3ES.

(2009), *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

(2011), *To Nation by Revolution: Indonesia in the 20th Century*. Singapura: National University of Singapore Press.

Reyne, A. (1948), "De cocospalm," dalam C. J. J. van Hall dan C. van de Koppel (ed.), *De Landbouw in de Indische Archipel*, 2a Voedingsgewassen en geneesmiddelen. The Hague: Van Hoeve.

Rohaedi, Ayat dan Tawalinuddin Haris (1994), *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rosidi, Ajip (1986), *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Idayu Press.

Sebastian, Leonard C. (2006), *Realpolitic Ideology: Indonesia's Use of Military Force*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Sandhu, Kernial Singh and Paul Wheatly (eds.). (1983). *Melaka: The Transformation of Malay Capital c 1400-1980*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Schricke, B. (1955), *Indonesian Sociological Studies, Selected Writings, part 1. Selected Studies on Indonesia by Dutch Authors, Vol. II.* The Hague/Bandung.

Sievers, Allen M. (1974), *The Mystical World of Indonesia: Culture and Economic Development in Conflict*. Baltimore/London: John Hopkins University Press.

Sjamsuddin, S. (1991) *25 Tahun Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: PT. Tuhe Lowarutu Utama.

Spruyt, J. (1979), *Indonesia: An Alternative History of the Timeless Islands*. New York: Macmillan.

Sutherland, Heather (1986), "Ethnicity, Wealth, and Power in Colonial Makassar: A Historiographical Consederation," dalam Peter J. Nas (ed.), *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*. Dordrecht: Foris Publication.

(1987), "Quarantiative and Qualitative Approach to the Study of Indonesian Trade: The Case Makassar," dalam T. Ibrahim Alfian, dkk. (ed.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan Kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

"Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth-Century Makassar," dalam Frank Broeze (ed.), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th–20th Century*. Kensington: New South Wales University Press.

Sutter, John O. (1959), *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940–1955*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Tambunan, Tulus. T.H. (1996) *Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Penulis bank Indonesia (1965), *Menudju Bank Berdjoang Tunggal*. Jakarta: Bank Indonesia, Bagian Hubungan Masyarakat.

(2001), *Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Biro Kredit Bank Indonesia.

(2005), *Sejarah Bank Indonesia*, Periode I 1945–1959. Jakarta: Bank Indonesia

(2005), *Sejarah Bank Indonesia*, Periode II 1959–1966. Jakarta: Bank Indonesia.

Tim Penulis LP3ES (1966), *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

Usman, Syafaruddin (2010), *Tragedi Patriot dan Pemberontak: Kahar Muzakkar*. Yogyakarta: Narasi.

van der Wal, S. L. (1976), *Oficiele beschieden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen*, Volume 36. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Valentijn, Françoi̇s (1724-26), *Oud en Nieuw Oost-Indiën,* Dordrecht: Joannes van Braam; Amsterdam; Gerard onder de Linden.

Westermann, J. C. (1941), *Een halve eeuw paketvaart 1891–1941*. Amsterdam: De Bussy.

Widjanarto (1993), *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wirawan, Yerry (2013), *Sejarah Masyarakat Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wolters, O. W. (1970), *The Fall of Sriwijaya in Malay History*. London: Lund Humphries.

Zhaojin Ji (2003), *History of Modern Shanghai Banking*. New York: An East Gate Book.

Wawancara

Wawancara simultan dengan anggauta Persatuan Pensiunan Bank Indonesia Makassar (Makassar, 14 Agustus 2018).

Wawancara simultan dengan pegawai senior Bank Sulselbar: Romy Thohar, Abdul Rahman, Muh. Rakib, Sukiman (Makassar, 12 November 2018).

Wawancara simultan dengan pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan: M. Natsir, Nusrat, Alimuddin (Makassar, 12 November 2018).

Wawancara dengan Pelaksana Teknis Pimpinan Proyek Pelindo, Hassan Dobdang (Makassar, 13 November 2018).

Internet

https://maps.google.com

Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Nusantara s.d. Abad Ke-20," https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Pages/prasejarahbi_2.aspx (diunduh 13 September 2018; 10.00 WIB).

www.norbruis.eu.

Website internal BLINK, artikel "Deklarasi Kendari : Kesepakatan TPID Se-Sulampua dalam Pengendalian Inflasi", 10 Maret 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "*Kick Off Tagline* TPID Sulampua : Meningkatkan Sinergi Menekan Inflasi", 14 April 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Mengurai Permasalahan Logistik: Isu Mendasar Wilayah Indonesia Timur", 13 Mei 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Blusukan Ala Bank Sentral", 16 Juli 2013, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Lawan Kartel Komoditi Penyebab Inflasi bersama KPPU – Era Baru TPID Sulsel", 14 Agustus 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Bambang Kusmiarso Resmi Gantikan Wiwiek SW sebagai Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan", 8 Juni 2017, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "TOT Gap Budidaya Cabai, Langkah Awal Pengembangan Klaster Cabai di Kab. Maros, Sulsel", 6 Juli 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Bersinergi Mendorong Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Klaster Sapi Bali di Barru", 04 Oktober 2012, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "TPID se-Sulsel : Koordinasi dan Koordinasi", 18 Juni2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Kinerja Ekonomi Sulawesi Selatan Atraktif, IMF Berkunjung ke Makassar", 11 April 2015, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Bank Indonesia Makassar Fasilitasi Seminar Sehari Pembiayaan Syariah bagi UMKM", 14 September 2011, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Pelatihan Pembukuan Untuk Pelaku UMKM Wanita", 9 Januari 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...Wanita.aspx

Website internal BLINK, artikel "Sosialisasi Produk Kredit Perbankan Bagi Pengusaha Mikro Kecil", 28 May 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "pelatihan Penanganan Kredit UMKM Bermasalah", 16 Juli 2012, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...Bermasalah.aspx

Website internal BLINK, artikel "Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat", 7 September 2013,http://internal.corp.bi.go.id/Berita/....(KUR).aspx

Website internal BLINK, artikel "Program Bank Indonesia Sulsel Sentuh Pulau Terluar Sulsel", 27 September 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/Pages/KegiatanSelayar.aspx

Website internal BLINK, artikel "Bank Indonesia Aktif dalam Forum Internasional (BIMP-EAGA) di Makassar", 21 September 2015, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

Website internal BLINK, artikel "Transaksi dengan E-money Mudah Ki!", 19 November 2014, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/

Website internal BLINK, artikel "Program Bank Indonesia Sulsel Sentuh Pulau Terluar Sulawesi", 19 September 2016, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Mks/Berita/.

Website internal BLINK, artikel "Gerakan Peduli Koin Nasional", 23 Oktober 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/....

Website internal BLINK, artikel "BI Sulsel Resmikan Kas Titipan di Bulukumba, 21 November 2016, http://internal.corp.bi.go.id/Berita/...

Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr

(Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023)

Sejak ratusan tahun lalu wilayah Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi maritim Nusantara. Para pedagang dari berbagai bangsa berdatangan dan berinteraksi satu sama lain hingga membentuk jaringan perdagangan maritim yang mapan. Di dalam buku ini ditampilkan dengan sangat apik bagaimana awal kemunculan Makassar hingga mampu menjelma menjadi satu kekuatan maritim yang kuat di Nusantara. Citra maritim amat melekat pada wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, bahkan hingga saat ini.

Saya menyambut gembira penerbitan buku berjudul "Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peranan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan" karya Tim Penulis Bank Indonesia. Kehadiran buku ini dapat memberikan gambaran bahwa ekonomi maritim merupakan tulang punggung yang telah membawa Makassar mencapai puncak kemakmuran. Untuk itu, dengan memberikan perhatian lebih pada pengembangan sektor maritim, diharapkan akan semakin membawa ekonomi Makassar untuk menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Dr. Tanri Abeng

(Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Periode 1998-1999)

Makassar telah menjadi simpul mata rantai perdagangan internasional sejak zaman kolonial hingga era modern ini. Perekonomian Makassar yang semakin berkembang akibat kegiatan perdagangan internasional yang masif tidak hanya menghasilkan peningkatan lalu lintas perdagangan secara signifikan, namun juga membuat kehadiran lembaga perbankan menjadi penting dalam rangka memfasilitasi perkembangan tersebut. Kemajuan ekonomi Makassar membuat lembaga perbankan tertarik untuk membuka kantornya di wilayah ini. Baru pada pertengahan abad ke-19, muncul lembaga perbankan pertama di wilayah Makassar dengan nama De Javasche Bank pada 1867. Kemunculan DJB menstimulus pembukaan bank-bank swasta kolonial di Makassar. Kehadiran lembaga perbankan erat kaitannya dengan akses kredit permodalan yang digunakan untuk keberlangsungan hingga ekspansi bisnis di Makassar. Perbankan yang begitu bergairah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi secara signifikan yang menempatkan Makassar sejajar dengan kota-kota perdagangan internasional pada masa kolonial.

Saat ini, kehadiran lembaga perbankan tidak kalah pentingnya untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi di Makassar serta Indonesia bagian Timur. Salah satu lembaga yang berperan kuat dalam perkembangan tersebut adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sangat mengapresiasi kontribusi dari Bank Indonesia yang bersama-sama pemerintah daerah berupaya untuk mengawal perkembangan ekonomi Kawasan Timur yang berpusat di Makassar demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.

(Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro)

Selama berabad-abad sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa di kepulauan Indonesia, Kota Makassar telah memiliki peran penting dalam perekonomian maritim baik pada level lokal, regional maupun internasional. Signifikansi Makassar sebagai pusat ekonomi bukan hanya terkait dengan letaknya yang strategis, namun juga ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, serta sumber daya manusia yang memiliki semangat dan jiwa *entrepreneurship* yang tinggi. Maka tidak mengherankan jika Makassar telah menjadi bandar maritim terbesar di kawasan Indonesia bagian timur sebelum kedatangan bangsa Barat. Bahkan kota ini telah berkembang menjadi salah satu simpul terpenting dalam jalur rempah dunia (*spice route*) yang terhubung dengan pusat-pusat perdagangan maritim internasional antara Asia dan Eropa.

Meskipun pada masa selanjutnya Makassar direbut dan dikuasai oleh kolonialis Barat, terutama Belanda, namun kota ini tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan maritim terpenting baik di kepulauan Indonesia dan di Asia Tenggara. Pada akhirnya sektor kemaritiman berperan sebagai driving force bagi perkembang sektor-sektor ekonomi yang lain. Dalam konteks inilah De Javasche Bank (yang kemudian berubah menjadi Bank Indonesia) mengambil peran yang sangat signifikan sebagai kekuatan menopang geliat ekonomi di Makassar kawasan Indonesia bagian timur pada umumnya hingga saat ini. Perjalanan Makassar sebagai pusat ekonomi di kawasan Indonesia timur memberikan pelajaran berharga bahwa sektor maritim mampu menjadi tenaga penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Oleh sebab itu upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali sektor kemaritiman sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Hanya dengan cara demikian visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan mimpi di siang bolong. Oleh sebab itu buku ini harus dibaca sebagai referensi.

BI INSTITUTE
www.bi.go.id/id/institute

ISBN 978-623-90661-1-6

9 786239 066116